

TERAKREDITASI NO 2/E/KPT/2015

**JURNAL HUBUNGAN
INTERNASIONAL | VOL. 5 | NO. 2 |
OKTOBER 2016 - MARET 2017
P-ISSN 1829-5088
E-ISSN 2503-3883**

JURNAL

HUBUNGAN INTER NASIONAL

JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terbit dua kali setahun pada bulan April-Oktober dan November-Maret. Redaksi menerima naskah artikel hasil penelitian dan artikel gagasan dalam selingkung ilmu hubungan internasional. Panjang naskah 15 sampai 25 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis.

Ketua Penyunting

Ade Marup Wirasenjaya

Sekretaris Penyunting

Sidiq Ahmadi

Dewan Penyunting

Tulus Warsito

Ali Muhammad

Ali Maksum

Takdir Ali Mukti

Ratih Herningtyas

Sugito

Sugeng Riyanto

Omi Ongge

Masyithoh Annisa Ramadhani

Faris Alfadhat

Staf Penyunting

Wilda Fatma Apsari

Kesekretariatan

Nurbiyanto

Alamat Redaksi

Gedung Ki Bagus Hadi Kusumo, E4 Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta,

Tel. 0274-387656

Email: jurnalHI@umy.ac.id

website: journal.umy.ac.id/index.php/jhi

Daftar isi

VOL. 5 - NO. 2, OKTOBER 2016 - MARET 2017

- 113 - 123 Pendekatan Konstruktivis dalam Kajian Diplomasi Publik Indonesia
IVA RACHMAWATI; Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- 124 - 136 Turkish Foreign Policy to European Union and Its Chance to be a European Union Member
ANTON MINARDI; Pasundan University Bandung, West Java 40261, Indonesia
- 137 - 146 Democracy and the Armed Forces: Lessons from the Coups of Egypt in 2013 and Turkey in 2016
MUHAMAD ROFIQ; Faculty of Politics and Social Science Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 147 - 160 Pengembangan Kluster Industri Militer India dari Sudut Pandang Developmental State Theory
ISMIYATUN; Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang
- 161 - 171 Diplomasi Ekonomi China di Negara-negara Teluk
BAMBANG CIPTO; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 172 - 180 Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere
FREDY MUNTHE; Center for Religious and Cross-cultural Studies, Gadjah Mada University Yogyakarta
- 181 - 192 Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik di Malaysia
IRZA KHURUN'IN; Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- 193 - 209 Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat
NUR RACHMAT YULIANTORO, ATIN PRABANDARI, DAFRI AGUSSALIM; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada
- 210 - 121 Dari Ji ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara
BADRUS SHOLEH; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- 222 - 237 Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional
TULUS YUNIASIH, RIASA RIZKY, CLAUDIA NATASHA; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Budi Luhur, DKI Jakarta

Makin Kaburnya Hierarkhi

Assalamu'alaikum wr.wb
Pembaca Yth.

JHI edisi kali ini membahas sejumlah isu dan pendekatan baru dalam kajian Hubungan Internasional. Ada banyak lensa yang menarik disajikan para penulis pada edisi ini. Meluasnya topik kajian dan ranah studi HI memberi keyakinan bagi kita betapa makin kaburnya batas antara problem domestik dan problem internasional dewasa ini, betapa makin cairnya relasi hubungan antar aktor, sekaligus betapa rapuhnya dunia yang kini kita huni.

Tulisan pertama dari Iva Rahmawati menampilkan kajian teoritis tentang pendekatan konstruktivis – sebuah perspektif yang nampaknya mulai banyak digunakan dalam kajian generasi mutakhir akademisi HI Indonesia – dalam meneropong diplomasi Indonesia. Menarik, setidaknya penulis ingin memberikan cara pandang baru terhadap persoalan diplomasi yang biasanya amat didominasi oleh pandangan realis.

Tulisan kedua dari Anton Minardi membahas tentang dinamika politik luar negeri Turki dalam relasinya dengan Uni Eropa. Kajian ini juga mencoba memberi tekanan pada pertautan antara *identity* dan *interest*: dua zona yang kadang sukar untuk didamaikan oleh sebuah negara yang posisinya sangat unik seperti Turki. Tulisan ketiga dari Muhammad Rofiq, melengkapi kajian Turki, namun dalam konteks ketegangannya dengan Mesir. Dua negara ini memang selalu menarik perhatian di tengah berbagai isu-isu hangat yang menimpa Eropa dan Dunia Arab akhir-akhir ini. Pada artikel berikutnya, Ismiyatun mencoba menganalisis India yang tak henti-hentinya melakukan

berbagai gebrakan ke luar. Dalam tulisan ini, dibahas upaya strategis India dalam menyiapkan dirinya menjadi kekuatan penting baik bagi kawasan maupun dalam level global. Artikel kelima berasal dari Bambang Cipto, yang mengupas tentang Cina – sebuah negara yang diam-diam telah menjadi *metronome* ekonomi-politik global saat ini.

Dari sisi aktor, hubungan internasional ditandai dengan munculnya aktor ketiga, yakni dari kekuatan *global civil society* yang kini tak bisa lagi dianggap sebagai aktor peripheral. Maka tulisan keenam yang ditulis Fredy Munthe, mencoba membahas tentang fenomena *faith-based organization (FBO)* yang kini sangat artikulatif dalam mempengaruhi dan mendesain isu politik luar negeri. Artikel ketujuh dari Irza Khurunin juga membahas kajian *non-traditional actor* dalam isu perlindungan buruh. Ini tentu sangat memperkaya studi HI.

Tulisan kedelapan ditulis oleh Dafri Agus Salim dkk, merupakan sebuah prediksi dan mengulas tendensi politik luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dengan representasi yang menarik, artikel ini melihat *interplay* antara aktor dan pola dukungan, serta preferensi ideologis yang bakal mewarnai politik luar negeri rejim baru Amerika Serikat. Tulisan kesembilan berasal dari Badrus Sholeh, tentang gerakan terorisme Asia Tenggara. Di tengah upaya negara-negara ASEAN menjadikan Asia Tenggara sebagai ekosistem perdamaian dunia, namun terdapat pula jejaring kelompok radikal yang nampaknya cukup potensial untuk berkembang biak. Edisi ini dipungkasi oleh tulisan Tulus Yuniasih yang

melihat betapa problematiknya penegakkan hukum humaniter dalam menyelesaikan problem kemanusiaan di sejumlah zona konflik.

Pembaca, edisi ini menyajikan spektrum yang luas dalam studi Hubungan Internasional. Kami yakin, semua artikel yang tampil di edisi ini niscaya akan memperkaya khazanah studi HI. Selamat membaca, kami selalu menunggu kontribusi anda untuk JHI.

Wassalamu'alaikum wr.wb
Salam hangat

Ketua Penyunting JHI

Ade M Wirasenjaya

Pedoman Penulisan

1. Artikel yang ditulis untuk JHI meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian (diutamakan) dalam lingkup ilmu Hubungan Internasional. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dicetak pada kertas A4 sepanjang 12 sampai 25 halaman. Kirim naskah anda ke <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi> dengan cara registrasi terlebih dahulu. Pengiriman file juga dapat dilakukan sebagai attachment email ke alamat JurnalHI@umy.ac.id dengan cc ke: adewirasenjaya@hotmail.co.id.
2. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat email untuk memudahkan komunikasi.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Bagian pendahuluan disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar di tengah-tengah, dengan poin 14. Peringkat judul bagian ditulis dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atau tebal dan miring) dan tidak menggunakan angka/nomor pada judul bagian;
Peringkat 1 (Huruf Besar Semua, Tebal, Rata Tepi Kiri)
Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Tebal-Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Sistematika artikel hasil pemikiran adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 200 kata); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 200 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
6. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.
7. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Friedman, 2008: 85).
8. Daftar Rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Buku

Kristol, Irving. 1983. *Reflection of a Neoconservative: Looking Back, Looking Ahead*. New York: Free Press.

Buku kumpulan artikel

Skinner, Kiron (ed).2003. *Reagan: A Life in Letters*.New York. Free Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Sutton, Frank. 2006. Nation-Building in US

Foreign Relations. Dalam Francis Fukuyama (ed), *Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq*. Baltimore: Jhon Hopkins University Press.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Skocpol, Theda.1977. *Wallerstein's Capitalist World System and Historical Critique*. The American Journal of Sociology, March, Vol.82, No.5.

Artikel dalam koran:

Hiarej, Erik. 2 Nopember, 2008. Terorisme dan Individualisasi Perang. *Kompas*, hlm.6.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang):

Kompas. 14 November, 2008. *Korea Utara Semakin Mengisolasi Diri*, hlm.9

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional.1990.Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Soros, George.2000. *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Terjemahan Sri Koesdiyantiyah.2007. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Sugito.2007. *Analisis Terhadap Misi Peacebuilding United Nations Transition Administration In East Timor (UNTAET)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Garnaut, Ross. 2008. *Indonesia and the World of Climate Change*. Makalah disajikan dalam Panglaykim Memorial Lecture. CSIS, Jakarta, 17 Oktober.

Internet (karya individual)

Ahmadi, Sidiq.2008. *Tantangan ASEAN Pasca*

Agreement on Transboundary Haze Pollution. (Online), (http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.pdf, diakses 12 November 2008).

Internet (artikel dalam jurnal online)

Herningtyas, Ratih. 2007. *Pengaruh Internet terhadap Demokrasi.* Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. (Online), Jilid 2, No.4, (<http://www.umy.ac.id>, diakses 1 Januari 2008)

Internet (bahan diskusi):

Sabrina, Katy, 20 Desember 2008. CIFOS Discussion List, (Online), (CIFOS@forestworld.org., diakses 25 November 2008).

Internet (email pribadi)

Riyanto, Sugeng (umy@ac.id). 5 Oktober 2008. Artikel untuk JHI. Email kepada Siti Muslihati (siti_m@msn.com)

9. Tata cara penyajian kutipan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Universitas Negeri Malang, 2000) atau mencontoh tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris menggunakan ragam baku.
10. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewer) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik (email).

STRUKTUR TULISAN

A. TULISAN GAGASAN/NON-PENELITIAN

1. Judul
2. Nama penulis (tanpa gelar)
3. Insitusi dan alamat jelas disertai kode pos dan email institusi

4. Abstrak dua bahasa (Inggris dan Indonesia)
5. Pendahuluan/Introduction
6. Pembahasan/Result and Analysis
7. Kesimpulan/Conclusion
8. Referensi/References

B. JENIS TULISAN HASIL PENELITIAN

1. Judul
2. Nama penulis (tanpa gelar)
3. Insitusi dan alamat jelas disertai kode pos dan email institusi
4. Abstrak dua bahasa (Inggris dan Indonesia)
5. Pendahuluan/Introduction
6. Tinjauan Pustaka/Metodologi/Theoretical framework
7. Hasil dan Pembahasan/Result and Analysis
8. Kesimpulan/Conclusion
9. Referensi/References

C. PUBLICATION FEE

Semua penulis yang naskahnya dinyatakan lolos untuk dipublikasikan diharuskan membayar Publication Fee sebesar 1.700.000 rupiah, dibayarkan melalui rekening berikut;

BTN Batara Kantor Kas UMY

No 0066301500001843 atas nama ADE MARUP WIRASENJAYA

Pendekatan Konstruktivis dalam Kajian Diplomasi Publik Indonesia

Iva Rachmawati

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jalan SWK 104, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia
iva.rachma@gmail.com
Diserahkan: 13 September 2016, diterima: 13 Desember 2016

Abstract

Rationalist approach remains dominant in the research of Indonesian public diplomacy. Therefore, public diplomacy is always used as a tool to gain the national interests through a particular image. In such framing, all activities in public diplomacy are intended for the state's positive image. Besides, Rationalist still puts state as the main actor in public diplomacy. Domestic dimension did not have the same position as the state in interpreting international phenomena. Whereas, each actor has the same access to information and communication nowadays. Rationalist has given dialogue as an important contribution to public diplomacy strategy. Dialogue is one of the communication forms which have a capability to build trust between actors. Several problems in limiting the development of public diplomacy concept become a reference for proposing Constructivist as an alternative approach. This approach will help understanding public diplomacy more by putting the consciousness of the difference of national identity and relationship building as the main purposes. Several empirical studies showed that national identity preservation had already held by not only a state but also domestic dimension. This approach will give domestic dimension a wider room in public diplomacy as well as the state in interpreting international phenomenon.

Keywords: Public Diplomacy, Constructivist View, Consciousness and Relationship Building, Domestic Dimension.

Abstrak

Dalam kajian-kajian diplomasi publik Indonesia, pendekatan rasionalis masih merupakan pendekatan yang dominan. Akibatnya, diplomasi publik selalu diletakkan sebagai alat untuk meraih kepentingan nasional melalui citra tertentu. Pembingkai diplomasi publik semacam ini mengarahkan sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam diplomasi publik semata-mata demi meraih citra positif negara tersebut. Di samping itu, pendekatan ini juga masih menempatkan negara sebagai aktor utama dalam diplomasi publik. Dimensi domestik belum mendapat tempat sebagai aktor yang sejajar dalam menginterpretasi fenomena antar negara. Sementara itu pada kenyataannya, setiap aktor memiliki akses yang sama dalam informasi dan komunikasi. Rasionalis memang telah memberi kontribusi penting dalam strategi dalam diplomasi publik, yaitu dialog, dimana komunikasi dalam bentuk dialog mampu menumbuhkan kepercayaan antar aktor. Beberapa hal yang dirasa membatasi perkembangan konsepsi diplomasi publik menjadi rujukan melalui artikel ini untuk mengusulkan pendekatan Konstruktivis dalam memahami diplomasi publik. Pendekatan tersebut meletakkan kesadaran atas perbedaan identitas nasional dan *relationship building* sebagai tujuan utamanya. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa upaya memelihara identitas nasional telah dilakukan oleh tidak saja negara tetapi juga dimensi domestik. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang bagi dimensi domestik sebagai aktor di samping negara dalam diplomasi publik.

Kata kunci: Konstruktivisme, Diplomasi Publik, Kesadaran dan Relationship Building, Dimensi Domestik

PENDAHULUAN

Studi mengenai diplomasi publik Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Selain studi diplomasi publik merupakan studi yang relatif baru, riset Rasmussen menunjukkan bahwa mereka yang menyelenggarakan diplomasi publik secara lebih serius adalah negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang relatif lebih mapan (Rasmussen, 2011).

Masih minimnya riset mengenai diplomasi publik juga didorong sikap skeptik akademisi yang menempatkan diplomasi sebagai sebuah keahlian praktis semata yang sifatnya sangat tergantung situasi yang melingkupinya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pendapat Raymond Cohen dalam artikelnya *'Putting Diplomatic Studies on the Map'* yang menyatakan diplomasi sebagai

sebagai ruang mesin hubungan internasional atau sebagai soko guru oleh Martin Wight dalam bukunya *Power Politics* (Nsson, 2013: 436). Sayangnya secara teoritis perkembangannya relatif lambat dibandingkan dengan obyek kajian hubungan internasional yang lain (Nsson, 2013: 436).

Di Indonesia sendiri, secara institusional Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik baru dibentuk pada tahun 2002, satu tahun setelah peristiwa 9/11 terjadi. Isu keamanan merupakan salah satu isu yang cukup kuat pada waktu itu mengingat Amerika begitu reaktif terhadap isu terorisme yang menerpanya di tahun 2001. Melalui GWOT (*Global War on Terror*) yang dicanangkan George Bush kala itu, diplomasi publik Amerika diarahkan pada upaya-upaya pemberantasan terorisme dan upaya untuk memberikan informasi lebih baik mengenai Amerika pada dunia terutama negara-negara yang dikhawatirkan memiliki potensi atas tumbuhnya terorisme, termasuk Indonesia yang diletakkan pada lingkaran kedua setelah negara-negara Timur Tengah (Hoffman, 2002; Singer, 2006).

Pengaruh isu keamanan nampak kemudian pada citra negara yang dilekatkan kepada diplomasi publik Indonesia dimana Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada waktu itu, menyematkan label moderat, progresif dan demokratis kepadanya (Wirajuda, 2007). Semenjak dicetuskannya citra Indonesia sebagai negara yang demokratis, moderat dan progresif tersebut, kajian mengenai diplomasi publik Indonesia berfokus pada tujuan 'pencitraan'. Tulisan ini hendak melihat bagaimana diplomasi publik Indonesia dikaji oleh beberapa akademisi untuk menawarkan pendekatan lain yaitu Konstruktivis dalam melihat konsep diplomasi publik. Melalui pendekatan konstruktivis, diplomasi publik tidak lagi dilihat sebagai semata-mata upaya pemerintah dengan melibatkan *non-state actors* untuk mempengaruhi negara lain melalui citra tertentu melainkan lebih kepada sejumlah upaya yang dijalankan oleh agen dalam upaya untuk mempengaruhi relasi antar negara.

PEMBAHASAN

KAJIAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

Dalam kajian diplomasi publik Indonesia dapat ditemukan 3 isu, pertama isu mengenai tujuan diplomasi publik, kedua adalah isu mengenai aktor domestik dalam diplomasi publik dan yang ketiga adalah strategi dalam diplomasi publik. Tujuan diplomasi publik dalam kajian diplomasi publik Indonesia banyak didominasi oleh citra sebagai jembatan bagi kepentingan nasional. Pada isu aktor dalam diplomasi publik, kajian-kajian diplomasi publik Indonesia masih menempatkan negara sebagai aktor utama. Sementara dalam isu strategi, dialog telah mulai banyak dipakai guna membangun kepercayaan antar negara dan publik di luar negara.

Isu pertama yaitu citra atau *image*. Citra menjadi kajian utama dalam diplomasi publik Indonesia (Ma'mun, 2009; Effendy, 2013; Gabriella, 2013; Novika Sari, 2013) dengan meletakkannya sebagai tujuan dari keseluruhan rangkaian kegiatan diplomasi publik. Riset-riset tersebut mengasumsikan bahwa citra positif mengenai sebuah negara dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai kepentingan nasional di luar negeri. Upaya yang dilakukan dalam rangka menjembatani persepsi di luar negara dengan apa yang terjadi di dalam negara (Hadi, 2009) ini diyakini dapat menjadi alat bagi Indonesia untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Citra sesungguhnya adalah sebuah refleksi dari diri, jadi jika kondisi internal suatu negara itu buruk maka tidak dapat dihindari lagi pantulannya akan buruk pula. Mengacu pada pendapat Leonard, citra merupakan premis dasar diplomasi publik dimana citra atau reputasi merupakan 'public goods' yang memungkinkan seseorang melakukan atau tidak melakukan transaksi (Leonard, 2002). Citra tersebut menjadi sebuah *brand image* yang dengan sengaja diletakkan oleh negara untuk memberikan gambaran publik dan pemerintah di luar negara mengenai Indonesia.

Kepentingan ekonomi dan keamanan menjadi agenda utama dalam pembentukan citra negara. Implementasi diplomasi publik dalam sejumlah

Tabel 1. Riset Diplomasi Publik Indonesia dalam Rasionalis dan Konstruktivis Berdasarkan Tujuan, Aktor dan Strategi

NO	RISET	TUJUAN	AKTOR	STRATEGI
1.	Rasionalis	<i>Image building</i> untuk kepentingan nasional	Aktor negara dan aktor non negara serta dimensi domestik yang bersifat subordinan	Diseminasi informasi kebijakan luar negeri kepada publik dan pelibatan publik domestik, media, dan lembaga swadaya masyarakat dalam untuk mendukung kebijakan luar negeri negara
2.	Konstruktivis	<i>Relationship building</i>	Aktor negara dan aktor non negara serta dimensi domestik yang bersifat independen	Proyek kesadaran warga negara dan relasi antar warga

kegiatan dirancang untuk membangun kepercayaan dan kesepahaman (Effendy, 2013). Sejumlah kegiatan juga dirancang untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Ma'mun bahkan membuat model diplomasi publik dalam Model Pelayanan Informasi Pemberdayaan Publik (Ma'mun, 2009: 310) demi tujuan ini.

Isu kedua adalah aktor dalam diplomasi publik. Meskipun pada beberapa riset, aktor domestik non negara (selanjutnya akan disebut sebagai aktor domestik) telah mendapat tempat di dalam aktifitas diplomasi publik, namun keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut berada di bawah kendali negara. Negaralah yang menjadi satu-satunya aktor dalam menginterpretasi fenomena yang terjadi antar negara dan negaralah yang menjadi satu-satunya pengambil keputusan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan serta informasi apa saja yang diberikan kepada publik. Situasi ini mendorong Ma'mun mengusulkan Model Diplomasi Publik dengan Pelayanan Informasi Terintegrasi Berstruktur dalam disertasinya. Ia meletakkan diplomasi publik sebagai institusi *public relation* pemerintah guna memberikan informasi sebenar-benarnya mengenai isu antar negara yang sedang terjadi. Institusi *public relations* semacam ini harus diletakkan dari tingkat yang paling bawah hingga pusat. Sementara pada riset Effendi, negara menjadi aktor utama dalam mendorong dan memedomani aktor domestik dalam kegiatan yang diinisiasinya baik dalam bidang ekonomi dan budaya (Effendy, 2013).

Sedangkan isu ketiga yaitu strategi dalam diplomasi publik, kajian-kajian ini telah beranjak dari strategi monolog menjadi dialog. Upaya ini dipercaya dapat membangun kepercayaan yang lebih baik dari pemerintah dan publik negara lain terhadap Indonesia. Bersamaan dengan diplomasi budaya (Clarisa Gabriell, 2013; Novika Sari, 2013), upaya dialogis untuk memperkenalkan nilai ke-Indonesiaan dilakukan. Program pertukaran pelajar melalui kegiatan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) juga menjadi satu kajian yang mengangkat mengenai strategi diplomasi publik dalam mengenalkan nilai-nilai ke-Indonesiaan untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan (Issundari dan Rachmawati, 2015).

Tabel 1 menunjukkan beberapa riset mengenai diplomasi publik Indonesia yang lebih banyak berkuat pada *image building* sebagai tujuan, negara sebagai aktor dominan dan diseminasi informasi baik monolog maupun dialog sebagai strategi diplomasi publik.

DOMINASI RASIONALIS DALAM KAJIAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

Merujuk pada tabel 1, kotak riset pertama, pengaruh rasionalis sangat terasa dengan ditempatkannya kepentingan nasional sebagai tujuan dan negara sebagai aktor utama dalam diplomasi publik. Rasionalis merupakan tradisi yang melahirkan konsep diplomasi. Ia percaya pada cara-cara yang bersifat akomodatif dan kompromistis melalui tatanan

internasional. Mereka memfokuskan diri pada bagaimana *system of state* menjadi *society of state* dimana tujuan bersama, kepentingan dan aturan menjadi isu yang penting dalam pembangunan masyarakat ini (Devlen et. all, 2005). Kaum rasionalis bahkan percaya bahwa tatanan internasional dapat terbentuk meskipun masing-masing negara tidak memiliki kultur politik yang sama karena setiap negara dan individu sesungguhnya memiliki nilai politis yang sama (Linklater, 1996: 98). Studi mengenai diplomasi berada dalam kerangka untuk menjembatani tercapainya tujuan-tujuan tersebut di antara negara-negara yang diasumsikan semua negara memiliki tujuan rasional yang sama dalam hubungan antar negara.

Dipersepsikannya diplomasi publik sebagai sebuah upaya negara untuk mendapatkan kepentingan nasional membuat seringkali disamakan dengan propaganda. Pada masa perang dingin diplomasi publik seringkali dipertukarkan dengan propaganda karena sama-sama dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Beberapa akademisi dan praktisi, bahkan pada masa sesudahnyapun, masih menganggap perbedaan diplomasi publik dan propaganda bukanlah hal yang terlalu penting (Berridge, 2010). Diplomasi publik dipandang sebagai sebuah terminologi yang lebih halus dibandingkan dengan manipulasi (atau propaganda) (Brown, 2012).

Tujuan diplomasi publik yang diabdikan pada kepentingan nasional ditegaskan oleh Edward Murrow (Snow, 2008) dan Edmund Gullion (Public Diplomacy Association, 2012) bahwa, "*Public diplomacy... deals with the influence of public attitudes on the formation and execution of foreign policies.*". Pengaruh merupakan kunci dari diplomasi publik untuk mendapatkan kepentingan yang sesungguhnya yaitu kerjasama ekonomi dan keamanan. Sejalan dengan pemahaman kaum rasionalis bahwa setiap negara memiliki tujuan yang sama yaitu tatanan internasional yang hanya akan dapat dicapai melalui kerjasama dan dialog, maka diplomasi merupakan bagian penting dari upaya tersebut.

Paul Sharp menyatakan, bahwa diplomasi publik

merupakan proses yang dilakukan untuk mengejar dan memperbesar kepentingan dan nilai-nilai tertentu dari negara yang diwakili (Ham, 2010:115). Sedangkan melalui Transformational diplomacy, Condoleeza Rice dengan tegas menyatakan bahwa, *Public diplomacy is defined in different ways, but broadly it is a term used to describe a government's efforts to conduct foreign policy and promote national interests through direct outreach and communication with the population of a foreign country* (Nakamura dan Weed, 2009). Citra kemudian menjadi jembatan bagi publik dan negara lain untuk memahami dan menerima sebuah negara dan menjadi jembatan bagi tercapainya kepentingan nasional.

Aktor dalam diplomasi publik merupakan perdebatan tersendiri dimana isu dimensi domestik (kelompok-kelompok publik domestik yang berada di dalam negara) merupakan perdebatan terakhir dalam diplomasi publik (Huijgh, 2012). Rasionalis memberikan ruang yang cukup besar bagi aktor non negara dalam diplomasi publik. Meski demikian, ia masih menempatkan negara sebagai pemeran utama dalam diplomasi publik. Negara baginya sudah seharusnya menjadi koordinator dari seluruh kegiatan diplomasi publik. Sementara aktor domestik hanyalah merupakan subyek pasif yang hubungannya bersifat subordinan (tidak menginterpretasi fenomena isu antar negara tetapi berada dalam program diplomasi publik negara). Istilah *government driven* dipergunakan Melissen untuk menggambarkan seperti apapun kekuatan pengaruh dari aktor non negara, negara harus mampu menjadi kontrol utama dari setiap diplomasi yang dilakukan (Melissen, 2011). Bagi Berridge, negara masih merupakan pemain utama dan koordinator dalam pelaksanaan diplomasi publik. Alasannya adalah Kementerian Luar Negeri masih menjadi tempat dimana publikasi cetak dan non cetak mengenai informasi kebijakan dan lain-lain dilakukan (Berridge, 2010). Negara, melalui Kementerian Luar Negerinya, merupakan pencetus dan penggerak utama diplomasi publik (Rasmussen, 2009). Meski telah memberikan tempat bagi aktor non negara dalam diplomasi publik, namun beberapa riset diplomasi publik masih meletakkan negara sebagai aktor yang utama dalam

mengontrol bagaimana sebuah diplomasi publik berjalan. Hal ini terjadi karena isu keamanan mendominasi tujuan diplomasi publik (Signitzer dan Coombs, 1992; Peterson, 2002).

Sejalan dengan tujuannya untuk meraih kepentingan nasional, tradisi liberal yang banyak memberikan pengaruh pada Rasionalisme, menekankan pentingnya dialog sebagai strategi utama dalam diplomasi publik. Adalah pengaruh besar liberalisme yang menempatkan diplomasi sebagai upaya negara dalam mewujudkan perdamaian melalui kompromi tanpa mempedulikan ideologi dan kepercayaan yang dianut oleh setiap negara (Nau, 2009: 42). Diplomasi dibangun untuk mendukung upaya-upaya negara dalam membentuk masyarakat dan tata internasional melalui dialog. Negara berdaulat diasumsikan memiliki akses yang sama di dalam mengomunikasikan kepentingan nasional mereka masing-masing dan tata internasional dibangun demi memenuhi kepentingan nasional tersebut. Semua pandangan masing-masing negara dihargai karena diplomasi dilandasi oleh toleransi dan persamaan. Tanpa menyingkirkan sama sekali strategi monolog dalam diplomasi publik, dialog dipercaya dapat menjadi jembatan berbagai kepentingan yang ditujukan untuk menumbuhkan kepercayaan, saling ketergantungan dan kerjasama. Kepentingan setiap negara dapat dijembatani melalui pembicaraan meskipun masing-masing negara memiliki perbedaan, seperti sistem politik. Diplomasi dapat menjadi jalan untuk mempertukarkan kepentingan negara satu dengan yang lainnya (Nau, 2009: 42). Ide semacam ini mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial dalam diplomasi publik. Setiap kementerian luar negeri bahkan duta besar dan para diplomat diwajibkan untuk memiliki website atau mempergunakan media sosial seperti twitter dan facebook guna menjalin dialog dengan berbagai aktor baik individu, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

KONSTRUKTIVISME DALAM DIPLOMASI PUBLIK

Konstruktivisme lahir sebagai penengah perdebatan

ketiga dalam ilmu Hubungan Internasional.

Konstruktivis muncul di akhir tahun 80an sebagai penengah untuk meredakan perdebatan ini. Konstruktivisme hadir dengan ketertarikan utamanya pada bagaimana obyek dan praktik kehidupan sosial dikonstruksi dan terutama obyek dan praktik yang dianggap oleh peneliti dan masyarakat sebagai hal yang alamiah (*given*). Bagi konstruktivis politik internasional adalah hasil dari konstruksi sosial atau proses interaksi dari agen dan struktur, dimana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam sosial politik (Hadiwinata dalam Hermawan, 2007: 20).

Keberatan Konstruktivis terhadap Positivis meliputi, pertama: konstruktivisme menolak asumsi kaum positivis yang tidak memandang penting agen di dalam realitas politik. Positivis dianggap terlalu menekankan perilaku/kepentingan dan menyingkirkan identitas. Sebaliknya bagi konstruktivis, percaya bahwa keduanya saling terkait dengan erat. Kedua, Konstruktivis menolak logika konsekuensi (*logic of consequences*) dan menekankan logika kepantasan (*logic of appropriateness*). Konstruktivis meyakini bahwa pilihan tindakan aktor tidak selalu didasarkan atas logika konsekuensi yang menekankan perhitungan matematis atas kepentingan yang bersifat materi. Pertimbangan kepantasan dalam mengambil keputusan untuk bertindak merupakan pengaruh utama terhadap aktor. Hal-hal yang bersifat non material atau ideasional dan norma yang saling dibagi dalam pergaulan internasional menjadi landasan bagi tindakan aktor. Ketiga, Konstruktivis menolak pembentukan klaim pengetahuan sebagai hukum obyektif yang dipergunakan untuk kebutuhan melakukan prediksi. Bagi konstruktivis, klaim terhadap pengetahuan hanya dapat dilakukan secara spesifik dan tidak semata-mata mengabdikan kepada kepentingan untuk dapat melakukan prediksi.

Merujuk pada asumsi dasar tersebut maka, bukan kepentingan nasional yang menjadi tujuan diplomasi publik melainkan kesadaran atas adanya perbedaan identitas negara bagi dasar pembangunan hubungan antar negara. Kesadaran dan pemahaman merupakan

faktor penting yang terkait dengan kedirian seseorang dan hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi memiliki peran utama dalam hal ini (Steans dan Pettiford, 2009: 229). Komunikasi telah mengubah paradigma kerja menjadi paradigma komunikasi dimana apa yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi melainkan proses belajar. Komunikasi dalam hal ini tidak hanya usaha untuk mempertukarkan pesan atau informasi (Bolton, 2005), melainkan merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap entitas politik baik negara maupun subsistem di dalam negara untuk mempertahankan identitas kolektifnya/negaranya (Luhmann, 1995).

Pentingnya dialog terbuka pada level yang lebih luas yaitu antar negara perlu dan dapat dilakukan demi menjamin tetap terselenggaranya perdamaian. Kesadaran dan kesepahaman melalui tindakan komunikatif Habermas dapat dilakukan antar negara melalui apa yang disebut dengan *multilateral diplomacy* (Mitzen, 2005). Bagi Mitzen, wadah bagi dialog antar negara dimungkinkan dalam kondisi yang sejajar dimana setiap peserta selalu akan berusaha membuat diri mereka sendiri mampu didengar oleh peserta yang lain melalui argumentasi yang dapat diterima oleh yang lain. Selain itu, interaksi yang terjadi juga akan menuntun pada norma yang lambat laun diterima sebagai norma bersama. Ide untuk menumbuhkan kesadaran publik semacam ini juga menjadi pijakan bagi Zaharna (Zaharna, 2000) dalam *cultural diplomacy*-nya. Dalam *Cultural Diplomacy* terdapat pengakuan terhadap nilai tertentu yang mempengaruhi setiap aktor non negara dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, publik menjadi penting dalam *cultural diplomacy* karena setiap individu dan kelompok yang sedang membangun *circular intercation* ini akan bertukar nilai secara langsung maupun tidak langsung. Bagi RS Zaharna, kultur adalah faktor penting dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal, non verbal dan pembentukan persepsi. Kultur menyediakan makna bagi berbagai bentuk perilaku komunikasi seperti kalimat atau tanda yang tidak diucapkan, demikian juga aturan dan norma yang melandasi perilaku.

Kultur mempengaruhi persepsi dan menyediakan tanda bagaimana pesan terstruktur dan diinterpretasi.

Tujuan dari diplomasi publik bagi Konstruktivis dengan demikian tidak terletak pada kepentingan nasional semata karena ia percaya kepentingan nasional akan selalu dapat berubah sejalan dengan berubahnya identitas negara yang terjadi karena interaksi antar negara. Diplomasi publik kemudian lebih dipahami sebagai interaksi aktor dalam menyampaikan pesan kepada aktor yang lain dan atau membentuk makna tertentu dalam benak mereka. Diplomasi publik juga dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi norma internasional melalui wacana publik (Juyan, 2006), menumbuhkan kesadaran publik dan akhirnya pembangunan hubungan baik antar negara. Melalui pendekatan semacam ini, diplomasi publik tidak lagi sebatas menyoal *state branding* yang dikehendaki secara sepihak oleh elit. Diplomasi publik bukan lagi sebatas upaya-upaya meyakinkan publik negara lain atas satu citra tertentu melainkan upaya setiap agen dalam mempengaruhi relasi antar negara. Jika kesadaran berbangsa dan identitas nasional tersemat dengan kuat maka diplomasi publik akan menjadi sebuah relasi positif dalam menjamin keseluruhan dinamika hubungan antar negara. Namun sebaliknya jika kesadaran berbangsa lemah dan identitas nasional kabur, maka diplomasi publik akan menjadi sebuah relasi negatif dalam mengelola persoalan antar negara.

Merujuk pada hal tersebut, diplomasi publik Indonesia justru segera terlihat pasca kemerdekaan dimana jati diri bangsa yang baru menjadi pendorong utama baik negara maupun publik domestik mempengaruhi relasi demi memperoleh pengakuan atas identitas diri sebagai bangsa yang merdeka. Bukan lagi sebagai bagian dari Hindia-Belanda melainkan Indonesia dengan sejarah dan nilai budaya sendiri serta menjadi bagian dari pergaulan internasional. Hal tersebut dapat ditemukan dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari Mesir dan beberapa negara Arab yang lain yang tidak hanya dilakukan oleh negara melalui utusannya, Kyai Haji Agussalim. Fachir justru menengarai, diplomasi tersebut diinisiasi dan lebih banyak

dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Indonesia di Mesir. Utusan resmi pemerintah tidak mudah dilakukan kala itu mengingat kondisi Indonesia yang disibukkan oleh perjuangan melawan Belanda yang berupaya menguasai kembali Indonesia melalui kekuatan militer (Fachir, 2009: 24-25). Nama Indonesia dipakai setelah kemerdekaan sebagai nama perkumpulan pemuda dan mahasiswa Indonesia di Mesir, Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia (PKI). PKI memiliki misi untuk menciptakan kebebasan de facto warga Indonesia dari perwalian Belanda dan mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi Indonesia yang merdeka. Mereka melakukan pendekatan khusus kepada tokoh-tokoh politik Mesir dan pendekatan terhadap media massa agar gencar memberitakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Mesir memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto (Rahman, 2007: 156).

Isu intermestik yang muncul antara Indonesia dan Malaysia sekitar tahun 2004-2014 juga menunjukkan sejumlah upaya untuk mempengaruhi hubungan dalam rangka memelihara identitas budaya dan identitas fisik. Meski dikomunikasikan melalui tindakan yang berbeda-beda oleh sekelompok dimensi domestik, upaya tersebut hadir sebagai respon dari isu klaim budaya dan perbatasan antara Indonesia Malaysia. Sebagian dimensi domestik menyelenggarakan upaya kooperatif melalui dialog akademis dan budaya (Eminent Person Group tahun 2008 didirikan sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan intermestik Indonesia Malaysia, Balai Melayu didirikan oleh Mahyudin Almudra sebagai upaya untuk memelihara budaya Melayu dan menjadi jembatan bagi hubungan informal warga kedua negara). Sebagian lain menyelenggarakan hubungan melalui cara-cara praktis yang cenderung negatif seperti demonstrasi anarkis.

Dominasi negara juga ditentang oleh Konstruktivis bukan hanya karena kesadaran warga menjadi hal yang penting dalam memberi mereka jalan dalam relasi antar warga tetapi juga aktor domestik non negara memiliki akses yang semakin besar sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Rondfeldt dan Arquilla, 2009). Bahkan arus

informasi yang semakin terbuka tersebut telah mengaburkan isu domestik dan isu internasional (Vickers, 2004) dimana hal tersebut semakin mendekatkan publik domestik dengan isu-isu antar negara. Mengaburnya aktifitas informasi internasional dan domestik tersebut, mendorong Nye melihat bahwa publik di dalam negara kemudian menjadi bagian yang sama pentingnya dengan publik di luar negara (Nye, 2010). Penting bagi negara untuk menjalin kerjasama dengan aktor domestik (Gregory, 2008; Peterson, 2002) karena banyak manfaat yang didapatkan negara dalam kerjasama tersebut (Huijgh, 2011; Fitzpatrick, 2010).

Memang tidak semua dimensi domestik memiliki pengaruh yang penting dalam postur diplomasi publik. Dimensi domestik yang dimaksudkan memiliki pengaruh pada diplomasi publik adalah masyarakat/publik domestik atau masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat/institusi non profit serta media (Chitty, 2007). Aktor domestik tersebut ditengarai memiliki kepentingan langsung dengan perubahan kebijakan luar negeri selain memiliki akses yang luas terhadap informasi. Dengan demikian, meskipun tidak dapat mempengaruhi keputusan secara langsung atas isu internasional, namun aktor non negara memiliki pengaruh penting yaitu pertama dalam hal *legitimacy* dan *efficacy* dalam citra nasional sebagai *good governance*. *Non state actor* dapat dikatakan *legitimate* dan memiliki *efficacy* ketika mereka mampu mendapat dukungan publik dan mampu meraih apa yang menjadi tujuan mereka. Kedua, penting bagi aktor non negara untuk mendapat dukungan dari publik karena dukungan publik menunjukkan pengakuan publik atas keberadaan mereka. Ketiga, transparansi, akses terhadap dokumen yang dimiliki dan informasi atas dialog-dialog yang dilakukan menjadi sangat penting bagi publik untuk memberikan dukungan (Porte, 2012:3).

Besarnya pengaruh dimensi domestik dalam memelihara identitas nasional sekaligus relasi antar negara tercermin dalam sejumlah kegiatan misi budaya Indonesia dan pertukaran pelajar yang diselenggarakan negara. Sejumlah misi budaya dari tahun 1957-1960an

merupakan diplomasi budaya Soekarno untuk menancapkan identitas nasional Indonesia di sejumlah negara sahabat seperti Pakistan, Uni Soviet, Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang dan lain sebagainya (Lindsay dan Liem, 2011: 227-228). Demikian pula dengan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) di tahun 1963 (Kurniawan dan Alrianingrum, 2013: 191). Sementara KIAS (Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat) pada tahun 1990-1991, merupakan misi Soeharto kala itu untuk memperkenalkan Indonesia melalui budaya (Warsito dan Kartikasari, 2007:150). Setelah didirikannya Direktorat Diplomasi Publik, kegiatan tersebut diberi label sebagai *domestic outreach* (Sukma, 2011; Nabbs-Keller, 2013; Huijgh, 2013).

Tidak semua misi budaya diinisiasi oleh negara, apa yang dikerjakan oleh AlMudra dengan mendirikan Balai Melayu, Tenas Effendi yang melakukan kajian dan pemeliharaan budaya Melayu di Riau, kerjasama kebahasaan melalui MABBIM (Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia) serta sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) yang tersebar di sejumlah negara merupakan bagian dari upaya untuk memelihara identitas nasional. Pengenalan identitas nasional melalui budaya yang memiliki nilai dan karya yang berbeda diyakini justru dapat menumbuhkan saling kesepahaman antar bangsa. Aktifitas untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan negara oleh dimensi domestik secara independen seperti ini disebut Mueller sebagai *spontaneous diplomacy* (Mueller dan Rebstock, 2012). Pengaruh globalisasi telah merubah bentuk peranan publik di dalam diplomasi publik terutama dengan munculnya masyarakat sipil dalam isu antar negara (Melissen, 2011; Porte, 2012; Huijgh, 2013; Trunkos, 2011). Kajian mengenai peran aktor domestik menjadi wilayah yang masih sangat mungkin untuk dikaji lebih lanjut dan konstruktivis memberikan jalan untuk hal tersebut.

Konstruktivis memang tidak secara spesifik menunjukkan strategi dalam diplomasi publik. Namun demikian, tujuan untuk memelihara identitas

nasional dan juga saling kesepahaman atas perbedaan antar negara, merujuk pada pola-pola komunikasi yang efektif. Dialog telah menjadi acuan utama dalam kelompok rasionalis dengan argumen bahwa dialog mampu menumbuhkan rasa percaya antar kelompok. Tulisan Geoffrey Cowen dan Amelia Arselnaut menunjukkan bahwa model komunikasi dialog memiliki efek yang jauh lebih baik dibanding monolog, meski monolog memiliki fungsinya tersendiri yang masih juga diperlukan dalam menyampaikan sebuah ide atau pesan kepada pihak lain. Dialog menurut Cowen dan Arselnaut mampu menumbuhkan hubungan yang lebih baik karena setiap pihak yang terlibat merasa diterima dan terlibat atau menjadi bagian yang penting dari komunitas tersebut (Cowan dan Arsenault, 2008). Riset mengenai diplomasi publik berkembang tidak hanya pada bagaimana negara dapat saling mengirimkan pesan dan berdialog melalui forum formal dan informal tetapi juga bagaimana dapat menjangkau publik di luar negara dengan lebih baik. Pengaruh teknologi menjadi salah satu sumbangan utama bagi revolusi diplomasi publik. Hal ini dicatat oleh Peter Van Ham bahwa diplomasi publik merupakan alat *postmodern* milik negara yang berusaha menggapai kembali legitimasi dan pengakuan di tengah dunia global yang kehilangan monopolinya dalam proses informasi (Ham, 2005: 57).

Bergesernya tujuan diplomasi publik lebih pada kesadaran pemikiran dan atau mempengaruhi ide maupun norma internasional yang mendorong dipergunakannya metode-metode komunikasi dan interaksi yang lebih beragam. Media televisi dan surat kabar merupakan salah satu metode diplomasi publik yang diyakini dapat menjangkau dan mempengaruhi publik secara lebih luas (Entman, 2003; Gilboa, 2002; Ammon, 2001). Meski demikian, ada pula yang meletakkan kontak langsung antar warga negara merupakan upaya yang cukup penting dalam *relationship building* (Leonard, Stead dan Sweming, 2002; Zaharna dalam Snow, 2009). Dengan begitu, diplomasi publik tidak lagi dilakukan dengan cara-cara komunikasi satu arah, melainkan dengan komunikasi dua arah untuk saling bertukar pesan melalui dialog.

Meski media sosial memberikan peluang besar, namun interaksi langsung masih merupakan strategi yang lebih manjur dalam menumbuhkan saling pengertian dan saling menghormati.

KESIMPULAN

Pada banyak kajian yang didominasi oleh pendekatan rasionalis, tujuan diplomasi publik masih diabdikan bagi kepentingan nasional. Diplomasi publik dipahami sebagai sebuah *image building* melalui *branding* dimana membentuk dan melekatkan *branding* adalah tugas negara. Studi yang meletakkan tujuan diplomasi publik pada hubungan atau relasi antar negara masih sangat terbatas. Hal ini kemudian berpengaruh pada penempatan aktor non negara di dalam diplomasi publik. Hubungan antara negara dan aktor non negara dalam hal ini bersifat subordinan dimana dimensi domestik menjadi aktor yang bersifat pasif. Perannya terbatas untuk mendukung segala kegiatan yang dibuat oleh negara merujuk pada interpretasi negara terhadap politik internasional. Negara menjadi satu-satunya pihak yang menginterpretasikan politik internasional dan atau isu yang terjadi antar negara. Hal inilah yang dikritik oleh Huijgh bahwa, dimensi domestik atau *domestic outreach* sebagai sebuah *denial hurt* karena meski disertakan dalam kegiatan diplomasi publik tetapi sama sekali tidak diberi tempat dalam konsepsi diplomasi publik (Huijgh, 2013).

Pendekatan semacam ini ternyata tidak dapat sepenuhnya menjelaskan hubungan antar negara yang saat ini lebih banyak didominasi oleh warga antar negara baik kontak langsung, media cetak dan elektronik. Mengaburnya batasan negara juga telah membawa isu internasional dan domestik menjadi isu-isu intermestik yang tidak mudah lagi dipilah. Memahami diplomasi publik dalam bingkai Konstruktivis memberikan peluang untuk memahami hubungan antar negara dari sisi lain. Sisi dimana hubungan antar negara bukan soal bagaimana negara secara formal membangun hubungan melainkan bagaimana hubungan antar negara sebagai keseluruhan dibangun oleh berbagai agen baik negara maupun

aktor domestik non negara. Beranjak dari kesadaran dan identitas berbangsa yang melekat, diplomasi publik mengantarkan rangkaian pemahaman mengenai hubungan antar negara yang tidak lagi didominasi negara.

Kontribusi lain yang ditawarkan pendekatan ini adalah bahwa aktor domestik non negara yang diasumsikan memiliki akses yang sama dalam menginterpretasi dan merespon fenomena intermestik (Stone, 2011; Chandra, 2004; Tan, 2005) dapat menjadi partner sejajar negara dalam menginterpretasi dan merespon fenomena intermestik. Menempatkan mereka secara subordinan dalam diplomasi publik merupakan hal yang kurang tepat. Sebagai agen, dimensi domestik dapat menjadi salah satu dari sekian ujung tombak diplomasi publik dalam mempengaruhi hubungan antar negara, baik secara independen atau subordinan. Klaim atas konstruksi kesadaran berbangsa menjadi dasar dari keseluruhan argumentasi pendekatan Konstruktivis di dalam kajian diplomasi publik Indonesia. Meski demikian, dalam hal strategi pendekatan ini tidak terlalu memberikan wacana baru untuk dikembangkan.

REFERENSI

- Abd. Rahman, Suranta. 2007. *Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947*. Wacana, Vol. 9; No. 2, Oktober 2007.
- Ammon, Royce. 2001. *Global Television and the Shaping of World Politics: CNN, Telediplomacy and Foreign Policy*. McFarland: Jefferson NC.
- Berridge, GR.. 2010. *Diplomacy Theory and Practice* (4th ed.). Plagrave Macmillan: Hampshire.
- Bolton, Roger. 2005. *Habermas's Theory of Communicative Action and the Theory of Social Capital*. Paper read at meeting of Association of American Geographers. Colorado. April 2005.
- Brown, John. 2012. *Public Diplomacy and Propaganda: Their Differences*. (Online), (http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2008/0709/comm/brown_pudiplprop.html, diunduh tanggal 30 Agustus 2014).
- Chandra, Alexander C.. 2004. *Indonesia's Non Sate Actors in ASEAN: A New Regionalisme Agenda for Southeast Asia?*. Contemporary Southeast Asia, Vol. 26, No. 1, April 2004.
- Chitty, Naren. 2007. *Diplomacy Public*. Paper Submission to the Senate Affairs, Defence and Trade Commission. Inquiry into the nature and conduct of Australian's public diplomacy.
- Chitty, Naren. Tanpa Tahun. *Public Diplomacy: Courting Publics Fors Short Term Advantage or Partering Publics for Lasting Peace and Sustainable Prosperity?*. (Online), (<http://www.wandrenpd.com/wp->

- content/uploads/2010/10/9789004179400_FisherLucas_15-chapter_Chitty_proof-01_enabled.pdf, diunduh 20 April 2014).
- Cowan, Geoffrey dan Amelia Arsenault. 2008. *Moving from Monolog to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616. Sage Publications.
- Devlen, Balkan et. al.. 2005. *The English School, International School: International Relations and Progress*. *Journal of International Studies Issues* 7. Malden: Blackwell Publishing.
- Effendy, Tonny Dian. 2013. *Diplomasi Publik sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 9 No. 1 (online). (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/540/524>, diunduh tanggal 10 November 2014).
- Entman, Robert M.. 2003. *Cascading Activation: Contesting the White House's Frame after 9/11*. *Political Communication*.
- Fachir. A.M.. 2009. *Potret Hubungan Indonesia-Mesir*. Kairo: KBRI Cairo.
- Fitzpatrick, Kathy R.. 2010. *US Public Diplomacy's Neglected Domestic Mandate*. CPD Perspective on Public Diplomacy, Paper 3, 2010. Los Angeles: Figueroa Press.
- Gabriela, Clarisa. 2013. *Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya*. (Online), (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella.pdf?sequence=1>, diunduh tanggal 10 November 2014).
- Gilboa, Eytan. 2002. *The Global News Networks and US Policymaking in Defense and Foreign Affairs*. The Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy. Kennedy School of Government: Cambridge.
- Gregory, Bruce. 2008. *Public Diplomacy: Sunrise of the Academic Field*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616. Sage Publications.
- Hadi, Umar. 2009. *Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional*. *Tabloid Diplomasi* (Online). (<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/55-desember-2007/535-diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html>, diunduh tanggal 10 Desember 2014).
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Hubungan Internasional: Dari Realism hingga Konstruktivisme*. Dalam Yulius P. Hermawan. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ham, Peter Van. 2010. *Social Power in International Politics*. New York: Routledge.
- Ham, Peter Van. 2005. *Power, Public Diplomacy and the Pax Americana*. Dalam Jan Melissen. *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relation*. New York: Palgrave MacMillan.
- Hoffman, Bruce. 2002. *Rethinking Terrorism dan Counterterrorism Since 9/11*. *Studies in Conflict and Terrorism*. Taylor Francis.
- Huijgh, Ellen. 2012. *Public Diplomacy in Flux: Introducing the Domestic Dimension*. *eHague Journal of Diplomacy* 7 (2012), hal. 359-367.
- Huijgh, Ellen. 2011. *Changing Tunes for Public Diplomacy: Exploring the Domestic Dimension*. *Netherlands Institute of International Relations* (online). (http://www.exchangediplomacy.com/wp-content/uploads/2011/10/6.-Ellen-Huijgh_Changing-Tunes-for-Public-Diplomacy-Exploring-the-Domestic-Dimension.pdf, download 20 April 2014).
- Issundari, Sri dan Iva Rachmawati. 2015. *Increasing Indonesian Public Diplomacy Through IACS (Indonesian Art and Culture Scholarship) Program*. Social Coservation based on Nation Character Building. International Conference on Education and Social Sciences 4th ICESS.
- Nye, Joseph. 2010. *The Essential New Public Diplomacy in Modern Power Politics*. (Online), (<http://bataviase.co.id>, diunduh tanggal 10 Desember 2012).
- Juyan, Zhang. 2006. *PD as Symbolic Interactions: A Case Study of Asian Tsunami Relief Campaigns*. *Public Relation Review* No. 32.
- Kurniawan, Bayu dan Septina Alrianingrum. 2013. *Ganefo sebagai Wahana dalam Mewujudkan Konsepsi Politik Luar Negeri Soekarno 1963-1967*. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No 2, Mei 2013*
- La Porte, Teresa. 2012. *The Legitimasi and Effectiveness of Non-State Actors and the Public Diplomacy Concept*. *Public Diplomacy Theory and Conceptual Issues*. ISA Annual Covention, San Diego, April 1-4, 2012.
- Leonard, Mark. 2002. *Public Diplomacy*. The Foreign Policy Centre. London: The Mezzanine Elizabeth House.
- Lindsay, Jennifer dan Maya H.T. Liem. 2011. *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia. 1950-1965*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Linklater, Andrew. 1996. *Rationalism*. Scott Burchill dan Andrew Linklater (ed). *Theories of International Relations*. London: MacMillan Press LTD.
- Luhmann, Niklas. 1995. *Social System*. California: Stanford University Press.
- Nabbs-Keller, Gretta. 2013. *Reforming Indonesia's Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership*. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 35, No. 1.
- Nakamura, Kennon H. dan Matthew C. Weed. 2009. *U.S. Public Diplomacy: Background and Current Issues*. Congressional Research Service CRS Report for Congress. 7-5700. (www.crs.gov diunduh tanggal 12 Juni 2013).
- Nau, Henry. 2009. *Perspective on International Relations, Power, Institution, Ideas 2nd*. Washington: CQ Press.
- Nsson, Christer J. 2013. *Diplomasi, Tawar Menawar dan Negosiasi*. Dalam Walter Carlsnaess et. al.. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Ma'mun, A. Saefudin. 2009. *Citra Indonesia di Mata Dunia Gerakan Kebasan Informasi dan Diplomasi Publik*. Bandung: TrueNorth.
- Melissen, Jan. 2011. *Beyond the New Public Diplomacy*. *Clingendael Paper*, No. 3. The Hague Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael': Netherland.
- Melissen, Jan. 2005. *The New Public Diplomacy Soft Power in International Relation*. London: Palgrave.
- Mitzen, Jennifer. 2005. *Reading Habermas in Anarchy: Multilateral Diplomacy and Global Public Spheres*. *The American Political Science Review*, Vol. 99, No. 3. August 2005.
- Madu, Ludiro 2008. *Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 2005: Refleksi Teoritis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet*. *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari - Juni 2008.
- Mueller, Sherry Lee dan Mark Rebstock. 2012. *The Impact and Practice of Citizen Diplomacy*. *PD Magazines Issue 7 Winter 2012*. USC

- Annenberg Press.
- Peterson, Peter G.. 2002. *Public Diplomacy and the War on Terrorism*. Foreign Affairs, Vol. 81. No. 5, September-Oktober 2002.
- Rasmussen, Ivan Willis. 2011. *Towards A Theory of Public Diplomacy, A Quantitative Study of Public Diplomacy and Soft Power*.
- Rondfeldt, David dan John Arquilla. 2009. *Noopolitik: A New Paradigm for Public Diplomacy*. Dalam Nancy Snow. Routledge Handbook of Public Diplomacy. Routledge: New York.
- Sari, Fitri Dyah Ruslina Novika. 2013. *Strategi Diplomasi Publik dalam Meningkatkan Citra Seni Budaya Indonesia di Mata Dunia Internasional (Studi Kasus: Seni Tari Dayak Kalimantan Timur)*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013. 1 (4). (ejournal.hi.fisip.unmul.org diunduh tanggal 10 November 2014).
- Singer, Peter Warren. 2006. *America, Islam and the 9-11 War*. Current History. December 2006.
- Signitzer, Benno dan Timothy Coombs. 1992. *Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Divergence*. Public Relation Review 18.
- Snow, Crocker, Jr.. 2008. *Murrow in the Public Interest: from Press Affairs to Public Diplomacy*. (<http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2008/06/20080601113033eaifas0.5135767.html#ixzz3G2mL8WSd>, diunduh tanggal 30 Agustus 2014).
- Steans, Jill dan Ilyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stone, Diane. 2011. *The ASEAN-ISIS Network: Intepretive Communities, Informal Diplomacy and Discourse of Region*. (Online), (<http://go.warwick.ac.uk/wrap>, diunduh tanggal 20 April 2014).
- Tan, See Seng. 2005. *Non Official Diplomacy in Southeast Asia: "Civil Society" or Civil Service?*. Contemporary Southeast Asia, Vol 27. No 3. December 2005.
- The 9/11 Commission Report*. 2001. (Online), (<http://www.911commission.gov/report/911report.pdf>, diunduh tanggal 10 Desember 2014).
- Public Diplomacy Association. *What is Public Diplomacy?*. (online), (<http://www.publicdiplomacy.org>, diunduh tanggal 10 Juli 2012).
- _____. 2011. *FBR Akan Sweeping Warga Malaysia*. (Online), (<http://news.okezone.com/read/2011/10/15/338/515572/fbr-akan-sweeping-warga-malaysia>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2011. *Demo Kedubes Malaysia*. (Online), (<http://fbr-korwil-tangerang.blogspot.co.id/2011/10/demo-kedubes-malaysia.html>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2010. *Aktis Bendera Sweeping Warga Malaysia*. (Online), (<http://news.liputan6.com/read/294600/aktis-bendera-sweeping-warga-malaysia>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2015).
- _____. 2009. *Warga Malaysia Di-Sweeping di Jalan Diponegoro*. (Online), (<http://news.detik.com/berita/1199055/warga-malaysia-di-sweeping-di-jalan-diponegoro> diunduh tanggal 25 Oktober 2015).
- _____. 2011. *FBR Akan Sweeping Warga Malaysia*. (<http://news.okezone.com/read/2011/10/15/338/515572/fbr-akan-sweeping-warga-malaysia>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2011. *Demo Kedubes Malaysia*. (Online), (<http://fbr-korwil-tangerang.blogspot.co.id/2011/10/demo-kedubes-malaysia.html>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2010. *Aktis Bendera Sweeping Warga Malaysia*. (<http://news.liputan6.com/read/294600/aktis-bendera-sweeping-warga-malaysia>, diunduh tanggal 25 Oktober 2015).
- _____. 2009. *Warga Malaysia Di-Sweeping di Jalan Diponegoro*. (Online), (<http://news.detik.com/berita/1199055/warga-malaysia-di-sweeping-di-jalan-diponegoro>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2015) dan netwar (Ludiro Madu, 2008).
- Trunkos, Judit. 2011. *Changing Diplomacy Demands New Type of Diplomats*. Institute of Cultural Diplomacy's International Conference. The Future of US Foreign Policy and "The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy?". January 4-6, 2011 Washington DC.
- Tuch, Hans. 1990. *Communicating with the Worlds: US Public Diplomacy Overseas*. New York: St. Martin.
- Vickers, Rhiannon. 2004. *The New Public Diplomacy: Britain and Canada Compared*. Political Studies Association. Garsington Road: Blackwell Publishing.
- Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari. 2007. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wirajuda, Hassan. 2007. *Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat and Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI*. Disampaikan dalam Pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda pada *Lokakarya Nasional Diplomasi Publik*, 11 Desember 2007, (<http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=speech&id=111>)
- Zaharna, RS. 2009. *Mapping Out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives*. Dalam Nancy Snow. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Routledge: New York.
- Zaharna, RS. 2000. *Intercultural Communication and International Public Relation: Exploring Pararells*. Communication Quaterly, Vol. 48. No. 1. Winter.

Turkish Foreign Policy to European Union and Its Chance to be a European Union Member

Anton Minardi

Pasundan University Bandung, West Java 40261, Indonesia

antonminardi@gmail.com

Submitted: 03 June 2016, Accepted: 17 October 2016

Abstrak

Peradaban Turki modern dibentuk atas sekularitas negara dengan karakteristik khusus yang diadopsi dari kerajaan Islam Ottoman. Wilayah strategis Turki yang membentang dari benua Asia hingga Eropa telah membentuk politik luar negeri Turki selama berabad-abad dimana negara ini menempatkan diri sebagai jembatan yang menghubungkan kedua benua dengan motto "peace at home, peace abroad. Meskipun demikian Politik luar negeri Turki dianggap lebih condong pada Eropa karena kesamaan identitas yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Turki dalam beberapa agenda internasional Uni Eropa seperti Europe Council tahun 1949, North Atlantic Treaty Organization (NATO) 1952, European Economic Community (EEC) 1959, maupun agenda-agenda lainnya dan secara resmi mendaftar sebagai anggota Uni Eropa pada 14 April 1987. Akan tetapi, kebijakan Turki terhadap krisis Cyprus dan Etnis Kurdi menyebabkan kecanggungan bagi negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Tulisan ini menjelaskan politik luar negeri Pemerintah Turki terkait isu keanggotaan dalam UE serta pengaruh Amerika dalam kasus tersebut.

Kata kunci: Geopolitik Turki, Politik Luar Negeri Turki, Uni Eropa, Peran Amerika, Isu keanggotaan Turki,

Abstract

The Modern Turkish was established as a secular state whose special characteristic was brought from the Ottoman Islamic empire. The area of Turkey's geopolitics is stretching from Asian to European continent, and always more inclined to the West. These circumstances have formed Turkish foreign policy for decades by indicating the bridging for the Asia on the East and Europe on the West with its motto "peace at home, peace abroad". As the secular state, Turkey recognized themselves as a country whose identity similar to the Western states given the fact that Turkish foreign policy always strive to join the European Union as their priority, as well as Turkey as a NATO member. Turkey showed a great effort through their involvement in various European affairs such as member of the Europe Council 1949, North Atlantic Treaty Organization (NATO) 1952, European Economic Community (EEC) 1959, member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1961, European Community 1964, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in 1973, and officially applied to be member of European Union (EU) on April 14 1987. However, some obstacles remain such as the reluctance of the West toward Turkish performance in dealing with the Cyprus and Kurdish crises. This article explains how Turkish government perform its foreign policy by considering the discussion of Turkish Geopolitics, Turkish Foreign Policy, Turkey - EU Relation, Membership Issue in the EU, The Role of the U.S. to Turkish Membership in the EU, and the Chances for Turkey to be the EU member.

Keywords: Turkish Geopolitics, Turkish Foreign Policy, European Union, the Role of the U.S., Membership Issues.

INTRODUCTION

For a long-time, Turkey is well known as part of European country due to the geographic location of the continent and culture, especially from post-Ottoman Caliphate culture. It is also an alliance to the West and has become the member of NATO, an organisation of the West European security alliance. It is necessary for Turkey to be the member of the European Union (EU) referring to its relations and

proximity to the EU states. It was unsurprising reason that Turkey is viewed to prioritise of its membership in the EU.

Before discussing Turkish foreign policy toward the European Union, it is better to know the definition of foreign policy, how it is developed and how to implement it. The old definition of foreign policy is understood as a formulation of national interests and

put it into international fora as advance goals, to gain the goals, and act to be a winner in the international game. In the new form of foreign policy, it remained as a more complex affair.

Laura Neack explored foreign policy in broad view. She explained that “Foreign policy is made and conducted in complex domestic and international environments as the results from the work of coalitions of interested domestic and international actors and groups. The issues are often linked and delinked, reflecting the strength of various parties and their particular concerns. It derives from issues of domestic politics as well as foreign relations, and it needs to be multilevel and multifaceted in order to confront the complicated sources and nature of foreign policy.” (Neack, 2008).

Charles Hermann defines foreign policy as “the discrete purposeful action that results from the political level decision of an individual or group of individual. (It is) the observable artifact of a political level decision. It is not the decision, but a product of the decision.” His definition more close to the meaning of foreign policy as the behaviour of states (Neack, 2008).

On the opposite, Bruce Russett, Harvey Starr, and David Kinsella in broader definition of foreign policy asserted: “We can think of a policy as a program that serves as a guide to behaviour intended to realize the goals of an organization has set for itself.... foreign policy is thus a guide to actions taken beyond the boundaries of the state to further the goals of the states.” They defined that if study foreign policy its must involve “formulations and implementation” of policy (Neack, 2008).

Furthermore, Deborah Gerner embraced the interest of Hermann in states behaviour and the focus of Russett, Starr, and Kinsella’s on programs or guides. She defined foreign policy as “the intentions, statements, and actions of an actor – often, but not always, a state – directed toward the external world and the response of other actors to these intentions, statements and actions.” (Neack, 2008).

Robert J. Jackson explained there are three stan-

dard models of the foreign policy process. The first is the rational actor model which has six basic steps include distinguish a problem from other; review the values, goals, and objectives in the form of priority; compile the alternative tools to achieve the goals; estimate the costs and benefits would come from each alternative tools; compare the costs and benefits of the other alternatives tools; and selects the maximum advantages with the minimum risks. Second, the organisational process model, it constitutes the standardisation of responses and operations in order to reach their goals. Third, the government or bureaucratic model, it views that various government actors and organisations would produce different goals and its actions, but would happen in a kind of bargain process (Jackson, 2013).

We can conclude that the foreign policy making process could be separated each model in practice, but it might be as an embracement of two or three model as mentioned above. The actors would start from their basic interest towards a standardisation then come to more complex interconnectivity. In the form of interests, interconnectivity foreign policy could be compiled as prioritised and considered as large and long term advantages.

Foreign policy could be implemented globally by diplomacy as the oldest arts of states to pursue their objectives, goals and demands. Diplomacy is used to develop accommodative policies on the specific issues, negotiation in the cases, moderation in solving a problem, and or consider to avoid unsuccessful bargain with deploying a convince, influence, inducement, manipulation, and furthermore coercion by reducing aid, severe diplomatic ties, or punishment in their manner. In public diplomacy, it could employ propaganda, espionage and subversion. The second form of foreign policy implementation is economic strategies in the meaning of positive and negative such as economic cooperation, funds, other aids, sanctions, embargo or boycott. Third, military and coercive strategies, it can include deterrence, corpulence, and arms race (Jackson, 2013). There are also some diplomacy techniques such as conferences, meetings, visits,

alliances, containment, détente, until army deployment and the army coalition’s attacks.

In the nature in implementing the foreign policy, it will boost to the use of a diplomacy method rely on the origin and its effectiveness. G.R. Berridge mentioned that diplomacy is an important means to pursue foreign policies whereas in many state actors are still concentered in the ministry of foreign affairs. Diplomacy in the changing nature has very important functions include ceremonial, management, information and communication, international negotiation, the duty of protection and contribution to international order (Berridge, 2010).

Next discussion will focus on the nature of Turkey as the basis of its foreign policy making and implementing. There are some levels in foreign policy implementation as defined into the level of analysis, namely individual level, organisational level, state level and international level. The level analysis would be cover all of the level analysis but obviously show the state and international level of analysis. The research describes how Turkish relations with the European Union, its attempts to be a European Union member, and the latest situation as the response of European Union member for Turkish efforts. It is a descriptive research with qualitative analysis to references.

ANALYSES

The findings of this paper have revealed some information. Turkish foreign policy has always put an effort to the member to the European Union as its priority. However, the European Union members consider Turkey as a strategic partner as a liberal democracy state but at the same time as a challenge for European “Christian identity” if Turkey became the European Union member. Lastly, some barriers appear as some European populations questioning why Turkey want to be the EU member, how strong Turkey as secular and liberal democracy state due to the dominant Turkish Muslim population, Kurdish crisis and also Cyprus crisis.

TURKISH GEOPOLITICS

Hudson and Vore mentioned some of the inclusive factors were involved for decision makers consideration in foreign policy including culture, history, geography, economy, political institutions, ideology, demographics, and innumerable other factors in a societal context (Hudson and Vore: 1995).

Figure 1. Republic of Turkey and its Neighbours.



Source: google.com

Figure 2. The Ottoman Empire in 1683 and 1914.



Source: google.com

Turkey post-Ottoman is a secular state in a mixture between ASEAN and European cultures based on Islamic views. Historically and geographically Turkey was an Ottoman empire with large geopolitical reign. In that era Ottoman was a dominant world power which encompassed from Anatolia, Mecca and Medina as two Muslim holy cities, Jerusalem as holy city of 3 countries: Jews, Christians and Muslims, Syria and Iraq in the Middle East, Egypt, Libya, Tunis and Algiers in North Africa, also Constantine, Armenia,

Crimea, Bulgaria, Hungary and Greece as seen in figure 2.

The large geographical reign is also meant large in economic, political and ideological influence and large population movement in demographically. Turkey today has situated on the land of Anatolia, it means this country is powerless compared to Ottoman whose around 85 million citizens and Turkish people diaspora, especially in the former Ottoman areas. Now Turkey lives in the middle of Ottoman former states.

Today the Republic of Turkey is located in Eurasia, on the Anatolian peninsula and East Thrace. Turkey's location on the edge of Western Asia and South-eastern Europe gives it an important position as the gateway between the two continents. Turkey closest enclosures a total of eight countries, some in Europe and others in Asia: Bulgaria, Greece, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq, and Syria. The capital city of Turkey, Ankara which lies in the north-west of Turkey, is the second largest city, after Istanbul. Istanbul, which is located in the west, outspread along the Bosphorus, was the capital of Turkey before it became a republic (Maps of World).

Turkey is divided into 81 provinces, each headquartered in its capital, known as the central district. Most provinces are named after their central district. The most populous provinces in Turkey are Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, and Andana (Maps of World).

In geopolitical view, Turkey could play an important role among Asian, European, Eurasia, Middle East and Africa. The state might act a smart role in the various religions, ideologies and cultures among them. From the beginning of the building of the Republic of Turkey, the state follows the western European frame of values with the fulfilment of Turkish cultures. Turkish actions more close to western European countries that showed attempts to full membership. Cendrowicz reported that the efforts clearly since the membership Europe Council 1949, in North Atlantic Treaty Organization (NATO) on 18 February 1952, member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1961, has been an associate member on 1963, and the Organiza-

tion for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in 1973, and officially applied to be member of European Union (EU) on April 14, 1987 (Cendrowicz, 2009).

Turkey has also been an associate member of the Western European Union from 1992 to its end in 2011 and is a part of the "Western Europe" branch of the Western European and Others Group (WEOG) at the United Nations. Then Turkey signed a Customs Union agreement with the EU in 1995 and was officially recognised as a candidate for full membership on 12 December 1999, at the Helsinki summit of the European Council. Negotiations were started on 3 October 2005. The membership bid has become a major controversy of the ongoing enlargement of the European Union (Cendrowicz, 2009).

TURKISH FOREIGN POLICY

In the first Turkish leadership as Attaturk led to found the strong basic of Turkish foreign policy. After the secular revolution, Attaturk led to plan a nice future world in peace. In his secular vision, he brought Turkey into a democratic state and provides a conducive situation. He stated a 'Peace at Home and Peace in the World' as one of the bases of Turkish foreign policy and this has become the important thing to Turkish position in the world (Ministry of Foreign Affairs the Republic of Turkey).

The concept of 'Peace at Home and Peace In the World' implemented in the field of foreign affairs as proofed in the matter of settlement in the form of antagonism towards Western states, and enlarged any possible cooperation with these countries and then strengthen in the future. Another example was in the case of Hatay whereas successfully avoided a gunshot in the integrations the area to the Turkey Nationality, the enhancement of nice Turkish-Greek relations and the close comrade and cooperation spread throughout the Balkans. Also in the case of the Mosul affair, the League of Nations' arbitration was accepted instead of unilateral acts although Mosul was not entered as part of Turkey this clearly portrayed an honour to the international law and peace. Thus, Turkey became the

only country to be invited to the League of Nations without submitting an application and it joined the organisation in 1932 (the Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs).

In the further effort to realise the concept of peace, in Ataturk tried to maintain the Turkish foreign policy with tight larger cooperation with several agreements. On 1932 when the Nazi Party hold the ruler power in Germany and Italy made efforts to expand to the Mediterranean and the Balkans, then European states were engaged in an arms race. Ataturk initiated a regional cooperation efforts to prevent the threat to the peace despite the next story was told the World War II. On 9 February 1934, Turkey, Greece, Yugoslavia and Romania signed the Balkan Entente, and on 8 July 1934, Turkey, Iran, Iraq and Afghanistan signed the Sadabad Pact. These are important Turkish efforts actively to maintain a peace and provide security with conducted large cooperation both in the east and the west since years ago when other states passion to war and Turkey keep in a neutral position (The Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs).

Ilter Turan showed three stages of Turkish foreign policy since the founding of the Republic of Turkey. He told the general stages of Turkish foreign policies including stages of neutrality and low level of involvement (1923-1947), ally loyalty with NATO (1947-1991), and autonomous ally (1992-present). Some internal and external factors resulted from these stages and derived Turkey to latest position (Turan, 2011).

In the first stage, neutrality, from the beginning new Turkish state need to consolidate their regime and build up an economy by avoiding the World War II and extensive international engagements. Strengthen its own sovereignty and cover the Turkish Straits and Mosul-Kirkuk crisis, on the peaceful ways. The Second stage Turkey's leaders would have to drive into a new stage of foreign policy in response toward Soviets expression to coop Turkish Straits and its eastern borders in the end of the World War II by linkage with the Western camp, eventually came into joining NATO in 1952. The next extensive of Turkish foreign affairs shaped by its security and economic dependence

on the United States and membership in NATO, and also considerations of Cyprus status. In the period especially in 1980 Turkey more focused to strengthen the value of Lira, Turkish expansion more visible to Russia, Middle East, in forming a "trading state". Furthermore conducted a new tie in trade affairs with the United States and European and Turkish historical relations with the Balkans, the Middle East and North Africa, Iran, the Central Asian republics, China, and Latin America. Then in 1991, post the Cold War and the collapse of the Soviet Union delivered Turkey to the third stage of foreign policy with the unimpeded space for policy making. Turkish attempts were fruitful, today the country became the sixteenth-largest economy in the world and the sixth largest in Europe. The Third Stage, Turkish foreign policy can be divided into two sub-periods 1991-2007 and 2007-present. In the first sub-period (1991-2007) the ruling Justice and Development Party (AKP) derived Turkish foreign policy more prioritised strongly western orientation in more autonomy and as the results of the Turkey candidacy declaration in 1999 and open accession negotiations in 2005. Also expanded its geographical scope such as enforcing a no-fly zone in Northern Iraq, participated in peace-keeping efforts in places like Bosnia, and supported to fight against separatism and terrorism with sending troops to Afghanistan after the terrorist attacks of September 11, 2001. Only a little Turkey's refusal to allow American forces through its territory toward Iraq during the invasion by the U.S. and coalition in 2003. Actually, the government had proposed a plan to U.S. forces through its territory but failed when several key AKP members denied to support it then resulted a little gap between Turkey and U.S until Barack Obama came into White House the relations came into normality. The haunting issue is around the Kurdish separatism where was disturbed Turkish performance in the Middle East (Turan, 2011).

TURKEY-EU RELATION

The most principal Turkish foreign policy during the new Turkish is the membership in European

Union (EU). These are some of Turkish explicit efforts to come into EU membership. On September 1959 The European Economic Community (EEC) accepted Turkey's application for associate membership, September 1963 the Ankara Agreement was signed to Custom Union and finally to full EEC membership, December 1968 negotiations on the Additional Protocol started, October 1971 the Additional Protocol was approved in the Turkish Grand National Assembly with 149 votes for and 69 against, September 1986 Turkey-EEC Association Council met, April 1987 Turkey applied for full EEC membership, October 1993 Turkey-EU Association Council met and decided that the technical preparations had been completed and Turkey had fulfilled the greater part of its obligations, March 1995 Turkey-EU Association Council decision on the customs union, December 1999 EU Helsinki Council decision on the candidate status of Turkey, December 2000 The EU Council of Ministers decision on the draft framework regulation on assistance to Turkey in the framework of the pre-accession strategy, June 2001 the 40th period meeting of the Turkey-EU Partnership Council was occurred and the 47th meeting of the commission of the Turkey-EU Joint Parliament Committee was occurred in Brussels, December 2001 the European Council was met in Leaken of Belgium. At the end of the summit, it was declared that Turkey had approached to the participation negotiations and Turkey would participate in the convention studies related to the future of the EU, January 2002 the 110th Turkey-EU Association Committee meeting was occurred in Brussels, April 2003 a new European Union Commission was established in the Turkish Parliament in order to negotiate and observe the cohesion of the rules to the EU legislation, April 2004 the referendum was completed in Cyprus the 69,4% of Turkish people in Cyprus accepted but the 75,85% of Greek people in Cyprus refused the Annan Plan, June 2005 the heads of governments and states of the EU emphasized on the full application of the decisions referring the decisions of the priority summit and there were no direct statement about Turkey in the final, September

2005 the EU' declaration said that Turkey must recognise Cyprus in the course of its membership talks and give access to its ports and airports to Cypriot ships and planes, January 2006 the Council of the EU adopted a decision on the principles, priorities and conditions contained in the accession partnership with Turkey on 17 January 2006 with No. 15671/05, December 2006 EU member states freeze eight negotiating chapters because Turkey refuses to open its harbours and ports to Greek Cypriot craft, March 2007 the EU and Turkey begin talks on "enterprise and industry policy" the second chapter Ankara has opened (Kapucu & Palabiyik, 2008).

Müftüler-Baç mentioned that in early 1959 Turkish foreign policy targeted objectives to become a member of the European Community, two years after the Rome Treaty was signed 1957. The earnest has begun 1963 with involvement in an Association Agreement, 1995 signed a Customs Union Agreement. The efforts in 1999 has resulted Turkish position as an official candidate for EU accession and began its accession negotiations in 2005 (Müftüler-Baç, 2015).

Nevertheless some lucid obstacles intercept the Turkish efforts to be an EU member. Hill and Smith pointed some of the most suspension are because Turkey has not completed all the requested demand for normalisation with all EU member states including Cyprus, and allow Cypriot vessels to enter its ports. Moreover there are some opposite argument to Turkish membership came from Austria, France and Germany, as the alternative these states proposed a 'privileged partnership' for Turkey (Hill and Smith, 2011).

Other important factor is the assessment of Turkish unimplemented on Cyprus issue which pulled the EU at the end of 2006 to suspend negotiations for 8 chapters of the Additional Protocol on the Customs Union to Cyprus. Thus, France and Cyprus vetoed the possibility for a vacancy for Turkey to converge in the same point of interest with EU members. These problems led toward the stagnation of Turkish accessible into EU. Other obstacle is that EU members questioned of Turkish commitment in ruling liberal

democracy as EU norm (Müftüler-Baç, 2015).

Ahmed Dovutoglu stated that Turkey has three methodological and five operational foreign policies. Methodologically formulate as the first principle its “visionary” approach the “crisis-oriented” attitude during Cold War period. Second principle is based on a “consistent and systematic” framework. Third, based on the spread of Turkish soft power. To implement that three methodologies Turkey has five practical principles. First, the balance between security and democracy. It means that it has to provide security without sacrifice freedom and human rights. Second, the zero problems toward neighbours through close cooperation such as with Armenia, Iraq, Syria, Greece and Russia. Then also following in the similar scheme with Bulgaria, Azerbaijan and Ukraine. Moreover Turkey had abolished visa each other with Syria, Tajikistan, Albania, Lebanon, Jordan, Libya and Russia. Third, operate proactive and pre-emptive peace diplomacy, for examples peace regional policy and efforts to make reconciliation between Sunni-Shiite in Iraq, Lebanon-Palestine, Serbia-Bosnia, recover of Darfur and Somalia. Forth, a multi-dimensional foreign policy whereas taking in a complementary position not in competition such as in membership in NATO, relations with Russia, partnership with Eurasia and U.S. and the EU membership proposal. Fifth, Turkey play a “rhythmic diplomacy” evidenced by active and involvement in all international affairs and organizations more over took strategic places such as in U.N. Security Council and South-East European Cooperation Process in soft power and a universal language (Davutođlu, 2010).

MEMBERSHIP ISSUE IN THE EU

The membership in EU is the first advance target for Turkish new vision. Ahmet Davutođlu remarked concerning Turkish “2023 vision” as a necessity. The new Turkish era would set up into strong democracy base on a solid circumstance between society and government bond as the principal capital for worldly activity. Turkey new vision including first, achieve full EU membership and become an influential EU

member state in 2023. Second, contending a regional security and economic cooperation. Third, take part as an influential actor in conflict resolution within a region. Fourth, Turkey would be a significant factor in the international organisations arena and become top 10 largest world economies (Davutođlu, 2010).

Nevertheless, the membership in EU is an old issue but it still as central point for next Turkish foreign policy. We can imagine how big of Turkish efforts for this achievement. Since the first European states were always the first priority for Turkish foreign policy. Turkish involvement in Western community was very large as some notes in the League of Nations 1932, UN 1945, OECD 1948, WTO 1951, NATO 1952, WCO 1952, joined the EEC 1959, EC since 1964, and finally submitted formal application for European Union on April 14 1987 (Kapucu & Palabiyik, 2008).

Turkey has requested a set of conditions for its submission process based on the criteria was given through Copenhagen Meeting 2002 include basic standards of democracy, human rights and respect for minorities. In the European Council, 2004 was decided that Turkey had fulfilled the Copenhagen criteria (Kapucu & Palabiyik, 2008). Then 2005 Turkey must also fulfil 35 criteria as the following preliminary indicative list of chapter headings (Note: This list in no way prejudices the decisions to be taken at an appropriate stage in the negotiations on the order in which the subjects will be dealt with). 1. Free movement of goods; 2. Freedom of movement for workers; 3. Rights of establishment and freedom to provide services; 4. Free movement of capital; 5. Public procurement; 6. Company law; 7. Intellectual property law; 8. Competition policy; 9. Financial services; 10. Information society and media; 11. Agriculture and rural development; 12. Food safety, veterinary and phytosanitary policy; 13. Fisheries; 14. Transport policy; 15. Energy; 16. Taxation; 17. Economic and monetary policy; 18. Statistics; 19. Social policy and employment (This chapter includes also anti-discrimination and equal opportunities for women and men); 20. Enterprise and industrial policy; 21. Trans-European networks; 22. Regional

policy and coordination of structural instruments; 23. Judiciary and fundamental rights; 24. Justice, freedom and security; 25. Science and research; 26. Education and culture; 27. Environment; 28. Consumer and health protection; 29. Customs union; 30. External relations; 31. Foreign, security and defence policy; 32. Financial control; 33. Financial and budgetary provisions; 34. Institutions; 35. Other issues (Principles Governing the Negotiations, 2005).

In 2007 European Commission announced Turkish progress to come to a final stage of the membership process. The Commission reported there some improvement in Turkish fulfilment to the EU membership requirements. The improvements include bilateral trade EU-Turkey which reach •85 billion in 2006, public administration, local ownership and participation in municipality management, enhanced the quality of regulations, established one-stop offices service within province and districts and legislative reform of the public administration and civil service system. On the other hand, the Commission also pointed some no progress in the area of more financial transfer to local administrations, transparency and accountability mechanisms and increasing financial resources of local government (Kapucu & Palabiyik, 2008).

In the field of individual freedom and human rights, Turkey has implemented it in the framework of a secular state. It raises a thought that Turkey has seen more like needs EU but vice versa EU did not need it. Actually, in the world community, every member would need each other, especially in the global era. The membership of Turkey into EU is more public opinion views and political leaders mood rather than economically or administratively. Public opinions might be based on the historical experience or thought that bring into political considerations or moods. Both have close relations in the public affairs in order Turkey-EU.

Cendrowicz mentioned two factors were influenced the Turkey position in EU. Firstly, a Europeans public opinion drop to support Turkey for membership fell down from more than 70% in 2004 to 42% 2008

and then only 31% of Europeans support Turkish membership in EU. That opinion proved in June (2009) came into European Parliament elections for the Turkey EU candidacy whereas the members pledging to veto. Second, the political mood might be carried on from the current economic downturn then making the E.U. averse to take on another country struggling under recession (Cendrowicz, 2009).

The Turkey closeness with EU and its admission requirements have influenced to Turkish political norms. Muftuler-Baç asserted although Turkey proves a high level of commitment to EU political norms and criteria until 2008 but it has been disapproved from EU membership objective. One of the most important reasons is that because of Turkey was convinced did not adjust to Cyprus occasions. France and Cyprus had vetoed to continue assessing next chapters of Turkish fulfilment ability to EU criteria. This veto led to pause both EU further enlargement and Turkey's accession into EU membership. In addition EU questions of Turkish commitment to the EU norms of liberal democracy. As the consequence of EU broke down the accession negotiation, and Turkey would rather away from Europe and may would bring the impact of Turkish democratic consolidation (Muftuler-Baç, 2015).

As cite from former European Commissioner Frits Bolkestein said: "Turkey is too big, too poor, and too different." These questioned answered by Modebadze & Sayin in their article. First, Turkey is too big (Its geographical size approximately 780,580 km with average populations 80 million in 2016). This current posture of Turkey membership it could strengthen Europe military power significantly. Compare to other European states Turkey is the second largest army. Also, Turkey has plenty young population whom could give benefit to maintain and reinforce for the European security (Modebadze & Sayin, 2015). It means that Turkey has large potential capital for economic and security because the population mostly well educated.

Second, there were widespread of views that Turkey is too poor and will cost the EU too much base on

reason of Turkish economic weakness and could be a heavy loading for the European Union. If considering Turkish Gross Domestic Product (GDP) of \$786 billion, "Turkey has become the 18th most powerful economy in the world." (The World Bank 2014). Therefore, it cannot be presumed as the "sick man of Europe" any more. Turkey has rapid economic growth figure pass the last decades when European states are in economic collapse. The Turkish economic growth in 2010 9.2%, and 2011 8.5% as fastest state in economic growth, this prove that this state could maintain their necessity (Modebadze & Sayin, 2015).

Third, Turkey is too different. In some European countries spreading knowledge on Turkey sound rather limited and bring to misperceptions and negative understanding. A Sociological research of European citizens described that only around 30% of European citizens' agreed for welcoming Turkey into the European Union. The other opinions are opposed to Turkish membership into the European Union because of their culture gap among them. Much European doubted that Turkey would follow the identity of Europeans. Their outlook base on the traditional view rather than modernity, that "they lack a Christian identity". There are still in thought that Europe is a club of Christian nations, and the other hand they recognised Turkey as an Islamic country. Referring to the official statistics that Turkish population is dominantly 99% Muslim, "the majority of whom are Sunni." The Turkish Muslim nature is one of the arguments to oppose for Turkish membership into the European Union. There are also worried Turkish closeness the Middle East conflicts, it might be accommodated religious extremism and fundamentalism in the European Union (Modebadze & Sayin, 2015).

TURKEY-U.S. RELATION AND ITS SUPPORT FOR TURKISH MEMBERSHIP IN EU

The relationship between Turkey-U.S. can be seen at several cases in a glance. Since the Ottoman empire, Turkey had a relations with U.S. started with Mutual Recognition 1830 when the first formal relations

James Biddle, David Offley and Charles Rhind were sent as diplomatic envoys to the Ottoman Empire (Turkey) to deal in a treaty of navigation and commerce. Then on September 13, 1831 improved to a term of Diplomatic Relations when the American Legation was established at Constantinople (Istanbul) and sent David Porter as U.S. Charges d'Affaires. In June 18, 1906 the status has elevate to be the Embassy of American and in October 1906 John G. A. Leishman has accepted credentials as the Ambassador. The diplomatic hampered when February 17, 1917 U.S. declared war toward Germany and furthermore February 17, 1927 the diplomatic relations re-established, with an exchange of notes in Angora, Turkey (Historian).

Turkey-U.S. relations in the post-World period emerged since the Second Cairo Conference in December 1943 and Turkey's joined into the U.S. allies in February 1945, and as a present Turkey was granted as a charter member of the United Nations. The adversity of facing a communist rebellion led by Soviet Union in the Turkish Straits encouraged the United States to proclaim the Truman Doctrine in 1947. The doctrine notified that American want Turkish and Greece security, and followed by large U.S. military and economic support.

It attested in the clandestine operational army, denoted the "Counter-Guerrilla". Futhermore, 1952 Turkey became the North Atlantic Treaty Organization (NATO) after finishing in the Korean War in the name of United Nations forces (Historian).

The Turkey-U.S. relationships run into aloofness when the United States deploy their armies in the Iraq War (to strike down Saddam Hussein) in 2003. In Turkish views, the U.S. strikes would advance for the Kurdistan Workers Party (PKK) in northern Iraq. Furthermore, Turkey worries that the violence in Iraq would give a space for Kurds movement to gain their independence cover Turkey, Iraq, and other Middle Eastern countries territory (Historian).

If we refer to Zanotti there are several reasons of Turkey-U.S. relations. First, The Turkey-U.S. alliance has a long story based on the defense ligament in

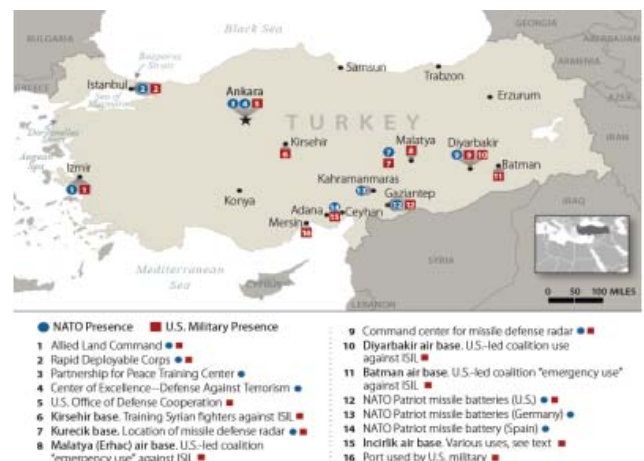
frame of bilateral relations and as NATO member, and also included Turkish involvement in actions in the Balkans, Middle East and Afghanistan after the Cold War. Turkish strategic territory to several global conflicts provide easiness and effectiveness to deploy U.S. and NATO arms, cargo, and personnel valuable to the targets. Turkey also base on the Montreux Convention of 1936 has a controls access to and from the Black Sea. Turkey provided its territory for the U.S. and NATO to deploy their warning missile defence radar and the transformation earlier of a NATO air command unit in Izmir gave Turkey as strategic importance alliance state. The presence of U.S. largest military which generally hosts approximately 1,500 U.S. personnel (and also houses approximately 3,500 Turkish contractors) is in Incirlik (pronounced in-jur-lick) Turkey as the air base near the southern city of Adana. When the Cold War ended, U.S. and NATO have employed Incirlik as the base operations in Iraq, Syria, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, and Afghanistan. According to the Bulletin of the Atomic Scientists reported that place as the home of vaults which holding approximately 60-70 U.S tactical, aircraft-deliverable B61 nuclear gravity bombs under NATO auspices in Incirlik. In order to the authority, Turkey holds the right to maintain including to cancel U.S. entrance to Incirlik with three days' edict (Zanotti, 2015). U.S. presence as seen in figure 3.

Second, in 2003 Turkish parliamentary decided not to permit U.S. forces to use their territory especially northern front to confront with Iraq. The decision was impacted to U.S.-Turkey relations crucially and the United States seem to not strongholds as primarily on past legacies of cooperation and span the relations with the Turkish military anymore (Zanotti, 2015).

Third, Turkey still carries on the demand on the advance of U.S. military equipment (include fighter aircraft and helicopters), and Turkish defence industry came into partnership with the United States (such as on the F-35 Joint Strike Fighter). The growth of Turkish defence industry visible to improve their larger

engagement within arms trade transactions or joint military training with non-NATO members, such as China, Russia, Pakistan, and South Korea. This showed that Turkey is attracted to maximise their military technology, diversify its defence relationships, and excessive dependence on the United States. As the result of the target, Turkey has reached increasing of its arms exports and intend to reach at least \$2 billion in military measures filed in 2016 (Zanotti, 2015).

Figure 3. U.S. and NATO Military Presence in Turkey



Source: (Zanotti, 2015).

Forth, after joining a customs union with the EU, Turkish involvement has requested in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) whereas the United States and the EU doing negotiate to the issue. Latest, considering the complexity negotiations of the T-TIP, and furthermore complicate with other additional trading partners. In addition, Penny Pritzker Secretary of Commerce concluded some specific trade policy "obstacles" for Turkey to involve in T-TIP negotiations during October 2014. On that reason, one expert has advised for Turkey to examine other choices to improve trade options with the United States and or EU rather than involving in T-TIP negotiation. In May 2013 the United States and Turkey unanimous to shape a High Level Committee (HLC) (to assess such potential impacts and seek new ways to promote bilateral trade and investment, and

have held several working-level consultations under the HLC) has offered that Turkey have to attend on the potential matters in T-TIP negotiations to formulate the trade relations among them (Zanotti, 2015).

Fifth, in the end of July 2015, Turkish officials declared that the United States and U.S. coalition would allow to employ Turkish territory including its airspace in order to defeat the Islamic State organisation for anti-IS airstrikes in Syria and Iraq to give straightforward for managing the logistical burdens of coalition operations. The Obama Administration and Turkish officials have agreed to the arrangements as part of a wider plan for U.S.-Turkey coordination to beat out the Islamic State. Previously Turkish government constituted a limitation as the base of action to control flights for Turkey and coalition operations, its consideration give a meaning of maintaining on a "safe zone" in Syria and look forward a support from U.S. to act more aggressive to cast out the Iranian as the back of ruling Syrian regime (Zanotti, 2015).

Since then Turkey-United States relations led to an increasing proximity than the previous time. The current Turkish position in economics development and foreign affairs activity stable the relationship even though they have some differences positions such as in the case of Iraq War 2003, U.S. relationship with Iran and various Kurdish groups could bring the aloofness for bilateral relations.

The Turkey-U.S. close relations gave the benefit for Turkish to gain the U.S. supports in order to Turkish membership in EU. At least U.S. had given attempts to support on the issue. Sarayi mentioned that Washington gave supported for Ankara on the issue of Turkish membership in the EU was became part of the agenda of U.S.-Turkey bilateral relations in the late 1980s. Since the time the agenda became the important pathway for the next Turkey-U.S. relations era. The American officials started to attract for intensive lobbying attempts amidst of U.S. key allies in Europe to open for Turkish membership in EU. Especially, during the 1990s the U.S. was involved in three key developments in EU-Turkey relations (Sayari, 2015).

Sarayi mentioned the U.S. efforts for Turkish membership in EU including on three points. First, in December 1995 Washington clearly involved to in negotiations between Brussels and Ankara eventually has driven to a Customs Union Agreement signature. At the beginning the European Parliament did not passion to take Turkey into Customs Union their mood recognised by many observers then the condition changed by installment until the European Parliament agreed on the agreement. American officials supported and actively approached the members of European Parliament to vote the agreement between the EU and Turkey in the Parliament. Stuart Eisenstadt the chief U.S. Trade Negotiator led the U.S. lobbying attempt in Strasbourg. Obviously, Washington's campaign performed an important role in conditioning to the Turkish inclination (Sayari, 2015).

Second, in December 1999 the U.S. appeared an identic important role in the outcome of the EU Council's Helsinki summit, which formally confessed Turkey's to be EU full membership candidacy. Washington showed clear disagreement to the EU's decision in Luxembourg two years earlier (1997), whereas exempted Turkey from the formal list of EU candidacy for full membership. In 1999, the Clinton administration utilised major pressure through both formal and informal linkages, comprising telephone calls by President Clinton to European leaders, for the turned over decision. Nevertheless new transformations, covering the victory of the Social Democrats went into power in Germany and the end of Greece's opposition for Turkish membership in EU were also very significant factors, but other significant factor also came from high ranking Clinton administration officials rigorous accentuations to their most prominent European counterparts in restoring of the EU's policy on Turkish issue. In the next occasion President Clinton addressed official statement in the EU summit meeting greeted the EU's decision "with pleasure" and emphasized that the U.S. has "long supported Turkey's bid to join the EU in 2003 the United States and Turkey's membership in the Euro-

pean Union the belief that this would have lasting benefits not only for Turkey, but also for all EU members and the United States.” (Sayari, 2015).

Third, foregoing to December 12, 2002 on the EU summit meeting in Copenhagen, 2002, the U.S. once again launched a principal campaign for Turkish advances when come into the EU membership. When President Bush met Tayyip Erdoğan the leader of the Justice and Development Party, in December 11 at the White House, he emphasised Washington’s support for Turkey membership in EU and proclaimed that the U.S. “stands side by side with Ankara in its bid to join the European Union.” Bush also holds several phone calls to European leaders while Colin Powell the U.S. Secretary of State boosted his European counterparts to set a date for new Turkish accession for EU membership. Other proof in December 2, U.S. Deputy Secretary of State Paul Wolfowitz for Turkish membership in EU when delivering his speech at the International Institute for Strategic Studies in London, he asserted: “The decision on E.U members is, of course, Europe’s to malfc. However, the history suggests that the European Union welcomes to Turkey will be even stronger, and safer and more richly diverse than today. The alternative, exclusionary choice is surely unthinkable.” Different with 1995 and 1999, Washington’s lobbying campaign in 2002 did not closed to set up on the main objectives of Turkish membership in EU, whereas reach to a specific date for Turkish accession consultations between Ankara and Brussels (Sayari, 2015).

CHANCES TO BE A MEMBER OF THE EUROPEAN UNION

Referring to the discussion above, we can conclude that if Turkey eager to be an EU member then Turkey has to answer several surrounding questions concerning Cyprus crisis, liberal democracy identity, and Kurdish crisis as the priority among other questions. This was the character of foreign affairs, in the opposite situation each actors have to consider each interests even though could be reached in matters of interests its might “some gain and some loss”. As Turkey put on focused that EU as the first foreign

policy priority, the efforts would be effective with rises economic cooperation and mutual understanding civilization. The consequences would rise Turkey to rid from Kurdish crisis as last miscomprehension and internally also would ready to admit internal “Islamic clash” and North Cyprus might be loss from its hand.

CONCLUSION

Turkey always showed its eager to be the European Union member. Internally Turkey has built its states as secular and liberal democracy state as West performance. Turkish state administration also fulfilled the requirement of European Union conditions. Externally Turkish foreign policy set as prioritized to enter the membership of European Union and maintained the close relations with European Union members. There was appeared of U.S. roles as support for Turkish membership in the Union whereas played important matter. Turkey has opened their territory for NATO and U.S. as its showed serious friendship and more close relations with the West. In the case of Cyprus Turkey has fixed relations with Greece and fulfilling non-discrimination condition in Cyprus Island.

Long term of Turkish’s efforts gained the development in its attempts to be the European Union member but its unsuccessful story like Bulgaria or Croatia which more easy to gain their membership in EU. It seems that Turkey must show more earnest to act to enter the Union internally and externally and answer the questions concerning Cyprus and Kurdish crisis and as democratic state.

REFERENCES

BOOKS

- Berridge, G.R.. 2010. *Diplomacy-Theory and Practice*. New York: Palgrave.
- Cendrowicz, Leo. 2009. *Fifty Years On, Turkey Still Pines to Become European*. (Online), (<http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1920882,00.html>).
- Davutoglu, Ahmet. 2010. *Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy*. (Online), (<http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/>).
- Hill and Smith. 2011. *International Relations and the European Union*. New York: Oxford University press.
- Hudson, M., Valerie, Vore, S., Christopher. 1995. *Foreign Policy*

- Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow*. Mershon International Studies Review (online), Volume 39, Issue 2, October 1995, (<http://www.jstor.org>).
- _____. *A Guide to The United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, Since 1776: Turkey*. (Online), (<https://history.state.gov/countries/turkey>).
- _____. *Turkish Foreign Policy During Ataturk's Era*. (online), (<http://www.mfa.gov.tr/turkish-foreign-policy-during-aturks-era.en.mfa>)
- Jackson, J., Robert. 2013. *Global Politics in the 21st Century*. New York: Cambridge University Press.
- Kapucu, Naim, Palabiyik, Hamit. 2008. *Turkish Public Administration from Tradition to the Modern Age*. Ankara: International Strategic Research Organization (ISRO).
- Modebadze, Valeri, Sayin, Mehmet, Fatih. 2015. *Why Turkey Should Join the European Union: Arguments In Favor of Turkish Membership*. The Institute for Research and European Studies: Journal of Liberty and International Affairs (online), Vol. 1, No. 2. (http://e-jlia.com/papers/v2_8.pdf.)
- Müftüler-Bağ, Meltem. (n.d.). *Turkish Foreign Policy in Turbulent Times*. (Online), (<http://www.E-ir.info/2015/01/25/turkish-foreign-policy-in-turbulent-times/>).
- Neack, Laura. 2008. *The New Foreign Policy Power Seeking in a Globalized Era*. The U.S.A: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Sayari, Sabri. (n.d.). *The United States and Turkey's Membership in The European Union*. (Online), (<http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/674/8589.pdf>)
- Turan, Ilter. 2011. *Turkish Foreign Policy: Interplay Between the Domestic and External*. Carnegie Endowment for International Peace. (Online), (<http://carnegieendowment.org/2011/09/21/turkish-foreign-policy-interplay-between-domestic-and-external#>).
- Zanotti, Jim. 2015. *Turkey: Background and U.S. Relations*. Congressional Research Service (online). (www.crs.gov).

Democracy and the Armed Forces: Lessons from the Coups of Egypt in 2013 and Turkey in 2016

Muhamad Rofiq

Faculty of Politics and Social Science
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
West Ringroad, Yogyakarta 55183, Indonesia
muhammadrofiq@umy.ac.id

Submitted: 01 September 2016, Accepted: 2 December 2016

Abstrak

Tulisan ini menganalisa secara komparatif kudeta militer yang terjadi di Mesir tahun 2013 dan Turki tahun 2016. Dua pertanyaan yang didiskusikan adalah: pertama, terkait dengan faktor yang mendorong terjadinya dua kudeta tersebut, dan kedua, alasan mengapa dua fenomena tersebut berbeda, kudeta berhasil di Mesir dan gagal di Turki. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, tulisan ini melihat sejumlah aspek yang terkait dengan kondisi sosial dan kekacauan politik menjelang kudeta, mulai dari krisis ekonomi, kebijakan non-demokratis, sikap masyarakat sipil sampai karakteristik angkatan bersenjata kedua negara. Dua kudeta militer yang terjadi ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di dunia muslim sesungguhnya sangat ditentukan oleh aktor politik, di mana peran terpenting dimainkan oleh angkatan bersenjata, selain itu juga dibentuk oleh doktrin Islam sendiri.

Kata kunci: Kudeta Militer, Arab Spring, Timur Tengah, Angkatan Bersenjata, Demokrasi

Abstract

This article seeks to comparatively examine the military coups happening both in Egypt in 2013 and Turkey in 2016. Two problems discussed in this paper are: firstly, concerning the trigger causes behind the two coups and, secondly, the reason why those phenomena are different, in which the coup was successful in Egypt and failed in Turkey. In order to answer these questions, this paper reviews some aspects related to social condition and the political turmoil before the coups exploded, ranging from the economic crisis, the autocratic policies, the stance of civil society, until the nature of the armed forces itself. The two military coups indicate that the democratization process in the Moslem world is highly determined by the political actors, in which the most important parts of them is the armed forces, in addition, to be shaped by the doctrine of Islam itself.

Keywords: Military Coup, Arab Spring, Military Forces, Middle East, Democracy

INTRODUCTION

Some Western scholars believe that Islam and democracy are incompatible in essence (Lewis, 2010; Fish, 2002). It is suggested that the principles of democracy and the basic nature of Islamic polity are extremely different. In response to this, many other scholars formulate feedback theory, saying that it is not the doctrine of Islam that leads Muslim states become undemocratic. Bayat for example, maintains that it is the intellectual belief and political capacity of the political actors that account for the absence of democracy in a Muslim country, instead of doctrine of

Islam itself (Bayat, 2007: 17). Likewise, Ahmed Kuru proposes another notion concerning the reason behind the absence of democracy. He believes in geographic and geologic determinism, saying that the abundance of natural resources, regardless of whether it is in a Muslim or non-Muslim country, creates the undemocratic system of a country. This lavishness of wealth, he argues, establishes patron-client relation between the ruled and the ruler (Kuru, 2014). This theory implies, if the economy of a state relies on taxation, rather than natural resources, then democ-

racy will exist strongly. Lastly, Esposito contends that like all other religions, Islam has a full spectrum of potential symbols and concepts for democracy. However, he argues, each Muslim-majority country has a distinctive experience in achieving a democratic system that cannot be assessed by the western definition of democracy (Esposito, 2016). Therefore, the absence of democracy in some Muslim countries does not necessarily mean that Islam contradicts democracy.

Recently, we witness the rise of hope for democracy in Muslim countries, especially in the Middle East since the Arab Spring which started in 2011 and has toppled the autocrat regimes in the region. Ranging from Tunisia, followed by Egypt, Libya, Yemen and Syria, the wave of revolution gave a new optimism for political change in those Arab countries amid crisis. After six years, the achievement of each revolution differs from one country to another, but mostly was still beyond expectation. Accordingly, Libya and Yemen suffered from civil wars, despite the fact that Qadafi and Saleh had been overthrown. Syria became the field of proxy war between the two blocs of Muslim country and the dictator, Assad who remains in his throne. Only the experience of Tunisia demonstrated the positive accomplishments of democracy and thus became the model for other countries in Middle East as well as North Africa.

In the case of Egypt, the revolution was hijacked by the military generals. At the beginning, given its position as the most powerful and influential Arab country at the time, there existed a greater expectation for the change. In the early 2011, when the protestors who gathered from various backgrounds and successfully ousted Mubarak – the tyrannical ruler for 30 years—, many believed that the future of Egypt would be brighter. This was subsequently and further rationalized by the achievement, whereby for the first time in the history of Egypt, a fair presidential election was magnificently held. However, what happened in reality was the opposite of the hope. In fact, political and social culture of Egypt was not ready enough to embrace the true democratic system. Finally, in the

name of stabilizing the political situation in Egypt, military generals raised a coup which ousted the first democratically elected president in the country. Consequently, the result of the military coup marked the turning point of Egypt's immature democracy and heralded a return to autocrat regime.

After the experience of failed democracy in Egypt along with in other Middle East countries during the Arab Spring, Turkey then became the next hope for achieving democratic political change. Many analysts believe that Turkey has succeeded in transforming not only their economic condition, but also the face of Islamism (Dagi, 2013). It is no doubt that the person behind the rising optimism of democratization in Turkey was the former prime minister and now the current president, Recep Tayib Erdogan. There are at least two strong reasons why this figure is worthy of respect and why he gained support of the Turks several times in the elections. Firstly, Erdogan was the first strong leader in Turkey who could weaken the role and influence of the military. It seems that the Turkey population has no more faith in the armed forces. The reason being that for almost a century the military had led the country within a secular system and the fate of Turkey remained unfortunate. Secondly, Erdogan has productively improved the economy of Turkey. Before the Erdogan presidency, Turkey was a weak state. But because of his strong commitment to be part of the European Union (EU), coupled with the strong and effective leadership, Turkey then became one of G-20 (Patton, 2006). However, after three periods of leadership, Erdogan began to show distinct authoritarian tendencies. Thus, this situation prompted the military to undertake the coup which dramatically occurred in the last 15th July. Though the attempted coup failed, many still believe that the democratization of Turkey is under threat and may be experiencing a setback.

In the wake of reflections about the failed military coup in Turkey, there occur some writings that intended to find similarities in its failure with that of failed coup in Egypt. While some emphasize its similarities over the actual differences, other does the opposite (Shapiro, 2016; Ashour, 2016). Similarly,

this article will compare the military coups that occurred in both Egypt and Turkey, but in a more depth analysis. The examination of these two coup d'états is justified by the following reasons. Firstly, because they are remarkable events in the history of democratization in the Muslim world. Although we will never refer to the thesis of Huntington about discordancy between democracy and Islam, these two experiences showed that the process of becoming a democratic country is still a faraway off and will take long time to achieve. In addition, by examining the two coups, we may be able to understand the map and the future of democracy in the region. Secondly, this writing will aim to propose an answer to the question "why the coup, as the serious constraint of democracy, happened recurrently in the Muslim world".

Given the considerations as above this paper will answer these two following questions: Firstly, what were the causes for the coup of Egypt and Turkey? Secondly, why was the military coup successful in Egypt while failed in Turkey? In order to answer these proposed questions, this paper will reveal similarities and differences between the military coups of both Egypt and Turkey and examined them comparatively.

ANALYSES

THE ECONOMIC SITUATION

Besides the different endings of both coups, in fact there are several other points that distinguish the military coup of Egypt in relation to that of Turkey. The most important point to consider before any other factors, is the triggering factor of the coups, integrated within an evaluation and comparison of the economic achievements of both ruling regimes. Morsi, due to his short government, failed to overcome the economic crisis that Egypt had been suffering since the fall of Mubarak. The New York Times even named the situation as the worst economic crisis since 1930s (Kingsley, 2016). The crisis was marked by the presence of the rising unemployment of youth, a drastic fall in both foreign investment and revenues from tourism, followed by a 60% drop in foreign exchange

reserves, 3% drop in growth, and a rapid devaluation of the Egyptian pound (Kingsley, 2016). The unemployment figures in the time of the Morsi Presidency reached 850,000 people (Singh, 2013). Moreover, at the same time, the cost of living soared tremendously and resulted in ordinary Egyptians living under unbearable pressure. In general terms, during the Morsi's term the economy was in a radical decline.

Enduring this situation, Egyptians showed and expressed their frustration and anger toward the governing regime, even though Morsi's tenure was still only a year old. This was because he was the only one who could be blamed. However, there was another theory which existed, that it was military and other opponents of Morsi from the remnants of the previous regime who had purposely plotted the economic crisis. There were several facts that affirm this suspicion, such as the sudden disappearance of a gas line during the turmoil and the resultant appearance of power cuts (Maass, 2013). Above all, regardless of who were responsible, the crisis was not rectified. The Egyptian people, who were actually highly pragmatic and not ideologically attached to Morsi, became intolerant of the crisis. As a result of the instability and this economic crisis, the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) considered themselves to be justified to seize the power.

Unlike the Egypt, the economy of Turkey during the tenure of Erdogan was quite positive. Erdogan and his party, Justice and Development Party (AKP), significantly raised the social welfare of the nation. During his reign, there has been a great success in terms of economic stability and improvement (Yulek, 2015). Perhaps this is partly due to his long period of administration, starting from 2002 to 2014. It is acknowledged that since he came to power, the economic growth of Turkey has averaged some 5%. Moreover, inflation has been controlled. Maybe this was just possible because his strong commitment to be a member of European Union (EU) (Ismahan, 2016).

In 2016, despite the slight decrease in economic development, on account of some acts of ISIS terror

and the worsened tie with Russia, the overall economic conditions in Turkey were actually still positive and satisfactory enough for Turks. This economic achievement was undoubtedly a strong factor that strengthened the bargaining position of Erdogan with his political enemies. In relation to this, an analyst suggests that the handout that Turks receive from their government, not Islamism ideology, was the cause most liable for improved support from Turks to Erdogan and contributed a real constraint upon the military's potential efforts to topple him and bring him down (Emre, 2016).

However, there is still one remaining question. But why the fact that the economy of Turkey was strong and not in crisis, did not prevent the military from undertaking the coup? At this point, we can assume that the spectacle used to understand the Egyptian coup, i.e. economic determinism, is useless.

THE NATURE OF OPPOSITION MOVEMENT

The second matter that distinguishes the experience of Egypt and Turkey is the nature of opposition movement in terms of their view toward the military coup. As the ruling regimes, Morsi and Erdogan were surrounded by the oppositional forces. However, unlike Erdogan who had enough strength around him, Morsi was almost without allies. As a matter of fact, Morsi's administration witnessed not only the absence of the so called "loyal opposition", but also the existence of "dedicated partners". In the beginning of his term, Morsi established a coalition comprising of his party, Freedom and Justice Party (FJP) and al-Nour party, another Islamist political group in Egypt. However, in the course of time, when Morsi seemed to have lost legitimacy, al-Nour broke the coalition, which left Morsi behind and alone. Surprisingly, the al-Azhar institution, which had strong influence on the civil society of Egypt, also abandoned Morsi, arguing that by doing so they were avoiding civil strife. The fact that Morsi was an Islamist political leader was not taken into consideration by sheikh al-Azhar when he justified the right of the army to topple Morsi.

In addition, mention must be made of the political

behavior of Morsi's opposition. They did not only dissent every single of Morsi's policies, but more than that, they also set up the *Tamarrod* movement with the main goal of removing Morsi altogether. Overall, Morsi faced a very strong opposition movement that consisted of many groups including the remnant of Mubarak bureaucrats, the secular or leftist groups and the youth movement. The main objective of the first opposition group was to defend the Mubarak legacy from every radical policy coming from Morsi, while objective of the secular or leftist groups was to separate the national identity from Islamism ideology. Meanwhile, the youth movement was motivated mainly by their disappointment with Morsi's tyrannical tendencies. In addition, Morsi also witnessed betrayal by the intelligentsia, who in their discourse always spoke about democracy but their behavior was less than democratic. Above all, Morsi antagonized the military corps who had their own interests, which were to preserve their privileges within Egyptian economy and politic. Finally, with the accumulation of the withdrawal of allies, the absence of support from al-Azhar in addition to the lack of loyal opposition ultimately, the coup was instigated by the military.

The Turkey's experience was different to that of Egypt. Erdogan is a strong leader. Some writers suggest that his strength is only comparable to Mustafa Kamal Ataturk, the founder of modern Turkey (Kuru A., 2015). Erdogan won the election in the four consecutive elections. In the last election held in 2014, Erdogan's party gained 52 percent of the votes. In the 2011 election, he also received half of Turkey's citizen's votes. This support made him quite secured from any attempt by the military to instigate a coup. Apart from this however, there are actually several groups who were always critical of Erdogan. The most prominent among these was the secularist group who embraced the ideology of Kemalism. Erdogan's oppositionists are represented by the Republican People's Party (CHP), the Nationalist Movement Party (MHP) and the Peoples' Democratic Party (HDP). Unpredictably, however, not a single

opposition party supported the attempted coup. Though they were in opposition to Erdogan, even within that context they refused to support military coup which they thought would result in destroying the democracy of the country. They believed that the price Turkey would pay would be considerably higher if a civil war occurred (Daily Sabah Politics, 2016). In fact, this phenomenon is very surprising, as within this highly polarized political landscape, the opposition movement had bound themselves with the national interest of Turkey.

THE UNITY OF MILITARY

Another remarkable feature that differentiates the coups of each country is centered on the unity of armed forces. It is worthwhile to note that in both contexts, the military have strategic positions, as the guardian of secularism in Turkey's case and in Egypt's case, as the owner of and controller power over the economy of nation. In addition, both military have had a long successful history in terms of overthrowing their respective governments. The armed forces of Egypt ousted King Faruq in 1952, which ended the system of monarchy in the country, and finally in 2013 the Egyptian army ousted the first democratically elected President. The army of Turkey had had greater experiences in terms of removing rulers, starting from 1960 when a coup that ended with the execution of Adnan Manderes, continued by the smooth coup in 1970 and followed by the bloodiest one in 1980, which executed 50 persons. The last attempt of coup before Erdogan's administration occurred in 1997 (Emre, 2016). Prior to the 2016 coup, the Turkey military has also attempted several times to overthrow Erdogan's government, namely in 2007, 2012, and 2013 (Espostio, 2016: 41). Interestingly in each attempted coup, however, Erdogan has successfully eliminated the involved military officers.

In regards to the latest coup, it is highly noticeable that military generals were divided. It appears there were only a small number of military officers who supported the removal of Erdogan. More importantly, also the highest general in the Army rejected the coup.

As a matter of fact the coup movement was led by Colonel Muharrem Kose. The disunity of military forces is without a doubt the most determining factor behind the failure of the coup. The important relevant question related to the disunity is, why was there a split among them? There are at least some possible answers for this. Firstly, the conviction by Erdogan was that those who rebelled against him were the followers of Gulen and they were a small quantity. This means that Erdogan acknowledged that the army has been infiltrated. However, there are many doubts concerning this accusation, given that Gulen is a moderate person who always condemns and resists military influence in the political activities of the state (Fuller, 2016). Secondly, the split among Turkey soldiers stems from their view of Erdogan's leadership. Some perhaps respected his positive achievement, especially in terms of economic matters, while others saw and objected to his authoritarian tendency. Thirdly, majority of army officers who resisted the coup, more than likely considered the limited possibility of a successful coup, taking into account the failed previous attempts which ended up with total detention of the officers by Erdogan. Those who fought against him, therefore, had no settled and clear plan, only an immature plot.

In comparison, in its attempted Egyptian coup, the Egyptian army was more solid and unified than the army in Turkey. Despite the fact that the Abdul Fattah al-Sisi, the military general who deposed Morsi, was a new commander of SCAF as well the youngest of them and who replaced the old field Marshal Mohammed Husein at-Thanthawi, this did not prevent the more senior officers from obeying him. As a matter of fact, the event of any split among Egyptian military had never occurred since the era of President Anwar Sadat.

Taking into consideration on this fact, the same question arises, why was no similar division among the SCAF of Egypt? There are several possible answers for this. Firstly, it was due to strong position of SCAF under strong generals itself. In the wake of Arab Spring, according to the new Egyptian Constitution,

the army still could enjoy the privileges of power where they could have control over their own military affairs. Unlike the Turkish Army, which in the course of time had been weakening by Erdogan, the SCAF of Egypt is still highly untouchable even until now. In addition to this, they also receive annual military aid from the USA. Secondly, because since the era of the Nasser presidency, the country had been led by the presidents whose background was also military. Under the tenure of military presidents, the army had easily consolidated themselves. This is incomparable to the military situation in Turkey where a split occurred because the army was led by the civilian. In conclusion and more importantly, the unity of the army eased the process of the coup d'état of President Morsi.

THE CIVIL RESPONSE

Egyptian people, with the influence of al-Azhar are largely an Islamic society. To some extent, this is similar to the Turks, who recently and especially after AKP's effect, became more religious than in the previous decades. Although similar in terms of religiosity, however, the responses of the two societies to the coups were different. Egyptian clerics, based on their long historical tradition of the Asharite school of thought they had been embracing, issued a fatwa and delivered opinions supporting the conduct of General al-Sisi (al-Azami). They argued, that in order to avoid *fitna* (civil disorder), they needed to endorse military action (al-Azami, 2015). This gave the justification for the masses to gather in *Tahrir* Square. No matter how democratic Morsi was elected, they considered that his presidency had lost its true legitimation because it lacked evidence of the support of the people. Sheikh al-Azhar, Ahmed Toyib, along with the Christian Coptic leader all stood behind al-Sisi in legitimizing his position and when this General declared the deposing Morsi (Shahine, 2016). Syekh Ali Gom'ah, the former mufti of Egypt, also gave a speech to the military troops supporting their action in dissolving the mass demonstration and justifying that the using of violence resulted in the death of thousand people (al-Azami, 2015). There was only dissenting opinion

for this coup and from one Egyptian scholar, Yusuf Qaradawi. However his voice was neglected and he was lack of influence. His ineffectiveness was perhaps due to his residence being outside Egypt and his tendency to support the Moslem Brotherhood from where Morsi originated.

Unlike the Moslem scholars of Egypt, those of Turkey rejected the coup. Moreover, unlike *ulama* of al-Azhar who quoted the discourse of *ilm kalam* (Islamic theology) pertaining to legitimate ruler and the *kharijite* (rebellious), there was no theological consideration or justification behind the positive stance of Turk clergies. This was highly likely explained by the fact that Turkey itself was a secular state, so that the use of specific religious arguments in political debate is uncommon. In addition, it was still doubted that it was effective. However, to some extent, those who resisted the coup still used general Islamic expressions, such as the slogan of *Allahu Akbar* (God is the Greatest) (Tremblay, 2016). Above all, the support of Mehmet Gormez, head of the Religious Affairs Directorate for Erdogan and Erdogan's call for Turks to come to street, is clear evidence that the civil society as well as religious groups were resisting the coup. It is also highly likely, however, that the resistance of all Turks was not because of religious consideration although religion slogan was vocalized, but rather based on pragmatic reasons and considerations that living under military regime would worsen the situation. Also, the resistance of the Turks to the coup did not necessarily mean that they supported Erdogan, but rather their overall propensity toward democracy.

THE UNDEMOCRATIC POLICIES

Erdogan was the pride of Turkey in his first two terms. However, according to Ahmed Kuru, after 2011, although Turkey still experienced stunning economic growth, Erdogan had moved toward authoritarianism, Islamist populism and crony capitalism (Kuru A., 2015). Prior to the coup of 2016, there were several actions by Erdogan that crushed the democracy in Turkey. In 2012, for example, Erdogan proposed amendment of the constitution, trying to

create a super powerful President who could legislate when the parliament was not in session and who was able to appoint two-thirds of the high court judges (Espostio, 2016: 41). As a result of those actions, Erdogan was charged by the opposition of strengthening the Presidency over the parliamentary system. He was accused of trying to fuse the executive with the legislative and judiciary. However, Erdogan frequently used the language of Western conspiracy theory in order to face his opponents.

In 2013, Erdogan was involved in a serious clash with his opponents because of his policy removing a park in Istanbul and replacing it with a mall and residency. Erdogan threatened the protestors by labeling them as secularists and under the influence of alcohol. In the same year, Erdogan was accused by the prosecutors of corruption on several issues, for example in government tenders. As a result, Erdogan reassigned hundreds of prosecutors and thousands of police officers. When the recording of his conversation about his corruption spread in the social media, he temporarily shut down Facebook, Twitter and YouTube. In addition, through the AKP media, Erdogan created an opinion that the money confiscated by the police was actually for Islamic services. Moreover, following the critical stance of Hizmet followers, Erdogan declared that Hizmet movement was a terrorist organization. Hundreds of members of the movement, which consists of judges, military generals, police officers and the ordinary followers, were detained. Gulen himself was painted by Erdogan media as a freemason trying to assassinate his daughter. In fact, this despotic attitude of Erdogan was another important and responsible factor behind the coup (Kuru A., 2015: 21).

With regards to Egypt, despite the fact that Morsi had only been seated in the Presidency chair for a year, he had issued some undemocratic policies. In response, there were several factors that triggered the anger of society towards Morsi and which ended up with his ousting. Firstly, he failed in accommodating a large number of important groups in his cabinet team. Out of 35 of his ministers, he neglected a youth

representative and a woman as minister as well as a Christian as Vice President. His team consisted mainly the members of FJP, which was 12 out of 35 (VOA, 2013). In November 2012, Morsi issued a constitutional decree that enhanced his power and also included a ban on judicial review of all his policies as a president until the Egyptian constitution had been passed. His decrees also included the immunization of the Constituent Assembly and Shuria Council from possible dissolution. Morsi was also accused of attempting to control every aspect of the government and including that of public life (Espostio, 2016: 223). These dictatorial policies instigated the masses to conduct a huge protest. The armed forces utilized this opportunity. Finally, on July 3, 2016, al-Sisi, the commander of SCAF announced, that besides suspending the Constitution and removing Morsi from power, he also would appoint the head of the Constitutional Court, Adly Mansour, as the Interim President.

THE ABSENCE OF THE UNIFYING IDEOLOGY

If we delve into the coups in both countries, actually one of the indirect causes of both Egyptian and Turkish turmoil was the debate over the ideology of the state. This stemmed from the absence of the unifying ideology that would unite all the ideological groups that existed in each country. In the case of both Egypt and Turkey, the absence of this uniting philosophy in each country led to high levels of tension and division, especially among educated people, about national identity, and in turn, contributed significantly to instigation of coups.

Ideologically, Egyptians are divided into several factions, being Islamist, secularist, leftist and Coptic who account for 10 % of Egyptian population. The Islamist themselves differ with in and from one to another. In the wake of January 2011 revolution, there were two Islamist parties established, namely al-Nour party, who resort to a conservative-salafist understanding of Islam and Freedom, and Justice Party established by the Moslem Brotherhood, in which its ideology was more moderate. Both parties were

unified by the notion that they wanted to Islamize the country, irrespective of their differing methods in formal and cultural ways respectively.

On the other side, the other ideological groups were always in fear of the Islamists whom they accused as being an authoritarian. There was a conviction among non-Islamist politicians that when an Islamist sits in the position of power, he will transform into a despotic ruler (Delkhasteh, 2016). Non-Islamic groups also were concerned and worried about a formal implementation of Shariah. The picture of Iran that lives under the Islamist autocratic leadership appeared in their imagination. These groups rejected the Islamist parties, which they viewed as a politicization of religion and which, according to them, would lead primarily to abuse of power and monopoly of religion over the State. Therefore, when victory was gained by the Islamists in 2012 election, there immediately emerged a phobia and paranoia within these groups in Egypt. This resulted in non-Islamists activists carrying out radical movements with the ultimate goal of deposing Morsi and eradicating the Islamist groups.

As far as the Turkey was concerned, with the fall of Ottoman Empire, modern Turkey was founded as secular state in 1924. Subsequently, secularization was enforced from top up to bottom down, in which the state imposed secularism rigorously on the people, not only as a value of the political system, but also as a way of daily life. As a response to this, in the history of Turkey, we have seen several endeavors by the Islamists to introduce a more Islamic identity and weaken the secular influence within politics. It is worth noting that, those who live in countryside of Turkey, actually never accepted secularization in cultural life (Esposito, 2016: 29). All of the efforts of Islamization, however, resulted and ended with a coup. To mention more specifically, this happened to Necmetin Erbakan, the previous Prime Minister of Turkey, who was overthrown three times by a military coup, namely in 1970, 1980 and 1997. Those coups were justified by the military by claiming an accusation of violation of the Turkey Constitution.

Learning from several coups that have happened in

the history of modern Turkey and which stemmed, primarily by the desire to revert to basic philosophy of the state, it can be said that the absence of unifying ideology among societies was also the determinant cause of those coups. In the case of military coup 2016, the military's desire to re-secularize the country also occupies an important factor behind instigation of the coup. It is true that there were several possible reasons that prompted some officers of Turkey military to undertake coup. Among prominent theories of the underlying factors behind current coup were firstly, it was undertaken by the military officers because they were infiltrated by Hizmet movement founded by Fethullah Gulen. Erdogan himself formulated this theory. However, there are some absurdities in this theory namely, the fact that Gulen himself is civilian man living abroad and Hizmet was already banned in 2013 (Fuller, 2016).

Second, there was a conspiracy theory where the Western countries were violating the face of a Muslim country. The followers of Erdogan also proposed this theory. However, there was no evidence for this theory. Thirdly, what seems to be the most convincing theory for me is the desire of armed forces themselves to restore the face of Turkey as a secular state, after it had been "shattered" by the soft Islamisation of Erdogan, and to retrieve the superiority of military forces. The reasons for this theory are: firstly, it is in line with the previous experiences of coups in Turkey and the fact that, in the course of time and under the Presidency of Erdogan, the military had been increasingly weakened.

CONCLUSION

In conclusion, there are several factors that contribute to the prompting of a military coup in Egypt or Turkey. In the case of Egypt, those factors are: the economic decay after the fall of Mubarak, the ambition of military forces to preserve their political and economic interests, and the traditionalist view and pragmatic behavior of *'ulama* as well as the fear of Islamism from the secularists and the leftist. This was further nourished by the fact that Morsi behaved

undemocratically. Regarding the context of coup in Turkey, the coup was triggered mainly by the army, who wanted to re-elevate their position after it had been weakened by Erdogan. In addition, the coup was also motivated by the desire of the army to retrieve secularism as the basic philosophy of the country's leadership, after it had been undermined with strong Islamization by Erdogan. The tendency by Erdogan toward authoritarianism after his second period also played a significant role in prompting the military force to undertake the coup.

While the military coup in Egypt was successful, that of Turkey failed. The success story of the military coup against Morsi originated from the unity of military officers, despite the fact that the army commander was still new seating in his position. It was also successful due to the strong support of the civil society with the clergy endorsement and the approval of all political parties. Meanwhile, the failure of the coup d'état in Turkey was caused by the split among army officers along with the strong refutation from society as well as the opposition parties. The fact that Erdogan has been charged previously by the corruption scandal and the violation of human rights still did not prevent him from getting strong back up and support.

REFERENCES

BOOKS

- Bayat, Asef. 2007. *Making Islam Democratic, Social Movements and the-Post-Islamist Turn*, Stanford California Press.
- Dagi, Ihsan. 2013. *Post-Islamism a la Turca*. In Bayat, Asef (ed.). *Post-Islamism, The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University Press.
- Esposito, John L., Sonn, Tamara, and Voll, John O.. 2016. *Islam and Democracy after the Arab Spring*, Oxford University Press.
- Fish, M. Steven. 2002. *Islam and Authoritarianism*. World Politics 55, October.
- Kuru, Ahmad T.. 2014. *Authoritarianism and Democracy in Muslim Countries: Rentier States and Regional Diffusion*. Political Science Quarterly, Volume 129, Number 3.
- Kuru, Ahmed T. 2015. *The False Promise*. Critical Muslim 16, October–December.
- Kuru, Ahmed T. *Turkey's Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of Analysis*. Mediterranean Quarterly 26:3. DOI 10.1215/10474552-3145779.
- Lewis, Bernard. 2010. *Faith and Power, Religion and Politics in the Middle East*. New York: Oxford University Press.
- Patton, Marcie J.. (2006). *The Economic Policies of Turkey's AKP Government: Rabbits from a Hat?*. The Middle East Journal 60:3, Summer.

INTERNET

- Al-Jazeera interview with Murat Yulek. *Erdogan's Turkey: An Economic Success Story?*. (Online), (<http://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2015/11/erdogan-turkey-economic-success-story-151108121817800.html>, accessed on July 28, 2016).
- Ashour, Omar. *What Egyptians can learn from Turkey's Failed Coup*, (Online), (<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/07/egyptians-learn-turkey-failed-coup-160720142447097.html>, accessed on July 30, 2016)
- al-Azami, Usaama. *Muslim Scholars and Autocrats (Part I)*. (Online), (http://www.huffingtonpost.com/usaama-alazami/muslim-scholars-and-autocrats_b_8865430.html, accessed on 30 July 2016).
- al-Azami. Usaama. *How Not to Disown 'Islamist' Terrorism*. (Online), (http://www.huffingtonpost.com/usaama-alazami/how-not-to-disown-islamism_b_8823864.html, accessed on 30 July 2016).
- al-Azami. Usaama. *Translation of Ali Jumas Lecture to the Egyptian Armed Forces*. (Online), (https://www.academia.edu/19791977/Translation_of_Ali_Jumas_Lecture_to_the_Egyptian_Armed_Forces_Summer_2013, accessed on 30 July 2016).
- Daily Sabah's report. *Turkey's Opposition Parties Take Unified Stance against Coup Attempt*. (Online), (<http://www.dailysabah.com/politics/2016/07/16/turkeys-opposition-parties-take-unified-stance-against-coup-attempt>, accessed on 28 July, 2016).
- Delkhasteh, Mahmood. *Egypt: Secular Dictatorship vs. Religious Dictatorship*, (Online), (http://www.huffingtonpost.com/mahmood-delkhasteh/egypt-secular-parites_b_3798852.html, accessed on 29 July 2016).
- Emre, Yusuf. *The Lessons to be Learned from Turkey's Failed Coup*. (Online), (<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/07/lessons-learned-turkey-failed-coup-160720085821212.html>, accessed on July 28, 2016).
- Fuller, Graham E.. *The Gulen Movement Is Not a Cult — It's One of the Most Encouraging Faces of Islam Today*. (Online), (http://www.huffingtonpost.com/graham-e-fuller/gulen-movement-not-cult_b_11116858.html, accessed on 28 July 2016).
- Ismahan. *Erdogan's Achievements in The Turkish Economy*. (Online), (<http://ar-rai.com/erdogans-achievements-in-the-turkish-economy?lang=en>, accessed on July 28, 2016).
- Kingsley, Patrick. *Egypt Suffering Worst Economic Crisis Since 1930*. (Online), (<https://www.theguardian.com/world/2013/may/16/egypt-worst-economic-crisis-1930s>, accessed on July 27, 2016)
- Maass, Harold. *Did Egypt's Military Manufacture An Economic Crisis to Sabotage Morsi?* (Online), (<http://theweek.com/articles/462268/did-egypts-military-manufacture-economic-crisis-sabotage-morsi>, accessed on July 28, 2016).
- Shahine, Gihan. *Risks to Al-Azhar?*. (Online), (<http://weekly.ahram.org.eg/News/3403/32/Risks-to-Al-Azhar.aspx>, accessed on 30 July 2016)
- Shapiro, Jeremy, *The Coup Conundrum*. (Online), (<http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2016/07/22->

turkish-coup-us-policy-shapiro, accessed on July 27, 2016).

Singh, Michael. *Egypt's Economic Crisis: How to Help Cairo Help Itself*. (Online), (<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/egypts-economic-crisis-how-to-help-cairo-help-itself>, accessed on July 27, 2016).

Tremblay, Pinar. *How Erdogan Used the Power of the Mosques against Coup Attempt*. (Online), (<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/turkey-coup-attempt-erdogan-mosques.html>, accessed on 30 July 2016).

Voa's News. *Egypt's Morsi Brings More Islamists into Cabinet*. (Online), (<http://www.voanews.com/a/egypt-morsi-brings-more-islamists-into-cabinet/1656125.html>, accessed on September 28, 2016).

Pengembangan Kluster Industri Militer India dari Sudut Pandang *Developmental State Theory*

Ismiyatun

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Sampangan, Jawa Tengah 50232, Indonesia
ismyunwahas@gmail.com
Diserahkan: 24 Agustus 2016, Diterima: 28 Desember 2016

Abstract

This research was held to investigate India government policy in military industry development by using the instrument of high technology cluster for anticipating revolution on the military affairs. The novelty was lied on its description about Developmental State Theory (DST), especially state domain and strategy toward market. India had half intervention characteristic. State owned enterprises was defended beside took collaboration with the market. The strategy prefers the empowerment of competence qualification for the domestic firm, hold the political agencies networking and diplomacy in order to support the regulation. High technology cluster could reinforce state domain and strategy because of its technology venture which gave power to attain economic diplomacy.

Keywords: Developmental State Theory, State Domain, Military Industry Cluster

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi kebijakan pemerintah India dalam pengembangan industri militer melalui suatu kluster industri berteknologi informasi, guna mengantisipasi fenomena revolusi dalam militer. Kebaruan penelitian ini terletak pada deskripsinya tentang teori negara developmentalis, khususnya mengenai domain negara dan strategi yang dijalankan terhadap pasar. India memiliki karakteristik setengah intervensi, perusahaan negara tetap dipertahankan disamping tingginya intensitas kolaborasi pasar. Spesifikasi strateginya lebih mengutamakan unsur penguatan melalui standar kompetensi bagi firma domestik, penciptaan jaringan yang mendukung peningkatan agen politik dan diplomasi sebagai pendukung regulasi. Kluster berteknologi tinggi dari sudut teori ini mampu menjadi penguat kelayakan atas tipologi domain negara serta strategi yang dihasilkannya

Kata kunci: Teori Negara Developmentalis, Domain Negara, Kluster Industri Militer

PENDAHULUAN

Industri militer India, pasca Perang Dingin, sering dijadikan objek penelitian. Dari sudut pandang keamanan Hoyt (2007) memandang India memiliki tingkat kepedulian cukup tinggi untuk mengembangkan sub sektor ini. Targetnya adalah pemenuhan kebutuhan militer domestik sampai dengan tercapainya kenaikan tingkat kemandirian bangsa dalam hal persenjataan modern. Di sisi lainnya Baskaran (2005) secara khusus meneliti sistem imbal dagang persenjataan mereka. Dari perhitungan ekonomis, disimpulkan bahwa industri militer India dipandang gagal mencapai tingkat kemandirian melalui

minimalisasi andil modal asing, sesuai dengan untkapannya di bawah ini:

“However, India failed to create a defense industry capable of supplying advanced weapon systems that would be competitive with western equipment. The technology gap hasn’t closed”.

Artikel ini menelaah kembali hasil dari dua pakar tersebut, namun menggunakan sudut pandang ekonomi politik dengan kerangka konseptual *developmental state theory* (DST). Aliran *developmentalist*, mulai bangkit kembali di akhir tahun 1980an sebagai

reinkarnasi dominasi pemerintah dalam pembangunan guna menjawab tantangan kaum neoliberalist dan globalisasi. Menurut (Weiss, 1998) globalisasi dan peran negara, tidak berkorelasi sebab akibat maupun hubungan yang bersifat *zero sum game*. Sebaliknya, kedua konsep seimbang, dan tidak saling mengunci, justru menjadi pemicu antara satu dengan lainnya. Negara memiliki kekuasaan, juga kedaulatan, seharusnya mampu mengantisipasi dominasi MNC, keterbukaan ekonomi melalui regulasi domestik dan kerja sama internasional (Weiss, 2000).

Berbagai teori yang terangkum dalam DST merupakan antisipasi yang dilakukan oleh negara berkembang untuk mengantisipasi globalisasi, tuntutan industrialisasi dan pembangunan nasional. Konseptualisasi, teorisasi di dalamnya berkembang lebih lambat apabila dibandingkan aspek praktis. Negara berkembang telah menjalankannya secara langsung melalui kebijakan, meskipun para pembuat kebijakan tidak mempelajari secara langsung DST. Jepang bahkan telah menjalankannya melalui konsep *flying geese* sebelum Johnson maupun Robert Wage menggunakannya sebagai negara model.

Industri militer, ditinjau dari perspektif teori ini tergolong sebagai salah satu sektor industri penyangga, tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan nasional, juga harus mampu berfungsi secara ekonomis. Konsekuensinya sektor ini dalam jangka pendek belum mampu berkontribusi dalam peningkatan penghasilan maupun pertumbuhan ekonomi. Kemanfaatan atas pemberdayaannya lebih diutamakan guna peningkatan ketahanan nasional, melalui kelengkapan angkatan bersenjata nasional dengan persenjataan modern bukan dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

Dalam wacana teori ini, industri militer dapat dijadikan sebagai wahana bagi negara berkembang untuk memperoleh kekuasaan struktural dalam bidang teknologi, sehingga pengembangannya melalui suatu kluster teknologi, mutlak dilakukan guna kelangsungannya. Makna kekuasaan struktural disini adalah terciptanya peluang dan pangsa pasar bagi industri militer domestiknya sehingga kelangsungan

produksi dan inovasi bisa berjalan seimbang. Mempelajari industri militer dari sudut pandang ini, berarti menelaah kemampuan dari pemerintah sebagai eksekutif di dalam menghadapi jaringan pertahanan internasional, menyelaraskannya dengan kebijakan perdagangan lainnya khususnya di dalam pasar modal maupun investasi asing.

DST sebagai suatu teori tentang tatanan yang dikembangkan negara berkembang sebagai antisipasi terhadap tuntutan penetrasi modal asing dalam pembangunan nasional bisa diekplorasi guna menjelaskan fenomena pengembangan kluster industri militer di negara berkembang. India sebagai suatu model menurut Mukherji (2016), bukan bersifat klasik. Tatanan serta regulasinya memberikan penguatan dalam kepemilikan saham perusahaan negara namun dalam jangka panjang tidak menutup peluang diinvestasi atas entitas negara ini. Selain itu potensi swasta domestik sebagai agen pembangunan difasilitasi secara seimbang sejalan dengan usaha peningkatan peran modal asing/katalisator.

Dalam kasus India, sub sektor ini menjadi penguat dalih keberadaan DST sebagai tatanan utama perekonomian India secara global, sekaligus menunjukkan data dinamika kebijakan persenjataan India. Kebijakan India dalam mengembangkan industri militer melalui kluster teknologi di Bangalore dan sekitarnya, ditinjau dari corak, tatanan maupun regulasi dalam koridor domain negara sebagai antisipasi internalisasi modal asing dalam pembangunan domestik akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini.

Kebaruan artikel ini terletak pada deskripsi tentang industri militer, kluster teknologi dan *developmental state theory* (DST). Agar mampu menciptakan profitabilitas, maka industri militer harus dikembangkan dalam suatu kluster berteknologi tinggi dan memperhatikan berbagai ketentuan yang tercakup dalam teori tersebut mengenai domain negara. Implementasi domain negara di India terbukti mampu mempertahankan keberadaan DPSU sebagai salah satu instrumen pengendali negara dalam industri militer.

Melalui DST, kluster teknologi mampu digunakan

sebagai wahana pembangunan guna menjawab permasalahan sektoral khususnya atas pertahanan dan teknologi informasi, karena ventura teknologi yang diproduksinya memberikan kekuasaan guna menjalankan diplomasi ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasinya tetapi dengan cara yang terpisah-pisah, sementara secara umum lembah silikon identik dengan kapitalisme dan neo liberalisme, tetapi melalui diplomasi ekonomi, DST mampu memberdayakan kebijakan di balik pengembangan industri militer mereka.

Antara DST, *techno park*, dan negara berkembang memiliki benang merah terkait dengan karakteristik teori tersebut. Secara umum, terdapat tiga elemen krusial, *state*, *strategy* dan *market*. *State* menghasilkan konsep *state domain*, *market* – dalam hal ini diwakili oleh jaringan/*networking*, transaksi, investor, dan MNC/Perusahaan Multinasional, sedangkan strategi direpresentasikan oleh regulasi, penguatan kelembagaan, penciptaan agen politik (*political agencies*) dan diplomasi.

Konsep pertama menunjukkan letak perbedaan India dari dua model klasik dalam DST. Tiongkok berciri khas *fully intervention* dan Korea Selatan justru sebaliknya, mengambil sikap *minimized intervention*. Negara ini memiliki corak *half intervention*, disamping menjalankan kolaborasi dengan pasar, tetap memperluas strategi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi firma domestik, baik level entitas global maupun UKM. Karakteristik ini juga berdampak pada spesifikasi strategi Pemerintah India terhadap pasar. Kecenderungan sikap kolaboratif terhadap pasar, sebagaimana dimiliki oleh Tiongkok dan Korea Selatan tetap dipertahankan, namun pemerintah negara tersebut lebih mengutamakan unsur penguatan melalui standar kompetensi bagi firma domestik, penciptaan jaringan yang mendukung peningkatan *political agencies* bagi kaum diaspora di luar negeri dan diplomasi sebagai pendukung regulasi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Perkembangan aliran *developmental* paska Perang Dunia II dijelaskan oleh Berberoglu (1992) terbagi ke

dalam dua kelompok yakni:

- a) *Structuralist developmental State*, lebih bertumpu kepada peran negara dalam kebijakan industrialisasi, dua opsinya adalah EOI (*Export Oriented Industry*) atau ISI (*Import Substitution Industry*). India, Afrika Selatan, Korea Selatan serta beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura adalah contoh negara yang mengaplikasikan berbagai konsep dari tipe ini ke dalam kebijakannya.
- b) *Capitalist developmental State*, membahas peran dan urgensi dominasi negara atas pasar sehingga menciptakan suatu akumulasi modal dalam negara sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan sekaligus kedaulatan. Akumulasi modal oleh negara ini menimbulkan suatu regim baru dari kelompok NIC (*Newly Industrial Country*). Contoh negara yang tergolong kelompok ini adalah Jepang, Tiongkok, dan Taiwan.

Kelompok pertama mengupas berbagai kebijakan dan strategi negara, termasuk melakukan subsidi terhadap *infant industry* (industri kecil menengah) sehingga mampu meningkatkan ekspor barang/jasa sebagai langkah awal menuju negara industri. Hubungan jangka panjang yang stabil antara *state* dan industri merupakan kunci bagi penciptaan pola khusus pembangunan dan kemampuan negara dalam melaksanakan pembangunan industri.

Kelompok kedua, menurut Chalmers Johnson (Öni^o, 1991) berciri khas pembentukan suatu *international governed market* bagi industri domestiknya melalui pola kelembagaan regional berdasarkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kompetisi dengan dominasi kepemimpinan tunggal negara tersebut. Baik Jepang, Tiongkok bahkan Taiwan masing-masing saling berkompetisi guna meraih kedudukan sebagai pemimpin negara berkembang. Mereka menjadi model *state-led development* di Asia Timur, dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Model Jepang, menurut Johnson (1995) merupakan kelanjutan dari kerangka *flying geese*, yang sudah dikembangkan oleh Akamatsu pada tahun 1935 ketika menjadi penasehat Kaisar Meiji. Tiga landasannya yang berfungsi sebagai agen pembangunan

adalah birokrat maupun teknokrat dari unsur pemerintah, *keiretzu* (jaringan antar MNC), dan diplomasi ekonomi untuk menciptakan suatu jaringan *work station* di berbagai negara Asia. *Embedded autonomy state* hanya ditunjukkan melalui dominasi kaum birokrat/teknokrat secara kelembagaan melalui MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) yang menginisiasikan diplomasi ekonomi melalui ODA (*Official Development Assistance*) untuk merintis terbentuknya jaringan dengan negara tetangga yang terletak dalam jangkauan kekuasaan regionalnya.

Meskipun Tiongkok/Taiwan dan Jepang menunjukkan dua model yang berbeda, namun merujuk pada penelitian Robert Wade (1990) dan Seung (2005) mereka berada dalam jalur *capitalist developmental state*. Keberadaan Korea Selatan dengan tiga penyangga ekonomi domestiknya, negara, bank dan *chaebol*, menimbulkan suatu dilema apakah tergolong ke dalam salah satu kategori ataukah terlepas dari keduanya sehingga membentuk kategori tersendiri. Konflik yang muncul adalah jika diklasifikasikan tipe pertama, karena spesifikasi *blanket ISI* (Patibandla, 2000) lebih mewarnai corak kebijakannya, namun kontribusi dari Hyundai, LG dan Samsung sebagai *chaebol* justru mendekati tipe yang berbeda. Chin (2006) bahkan mengungkapkan bahwa negara ini sedang bertransformasi menuju model Jepang/Tiongkok.

Sementara, Pirie (2008) justru dalam artikelnya mengungkapkan peningkatan keterlibatan kaum *chaebol*, khususnya di masa Lee Myung Bak cenderung membawa mereka menuju neoliberalisme. Meskipun demikian, manajemen Pemerintah Korea Selatan terhadap *chaebol* dalam pengembangan kluster industri militer di Daejeon kembali memperkokoh bukti bahwa mereka tetap berada dalam koridor teori ini.

Dinamisasi langkah kebijakan Korea Selatan sampai Pemerintahan Park Geun Hye diargumentasikan penulis masih dalam ranah kerangka teori ini dengan mengambil pijakan Minns (2001), otonomi negara terimplikasikan melalui kebijakan dan otoritas finansial, melalui bank sentral serta pengelolaan asset dengan pemberdayaan KAMCO (*Korea Asset Manage-*

ment Corporation). Peneliti lainnya, Mah (2011) memperkuat melalui dalih efektifitas birokrasi dan kaum teknokrat di negara ini, sehingga mampu memberikan corak dan menjaga kelangsungan agar mereka tetap konsisten dengan pola *developmentalist*.

Penulis mencatat rekam jejak kebijakan India dalam koridor teori ini melalui beragam hasil penelitian yang dilakukan para ahli ekonomi politik, antara lain Bagchi (2003). Menurutnya posisi India adalah sebuah negara dengan demokrasi liberal namun status kebijakan ekonominya justru tidak bersifat neoliberal, karena dominasi peran pemerintah senantiasa melekat, mengendalikan kontribusi swasta dan modal asing. Istilah yang diberikannya adalah *embedding a developmental, diversified democracy in developmental state*.

Kebijakan industri militer yang dijalankan oleh negara dunia ketiga dilatarbelakangi berbagai motif politik, ekonomis maupun prestise. Ditinjau dari *developmental state theory*, interaksi dari ketiga aktor menghasilkan posisi tawar menawar antara pemerintah sebagai aktor yang memiliki kekuasaan politik, legislatif selaku pemegang hak ratifikasi dengan MNC pertahanan sebagai aktor swasta internasional pemegang kekuasaan ekonomi, dalam urusan pengelolaan aset publik.

India dikelompokkan sebagai *developmental democratic state*. Sebagai negara demokrasi yang sedang mengalami transisi di dalam kebijakannya yang bercorak *developmentalist state*, berbeda dengan Tiongkok atau Korea Selatan. Tiongkok merupakan *developmentalist state* murni dengan *single majority* bertumpu pada Partai Komunis Cina, sedangkan Korea Selatan adalah *democratic developmental states*, karena mampu menyeimbangkan dua konsep yang berbeda, antara demokrasi dan pembangunan. Hasil penelitian para ahli ekonomi politik seperti, Martinussen (2001), Sinha (2003), mengargumentasikan kebijakan ekonomi politik India berbeda dengan Tiongkok atau Korea Selatan.

Martinussen (2001) mendeskripsikan salah satu ciri khas kebijakan India setelah tahun 1991 adalah menempatkan pemerintah dalam posisi seimbang antara modal asing dengan swasta domestik.

Implementasinya dijalankan melalui kebijakan fiskal dan non fiskal, termasuk di dalamnya regulasi status *ratna* bagi DPSU/*Defense Public Sector Undertaking* dan *Raksha Udyog Ratna* (RUR) menjadi ambang batas investasi bagi firma domestik. Sementara Sinha (2003) kembali menegaskan, keberadaan model India ini terlihat dari harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan negara bagian. Segala regulasi terkait dengan pemberdayaan sumber daya alam maupun manusia, menjadi kewenangan negara bagian.

Klausul ini kemudian memberikan peluang bagi negara bagian guna mengembangkan beragam *techno park*. Ketika terjadi inisiasi kebutuhan inkubasi maupun katalisasi dalam suatu *techno park* sehingga mampu berkembang menjadi kluster industri militer, maka pemerintah federal mengambil alih peran ini, serta menjalankan langkah *start up*.

Kebijakan fiskal, sebagai salah satu unsur strategi dalam model ini, menurut Nayar (2010), mutlak dijalani karena globalisasi dan liberalisasi merupakan dua fenomena dalam satu kesatuan “ekonomi dan sosial”, dan negara sebagai penjaga dampak negatif dari keduanya dituntut menjalankan disiplin fiskal, di bawah kendali pemerintah federal/*fiscal federalism*. Pengetatan disiplin fiskal ini harus dijalankan menyeluruh atas segenap sektor pembangunan. Kelangsungannya menuntut kepatuhan dari segenap aktor pemangku kepentingan sektoral.

Kebijakan fiskal dan non fiskal menurut Low (2004), merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam DST, khususnya kategori penciptaan suatu lingkungan bisnis yang kondusif. Dua kebijakan tersebut menjadi bagian di dalamnya selain memelihara tatanan politik, menciptakan dan memelihara tatanan hukum antara properti swasta dan hubungannya dengan pasar, penyediaan infrastruktur, serta meminimalisasi terjadinya kekurangan sumber daya alam dan manusia. Elemen yang terakhir ini menjadi bagian yang cukup krusial dalam implementasi DST di berbagai negara berkembang baik Tiongkok, Korea Selatan maupun India, khususnya dalam pengembangan industri militer.

Dari ketiga pendapat ahli tentang India meneliti

industri militer sebagai salah satu sub sektor prioritas pembangunan dengan rujukan DST, menghasilkan tuntunan penelahan lebih lanjut atas beragam prasyarat yang melekat sehingga suatu negara disebut berada dalam koridor teori ini:

- a. Eksplorasi keberadaan *domain* negara (*state domain*).
- b. Deskripsi strategi terpilih, mencakup regulasi, penguatan, penciptaan dukungan politik/*political agencies* dan diplomasi.
- c. Identifikasi kelayakan kondisi pasar sehingga memberikan peluang bekerjanya dua segmen DST seperti tertuang pada poin a dan b.

Keberadaan *techno park*, dalam hal ini kluster industri militer, disebut sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*). Secara teoritik peneliti mengidentifikasi korelasinya dengan strategi, domain negara serta kondisi pasar selaku variabel bebas (*independent variable*).

Techno park dan DST bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya. Keduanya mutlak dibutuhkan negara berkembang ketika meletakkan sub sektor ini sebagai salah satu prioritas pembangunan. Tanpa penerapan kerangka konseptual teori ini, khususnya sebagai wahana *political agent* dalam konteks strategi, maka *techno park* yang dikembangkan serupa dengan wahana sejenis di negara industri. Selain itu tatanannya berfungsi sebagai penjamin kelangsungan inovasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DOMAIN NEGARA DAN INTENSITAS AKTOR INDUSTRI MILITER INDIA

Istilah *state domain* dalam DST telah digunakan oleh beberapa peneliti teori ini, Öni° (1991) memakainya untuk memaknai langkah intervensi, keterlibatan pemerintah. Sementara Bolesta (2007) memilih menggunakan istilah intervensi negara, baik *fully*, *minimized* maupun *half intervention*. Doner (2005) mulai menggunakan istilah ini dengan argumen negara tidak hanya menjalankan intervensi saja melainkan juga pelembagaan dalam strategi terhadap pasar.

Kajian industri militer dari sudut DST lebih ditujukan guna eksplorasi teori tersebut ke dalam beragam sektor ekonomi maupun sub sektor ekonomi

maupun sub sektor industri dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang telah disepakati sebagai koridornya. Merujuk kerangka teori di atas, ambang batas keberadaan *domain* negara adalah,

- a. *Embedded autonomy of state*, tercermin melalui dominasi perusahaan negara (*State owned Enterprises/ SoE*), kebijakan fiskal, non fiskal dan diplomasi ekonomi atau militer, dan perencanaan pembangunan.
- b. Keberadaan birokrat, teknokrat sebagai *think tank*. Kelompok ini memelopori perencanaan pembangunan sebagai suatu strategi atas pasar.
- c. Terdapat konsensus di antara elit politik, meskipun kondisi politik domestik negara tersebut bersifat multi partai.

Meskipun memiliki latar belakang multi partai, namun pertumbuhan konglomerasi di India cenderung secara langsung mendukung partai yang berkuasa, intensitas lobinya di parlemen juga terbatas. *Domain* negara lebih ditentukan oleh *bargaining position* dalam tubuh legislatif, bukan hasil *lobby* kaum pengusaha. Wujud nyata *domain* negara type India adalah peranannya sebagai manajer sekaligus penyeimbang antara swasta domestik dengan modal asing – dalam hal ini kontraktor pertahanan.

Bentuk *domain* ini kemudian menentukan karakter birokrat/teknokrat maupun RUR/swasta domestik yang bersifat netral dan otonom dari politik praktis khususnya aktivitas partai politik. DPSU sebagai perusahaan militer milik negara dan lembaga riset sebagai inkubator juga mengikuti sifat ini. Di sisi lainnya konglomerasi yang dihasilkan jauh berbeda dengan Tiongkok atau Korea Selatan. Di Negara pertama, mereka adalah bagian dari partai penguasa, sementara di negara kedua, mereka secara aktif terlibat dalam persaingan antar partai, bahkan pada suatu masa mampu menjadi penentu kebijakan partai penguasa.

Karena sejak kemerdekaan, landasan kebijakan ekonomi India bersifat lebih menekankan pembangunan industri domestik, maka terbentuklah jenis dan fungsi *domain* yang bersifat *half intervention*, sehingga terjadi keseimbangan peran antara pemerintah, swasta domestik dan perusahaan

multinasional. Dalam industri militer, DRDO/*Defence Research and Development Organization* sebagai lembaga riset pemerintah yang didirikan pada tahun 1958 mengkoordinir jaringan pusat penelitian dan laboratorium militer. Karena perkembangannya cukup pesat maka beberapa tahun kemudian, 1962 didirikan *Department of Defense Production* sebagai lembaga produksi yang membawahi delapan DPSU dan 41 *Ordnance Factories/OF* (Gupta, 2012).

Keterlibatan industri militer domestik di India memiliki fungsi ganda bagi pemerintah maupun MNC pertahanan. Bagi pemerintah, partisipasi aktif firma domestik sebagai sub kontraktor dari SoE militer selain memberikan peluang efisiensi anggaran belanja militer, juga menjadi wahana transfer teknologi. Sementara bagi MNC pertahanan, pemberian kewenangan bagi firma domestik India untuk menjalin kerjasama dengan mereka, menjadi jalan untuk merintis privatisasi industri militer di negara berkembang melalui kerja sama ventura antara swasta baik domestik maupun internasional.

STATUS RATNA DAN RUR SEBAGAI INSTRUMEN DST

Pilihan posisi peran pemerintah sebagai manajer, fasilitator dan pemersatu bagi seluruh kelompok kepentingan, juga berdampak dalam struktur kepemilikan saham SoE bidang militer, keterlibatan lembaga departemen maupun otonom sebagai unsur penunjang. Regulasi fundamental atas DPSU dan OF dijalankan melalui konsep hibah status *ratna* sedangkan bagi firma domestik diberlakukan RUR.

Pemberian status *ratna* bagi DPSU merupakan hak otonomi, terkait dengan kedudukannya sebagai badan usaha milik negara. Tujuannya adalah memberikan kewenangan khususnya dalam kebijakan investasi, penjualan emisi saham baru melalui pasar bebas. Peringkat maharatna memberikan keleluasaan investasi. Kerja sama produksi, ventura serta penjualan saham dalam jumlah yang lebih besar, nominalnya sampai 5000 *crore* sementara kewenangan *navratna* hanya terbatas sampai 1000 *crore*. *Mini ratna* memiliki batasan lebih rendah lagi, 300–500 *crore* atau separuh dari laba bersih (The Times of India, 25 Desember

2009).

Di antara kesembilan perusahaan, sampai tahun 2016, baru HAL (*Hindustan Aeronautics Ltd.*) dan BEL (*Bharat Electronics Ltd.*) yang telah berstatus *navratna*, sedangkan keenam perusahaan lainnya masih berstatus *mini ratna* kategori 1. Satu-satunya DPSU yang belum mampu meraih status *ratna* adalah HSL (*Hindustan Shipyard Ltd.*). Perusahaan ini terbebani produksi kapal selam bertenaga nuklir serta kualifikasi sistem penjaminan mutu, ISO 9001 sebagai suatu perusahaan perkapalan modern sehingga menderita defisit sejak tahun 2013 sampai 2016 (*The Times of India*, 24 Desember 2009).

Tiga belas perusahaan multinasional India berkategori RUR terlahir dari rekomendasi *Kelkar Committee* dengan tujuan peningkatan kompetensi swasta sebagai rekanan DPSU maupun jaringan pertahanan internasional. Vijay Kelkar dalam rekomendasinya mengungkapkan tingginya persaingan dalam inovasi persenjataan semakin memperberat DPSU dalam usaha peningkatan statusnya menuju *maharatna*. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada beberapa entitas global milik bangsa India menjadi salah satu alternatif antisipasi (Sharma, *The Hindu*, 08 Agustus 2008).

Proses penetapan statusnya memerlukan waktu sampai empat tahun, karena Kementerian Pertahanan India (MOD) membutuhkan konsultasi serta pertimbangan yang cukup mendalam dengan CII (*Confederation of Indian Industry*) dan *Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry* (FICCI). Tahun 2007 terbentuk komite seleksi tingkat tinggi (*Sengupta Committee*) atas RUR. Komite ini menetapkan batasan kualifikasi RUR sepadan dengan status *navratna*. Nilai kontrak minimum bagi mereka sebagai rekanan DPSU maupun kontraktor pertahanan adalah Rs 1000 *crore* bagi jalur kendaraan baja dan Rs 5000 *crore* untuk pesawat dan kelautan (Behera, 2008).

Hibah status *ratna* dan RUR berdampak pada kecenderungan interaksi kelompok kepentingan (domestik) dengan jaringan kontraktor pertahanan dan karakteristik bisnis militer. Tidak semua entitas swasta global India berkonsentrasi serta memiliki divisi

berjalur produksi barang/jasa militer. RUR sebagai representasi swasta global memiliki karakteristik serta peran krusial yang sebanding dengan *chaebol* di Korea Selatan. Sebagai bagian dari birokrat, *Kelkar Committee* telah membuka jalan ke arah desinvestasi, namun permasalahan utama terletak pada fungsi khusus DPSU/OF dalam anggaran defisit adalah sebagai wahana pemenuhan kebutuhan Angkatan Bersenjata India, agar tingkat ketergantungan terhadap persenjataan impor maupun investasi asing bisa berkurang. Beban ini berdampak pada pajak tidak langsung atas produksinya. Penetapan kuantitas atas pajak tidak langsung yang cukup tinggi bagi DPSU justru akan membebani pemerintah sendiri sebagai pembeli utama. Para pembuat kebijakan lainnya berkehendak mempertahankan perimbangan andil dari pemangku industri militer (Behera, 2013).

Sebagai jalan tengah, kriteria hibah status *ratna* merupakan rujukan penjaminan mutu secara menyeluruh mulai dari peluang kenaikan harga saham, sampai dengan prediksi disinvestasi dan potensi pasar produksi barang maupun jasa perusahaan. Nominal ambang batas yang telah ditetapkan terhadap PSU maupun firma domestik telah dipertimbangkan para pembuat kebijakan sehingga isu disinvestasi bukan menjadi sebuah fenomena yang terlarang namun justru diantisipasi dengan tuntutan kualitas serta kompetensinya guna bersaing dalam pasar global (Kelkar, *Inclusion*, Januari – Maret 2010).

Kriteria setiap *ratna* bagi setiap DPSU menjadi pembatasan secara kuantitatif terhadap kompetensi mereka melalui instrumen fiskal di atas. Komitmen pemerintah dalam mengontrol kualitas produksi barang maupun jasa yang dihasilkan secara langsung tercermin dari konsistensinya untuk mengikuti setiap tahapan perkembangan mereka serta berusaha mengendalikannya melalui instrumen fiskal tersebut. Sebagai pemegang saham utama, pemerintah bisa melakukan percepatan menuju status *navratna* dengan prediksi emisi saham dalam pasar modal harus mampu menaikkan ketiga segmen utama (Koner, 2014).

Kompetensi RUR menempatkan mereka sebagai peringkat pertama ketika pelelangan beragam proyek

pemerintah maupun kerja sama dengan modal asing, sesuai dengan ketentuan DPP. Beberapa perusahaan multinasional milik Bangsa India yang belum mampu mencapai status tersebut tetap didorong serta diberikan kesempatan menjalankan bisnis jasa militer melalui sistem BPO - *outsourcing*. Masa ROI (tingkat pengembalian investasi) bagi industri militer cukup lama, apabila jumlah aktiva lancar yang dimiliki belum cukup besar sesuai dengan kuantitas RUR, maka perusahaan tersebut akan memiliki masalah finansial di awal pengerjaan suatu tender persenjataan (Behera, 2008).

Ketentuan RUR secara fiskal merupakan standar penjaminan mutu bagi perusahaan yang berinisiasi memperbesar atau merintis jalur produksi militer. Prediksi Vijay Kelkar atas sistem *Public Private Patnership* ini (jagranjosh.com, 29 Desember 2015) dalam jangka panjang akan mampu meringankan beban pembelanjaan militer negara, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu tiang penyangga industri militer nasional. Kebijakan ini juga memberikan ciri khas bagi India, khususnya penguatan swasta domestik yang sebanding dengan usaha peningkatan kapasitas perusahaan negara guna menciptakan situasi kondusif bagi kontraktor pertahanan maupun modal asing sebagai katalisator sub sektor industri ini (Singh, 2010). Tata Group, misalnya telah memiliki jangkauan bisnis militer mulai dari pesawat, peluru kendali, *arm drone* sampai dengan kelistrikan dan jasa konsultasi militer. Begitu pula dengan Mahindra & Mahindra Ltd., entitas global ini bahkan mampu memperluas jalur produksi militernya, tidak hanya dalam senjata altileri, namun sampai pada pemrosesan baja dan jasa militer, khususnya bagi penerbangan (Behera, 2013).

Sebagian saham Larsen & Toubro dipegang pemerintah sehingga secara langsung perusahaan ini berkonsentrasi sebagai sub kontraktor DRDO, ISRO serta DPSU bidang Kelautan dalam mengembangkan persenjataan modern seperti rudal balistik, landasan peluncuran roket, dan kapal selam bertenaga nuklir. Meskipun secara kuantitas kontribusinya terbatas, namun mampu mengurangi tingkat kerugian Goa

Shipyards Ltd., *Mazagon Dock Ltd.*, *Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.* dan *Hindustan Shipyards Ltd.* sebagai perusahaan militer negara bidang perkapalan (Chhibber, 2013).

Peran sebagai rekanan pemerintah dalam industri militer juga dikembangkan Godrej. Melalui Precision Division Ltd. Divisi militer ini memiliki dua anak perusahaan dalam bisnis militer, Godrej and Boyce Ltd. dan Godrej Aerospace Ltd.. Yang pertama berkonsentrasi guna inisiasi kerja sama ventura atau produksi, khususnya dengan kontraktor pertahanan atau PMSC. Salah satu hasilnya adalah Efacec Engenharia dari Portugis untuk pembuatan robot dan pesawat nir awak. Sedangkan yang terakhir lebih ditujukan sebagai fasilitasi sub kontraktor, baik domestik maupun asing (firstpost.com, 14 Agustus 2014).

Kirloskar Ltd. merupakan perusahaan alat berat ternama India dengan keunggulan dalam pompa dan generator. Perusahaan ini menjadi pintu masuk Toyota, dalam usaha perluasan jaringan investasi otomotifnya di India. Pasca 2008, Divisi "*Kirloskar Brother Ltd.*" (KBL) ditugaskan menginisiasikan bisnis militer, khususnya sebagai penyedia peralatan serta suku cadang pesawat, landasan peluncuran roket atau rudal balistik. Dukungan Toyota memberikan dampak global bagi perusahaan ini. Sampai tahun 2014, perusahaan ini telah menjadi sub kontraktor pembuatan *dry dock*, *port trust* dan infrastruktur perkapalan lainnya bagi Angkatan Laut India. Melalui konsep "*Fluid Management System*", KBL berhasil menjadi penyalur beragam jenis pompa modern seperti *concrete volute*, BHM T130 bagi kepentingan proyek pembangkit energi nuklir atau kelistrikan baik domestik maupun PMSC. Kapasitasnya sebagai RUR mampu mengimbangi Tata Power Ltd.. Bisnis internasionalnya per tahun 2013 telah mampu menyumbangkan 30% dari penghasilan perusahaan (Atarodi, 2010).

Hinduja Group sebagai *Holding Company* dari Ashok Leyland, memiliki strategi pengembangan tersendiri. Sebagai entitas global yang telah mencapai peringkat RUR, divisi ekspor perusahaan kemudian

bergabung dengan dua entitas global terkemuka dalam konsultasi dan manajemen, Capgemini Ltd. (Perancis) dan Frost & Sullivan Ltd. (AS). Melalui keduanya maka perusahaan bisa memasarkan berbagai produksi persenjataan dan jasa konsultasinya ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik dan Afrika. Perusahaan lainnya dalam kelompok konsorsium ini, yakni Hinduja Technology Ltd. melengkapi fasilitas penawaran produksi maupun jasa *Ashok Leyland Defense System* sehingga prediksi satu dasawarsa ke depan, perusahaan tidak hanya terkonsentrasi pada sistem persenjataan bagi angkatan darat maupun para militer saja, melainkan juga penerbangan dan C4ISR (capgemini.com, 13 Nov 2014).

Kalyani Group bahkan berkembang cukup pesat setelah Bharat Forge menerima status RUR (showdailys.com, 7 Feb 2014). Perkembangan empat belas anak perusahaannya mampu mendukung kompetensinya sebagai entitas global bidang infrastruktur dan *forging*. Keragaman divisinya cukup lengkap mulai dari jasa konsultan, penyalur bahan mentah baja sampai penyedia beragam suku cadang yang sangat dibutuhkan berbagai sub sektor industri. Bharat Forge sebagai ujung tombak, memiliki manajemen tersendiri, di bawah kendali BF Investment Ltd.. Di samping itu Hikal Ltd. menjamin kelangsungan inovasi beragam produksinya melalui beragam riset. Sejak tahun 2014 telah dilakukan kerja sama ventura dengan Elbit Systems sebagai perusahaan senapan terkemuka milik pemerintah Israel (kalyanigroup.com, 19 September 2015).

Tiga perusahaan multinasional India berkualifikasi RUR yang tersisa adalah Infosys Technologies Ltd., Wipro Technologies Ltd. dan HCL Technologies Ltd.. Ketiganya bergerak dalam bidang computer dan IT. Meskipun kontribusinya dalam industri militer bertema sejenis yakni jasa konsultasi IT bagi kepentingan militer/pertahanan, C4ISR (*Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) dan Penerbangan maupun masing-masing memiliki spesifikasi berbeda antara satu dengan lainnya. Infosys lebih menekankan pada dua konsentrasi: kerja sama riset dengan institusi

pendidikan asing di satu sisi, sementara di sisi lainnya mengontrol pengembangan divisi berjalan jasa militernya secara langsung tetap di bawah kendali perusahaan. Sementara Wipro Technology justru sangat menekankan kerja sama ventura/produksi dengan kontraktor pertahanan utama seperti Boeing, Lockheed Martin, Northrop and Grumman, Airbus, dan BAE. Sedangkan HCL Technologies lebih meningkatkan fungsinya sebagai konsultan penerbangan (Chhibber, 2013).

PENGEMBANGAN KLUSTER INDUSTRI MILITER MELALUI TECHNO PARK

Neumann (1994) mengemukakan bahwa kluster industri berteknologi tinggi di bidang informasi akan mampu memberikan peluang negara Dunia Ketiga untuk mengkomersialisasikan industri militernya karena tingkat pembelanjaan dalam litbang militer dalam kondisi tertentu justru akan menguntungkan sistem ekonomi domestik jika bisnis militer ini dilakukan dengan cara maupun kaidah industri sipil termasuk teknik dan materialnya. Penelitiannya membantah hasil penelitian Degler (1983) atas beberapa LDC (*Least Developed Country*) termasuk India, bahwa secara kuantitatif, sedikit sekali dampak positif pengeluaran militer terhadap pembangunan, bahkan lebih besar negatifnya karena banyak mengurangi tabungan nasional.

Lebih lanjut lagi dikemukakan Neumann (1995) makna komersialisasi industri militer adalah kemampuan suatu LDC untuk menangkap peluang, sesuai dengan kemampuan serta keunggulan regional yang dimilikinya sehingga tetap mampu menjual produk industri militernya, meskipun dalam wujud jasa. *Military support - training*, dukungan logistik, informasi intelijen, sebagai salah satu bentuk jasa militer *non-combatant* yang sarat dengan teknologi tinggi, telah mampu menunjukkan kontribusinya dalam industri militer. Negara penggunaannya bisa negara Barat maupun berkembang di sekitarnya yang sedang terlibat konflik. India, sudah lama merintis *trainer* sebagai bentuk output industri militernya sehingga meskipun ekspor persenjataan mereka relatif kecil,

namun kerjasamanya dengan Argentina, Brazil, mampu mencatat 80% produksi sistem persenjataan di negara Dunia Ketiga.

Adam Segal (2004) pun sependapat, AS tidak mungkin menghambat laju perkembangan industri militer di negara kawan maupun rivalnya - baik di Barat maupun LDC. Tuntutan inovasi yang berkesinambungan semakin menyulitkan negara Adi Kuasa tersebut untuk mempertahankan posisinya di tempat teratas apabila tidak melakukan perubahan kebijakan di bidang militer sejak dini. Kendala utama yang dihadapi oleh negara Adi Kuasa tersebut adalah peningkatan kompleksitas dalam keamanan regional tidak memungkinkan lagi sistem monopoli, justru dengan kerjasama internasional akan mampu menciptakan suatu pasar modal yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sejalan dengan konsep yang dikemukakan kedua ilmuwan di atas, Bitzinger (2009) berpendapat bahwa negara Dunia Ketiga tetap mampu berkontribusi dalam industri militer global di Abad 21 ini asal berkonsentrasi pada keberadaan RMA yang berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak dari RMA terhadap pengembangan industri militer adalah keberadaan suatu link antara orang, platform, senjata, sensor, dan berbagai keputusan tentang bantuan militer dari negara lain ke dalam suatu jaringan tunggal. Andrew L. Ross (2008) menyebutnya dengan istilah NCW (*Network Centric Warfare*).

Setelah itu pengembangan kluster industri di dalamnya, termasuk militer, merupakan pengembangan jalur produk dari teknologi informasi sifat RMA sendiri. Menurut peneliti lainnya, Sloan (2000) coraknya telah menuntun kluster industri militer di dalamnya ke arah dua spesifikasi produk, yakni: a) persenjataan dan pesawat tempur dengan ketepatan bidikan terhadap sasaran, meskipun berjarak ratusan mil kilometer (*precise strike*) dan b) satelit dan *chip* yang memiliki kemampuan *battlespace awareness* dalam menjalankan.

Bagi negara berkembang, kluster ini menjadi wahana alih teknologi serta memperoleh dukungan

finansial internasional bagi industrinya. Leslie (1996) bahkan mengungkapkan jika beberapa negara berkembang di Asia menggunakan kluster teknologi ini untuk mencapai keunggulan regional. Hanya coraknya berbeda, di sana dominasi pemerintah terlihat menonjol. Leslie menyebutkan dua contoh negara dengan konsep pengembangan lembah silikon yang berbeda. AS di satu sisi mengembangkan dengan liberalisasi dan privatisasi, sedangkan Korea Selatan mengintegrasikannya dengan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, riset dan strategi pembangunan.

Breznitz (2007) meneliti pengembangan kluster teknologi di Israel, Taiwan, dan Irlandia. Hasil penelitiannya menegaskan urgensi peran pemerintah dengan alasan untuk menanggulangi kegagalan pasar, karena di satu sisi tuntutan pembiayaan yang cukup tinggi sementara dari segi permintaan tidak mampu memberikan daya beli yang sebanding. Modal ventura, menjadi tidak optimal dalam pengalokasian sumber daya. Selain itu, menurutnya, kebijakan pemerintah merupakan langkah yang cukup krusial karena proses inovasi itu sendiri bersifat kerja kolektif antara pemerintah dan swasta. Sehingga, pemerintah harus secara aktif memfasilitasi *link* antara industri domestik dengan pasar global baik dengan jaringan produksi maupun finansial.

Kaitan antara DST dengan *techno park*, terletak pada strategi yang diambil oleh negara model secara khusus dalam kluster ini sebagai antisipasi terhadap pasar. Segmen yang menonjol adalah penguatan, penciptaan *political agent* dan diplomasi. Penelitian Yun (2002) atas kaum diaspora Tionghoa berkebangsaan Taiwan di AS menunjukkan keberhasilan pemerintah Taipei untuk menarik kaum diaspora Cina sehingga bersedia kembali ke tanah airnya, merupakan ancaman bagi neoliberalisme. Min Ye (2009) bahkan mengemukakan, keberadaan jaringan diaspora Tionghoa yang kuat dengan pemerintah lokal di PRC melalui mekanisme difusi, mampu mendorong Pemerintah Beijing sehingga semakin kolaboratif terhadap pasar, dan berdampak pada pembentukan zona ekonomi khusus serta desakan reformasi terhadap

kebijakan atas SoE.

Dalam kaitan antara diplomasi dengan penciptaan *political agent* melalui *techno park* sebagai instrumen insentif, sehingga terjadi suatu ikatan, kepedulian sampai dengan partisipasi terhadap pembangunan domestik tanah air mereka, Rana (2014) membandingkan usaha diplomasi antara India dengan Tiongkok dalam kerangka peningkatan *political agent* dari kaum diaspora masing-masing. Tiongkok dipandang lebih berhasil karena didukung oleh beragam konsorsium bisnis Cina serta kaum profesional, sedangkan India mengalami kendala minimnya fasilitasi pemerintah terhadap keinginan, aspirasi kaum diaspora India.

KEBIJAKAN FISKAL DAN NON FISKAL SEBAGAI CIRI KHAS INDIA DALAM DST

Sebagai strategi terhadap pasar, kedua kebijakan, baik fiskal maupun non fiskal, secara sederhana mampu memberikan sebuah tatanan fundamental bagi negara ini sehingga secara kontekstual tetap berada di jalur DST sehingga Mukherji (2016) menyebut India sebagai model non klasik, karena corak dua kebijakan ini. Posisi industri militer sebagai salah satu sub sektor prioritas India, membuat dua kebijakan ini terlihat nyata perbedaannya dengan Tiongkok dan Korea Selatan sebagai dua model klasik.

DPP (*Defense Procurement Procedure*) sebagai kebijakan fiskal khusus bagi industri militer memiliki komposisi perimbangan yang lebih longgar bagi modal asing dalam segmen tertentu, namun tetap memberikan ruang gerak bagi perusahaan negara dan firma domestik – entitas global maupun industri berskala kecil dan menengah. Sementara kreasi dalam SEZ (*Specific Economic Zone*) meskipun tidak mencakup klausul subsidi gaji pegawai berkebangsaan India yang bekerja pada modal asing seperti dua negara sebelumnya, namun tetap mampu menjadikan zona tersebut sebagai lokasi pasar tenaga kerja internasional.

Kedua kebijakan di atas, merupakan hasil andil yang seimbang diantara pembuat kebijakan India, dimotori oleh kaum birokrat. Aspek rasionalitas lebih diutamakan daripada kepentingan parsial. Hal ini

terlihat nyata dalam dinamika DPP sampai tahun 2013, khususnya pada perubahan komposisi kerja sama ventura/produksi pada setiap konsep – *buy*, *make*, *buy and make* serta segmen – *low technology mature system*, *high technology complex system* dan *strategic, complex and security sensitive system*. Wacana yang tersirat adalah sikap terbuka yang lebih luas terhadap modal asing/jaringan kontraktor pertahanan namun tetap menjaga dampak negatifnya dengan tuntutan pelaksanaan alih teknologi melalui konsep *buy and make* diiringi dengan tuntutan internal bagi modal manusia dengan konsep *make*.

Dua jenis kebijakan moneterinya – devaluasi dan *holding*/sekuritas, saling melengkapi sehingga negara ini terbebas dari dampak negatif penurunan nilai rupee atas US \$ oleh RBI (*Reserve Bank of India*). Konsorsium yang telah dibentuk RUR memiliki konsep sekuritas dan ruang gerak luas dan fleksibel, khususnya pasar modal di Eropa. Ketika ekonomi domestik sedang terpuruk akibat krisis moneter maupun dampak devaluasi, kondisi industri militer tidak terpengaruh karena ketersediaan pasar bagi jalur produksi jasa militer tetap stabil, karena terjamin oleh keberadaan pangsa pasar tradisional maupun potensial. Sektor jasa secara umum tahan terhadap krisis moneter. Selain itu konsorsium milik RUR memiliki sekuritas berbasis pasar modal Eropa, padahal devaluasi dilakukan atas US \$, sehingga berbagai valas Eropa yang bersifat *hard currency*, cenderung menstabilkan likuiditas perusahaan mereka.

Tata Sons sebagai konsorsium milik Tata group menempatkan bisnis militer sebagai salah satu prioritas utama mereka. Konsorsium ini bahkan pernah mengakuisisi saham Daewoo ketika mengalami kebangkrutan dan dijual di pasar modal Eropa. Beberapa tahun kemudian seluruh saham miliknya dijual kepada KAMCO (*Korea Asset Management Corporation*) yang kemudian dialihkan pada POSCO (*Pohang Iron and Steel Company*). Kontribusi yang serupa juga diberikan tiga konsorsium swasta lainnya, Hinduja Group, Godrej and Boyce Mfg Co Ltd. dan Kalyani Investment Company Ltd.. Keempatnya menjadi pembeda India dengan Tiongkok maupun Korea Selatan. Di kedua negara tersebut tidak terdapat

konsorsium swasta yang memiliki keterlibatan cukup besar dalam industri militer.

India termasuk negara pendukung IMF dan aktif menggunakan hak SDR setiap dilanda krisis. Melalui sistem anggaran defisit yang sangat ketat, bersama sama dengan Tiongkok, negara ini tercatat berhasil menggunakan fasilitasi kredit lembaga ini untuk mengatasi ketimpangan neraca pembayaran serta krisis moneter tanpa intervensi eksternal dalam penetapan kebijakan anggaran secara langsung. Kedua negara dipandang telah mampu mengantisipasi dampak negatifnya baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

Tahun 2014, mencatat kinerja perekonomian India mengalami peningkatan GDP cukup tinggi, meskipun usai menuai krisis moneter akibat fluktuasi harga minyak dunia di tahun 2012. Pada tahun tersebut prosentase kenaikan sebesar 7.17%. Prediksi para ekonom, berdasarkan *forecast* prosentase kenaikan GDP, jika Pemerintah senantiasa konsisten dalam sikapnya terhadap FDI sebagai katalisator pembangunan, maka angka ini akan terus meningkat sampai tahun 2018 sehingga menjadi 7.65% (Master, 2014).

KESIMPULAN

DST tumbuh dan berkembang lebih berwujud sebagai suatu tatanan, bukan merupakan teori yang bersifat statis melainkan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan LDC dalam mengantisipasi langkah progresif modal asing - FDI dan portofolio. Ketika para pakar meneliti beragam masalah yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan, maka DST muncul sebagai salah satu teori rujukan. Pemberian label suatu negara menggunakan DST atau tidak, bukan dilakukan oleh negara, melainkan para pakar melalui beragam dalih. Keberadaan India sebagai model DST, terletak pada dua konsep utamanya yakni domain negara dan strateginya terhadap pasar. Sifat domain negara mengikuti peran pemerintah yakni sebagai pemersatu, fasilitator tunggal sekaligus menjadi manajer atas berbagai jenis investasi. Sifat *half intervention* secara melekat dalam tipe domain ini.

Sementara strategi sangat melekat dalam kebijakan fiskal dan non fiskal.

Herring (1999) mengungkapkan, karakter domain negara yang disebutnya dengan istilah *embedded particularism*, menjadi kunci utama kegagalan negara ini agar tetap berada dalam koridor developmentalist. Negara dipandang lemah dan tidak mampu mengatasi persoalan sosial ekonomi selain karena pemerintah federal New Delhi lemah dibandingkan dengan negara bagian, konflik antar partai politik semakin memperburuk kondisi negara ini.

Sinha (2005) mengkritisi pendapat ini dengan mengungkapkan istilah kegagalan bagi India dalam hal ini karena mereka meninjaunya dari kerangka domain negara bersifat *fully intervention*, seperti di Jepang, dan di sisi lainnya keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi India hanya dipandang sebagai hasil liberalisasi atas pasar. Menurutnya klaim atas kegagalan maupun keberhasilan India merupakan suatu *puzzle* yang hilang namun para peneliti justru memandang dari sudut pandang lainnya di luar kerangka DST. Sinha (2003) kemudian berusaha mengelaborasi keberadaan domain negara dalam pemerintahan India melalui wawancara terhadap sejumlah birokrat dan pelaku bisnis tentang pembuat kebijakan negara tersebut. Hasilnya adalah suatu konsep baru di ranah DST, India telah menunjukkan keberadaan *half intervention*, suatu komposisi seimbang di antara para pembuat kebijakan, dimana di dalamnya mencakup para pelaku bisnis, legislatif, bahkan negara bagian.

Artikel ini menjadi salah satu pendukung konsep yang diletakkan oleh Sinha. Paparan dalam berbagai bab menunjukkan keberadaan unsur utama *half intervention* ini seperti jajaran birokrasi yang mampu berfungsi sebagai pelopor *think tank of development* seperti, DRDO, Kelkar Committee, lembaga riset. Dalam beberapa persoalan pembangunan sektoral, supremasi pemikiran mereka di atas pertikaian antar partai di India. Pemerintahan bisa dipegang secara bergantian oleh Congress Party atau BJP (*Bharatiya Janata Party*) namun pemikiran para birokrat tersebut secara berkesinambungan tetap diimplementasikan. Selain itu dari kalangan pebisnis, kelompok RUR

maupun non RUR juga kaum diaspora senantiasa mendukung keberlanjutan program yang telah diletakkan landasan oleh lembaga ini.

REFERENSI

JURNAL

- Bolesta, Andrzej. 2007. "China as Developmentalist State". *Montenegrin Journal of Economics* No 5 (June).
- Chin, Lim Hyun and Jan Jin- Ho. "Between Neoliberalism and Democracy: the Transformation of the Developmental State in South Korea". *Development and Society* Volume 35 No 1 (June).
- Degler, Saadet and Ron Smith. 1983. "Military expenditures and Growth in Less developed Countries. *Journal of Conflict Resolution*, Vol 27 No 2 (June).
- Doner, Richard F (et. al.). 2005. "Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective". *International Organization* 59 (Spring)
- Gupta, PK. 2012. "General Study of Public Sector Undertakings: Growth of PSUs and How Effectively Financially Managed are our PSUs". *Basic, Applied and Social Sciences*. Volume II Oct
- Koner, Sri Santosh (et. al.). 2014. "Disinvestment of Public Sector in India: Concept and Different Issues." *Journal of Economics and Finance* Vol 3 Issue 6 (May – Jun)
- Leslie, Stuart W and Robert H Kargon. 1996. "Selling Silicon Valley: Frederick Terman" model for Regional Advantage. *The Business History Review*, Vol 70 No 4 (Winter)
- Minns, John. 2001. "Of Miracles and Models: the Rise and decline of the Developmental State in South Korea". *Third World Quarterly* (Vol. 22 No 6)
- Min, Ye. 2009 "Policy Learning of Diffusion: How China Opened to Foreign Direct Investment". *Journal of East Asian Studies* Vol 9 No 3 (Sept – Dec)
- Neuman, Stephanie G. 1984. "International Stratification and Third World Military Industries". *International Organization* Vol 38 No 1 (Winter)
- _____. 1994. "Arm Transfers, Military Assistance, and Defense Industries: Socio economic Burden or Opportunity?". *Annals of the American Academy of Political and Social Science* Vol 535: The Arm Trade: Problem and Prospect in the Post Cold War World (Sept)
- _____. 1995. "The Arm Trade, Military Assistance and Recent Wars: Change and Continuity". *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol 541: Small Wars (September)
- Öniş, Ziya. 1991. "The Logic of the Developmental State Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization by Alice H. Amsden; The Political Economy of the New Asian Industrialism by Frederic C. Deyo; MITI and the Japanese Miracle by Chalmers Johnson; Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization by Robert Wade"(Article Review). *Comparative Politics*, Vol. 24, No. 1 (Oct)
- Patibandla (et. al.). 2000. "Import Substitution with Free Trade: Case of India's Software Industry". *Economic and Political Weekly* Vol 35 No 15 (April)
- Rana, Kishan S. 2014. "Diplomacy Systems and Processes: Comparing India and China. *China Report* 50: 4
- Ross, Andrew L. Peter Dombrowski. 2008. "The Revolution in Military Affairs, Transformation and the Defence Industry". *Security Challenges*, Vol. 4, No. 4 (Summer)
- Segal, Adam. 2004. Is America Losing Its Edge? Innovation in a Globalized World. *Foreign Affairs*. Vol 83 No 6 (Nov – Dec)
- Seung, Wook Baek. 2005. "Does China Follow the East Asian Development Model". *Journal of Contemporary Asia* Vol 35 no 4
- Sinha, Aseema. 2003. "Rethinking the Developmental State Model: Divided Leviathan and Subnational Comparisons in India". *Comparative Politics* Vol 35 No 4 (July)
- Sloan, Elinor. 2000. "Canada and the Revolution in Military Affairs: Current Response and Future Opportunities". *Canadian Military Journal* (Autumn)

BUKU

- Atarodi, Alexander (et. al.). 2010. "India: A defence and Security Primer". *Monograf of FOI*. Stockholm: FOI Press
- Bagchi, Amiya Kumar. 2003. *The Developmental State in History and in the Twentieth Century*. New Delhi: Regency Publications
- Baskaran, Angathevar. 2005. "The Role of Offsets in Indian Defense Procurement Policy" dalam Jurgen Brauer, dan J Paul Dunne. 2005. *Arm Trade and Economic Development: Theory, Policy and Cases in Arms Trade Offsets*. New York: Routledge.
- Behera, Laxman K. 2013. "Indian defence Industry Issues of Self Reliance". *IDSA Monograf Series No 21*. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses Press
- Berberoglu, Berch. 1992. *The Political Economy of Development: Development Theory and The Prospect for Change*. New York: State University of New York Press
- Bitzinger, Richard A. 2009. *The Modern Defense Industry: Political, Economy, Technological Issues*. California: ABC-CLIO
- Brennitz, Dan. 2007. *Innovations and the State: Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan and Ireland*. New Haven: Yale University Press.
- Chhibber Brajesh (et. al.). 2013. "A bright Future for India's Defense Industry?" *Monograf of McKinsey on Government*. New Delhi: McKinsey Press
- Herring, Ronald J. 1999. "Embedded Particularism: India's Failed Developmental State dalam Meredith Woo and Cumings. 1999. *The Developmental State*. London: Cornell University State Press
- Hoyt, Timothy D. 2007. *Military Industry and Regional Defense Policy: India, Iraq and Israel*. New York: Routledge
- Johnson, Chalmers. 1995. *Japan: Who Governs?: The Rise of the developmental State*. New York: W.W. Norton Company Inc
- Martinussen, John Degnbol. 2001. *Policies, Institutions, and Industrial Development: Coping with Liberalisation and International Competition in India*. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd
- Leamer, Edward E. 1995. *The Heckscher Ohlin Model in Theory and Practice*. New Jersey: Princeton University Press
- Low, Linda. 2004. *Developmental States: Relevancy, Redundancy, or Reconfiguration*. New York: Nova Science Publishers, Inc
- Martinussen, John Degnbol. 2001. *Policies, Institutions, and Industrial Development: Coping with Liberalisation and International Competition in India*. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd
- Mukherji, Rahul. 2016. "Is India a Developmental State" dalam Yin,

- Wah Chu (ed).2016. *The Asian Developmental State: Reexaminations and New Departures*. London: Palgrave Macmillian
- Nayar, Baldev Raj. 2010. *Globalization and Politics in India*. Oxford: Oxford University Press
- Pirie, Iain. 2008. *The Korean Developmental State: from Dirigisme to Neo-liberalism*. New York: Routledge
- Sinha, Aseema. 2005. *Regional Root of Developmental Politics in India: A Divided Leviathan*. Indianapolis: Indiana University Press
- Wade, Robert. 1990. *Governing the Market: Economic Theory and the role of Government in East Asia Industrialization*. New Jersey: Princeton University Press
- Yun, Han Chu. 2002. "Re-engineering the Developmentalist State in Age of Globalization: Taiwan in Defiance of Neoliberalism". *The China Review* Vol 2 No 1 (Spring)

MAKALAH INTERNASIONAL

- Mah, Luis. 2011. "Lesson from Korea to Africa: Leaders, Politics and Developmental States. *International paper* for 4th European Conference on African Studies 17th June 2011 Uppsala (Swedia) oleh CEaA (Centro de Estudos sobre Africa e do Desenvolvimento) lembaga riset dari Insituto Superior de Economia e Gestao da Universidade Tecnica de Lisboa
- Gupta, Poonam and Barry Eichengreen. 2011. "The Service Sector as India's Road to Economic Growth. *Working paper* that was presented to National Bureau of Economic Research (NBER) on February.

INTERNET

- "Ashok Leyland Enriches Massive Data with Superior BI Capabilities" tersedia dalam <https://www.capgemini.com/resource-file-data> diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30 access/resource/pdf/ashok_leyland_enriches_massive_data_with_superior_bi_capabilities.pdf
- Behera, Laxman K. 2008. "Private Sector Participation in India Defence Industry" tersedia dalam <http://www.idsa.in/taxonomy/term/593> data diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30
- "Defence may Notify Companies cleared for Raksha Udyog Ratna Status". *The HINDU*. 8 August 2008 data diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30
- General Knowledge Today. News. April 2013. "Minimum Support Price Scheme" tersedia dalam <http://www.gktoday.in/minimum-support-prices/> data diakses pada tanggal 28 April 2015 pukul 15.30
- "How Godrej Helped India in Its Fight for Freedom" tersedia dalam <http://www.firstpost.com/india/sponsored-how-godrej-helped-india-in-its-fight-for-freedom-1663841.html> data diakses pada tanggal 28 April 2015 pukul 15.30
- "Kalyani Group to Intensify its Focus on defence Business" tersedia dalam <http://www.kalyanigroup.com/Story/21/2014-03-20%20-%20On%20the%20Defence%20Business> data diakses pada tanggal 28 April 2015 pukul 15.30
- Kelkar, Vijay. 2010. "On Strategies for Disinvestment & Privatisation". Inclusion Jan –March 2010 tersedia dalam <http://inclusion.skoch.in/story/521/on-strategies-for-disinvestment-&-privatisation-821.html> data diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30
- "Kilroskar Brothers Limited- a Kilroskar Group Company 94th Annual

- Report 2013 – 2014" tersedia dalam http://www.moneycontrol.com/bse_annualreports/5002410314.pdf diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30
- "Maharatna status for mega PSUs gets nod". *The Times of India*. 25 December 2009. data diakses pada tanggal 23 Feb 2014 pukul 12.14 Wib
- Masters, Jonathan. October 2014. The International Monetary Fund-Introduction" dalam <http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberkey1=430&date1Key=2015-03-31> data diakses pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 06.30
- Nune, Shavan. 29 Dec 2015. "Report of Vijay Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing PPP Model released" tersedia dalam <http://www.jagranjosh.com/current-affairs/report-of-vijay-kelkar-committee-on-revisiting-revitalizing-ppp-model-released-1451371983-1> data diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30
- "On National Security Interest, Govt Moves Hindustan Shipyard to Defence Ministry". *The Times of India*. 24 December 2009 data diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 13.30

Diplomasi Ekonomi China di Negara-Negara Teluk

Bambang Cipto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Ringroad Barat, Bantul, Yogyakarta 55183, Indonesia
bcipto2008@yahoo.com
Diserahkan: 01 September 2016, Diterima: 3 Januari 2017

Abstract

This article aims to analyse the diplomatic relation between China and the gulf states which incorporated to Gulf Cooperation Council (GCC). The absence of England from this region in late 1960s was marked by the changing of China relation to the gulf states. However, as the pro-communist policy by China had spread over the world, the gulf country were reluctant to open diplomatic relation with China immediately. Therefore, this situation has made the changes went slowly. The spreading of the external threat from Soviet Union Communism in Iraq, became a strong consideration for Kuwait to eventually open the diplomatic relation to China before the other gulf state.

Keywords: Economic Diplomacy, East Asia, Gulf States, Gulf Cooperation Council

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan diplomasi antara China dan negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*). Keluarnya Inggris dari kawasan Teluk pada akhir dekade 60-an ditandai, antara lain, dengan perubahan hubungan China dan negara-negara Teluk. Namun perubahan ini berlangsung cukup lambat karena masa lalu kebijakan pro-komunis China di berbagai belahan dunia membuat negara-negara Teluk tidak segera membuka hubungan diplomasi dengan China pada saat itu. Kuwait merupakan sebuah perkecualian karena kekhawatiran Kuwait terhadap melebarnya pengaruh Uni Soviet di Iraq yang cenderung pro-Uni Soviet. Kekhawatiran terhadap ancaman eksternal ini menjadi alasan kuat bagi Kuwait untuk mendahului rekan-rekannya sesama negara Teluk dalam membuka hubungan diplomatik dengan China.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Asia Timur, Negara Teluk, Dewan Kerjasama Teluk

PENDAHULUAN

Hubungan diplomasi antara China dan negara-negara teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC) baru berkembang antara awal 1970-an hingga akhir dekade 1980. Keluarnya Inggris dari kawasan teluk pada akhir dekade 1960-an ditandai, antara lain, dengan perubahan hubungan China dan negara-negara teluk. Namun, perubahan ini berlangsung cukup lambat karena masa lalu kebijakan prokomunis China di berbagai belahan dunia membuat negara-negara teluk tidak segera membuka hubungan diplomasi dengan China pada saat itu. Kuwait merupakan sebuah perkecualian karena kekhawatiran Kuwait terhadap melebarnya pengaruh Uni Soviet di Iraq yang cenderung pro-Uni Soviet. Kekhawatiran terhadap ancaman eksternal ini menjadi alasan kuat bagi Kuwait untuk mendahului rekan-

rekannya sesama negara teluk dalam membuka hubungan diplomatik dengan China. Oman mengikuti jejak Kuwait dengan membuka hubungan dengan China tahun 1978. Sementara negara-negara teluk yang lain baru membuka hubungan diplomasi dengan China sejak China melancarkan politik pintu terbuka tahun 1978 (BBC).

Dengan dilancarkannya kebijakan pintu terbuka oleh Deng Xioping, China tidak lagi menutup diri dari kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. China membuka pintu bagi investasi asing. Dalam hubungan internasional, China juga menanggalkan kebijakan perjuangan kekuasaan internasional dan menggantikannya dengan politik luar negeri yang lebih pragmatis (The Guardian, 2008). Pragmatisme politik luar negeri China, antara lain, dengan meninggalkan

kebiasaan mencampuri urusan dalam negeri negara lain sebagaimana dipraktikkan China sebelum Deng Xioping. Deng menerapkan kebijakan baru yang lebih berorientasi pada upaya membangun ekonomi nasional China yang semakin terpuruk akibat kebijakan ekonomi tertutup dimasa Mao. Deng menciptakan angin baru dalam politik luar negeri China termasuk pada diplomasi China dengan negara-negara teluk. Tulisan ini akan meneliti bagaimana diplomasi China terhadap negara-negara teluk dan bagaimana dampaknya bagi masa depan China di Timur Tengah secara umum?

Diplomasi secara umum dapat dipahami sebagai cara mengelola hubungan antar-bangsa melalui jalan perundingan. Tujuan utama diplomasi sesungguhnya adalah untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan antara negara dengan mengutamakan perundingan untuk menghindari sejauh mungkin penggunaan kekerasan yang sering merugikan banyak pihak. Diplomasi ekonomi merupakan perkembangan baru dari istilah diplomasi secara umum dan baru mulai berkembang pada tahun 1980-an, walaupun praktik diplomasi ekonomi sesungguhnya jauh lebih tua dari definisinya. Kebijakan Marshall Plan pemerintah Amerika untuk membangun kembali perekonomian Eropa sesudah PD II bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi yang terkemuka pada waktu itu. Diplomasi ekonomi adalah upaya untuk mendapatkan jaminan keamanan ekonomi ditengah hubungan internasional yang anarkis (Hocking in Denemark, 2010: 1216-1227). Menurut Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan aset-aset diplomatik untuk meningkatkan kemakmuran Australia dan kemakmuran global. Diplomasi ekonomi memiliki empat pilar yakni memajukan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, menarik investasi dan mendukung bisnis Australia. Secara umum tujuan utama dari diplomasi Australia adalah untuk meningkatkan kemakmuran (Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade).

Sementara itu pemerintah Jepang dibawah

Nobusuke Kishi memperkenalkan istilah diplomasi ekonomi dan menerapkannya di Asia Tenggara. Nobusuke memberikan bantuan luar negeri dan infrastruktur untuk negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan utama untuk membentuk dan membangun pasar bagi barang-barang komoditas Jepang dikemudian hari (Hao, 2014). Diplomasi ekonomi Jepang sangat besar pengaruhnya bagi negara-negara Asia Tenggara bahkan hingga kini produk-produk Jepang masih mendominasi pasar Asia Tenggara.

Dalam perspektif diplomasi ekonomi diatas, diplomasi ekonomi China di negara-negara teluk merupakan upaya China untuk mendapatkan pemasok energi berupa minyak dan gas untuk menopang perekonomian China. Diplomasi ekonomi yang diterapkan China berbeda dengan diplomasi yang diterapkan Amerika dan negara-negara Barat lain. Perbedaan tersebut adalah bahwa diplomasi ekonomi China bebas dari unsur campur tangan China terhadap negara-negara teluk. Artinya bahwa diplomasi ekonomi China sepenuhnya merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjamin suplai minyak dan gas dari kawasan teluk tanpa ada campur tangan terhadap isu-isu politik di negara-negara teluk. Dengan karakter khusus tersebut bukan tidak mungkin diplomasi China akan semakin diterima oleh kalangan negara-negara. Di samping itu menurunnya impor minyak Amerika dari negara-negara teluk dalam beberapa tahun terakhir menempatkan China sebagai importir minyak terbesar menggantikan posisi Amerika. Penurunan impor minyak Amerika dari kawasan Timur Tengah disebabkan oleh meningkatnya produksi dalam negeri dan ditemukannya *shale oil* yang menambah banyak cadangan minyak Amerika (Institute of Energy Research, 2015). Pergeseran sumber minyak inilah, antara lain, yang membuat China terus meningkatkan diplomasi ekonominya di negara-negara teluk. Meningkatnya kebutuhan minyak dan gas juga memunculkan istilah diplomasi sumber daya. Dalam konteks ini, China berusaha membina hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang guna memenuhi kebutuhan energinya (Zweig, 2010: 38).

PEMBAHASAN

HUBUNGAN CHINA DAN NEGARA-NEGARA TELUK

Negara-negara teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) terdiri dari Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Persatuan Emirat Arab (UAE), dan Saudi Arabia menduduki posisi strategis dalam hubungan internasional karena kawasan ini merupakan salah satu pusat penghasil minyak dan gas dunia dalam jumlah sangat besar. Hingga tahun 2013, negara-negara teluk menguasai 24% produksi minyak mentah dunia. Di samping itu, 30% cadangan minyak mentah dunia juga berada di negara-negara teluk. Sementara itu, Qatar adalah negara yang menguasai cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia sesudah Iran dan Rusia (Salacanian, 2015).

Kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam merupakan daya tarik utama yang mendorong China untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara teluk. Arah kebijakan ini menarik perhatian karena negara-negara di kawasan teluk sudah sejak lama menjamin hubungan yang kuat dengan negara-negara Barat khususnya Amerika. Amerika memiliki jaringan basis militer di kawasan Timur yang terbentang dari Afghanistan hingga Afrika Timur. Amerika menempatkan ribuan pasukan militernya di Arab Saudi dan Kuwait. Sementara itu, Angkatan Udara Amerika memiliki basis militer di Qatar, UAE, dan Oman. Sedangkan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika memiliki basis angkatan laut di Bahrain. Selama lebih dari 30 tahun jaringan basis militer AS tersebut melindungi negara-negara teluk dari intervensi militer Rusia. Kerjasama militer ini bukan tanpa resiko sama sekali. Jaringan basis militer inilah sesungguhnya yang menjadi penyebab kebangkitan kelompok-kelompok Islam radikal yang sangat menentang kehadiran basis militer tersebut di negeri mereka sendiri (Vine, 2016).

Kedekatan negara-negara teluk dengan Amerika dipandang China bukan sebagai halangan untuk membina hubungan baik dengan kawasan tersebut. Kebutuhan energi yang sangat banyak membuat diplomasi China di kawasan teluk menjadi sangat

penting dan strategis bagi masa depan kemajuan China sendiri. Oleh karena, sejak kunjungan Presiden Hu Jintao ke Timur Tengah tahun 2006 dan 2009, pemerintah China telah memastikan bahwa hubungan dengan negara-negara di kawasan teluk akan terus ditingkatkan (Aluwaisheg, 2014).

Kunjungan Hu Jintao bukan tanpa hasil karena sejak 2010 hubungan China dan GCC terus meningkat dalam bentuk dialog strategis yang berlangsung hingga tiga kali. Dialog strategis pertama diselenggarakan di Beijing tahun 2010. Dialog tingkat menteri ini menghasilkan kesepakatan tentang masa depan hubungan China dan GCC. Mereka sepakat bahwa dialog akan meningkatkan kerjasama timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2010).

Tahun 2011, dialog strategis kedua diselenggarakan di Abu Dhabi. Pada dialog ronde kedua ini kedua pihak sepakat untuk terus memperdalam dan memperluas koordinasi kerja sama (Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, 2011). Dalam dialog strategis ronde ke tiga yang diselenggarakan di Beijing tahun 2014 perkembangan cukup berarti mulai terlihat. Kedua belah pihak sepakat untuk mendukung implementasi kebijakan China, yakni, *The Silk Road Economic Belt dan the Maritime Silk Road of the 21 Century* (Embassy of The People's Republic of China in Arab Republic of Egypt, 2014). Dialog ini diselenggarakan tepat waktu, yakni, pasca pengumuman *grand strategy* diatas oleh presiden Xi Jinping tahun 2013.

Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Arab Saudi pada awal Januari 2016 memperkuat hubungan China dan negara-negara teluk. Dalam kunjungan tersebut Xi Jinping bertemu dengan Sekretaris Jendral GCC, Abdul Latif Bin Rashid al Zayani. Dalam pertemuan yang difasilitasi Kerajaan Arab Saudi tersebut Xi menyatakan kesiapan China sebagai pasar energi jangka panjang bagi negara-negara teluk. Menanggapi pernyataan Presiden Xi Jinping tersebut, Sekretaris Jendral GCC Zayani menyatakan bahwa seluruh

anggota GCC berharap agar kerjasama dengan pemerintah China ditingkatkan hingga ke “*special strategic partnership*” (Xiaokun, 2016). Dalam pembicaraan tersebut, Xi juga menyatakan mendukung upaya-upaya untuk memperdalam kerja sama dalam bidang infrastruktur, telekomunikasi, investasi, energi nuklir dan teknologi angkasa. Pembicaraan kerja sama ekonomi kedua belah pihak menjadi perhatian khusus Raja Arab Saudi yang juga menyatakan bahwa kedua belah pihak sangat bergembira menyaksikan perkembangan pembicaraan antara pihak China dan GCC (CGTN America, 2016).

Kunjungan Xi Jinping ke Arab Saudi dan pertemuan dengan Sekretaris Jendral GCC al-Zayani mengisyaratkan keberhasilan diplomasi China di negara-negara teluk. Baik China maupun GCC, keduanya menunjukkan minat yang kuat untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama ekonomi kedua belah pihak. Dalam kenyataan, kerjasama ekonomi antara China dan GCC terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tahun 2012 volume perdagangan kedua belah pihak telah mencapai angka \$155 miliar, angka ini jauh melampaui volume perdagangan China-Iran pada tahun yang sama yang hanya bernilai \$37 miliar. Bahkan nilai ekspor China ke GCC sebanyak \$60 miliar pertahun telah melampaui nilai ekspor Amerika ke kawasan tersebut (Karasik, 2016).

DIPLOMASI EKONOMI CHINA DI NEGARA-NEGARA TELUK Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UAE) adalah salah satu dari anggota GCC yang cukup lama membina hubungan dengan China. UAE merdeka pada 2 Desember 1971 setelah PM Inggris Harold Wilson menyatakan akan menarik pasukanya dari kawasan teluk dua tahun sebelumnya. Hanya dalam waktu satu hari setelah kemerdekaan Presiden UAE, Sheik Sayid bin Sultan memberitahu PM China, Zhou Enlai, tentang kemerdekaan tersebut. PM Zhou Enlai membalas berita tersebut dengan menyatakan akan mengakui kemerdekaan UAE. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah China dengan sigap segera

menyelenggarakan pameran produk China di Dubai dan diikuti dengan pengiriman misi diplomasi kebudayaan untuk mempererat persahabatan dengan UAE. Hubungan diplomasi dengan China dimulai pada tahun 1984 setelah pemerintah China mengembangkan kebijakan ekonomi terbuka dibawah Deng Xioping (Hua, 2015).

Sejak dibukanya hubungan diplomatik, hubungan kedua negara semakin erat. Berturut-turut para pemimpin China berkunjung ke UAE. Presiden China Yang Shangkun melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Abu Dhabi pada tahun 1989. Sheik Sayed bin Sultan al-Nahyan melakukan kunjungan balasan ke Beijing pada tahun 1990. Pada tahun 2007, presiden Hu Jintao juga berkunjung ke Abu Dhabi (Emirates New Agency, 2015). Pada tahun 2012, Wen Jiabao juga berkunjung ke UAE (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2015). Pada tahun 2015, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, berkunjung ke UAE (Hua, 2015). Rangkaian kunjungan pemimpin China selama tiga puluh tahun terakhir merupakan sinyal sangat kuat bahwa UAE merupakan negara federasi yang memainkan peran strategis bagi masa depan perekonomian China.

Bagi China, UAE memainkan peran strategis dalam perdagangan global negeri panda tersebut. UAE adalah pintu masuk bagi perdagangan China dengan Afrika dan Eropa. Barang-barang China memasuki UAE melalui pelabuhan Jebel Ali yang merupakan pelabuhan kontainer terbesar kesembilan di dunia. Pelabuhan udara Dubai International Airport, yang telah mengalahkan Heathrow (London) sebagai pelabuhan paling sibuk, merupakan surga bagi warga China dengan hobi utama belanja. Dubai juga menjadi salah satu kota paling menarik didunia bagi pengusaha China. Tahun 2005 kurang dari 20 perusahaan yang beroperasi di Dubai, tahun 2015 jumlah tersebut menggelembung menjadi 4000 perusahaan China. Dubai Mart adalah mega-mal terbesar yang dibangun China diluar *mainland*. Tiap hari Dubai Mart dikunjungi tidak kurang dari 50.000 orang untuk belanja segala macam kebutuhan dari boneka hingga alat-alat pertambangan (Molavi, 2015).

Bulan Desember 2015 merupakan puncak keberhasilan China dalam menjalankan diplomasi perdagangan dengan UAE. Pada bulan ini, Yang Mulia Shaikh Muhammad Bin Sayed, Putra Mahkota Abu Dhabi dan yang juga menjabat sebagai Deputi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UAE, melakukan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping dengan membahas berbagai isu nasional maupun internasional yang menyangkut kepentingan kedua negara. Namun, hal terpenting dalam pertemuan tersebut adalah penandatanganan *UAE-China Joint Strategic Investment Fund* yang bernilai \$60 miliar (Gulf News Government, 2015).

Sangat menarik untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak saat dunia memandang pertumbuhan ekonomi China mulai melambat. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa pihak UAE meragukan kemampuan ekonomi China ditengah kritik dunia terhadap melambatnya perekonomian China. Bukan tidak mungkin bahwa kalangan elit UAE berasumsi bahwa pelambatan adalah sesuatu yang normal terjadi dengan harapan akan kembali membaik pada waktunya. Dengan modal keyakinan ini, UAE memantapkan diri meningkatkan kerjasama dengan China.

Diplomasi China di UAE juga semakin kuat sejalan dengan pergeseran arus kelas menengah dunia dari kawasan utara menuju kawasan selatan. Pada tahun 2030 kelak diperkirakan sepertiga dari kelas menengah dunia akan tinggal di kawasan Asia Pasifik sejalan dengan semakin berkurangnya jumlah kelas menengah di Eropa dan Amerika. Khusus untuk China jumlah kelas menengah diprediksi akan mencapai angka 1 miliar pada tahun 2030. Berdasarkan prediksi tersebut China akan menjadi negara dengan jumlah kelas menengah terbesar didunia. Prediksi ini membuat China tidak ragu-ragu untuk terus mengembangkan kerjasama dengan UAE.

Sebagai langkah antisipasi perkembangan ekonomi masa depan UAE juga menyiapkan diri dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pelaku bisnis China. Dewasa ini tidak kurang dari 250 perusahaan China beroperasi di Otoritas Zona Bebas

Pelabuhan Jebel Ali. Dari kawasan bisnis khusus inilah perusahaan-perusahaan China membuka dan mengembangkan pasar di kawasan Afrika (Jaber, 2016).

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa diplomasi China selama tiga puluh tahun terakhir plus prediksi perubahan-perubahan ekonomi masa depan menempatkan China pada posisi yang semakin dekat dengan UAE. Sebaliknya, UAE pun terus berusaha untuk mendekati China untuk memanfaatkan kebijakan ekonomi China yang cenderung terus berkembang. Kepentingan timbal balik antara kedua belah pihak dengan demikian menjadikan hubungan China dan UAE selaku negara muslim semakin erat dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Qatar

Qatar adalah anggota GCC yang juga menarik perhatian China mengingat posisinya sebagai eksportir LNG terbesar di dunia. Qatar memiliki cadangan gas alam terbesar ketiga setelah Rusia dan Iran. Hasil penjualan gas alam, minyak mentah, dan produk petrokimia lain menyumbangkan separuh dari penghasilan pemerintah (U.S. Energy Information Administration, 2015). Pada tahun 2015, Qatar tercatat sebagai negara terkaya di kalangan negara-negara teluk, bahkan terkaya didunia. Qatar juga tercatat sebagai pemerintahan paling efisien menurut versi World Economic Forum (Albawaba, 2015).

Qatar dengan kekayaan sumber alamnya sudah barang tentu menarik perhatian China yang senantiasa haus dengan energi. Walaupun hubungan dagang telah dimulai sejak tahun 1950-an, hubungan diplomasi secara resmi baru dimulai pada tahun 1988. Sejak itu kunjungan timbal balik antarpemimpin China dan Qatar berlangsung intensif. Kunjungan timbal balik antar pemimpin kedua negara menghasilkan kemajuan yang luar biasa bagi kedua belah pihak. Pemerintah China memanfaatkan hubungan baik tersebut untuk mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang perdagangan dan investasi.

Gao Yaozhen, duta besar China untuk Qatar yang fasih berbahasa Arab, menyatakan bahwa hubungan China dan Qatar selama terus berkembang semakin

baik. Beberapa perusahaan China dipercaya pemerintah Qatar untuk membangun berbagai proyek besar di Qatar seperti Doha Lusail City, Doha Tower, dan New Doha Port (Aguilar, 2013). Duta besar Yaozhen juga masih akan terus mengembangkan kerjasama dalam sektor-sektor lain untuk mengimbangi impor gas dan minyak yang merupakan komoditas utama pemerintah Qatar.

China mulai menjadi pasar LNG Qatar sejak 2009, sebelumnya Qatar menjual LNG ke Jepang, India, dan Korea Selatan. Dalam waktu lima tahun, ekspor LNG Qatar ke China meningkat dari 2 Juta Ton Pertahun (MTPA) menjadi 7 juta ton pertahun pada akhir 2013. Saat ini Qatar menyuplai sepertiga dari seluruh kebutuhan LNG China (18,6 juta ton per tahun) dan menjadikan Qatar sebagai suplier LNG terbesar untuk China (Al-Tamimi, 2014).

Meningkatnya peran strategis Qatar sebagai suplier gas terbesar bagi China mendorong Beijing lebih agresif dalam mengembangkan kerjasama dengan negara teluk tersebut. Bulan April 2015 China membuka *renmimbi (yuan) clearing center* di Qatar. Gubernur bank sentral Sheikh Abdullah bin Saud al-Thani dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan dibukanya *renmimbi clearing center* di Doha ini diharapkan perdagangan Qatar dan China akan semakin berkembang (Bakr, 2015).

China berharap dengan terbentuknya *renmimbi clearing center* di Doha akan banyak kemudahan yang diperoleh mengingat transaksi perdagangan di Timur Tengah masih didominasi oleh dolar Amerika. Dengan adanya *clearing center* berbasis yuan ini China akan lebih mudah mengatur urusan finansialnya di kawasan Timur Tengah. Disamping itu, baik Qatar maupun China dengan sendirinya akan terbebas dari ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dolar Amerika. Langkah ini juga menopang kebijakan ekonomi China dalam konteks *Silk Road Economic Belt*. Secara geopolitik upaya China untuk membangun tatanan internasional baru yang sesuai dengan kepentingannya semakin kuat (Rakhmat, 2015).

Kuwait

Kuwait adalah negara anggota GCC yang paling lama menjalin hubungan dengan China, yaitu sejak kedua negara resmi membuka hubungan diplomatik tahun 1971 (Embassy of People's Republic of China in the State of Kuwait). Jika negara-negara teluk lain menunggu cukup lama untuk membuka hubungan diplomatik dengan China, Kuwait adalah negara yang pertama kali membuka hubungan diplomatik dengan China jauh sebelum pemerintah China mencanangkan kebijakan pintu terbuka yang diluncurkan oleh Deng Xioping (BBC).

Sejak hubungan diplomatik terbentuk hubungan persahabatan antar kedua negara berkembang dengan cepat melalui kunjungan timbal balik antara elite kedua negara. Presiden China, Yang Shangkun, berkunjung ke Kuwait pada tahun 1989, Menteri Luar Negeri China Qian Qichen berkunjung ke Kuwait pada tahun 1990, demikian pula Perdana Menteri Li Peng pada tahun 1991. Pada tahun 2008, Wakil Perdana Menteri Le Keqiang juga berkunjung ke Kuwait. Sebaliknya, Emir Kuwait Jaber beberapa kali berkunjung ke Beijing. Demikian pula Pangeran Mahkota dan Perdana Menteri Saad berkunjung ke Beijing pada tahun 1995 (Embassy of People's Republic of China in the State of Kuwait).

China sangat menghargai Kuwait karena secara konsisten mendukung kebijakan Satu China dalam arti Kuwait memilih tidak mengakui Taiwan dan hingga kini tak ada perwakilan diplomatik Kuwait di Taiwan. Kuwait juga mendukung penuh isu-isu hak asasi manusia di China. Sebagai balasan atas dukungan penuh terhadap dua isu penting tersebut China juga menentang invasi dan pendudukan Kuwait oleh Iraq tahun 1990. Perdana Menteri China Li Peng merasa perlu untuk berkunjung ke Kuwait beberapa bulan setelah Kuwait merdeka dari pendudukan Iraq (Niazi, 2009).

Meningkatnya hubungan kedua negara mempermudah tumbuhnya hubungan saling menolong antara kedua negara. Musim panas tahun 1998, sungai Yang Tze meluap dan menimbulkan banjir besar. Ribuan orang meninggal dan jutaan

keluarga kehilangan tempat tinggal. Pada saat pemerintah China membutuhkan bantuan keuangan dalam jumlah besar, Kuwait memberikan donasi sebanyak \$3 juta. Tak ada negara lain yang jumlah sumbangannya melebihi apa yang diberikan Kuwait saat itu (Lulu, 2011).

Hubungan persahabatan ini terus dipelihara kedua belah pihak. Kunjungan Perdana Menteri Kuwait, Shaikh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al-Sabah, ke Beijing atas undangan Perdana Menteri China Li Keqiang pada bulan Juni 2014 memperkuat asumsi di atas. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama. Li secara khusus menawarkan kesediaannya untuk membantu pengembangan proyek kereta api di Kuwait dan berharap agar Kuwait terus mendukung proyek pengembangan *the Silk Road Economic Belt* dan *the Maritime Silk Road* serta persiapan peluncuran *Asian Infrastructure Investment Bank*. Shaikh Jaber menanggapi positif tawaran-tawaran yang diajukan Li Keqiang. Pertemuan keduanya diakhiri dengan penandatanganan beberapa perjanjian bilateral dalam bidang perdagangan, keuangan, energi, dan penerbangan (Xuequan, 2014).

Baik Kuwait maupun China menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkatkan kerjasama. Di satu pihak, China berharap agar kerjasama ekonomi terus dikembangkan hingga terbentuknya *free trade agreement*. Disisi lain, Kuwait berharap agar China tetap membuka pasarnya bagi produk gas dan minyak negara teluk tersebut. Kedua negara tampaknya menghendaki kepastian dalam masa depan kerja sama kedua belah pihak.

Oman

Muscat, ibu kota Oman, adalah nama sebuah kota di Teluk yang selalu muncul dalam peta saat seseorang terbang melintasi kawasan tersebut menuju Eropa atau saat akan transit di Dubai. Oman adalah sebuah kesultanan yang terletak di mulut Teluk Persi. Oman memiliki tempat khusus bagi para pengambil keputusan di Beijing. Omanlah negara Arab yang pertama kali mengekspor minyak ke China sebelum

negara-negara Arab lain melakukan hal yang sama. Dengan demikian, minyaklah yang melandasi poros utama Muscat – Beijing hingga saat ini. Kesultanan Oman sangat ramah terhadap Beijing sehingga lebih dari empat puluh perusahaan China diberi kesempatan untuk beroperasi di Oman. Oman juga merupakan pasar bagi barang-barang komoditas China (The Diplomat, 2014).

Minyak adalah tulang punggung hubungan China dan Oman. Sekalipun produksi minyak Oman per hari kurang dari satu juta barel namun China tetap menganggap Oman sebagai eksportir minyak yang strategis. Sekitar 10% dari seluruh impor minyak China berasal dari Oman. China juga mengimpor gas alam dari Oman (Zambelis, 2016). Bagi Oman, China adalah rekanan dagang terbesar karena sebagian besar ekspor minyaknya tertuju ke China. Untuk memelihara hubungan dagang yang menguntungkan ini tahun 2015 Oman termasuk salah satu negara yang menandatangani pembentukan AIIB (Observer, 2015).

Berita-berita internasional tentang kemunduran ekonomi China semenjak harga minyak dunia merosot tajam hingga dibawah \$30 tidak banyak berpengaruh terhadap kepercayaan Kesultanan Oman terhadap masa depan ekonomi China. Disamping tentu saja ketergantungan ekonomi Oman terhadap China membuat pilihan lain menjadi kurang menarik. Oleh karena itu, pada pertengahan bulan Mei 2016 kedua negara dengan penuh semangat menyelenggarakan Forum Bisnis China dan Oman di Shanghai dan Guangzhou. Kedua belah pihak memanfaatkan forum tersebut untuk mengevaluasi peluang kerjasama investasi dan bisnis kedua negara. Forum tersebut secara khusus juga membahas peluang investasi bagi China dalam rencana pengembangan zona ekonomi khusus di Dugm (Times of Oman, 2016).

Pemerintah China dengan cepat menanggapi tawaran investasi jangka panjang ini dan segera mewujudkan tawaran tersebut dalam bentuk perjanjian kerjasama kedua negara. Dugm adalah kawasan pantai di sebelah selatan ibu kota Oman, Muscat, yang membentang sepanjang 550 km. Proyek raksasa ini dirasa mendesak bagi pemerintah Oman

sebagai upaya diversifikasi ekonomi yang didorong oleh menurunnya harga minyak dunia. Pemerintah diharapkan akan menginvestasikan \$370 juta dari total anggaran yang diperkirakan akan mencapai \$10 miliar (Reuters, 2016). Proyek jangka panjang ini menunjukkan betapa kepercayaan Oman terhadap kemampuan ekonomi China tak tergoyahkan meskipun berita tentang kemunduran ekonomi China telah menyebar di berbagai media cetak maupun elektronik. Akan tetapi, dengan tercapainya kesepakatan kedua negara untuk membangun proyek raksasa di Gudm membuat keraguan terhadap masa depan ekonomi China tak banyak berpengaruh pada langkah-langkah strategis dalam bidang ekonomi dan perdagangan Oman hingga saat ini. Tampaknya Oman telah mengambil pilihan yang tepat karena paling tidak dalam jangka panjang perekonomian China tetap prospektif dibandingkan dengan negara-negara Barat dengan jumlah penduduk yang relatif tidak banyak menunjukkan kenaikan berarti. Sebuah sinyal yang cukup mengkhawatirkan bagi masa depan perekonomian Barat. Sesuatu yang belum terjadi di China saat ini.

Bahrain

Dibandingkan dengan rekan-rekan sesama anggota Dewan Negara Teluk, Bahrain dapat dikatakan paling lambat dalam membuka hubungan diplomatik dengan China. Pada saat negara-negara teluk lain telah mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China, Bahrain masih bertahan sebagai negara sekutu Barat tanpa ada hubungan diplomasi sama sekali dengan China hingga pada awal tahun 1989. Baru pada bulan April tahun 1989 Bahrain secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan China.

Sekalipun demikian, pembukaan hubungan diplomatik ini tidak secara otomatis menghasilkan terobosan-terobosan dalam hubungan ekonomi kedua negara. Masing-masing pihak menunggu cukup lama sebelum pada akhirnya muncul prakarsa-prakarsa peningkatan kerjasama konkret dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tahun 2004 Bank of China mulai membuka cabangnya di Manama, ibu kota Bahrain (Albawaba, 2004). Pembukaan kantor cabang

ini diharapkan akan mendorong terbukanya peluang bisnis dan investasi bagi kedua negara. Kerjasama ekonomi kedua negara memang terus berlanjut. Pada awal tahun 2014, pemerintah Bahrain menyetujui kontraktor China untuk membangun puluhan ribu perumahan yang tersebar di berbagai kawasan. Disamping itu pemerintah Bahrain juga mendukung penuh rencana pembangunan mall raksasa yang akan disebut sebagai "Dragon City". (Rakhmad, 2014). Kerjasama ekonomi ini bahkan kemudian menyebar ke sektor-sektor lain seperti pendidikan. Pemerintah Bahrain, misalnya, sepakat untuk membuka *Confucius Institute* di Universitas Bahrain. Dalam sambutan pembukaan, Menteri Pendidikan Bahrain, Madjid Al Nuaimi, menyatakan bahwa selain untuk menambah pengetahuan tentang bahasa dan budaya China diharapkan bahwa Pusat Kajian Konghucu ini akan semakin memperkuat persahabatan Bahrain dan China (Xinhuanet, 2014).

Sejak akhir tahun 2015 hingga pertengahan 2016 kedua negara meningkatkan kunjungan bisnis resiprokal sebagai upaya strategis untuk terus memelihara dan meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Badan Pembangunan Ekonomi (*Economic Development Board*) Bahrain melakukan kunjungan khusus ke China untuk memperkuat kerjasama yang telah ada. Demikian pula delegasi China juga berkunjung ke Bahrain untuk tujuan yang kurang lebih sama (Bahrain News Agency, 2014). Kunjungan timbal balik ini sangat diperlukan kedua negara untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama dalam berbagai bidang. Bagi China ini kesempatan untuk memperluas kehadirannya di kawasan Teluk dan lebih luas lagi ke kawasan Timur Tengah. Bahkan sesungguhnya Bahrain berpotensi menjadi pijakan bagi China untuk memperluas jaringan perdagangan hingga ke negara-negara Afrika yang lebih luas lagi.

MASA DEPAN DIPLOMASI EKONOMI CHINA DI TELUK

Diplomasi China di teluk tampaknya akan terus berkembang sebagai akibat peningkatan kebutuhan energi China, dan sikap negara-negara teluk terhadap

diplomasi China, serta berkurangnya kebutuhan impor minyak Amerika dari kawasan teluk. Perkembangan diplomasi China ini ditandai dengan meningkatkan kerjasama ekonomi antara China dan masing-masing negara teluk maupun hubungan China dengan GCC secara kelembagaan. Pertemuan Xi Jinping dengan Sekretaris Jendral GCC di Riyadh awal 2016 merupakan pertanda yang sangat kuat bahwa diplomasi ekonomi China di kawasan teluk semakin menguat. Kunjungan timbal antara pimpinan negara-negara teluk antara awal hingga pertengahan tahun 2016 juga pertanda baik lain diplomasi ekonomi China menuai hasilnya. Disamping itu, Oman, Qatar, dan UAE adalah founding members dari AIIB yang dibentuk China. Keterlibatan negara-negara teluk dalam institusi keuangan bentukan China tahun 2015 ini memperkokoh kepercayaan negara-negara tersebut terhadap masa depan perekonomian China.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa kunjungan Presiden Xi Jinping ke Riyadh dan pertemuan dengan Sekretaris Jendral GCC, Al Zayani, merupakan pertanda yang sangat jelas betapa semakin menguatnya diplomasi China di negara-negara teluk. Kunjungan itu menepis kekhawatiran global tentang melambatnya perekonomian China sebagai akibat dari penurunan harga minyak dunia. Pembicaraan yang dilakukan kedua belah pihak mencerminkan adanya keinginan kuat untuk terus mengembangkan dan memperluas kerjasama kedua belah pihak. Keinginan China untuk mengembangkan kerjasama jangka panjang dalam bidang energi dengan semua negara teluk adalah sebuah indikator kemajuan diplomasi China di kawasan tersebut. Al Zayani menanggapi harapan Xi dengan menyatakan dukungan terhadap harapan tersebut bahkan Sekretaris Jendral GCC juga mengharapkan peningkatan keterlibatan negara-negara teluk proyek *Belt and Road* (CGTN America, 2016). Harapan timbal balik ini merupakan petunjuk jelas bahwa diplomasi ekonomi China telah berhasil membangun *trust* dikalangan negara-negara teluk.

KESIMPULAN

Berdasarkan perkembangan terakhir di atas sangat

jelas terlihat bahwa diplomasi ekonomi China di kawasan negara-negara teluk cenderung menunjukkan kemajuan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pelambatan perekonomian China tidak memengaruhi kinerja diplomasi China di kawasan tersebut. Sebaliknya, tingkat kepercayaan harapan negara-negara teluk terhadap masa depan ekonomi China cenderung naik sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris GCC, Al Zayani. Tingkat kepercayaan tersebut diperkuat dengan kecenderungan China yang tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Dalam menjalin hubungan dengan China, negara-negara teluk sepenuhnya bebas dari beban untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia yang cenderung menyertai diplomasi Amerika dan negara-negara Barat pada umumnya. Dalam konteks ini, China dipercaya sebagai rekanan bisnis dan politik yang cocok bagi pengembangan masa depan negara-negara teluk.

Sementara itu penurunan import minyak Amerika merupakan "*blessing in disguise*" baik bagi negara-negara teluk maupun China. Negara-negara teluk mendapatkan pasar baru bagi produksi minyak dan gasnya yang lebih menjanjikan. Negara-negara teluk juga mendapatkan jaminan untuk meningkatkan investasinya di luar negeri khususnya di China. Pada waktu yang bersamaan China juga mendapatkan pemasok minyak dan gas alam yang juga sangat menjanjikan. Bertemunya dua kepentingan nasional yang saling berimpit ini menjamin keberhasilan diplomasi ekonomi China di kawasan teluk. China kini mendapatkan pijakan yang sangat kuat di kawasan teluk untuk memenuhi ambisinya yang terlembagakan dalam strategi ekonomi *One Belt One Road policy*. Dengan kata lain, diplomasi ekonomi China di negara-negara teluk tidak hanya menghasilkan pemasok energi baru yang sangat melimpah, namun juga memberi China pijakan baru untuk strategi global ekonominya yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi domestik China.

REFERENSI

- Aguilar, J. (2013, March 13). *China-Qatar relations get a boost*. Diambil kembali dari Gulf Times: <http://www.gulf-times.com/story/345338/China-Qatar-relations-get-a-boost>

- Albawaba. (2004, July 19). *Bank of China opens Bahrain branch*. Diambil kembali dari Albawaba Business: <http://www.albawaba.com/business/bank-china-opens-bahrain-branch>
- Albawaba. (2015, October 30). *This Gulf state was listed as the richest country in the world*. Diambil kembali dari Albawaba: <http://www.albawaba.com/loop/gulf-state-was-listed-richest-country-world-761258>
- Al-Tamimi, N. (2014, November 24). *Qatar looks East: Growing importance of China's LNG market*. Diambil kembali dari Al-Arabia English: <http://english.alarabiya.net/en/views/business/2014/11/24/Qatar-looks-East-Growing-importance-of-China-s-LNG-market.html>
- Aluwaisheg, A. A. (2014, January 19). *China-GCC strategic dialogue resumes*. Diambil kembali dari Arab News: <http://www.arabnews.com/news/511401>
- Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Economic Diplomacy*. Diambil kembali dari <http://dfat.gov.au/trade/economic-diplomacy/pages/economic-diplomacy.aspx>
- Bahrain News Agency. (2014, April 28). *Boost Bahrain-Chinese Relations*. Diambil kembali dari Bahrain News Agency: <http://www.bna.bh/portal/en/news/724865>
- Bakr, A. (2015, April 14). *Qatar launches first Chinese yuan clearing hub in Middle East*. Diambil kembali dari Reuters: <http://www.reuters.com/article/qatar-china-yuan-idUSL5N0XB2D220150414>
- BBC. (n.d.). *Open Door Policy*. Diambil kembali dari Inside China's Ruling Party: http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/asia_pac/02/china_party_congress/china_ruling_party/key_people_events/html/open_door_policy.stm
- CGTN America. (2016, January 20). *China to strengthen ties with Gulf Cooperation Council countries*. Diambil kembali dari <https://america.cgtn.com/2016/01/20/president-xi-pushes-forward-china-gcc-fta-talks>
- Denemark, R. A. (2010). *The International Studies Encyclopedia* (Vol. II). Wiley Blackwell.
- Egypt, E. O. (2014, January 17). *Third Round of China-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue Held in Beijing*. Diambil kembali dari Embassy of the People's Republic of China in Arab Republic of Egypt: <http://eg.china-embassy.org/eng/zgyw/t1121625.htm>
- Embassy of People's Republic of China in the State of Kuwait. (n.d.). *China and Kuwait*. Diambil kembali dari Embassy of People's Republic of China in the State of Kuwait: <http://kw.chineseembassy.org/eng/sbgx/t580302.htm>
- Emirates New Agency. (2015, December 09). *UAE and China enjoy robust relations and bullish prospects: Report*. Diambil kembali dari Emirates New Agency: <https://www.wam.ae/en/news/emirates-international/1395289014840.html>
- Gulf News Government. (2015, December 17). *UAE, China launch \$10b joint strategic fund*. Diambil kembali dari Gulf News Government: <http://gulfnews.com/news/uae/government/uae-china-launch-10b-joint-strategic-fund-1.1636147>
- Hao, Y. (2014, January 20). *Some Thoughts on Deepening Economic Diplomacy*. (L. Xiaoyu, Penyunting) Diambil kembali dari China Institute of International Studies: http://www.ciis.org.cn/english/2014-01/20/content_6623715.htm
- Hocking, D. L. (2010). *Economic Diplomacy*.
- Hua, C. (2015, Desember 12). *Visit marks the beginning of a 'new era of UAE-China relations'*. Diambil kembali dari The National: <http://www.thenational.ae/opinion/comment/visit-marks-the-beginning-of-a-new-era-of-uae-china-relations#full>
- Institute of Energy Research. (2015, May 13). *China Overtakes U.S. as World's Largest Oil Importer*. Diambil kembali dari Institute of Energy Research: <http://instituteforenergyresearch.org/analysis/china-overtakes-u-s-as-worlds-largest-oil-importer/>
- Jaber, S. A. (2016, February 14). *Opinion: Asia's middle class is reshaping world trade*. Diambil kembali dari CNN Money: <http://money.cnn.com/2016/02/14/news/economy/china-india-middle-class-world-trade/>
- Karasik, T. (2016, February 24). *The GCC's New Affair with China*. Diambil kembali dari Middle East Institute: <http://www.mei.edu/content/map/gcc%E2%80%99s-new-affair-china>
- Li Xiaokun, X. Z. (2016, January 21). *China and Gulf nations resume free trade agreement talks*. Diambil kembali dari China Daily: <http://www.mei.edu/content/map/gcc%E2%80%99s-new-affair-china>
- Lulu, F. (2011, September 07). *he Study about the Development Strategy of Economic and Trade Relations between China and Kuwait*. Diambil kembali dari Xinhua.net: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112242.htm
- Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China. (2011, May 03). *The Second China-GCC Strategic Dialogue Held in Abu Dhabi*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/yangjiechichufang_665758/t819923.shtml
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2010, June 04). *Press Communiqué of the First Ministerial Meeting of the Strategic Dialogue Between the People's Republic of China and The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t707677.shtml
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2015). Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.
- Molavi, A. (2015, December 23). *The United Arab Emirate, China, and the New Triple South*. Diambil kembali dari The Foreign Policy Institute.
- Niazzi, K. (2009, September 01). *Kuwait Looks towards the East: Relations with China*. Diambil kembali dari Middle East Institute: <http://www.mei.edu/content/kuwait-looks-towards-east-relations-china>
- Observer, O. D. (2015). Diambil kembali dari <http://omanobserver.om/china-investments-touch-2-bn/>
- Rakhmad, M. Z. (2014, May 22). *China and Bahrain: Undocumented Growing Relations*. Diambil kembali dari Fair Observer: http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/china-and-bahrain-undocumented-growing-relations-66107/
- Rakhmat, M. Z. (2015, June 06). *China, Qatar, and RMB Internationalization*. Diambil kembali dari The Diplomat: <http://thediplomat.com/2015/06/china-qatar-and-rmb-internationalization/>
- Reuters. (2016, May 23). *Chinese investors to build industrial park at Oman's Duqm port*. Diambil kembali dari Reuters: <http://>

- www.reuters.com/article/oman-china-industry-idUSL5N18K32D
- Salacanian, S. (2015, February 1). *Oil and Gas reserves: how long will they last?* Diambil kembali dari BQ Magazine: <http://www.bq-magazine.com/energy/2015/02/oil-and-gas-reserves-in-the-gcc>
- The Diplomat. (2014, May 10). *Exploring the China and Oman Relationship*. Diambil kembali dari The Diplomat: <http://thediplomat.com/2014/05/exploring-the-china-and-oman-relationship/>
- The Guardian. (2008, December 18). *The Great Pragmatist: Deng Xiaoping*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/business/2008/dec/18/globaleconomy-economics>
- Times of Oman. (2016, May 16). *Oman, China business heads explore avenues*. Diambil kembali dari Times of Oman: <http://timesofoman.com/article/83923/Oman/Government/Oman-China-business-heads-explore-avenues>
- U.S. Energy Information Administration. (2015, October 20). *Qatar*. Diambil kembali dari U.S. Energy Information Administration: <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=QAT>
- Vine, D. (2016, January 20). *The U.S. Has an Empire of Bases in the Middle East — and It's Not Making Anyone Safer*. Diambil kembali dari Foreign Policy in Focus: <http://fpif.org/u-s-empire-bases-middle-east-not-making-anyone-safer/>
- Xinhuanet. (2014, June 17). *First Confucius Institute in Bahrain Established*. Diambil kembali dari Xinhuanet: http://english.hanban.org/article/2014-06/17/content_541527.htm
- Xuequan, M. (2014, June 03). *China, Kuwait eye closer friendship, cooperation*. Diambil kembali dari Xinhuanet: http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/03/c_126576653.htm
- Zambelis, C. (2016). China and the Quiet Kingdom: An Assessment of China-Oman Relations. *China Brief*, 15(22).
- Zweig, D. (2010). The Rise of a New Trading Nation. Dalam L. D. Yu, *China, The Developing World, and the New Global Dynamic* (hal. 38). Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.

Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere

Fredy Munthe

Center for Religious and Cross-cultural Studies, Gadjah Mada University
Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
fredy.torang@mail.ugm.ac.id
Submitted: 21 September 2016, Accepted: 14 Desember 2016

Abstrak

Organisasi berbasis agama (FBO) memiliki peran yang kuat dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. Namun, kuatnya peran yang dimiliki negara-bangsa dalam lingkup diplomasi mengabaikan kemunculan FBO sebagai salah satu aktor. Sampai saat ini, belum ada teks yang secara eksplisit membahas munculnya FBO dalam diplomasi kemanusiaan. Semua teks hanya membahas masalah FBO dan aksi kemanusiaan. Namun faktanya, tidak ada bantuan kemanusiaan jika tidak ada diplomasi kemanusiaan sebelumnya. Oleh karena itu artikel ini mencoba untuk melacak munculnya FBO sebagai aktor diplomasi kemanusiaan. Artikel ini menganalisis perspektif diplomasi dan dampaknya terhadap kemunculan FBO sebagai aktor. Untuk melakukannya penulis menggunakan kajian literatur untuk mendapatkan data tentang hal tersebut. Artikel ini berguna untuk memperkuat posisi FBO sebagai salah satu aktor non-negara dalam ruang kemanusiaan begitu pula diplomasi.

Kata kunci: Diplomasi, Organisasi Berbasis Agama, Kemanusiaan, Aktor Non-negara

Abstract

Faith-Based Organization (FBO) has a strong role in conducting humanitarian Diplomacy. However, the strong role of the nation-state in that sphere ignored the emergence of FBO. Until now, there is no text that explicitly discusses the emergence of FBO in humanitarian diplomacy. All of the text only discusses the issue FBO and humanitarian action. In fact, there is no humanitarian aid if there is no humanitarian diplomacy previously. Therefore, this paper traces the emergence of FBO as the actor of humanitarian diplomacy. It analyzes the perspective of diplomacy and the impact of the emergence of FBO as the actor. This article use literature review to get data about the case given. This paper is useful for strengthening the position of FBO as the non-state actor in the humanitarian sphere as well as in diplomacy.

Keywords: Diplomacy, Faith-Based Organization, Humanitarian, Non-state Actor

INTRODUCTION

Faith-Based Organization (FBO) has a role in humanitarian diplomacy. Its presence brings a new spirit in seeking a form of humanitarian diplomacy. However, the strong role of the nation-state ignored the emergence of FBO in conducting humanitarian diplomacy. Most of the discussions only focus on the diplomacy which is conducted by nation-state for a humanitarian issue. Therefore this paper is presented to discuss the emergence of FBOs as the actor of

diplomacy when they conduct a humanitarian activity for a livelihood of the refugees.

Some scholars have recognized the strength of FBOs in establishing relationships with many parties which allows them to collect support, including from government and other NGOs as well as other international parties who cooperate with this kind of organization (Ferris, 2011: 609–611). This phenomenon gives a description that FBOs also have a role in

opening the access so the humanitarian aid can be distributed to the parties that need help (Minear & Smith, 2007: 53–54; Orji, 2011). The way of FBO in conducting negotiation with many parties is evidence that they also have ability as diplomats.

However, to date, there have been only three studies that mention FBO as one of the actors in the field of humanitarian diplomacy alongside the state and secular NGOs. In those studies there is no clear and comprehensive explanation how to perceive the emergence of the FBO as an actor in diplomacy for a humanitarian issue. Regnier (2011) only mentions that there are also humanitarian groups which engaged on the basis of faith while Minear and Smith (2007) added that those groups can be labelled as FBOs. In 2014, Kumesan tried to use the term of FBO and humanitarian diplomacy in her thesis. However, there is no explanation for the emergence of the FBO as the actor of diplomacy in a humanitarian sphere. Moreover, she only used the humanitarian diplomacy as a term that takes for granted. Until now, there are no detailed studies about the emergence of FBOs as the non-state actor in the field of humanitarian diplomacy.

Through this paper, the writer want to continue the research done by Minear and Smith, whose argumentation that FBOs are also playing a significant role as actors in humanitarian diplomacy (Minear & Smith, 2007: 53–54). The writer wants to explain how FBO have emerged as the actors of humanitarian diplomacy in particular in supporting the livelihoods of refugees in several places. This paper aims to fill a scholarly gap between analysis of FBOs and about the concept of humanitarian diplomacy.

ANALYSES

Faith-Based Organizations (FBO) have taken on a major role in diplomacy as a response to the humanitarian issues. These indirectly force a paradigm shifting in naming the actors of diplomacy (Barston, 1997: 12). The diplomacy in the traditional conception placed states as the only actor to make decisions or even enter negotiations, but in recent times the

conception has changed and shifted into a new one that is well known as the idea of multi-track diplomacy. It means that the actors are not only states but there are also many parties that can be considered as the actors. The multi-track diplomacy emerges because the state as the sole actor has limitations in responding to all humanitarian problems. Various actors have emerged in contributing to the response of those conditions, including FBOs, which, through their religious values, seek to aid the needy and vulnerable, including refugees. In the context of assistance, religious teachings have compatibility with existing humanitarian values. FBO uses religious language to communicate with sponsors and other stakeholders but also use the secular language in other contexts.

FBOs have presented since a few years ago and their existence has relevance with the number of humanitarian cases. In several impoverished regions, the role of FBOs is even more prominent than any secular groups (Ferris, 2011). Even though there are many critical questions about the rise of FBO in humanitarian work, it is a fact that FBO as one of the non-state actors with a role in international activities. It happens because they successfully make a connection through diplomacy.

In order to understand the involvement of FBOs in diplomacy for humanitarian purposes, this paper will highlight the development of diplomacy and the dynamics that influence the emergence of FBO. Furthermore, it will show how FBOs put the idea of faith into humanitarian issues. In the last part, this article will describe how FBOs work in some humanitarian cases through diplomacy.

SHIFTING PERSPECTIVES ON THE ACTORS

The shifting process in perceiving the actor of diplomacy occurs as the impact of the humanitarian issues. The development of humanitarian issues specifically leads to a shift of perspective to perceive the existence of diplomatic actor (Barston, 1997: 9–13). The shifting perspective provides a space for humanitarian workers who work for particular organizations to be perceived as diplomats, as well.

Prior to the twentieth century, only the states used diplomacy to pursue their interests (Leguey-Feilleux, 2009: 23); (Black, 2010). There were many efforts from the states as the international actors to solve the humanitarian issues through diplomacy or round-table discussions. At that time, each of states cooperated with the others to gain benefits for their interests. This pattern was even legitimized in the Congress of Vienna in 1815. It led to the presence of diplomacy roles and to the respect of the legitimacy played by the state in International space (Lentner, 1997). The only actor that could play a role in international space was the nation-state. It means the title diplomat or envoy only referred to someone who had received the official mandate from a state to become a diplomat for other parties.

Recognizing the strong role of a state, Morgenthau (1972) then defined diplomacy as follows,

“the art of bringing the different elements of national power to bear with maximum effect upon those points in the international situation which concern the national interest most directly” (Morgenthau, 1972:146).

Morgenthau perceives the diplomacy as an effort of the international actors to get the interests. He emphasizes his perspective of diplomacy on the work of nation-state diplomats at a high level. The national interests that prioritize the domestic interest become the main priority that should be fulfilled by each state. Domestic demand emerges due to the need to resolve humanitarian problems within the borders of a particular state. A fulfilment of domestic demand in a particular state can be interpreted as the humanitarian activity which prefers to be prioritized by any actor when they want to make a link with outside parties. However, the humanitarian issue in this earlier understanding only refers to the activities limited by borders of a country. The humanitarian concern in this context does not reach beyond boundaries.

In addition, when perceiving the style of diplomacy carried out by state actors, so the existence of the diplomatic protocol cannot be avoided. The diplomatic protocol itself is a kind of guidance that must

be followed. It is important because as Bull (1977) said, the diplomatic protocol becomes a bridge to communicate with the others (Bull, 1977:161). The diplomatic protocol itself has strict rules. All parties must have clear understanding about protocol and must commit to a long process before they exchange envoys. These requirements, in turn, became one of the barriers to the movement of the state actors in terms of reducing the humanitarian problems.

Even though the state has conducted a lot of effort to reduce the problems of humanity, in fact there were many humanitarian problems happened. As it is commonly known, a lot of conflicts happened, such as the Battle of Solferino, World War I and World War II, and the Vietnam War, as well as conflicts in Africa, Asia and also Latin America (Cahill, 2013:17-20). Certainly, there were many people who became the victims due to these conflicts. Some of them had to be forcibly-displaced people as the impact of those conditions. They had to escape from their lands to seek a new place for continuing their life (Manning, 2005). Numbers of people became cross-border refugees as what happen to Rohingya people, refugees from East Timor, Syria, Iraq, Afghanistan and so forth.

Galtung (1969) and Tirtosudarmo (2015) argue that forcibly-displaced people existed because of the problem related to the security need of these people wish for (Galtung, 1969; Tirtosudarmo, 2015:281-320). Even though the two scholars perceive this question of security from different perspectives, the essence of the problem is important for seeing the reality experienced by these people who are forcibly displaced and whose lives are threatened because of the condition. The state as the legitimated actor in the international context in fact fails to accomplish it.

The state as the only actor of diplomacy often ignores the existence and the needs of the forcibly-displaced people. If the state had taken a strategy in the form of diplomacy, so it would have only worked on the high-level politics. The state tends to limit its works only on that level. In order to handle the works of diplomacy in the field, the state often cannot make

it. Seeing the condition, the existence of many state actors is not enough to provide humanitarian aid for the refugees. The state actor has limitations in accommodating the humanitarian needs through diplomatic means.

It is perceived that at least there are two limitations with recognizing the state as the one and only actor in diplomacy making response to the global humanitarian affairs. The first is the official protocol of the state. The limitation appears in the official protocol to decide a diplomacy strategy and along with the diplomat. This raises difficulties in realizing a rapid response to the global needs. International humanitarian world really needs the role of the parties that are able to go beyond it. The international humanitarian world needs an actor that can respond quickly toward the humanitarian problems that arise. It is very important because the refugees are the most vulnerable of people.

The second is the existence of the diplomat (representative). In the perspective of traditional diplomacy that puts the state as the only actor, only few parties are recognized as the diplomat. They are the people who get official recognition from their country and also receiver country to become a representative (Bull, 1977:157). In fact, there are many humanitarian workers crossing the territorial boundaries, even though there is no recognition from their country or receiver country. The humanitarian workers even have to cross national borders to conduct negotiations with the others, so they can reach the refugees. Sometimes they even have to work among belligerents in order to reach the refugees. It is very difficult to do for an official state diplomat. This fact shows the condition that the humanitarian issues usually find a contradiction with the way of traditional diplomacy.

The presence of non-state actors become a bid to break the deadlock because of the state's limitation in responding to the international humanitarian issues through diplomatic ways (Leguey-Feilleux, 2009:105). The presence of non-state actors in the international political space has encouraged a change in the existing constellation of humanitarian issues (Manokha, 2011). The emergence of many humanitarian workers also

gradually has shifted the rigidity of the existing rules related to diplomacy (Macalister-Smith, 1985:117). This moment gives an opportunity to other humanitarian organizations, especially those that are based on religious values to develop (Minear & Smith, 2007:36-37). Many non-state actors have emerged as the new power that also influence the international order (Black, 2010:224).

Perceiving this condition, in 1982, Joseph Montville introduced the Multi-Track Diplomacy concept to answer the phenomenon of the emergence of the other actors who did not officially work as state diplomats. In his text, Joseph Montville saw that there were many parties that could be recognized as a diplomat for their state when they had communication with other parties from another state. This phenomenon explains that there is a transformation of the diplomacy concept in international relations sphere. Joseph Montville perceived that the idea of diplomat did not only refer to nation-state diplomat (Diamond & McDonald, 1996). There was a role of another actor that could act as the diplomat too. They could be non-governmental organizations (NGOs), multinational corporations (MNCs), churches and religious movements, transnational terrorists and revolutionaries, and private individuals (Leguey-Feilleux, 2009:101-121).

There are many non-governmental organizations (NGOs) that have emerged as an impact of the humanitarian issues. Their presence on the international level is accordance with the number of international regulations that appeared (Simpson, 1945). It is known that the international regulations are made to provide respect to the humanitarian value. International Committee of Red Cross (ICRC) becomes one of the first organizations that take a concern on this issue. The existence of ICRC which was initiated by Henry Dunnant, becomes a stimulant for the development of humanitarian issues. Over the course of time, there are many parties involved in the humanitarian issues (Roeder & Simard, 2013:3-4).

Multinational corporations (MNCs) are one of the international actors that appear as the impact of the

condition change. The MNC itself is a business-oriented institution that has orientation on seeking a profit. Their expansions in international space have made them able to be actors that can affect local and international stability. The strong profit orientation of this actor is able to fill the weaknesses of the state in encouraging the economic condition of the countries.

Churches and religious movements are the international actors that emerge and fill the religious space. Leguey-Feilleux mentioned two actors as different institutions but their action was still in religious frame. They did so in order to accommodate the specific organizations based on their particular religious teachings. FBO is an example of such organizations. In the thesis written by Gres (2010) it was quite clearly stated that FBO was involved in international humanitarian activities (Gres, 2010). Such types of organizations grow and thrive in all countries to minimize the humanitarian issue including the impact of the wars (Cahill, 2013: 20).

Furthermore, transnational terrorist and revolutionary movements are another kind of non-state actors. They act as international actors because their existence often brings an impact upon the international level. The existence of such groups often gets support of funds from international actors. Generally, their main goal is to overthrow ruling governments. In general, their actions ignore humanitarian values.

Private actors are individuals who have the capability to make an impact in international scale through their thoughts or decisions. Leguey-Feilleux sees that the number of the actors is small, but the presence and their thoughts are influential on the international place. According to Leguey-Feilleux, they come from various places. They can be a former heads of particular institutions including businesses, governments and NGOs.

The shifting perspective in diplomacy studies has brought successfully a new perspective to perceive the diversity of the existing actors. The actors appear as the effect of the existing humanitarian issue. The limited ability of the state in fighting for humanitarian through global diplomatic agendas makes a number of

non-state actors appear to help and provide solutions. The shifting process provides a starting point to discuss the potential role of FBOs in filling the gap that cannot be covered by state actors.

International humanitarian issues have become a trigger for the emergence of many FBOs. They are present as a form of response to a number of humanitarian issues at the global level (Wahid, 2007: 239-251). The strength of the religious teachings has become a fundamental value in the works of FBO in humanitarian. From the observation of some scholars like Marshall (2005) and Ferris (2011), the existence of FBO is quite able to transform the religious teachings into the humanitarian work (Ferris, 2011). Certainly, there are many common values between religious teachings and humanitarian values that make the spirit of religious idea work in humanitarian activity. Starting from this point, this article will see the close relationship between faith values and humanitarian value.

FBO: FAITH VALUES IN HUMANITARIAN ISSUES

This part explains the common sense of the idea between faith value and humanitarian value of the FBO. It is important to discuss because through the faith value, the FBO can conduct the humanitarian activity. It means there must be a similarity between faith value and humanitarian value. To explain it clearly, some ideas that belong to certain religion which has similarity with the idea of humanitarian value will be explained. Furthermore this article will explain the idea of humanitarian and followed by the explanation of how the FBOs interpret the idea of humanitarian into the religious teachings.

The religious teachings share many ideas that are able to remind their adherents of how important it is to share with others. For instance, "the theme of justice for the poor, the marginalized and the alien is central to the Hebrew scriptures" (Ferris, 2005: 313). Furthermore, in Christianity there is the idea of loving your neighbors, like in Matthew 25: 35-40 and within Islam the idea of maintaining good relationships with all of humankind which is called *hablumminannas*. In

addition, there is also a concept of *Zakat* in Islam which aims at helping other people. There are still many other ideas embedded in religious teachings about humanity. Certainly, those ideas are quite capable to shape the way the adherents think about how to treat each other and also the importance of sharing with others (Latief & Mutaqin, 2015: 24-25).

Furthermore, concerning about the humanitarian concept, that can be sketchily concluded as the concept which puts the human as the center of the priority. Most scholars perceive that this concept was born from the concept of altruism and cosmopolitanism. Altruism itself is a concept introduced by August Comte (1798-1857). According to Krieg (2013) altruism is defined as “describing a selfless and other-oriented behavior” (Krieg, 2013: 37). Krieg sees altruism as a concept used to describe the characters of people who try to prioritize the needs of others rather than personal interests.

Hereafter, cosmopolitanism was born from the fruit of Immanuel Kant’s ideas about universal virtue that crosses state boundaries. Some scholars believe that the value of cosmopolitanism can be used as a basis of thinking to solve humanitarian problems. According to Sugiono (2011) cosmopolitanism can be defined as follows,

...every single individual as a goal with ultimate value in itself and their existence is primary to any social organization. They cannot be treated as an instrument of social values or treated differently due to its artificial or social attributes such as citizenship. In more concrete terms, this means that an association of an individual with his or her country, as a citizen, should not qualify her or him to more or less rights or responsibility than other individuals of other countries. (Sugiono, 2011:224)

Certainly, those two values can be perceived as a guiding principle for the people to conduct humanitarian activity for others (Wispé, 1978:304).

Then, FBOs as the part of the certain religious groups also have a similar purpose in conducting the humanitarian activity. The work of FBOs for humanitarian activity is quite in accordance with cosmopoli-

tanism idea. FBOs work in every sector of human life. Their existence is a part of the response to the humanitarian problems in society. Mostly the purpose of humanitarian workers is to save lives and to ameliorate suffering (Keishin, 2003). They design their vision and mission for keeping the humanitarian values. They start to put the public interest as their objectives.

The ability of FBOs in transforming the religious value into humanitarian action has become the strength of FBOs in real condition. This becomes an advantage for FBO because there are many people who sympathize with their work. One of them is the party who has the same religious identity with certain FBOs. As it is commonly known, there is always a tendency that the society will give donation to the parties that have similar identities with them. As the result, FBOs are more advantageous than the secular humanitarian groups (Miner & Smith, 2007:36); (Latief & Mutaqin, 2015). The alignments of FBO on humanitarian values through their religious teachings make them able to utilize all opportunities.

THE WORK OF FBOS IN DIPLOMACY FOR HUMANITARIAN PURPOSES

There are no explicit arguments from any scholars who assert about the role of FBO in humanitarian diplomacy. However, one thing which has to be realized by many parties is that humanitarian actions will not occur if there is no communication preceding it. The communication becomes a bridge idea of diplomacy to resolve the humanitarian issues. In order to get a depiction of FBO’s work in humanitarian diplomacy space, a few problems of FBO in the field and the perception of how it deals with them will be elaborated in this part. To analyze this phenomenon, some examples from the issue of the forcibly-displaced people will be given. This is done because there are many movements conducted by FBO in regards to this issue. They have a massive movement to handle it (Fiddian-Qasmiyeh, 2011).

In Kenya 2007, there was a mass displacement because of the post-election violence between two big powers fighting to claim legitimacy (Parsitau, 2011).

There were numerous people who became refugees because of this condition. The government lost control in handling the internally displaced-people, especially in fulfilling their needs for evacuation and during their stay in that place. There were many FBOs that emerged to solve the problem through humanitarian diplomacy. They sought to connect themselves to an international organization, the Kenyan Red Cross, some public authorities, local church, local government and so forth, for the common purpose of reducing their suffering of IDPs (Parsitau, 2011: 497).

Susanna Snyder also describes that there is a role of FBO in decreasing number of asylum seekers in the United Kingdom. In the past, the number of asylum seekers reaching the UK was quite big. At least in 2002, the number of asylum seekers reached 84,130. Certainly, it became a problem for the government. The emergence of FBO brought a success in decreasing this number (Snyder, 2011). There were many FBOs involved in that movement, such as Islamic Relief, Jewish Council for Racial Equality, Jewish Social Action Hub, etc. Their involvement in humanitarian diplomacy was clearly illustrated in the good relationship and communication with the government (Snyder, 2011). By connecting themselves to all parties, those FBOs created an image that the UK was a friendly state for the presence of asylum seekers (Snyder, 2011:572-573). They succeeded in changing people's attitude, and also government policy for standing on the humanitarian side. Finally, the involvement of many parties and government could help FBO and other humanitarian workers to fight for the rights of asylum seekers during their stay in the UK.

One concern that cannot be denied by the humanitarian workers is how to connect themselves with other parties. It is a kind of humanitarian diplomacy that must be conducted before they perform humanitarian activity. Orji (2011) also talks about it implicitly. He explains that the success obtained by FBOs in Nigeria is not only because of the FBO itself but also because of the connection with other parties. At that time, in Jos, Nigeria, there were FBOs from different

faiths that established a cooperation with governments, national NGO, international parties and also local NGO (Orji, 2011: 487-488). Those FBOs succeeded in providing a relief to the people affected by the conflicts, particularly to those who became internally displaced-people.

A success story for FBOs can also be seen in Burma. It happened when the Karen Baptist convention was conducting humanitarian activity for the Karen societies. The Karen is one of the tribes that live in the borderland of Burma and Thailand. As like the Rohingya people, they also faced a nationalism issue. The governments of Burma and Thailand could not reach them because their location was quite isolated. The Karen Baptist Convention, however, could reach the Karen societies and provided assistance for them. In addition, Karen Baptist convention also built relationships through diplomacy with many parties especially from overseas (Horstmann, 2011).

In Australia, FBO even tries to influence the policy of the government. As it is commonly known, since a several years ago Australia has become a destination country for the refugees to seek a permanent place. At that time, FBOs in Australia could influence the government to give permission so that the asylum seekers could stay in Australia (Wilson, 2011).

...the faith-based hospitality that underpins the work of FBOs in the asylum sector has played a significant role in the substantial shifts in Australian government asylum policy in recent times, in particular the decision to expand the government's community detention program" (Wilson, 2011: 548).

Moreover, in the United States, the work of FBO in humanitarian diplomacy is successful because it has provided advocacy for the resettlement of the refugees; so that the refugees can have a place to stay in the USA. FBOs fight for it by providing assistance in conducting English classes, job skills training, and so forth. In addition, FBOs also conduct the humanitarian diplomacy with the society where the refugees live in, so that it could accept them (Eby et. al., 2011). FBO has flexibility in moving even into the grass roots

level and conducting many creative movements.

This condition actually has provided a clear explanation that the role of FBO in humanitarian diplomacy can fill the gap that is left by the government. This is important to do because sometimes the positions of the refugees are quite difficult to reach. That matter is likely to happen as the impact of several problems, such as the lack of infrastructure, the conflict that keeps raging, or the limited access from the government. Humanitarian diplomacy aims to reach all refugees regardless of religion or place of origin and to provide assistance for them. It can be certainly done by many parties as long as they focus upon upholding the humanitarian value as the priority focus.

CONCLUSION

The existence of a diplomatic role of FBO requires the shifting perspective in the diplomacy studies. The shifting of perspective has occurred as the impact of the humanitarian cases and the involvement of non-state actors. The shifting of perspective eventually provides a position for perceiving the non-state actors as the diplomat as well. The non-state actors emerge as a response to the state's limitations in fighting for the humanitarian issues through diplomatic ways. The limitations of the state can be seen from two aspects, such as the diplomatic protocol to design communication between each of the states and only a few parties that can be legitimized by the states as the diplomat. Those facts contradict with the needs of refugees in the field. The non-state humanitarian workers, in fact, have an ability to solve that matter.

One of the non-state actors is religious movement or some scholars recognized it as FBO. The religious teachings of FBOs have a similarity with the values in humanitarian diplomacy. In addition, the movement of FBO in assisting the refugees represents their ability to communicate their basic values and the purpose with all parties. The movement of FBO can be seen clearly in some countries. FBO can act as a humanitarian advocate for the needs of the refugee. They can act as diplomats, especially for those issues that cannot be

addressed by the government.

REFERENCES

- Barston, R. P. (1997). *Modern Diplomacy*. Edinburgh: Pearson Longman.
- Black, J. (2010). *A History of Diplomacy*. London: Reaktion. Retrieved from <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=618746>
- Bull, H. (1977). *The anarchical society: a study of order in world politics*. New York: Columbia University Press.
- Cahill, K. M. (2013). *History and hope: the international humanitarian reader*. Retrieved from <http://site.ebrary.com/id/10746730>
- Diamond, L., & McDonald, J. W. (1996). *Multi-track diplomacy: a systems approach to peace*. West Hartford, Conn.: Kumarian Press.
- Eby, J., Iverson, E., Smyers, J., & Kekic, E. (2011). *The Faith Community's Role in Refugee Resettlement in the United States*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 586–605.
- Ferris, E. (2005). *Faith-based and Secular Humanitarian Organizations*. *International Review of the Red Cross Revue Internationale de La Croix-Rouge = International Review of the Red Cross*, 87(858), 311–325.
- Ferris, E. (2011). *Faith and Humanitarianism: It's Complicated*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 606–625.
- Fiddian-Qasmiyeh, E. (2011). *Introduction: Faith-Based Humanitarianism in Contexts of Forced Displacement*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 429–439.
- Galtung, J. (1969). *Violence, Peace and Peace Research*. *Journal of Peace Research*, 6, 170–171.
- Gres, D. (2010). *The Ambivalence of Religion within The Framework of Secular Humanism the Case of Faith-Based Humanitarian Organizations*. University of British Columbia. Retrieved from <http://hdl.handle.net/2429/19235>
- Horstmann, A. (2011). *Ethical Dilemmas and Identifications of Faith-Based Humanitarian Organizations in the Karen Refugee Crisis*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 513–532.
- Krieg, A. (2013). *Motivations for Humanitarian Intervention Theoretical and Empirical Considerations*. Dordrecht; New York: Springer. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-5374-7>
- Latief, H., & Mutaqin, Z. Z. (2015). *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Leguey-Feilleux, J.-R. (2009). *The Dynamics of Diplomacy*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Lentner, H. H. (1997). *International politics: theory and practice*. Minneapolis/St. Paul: West Pub. Co.
- Macalister-Smith, P. (1985). *International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Actions in International Law and Organization*. Dordrecht; Boston; Hingham, MA, USA: M. Nijhoff; Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers.
- Manning, P. (2005). *Migration in World History*. New York: Routledge.
- Minear, L. & Smith, H. (2007). *Humanitarian Diplomacy Practitioners and Their Craft*. Tokyo; New York: United Nations University Press. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=217489>
- Morgenthau, H. J. (1972). *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*. 5th edition. Hans J. Morgenthau. New York:

- A.A. Knopf.
- Orji, N. (2011). *Faith-Based Aid to People Affected by Conflict in Jos, Nigeria: An Analysis of the Role of Christian and Muslim Organizations*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 473–492.
- Parsitau, D. S. (2011). *The Role of Faith and Faith-Based Organizations among Internally Displaced Persons in Kenya*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 493–512.
- Régnier, P. (2011). *The Emerging Concept of Humanitarian Diplomacy: Identification of A Community of Practice and Prospects for International Recognition*. *International Review of the Red Cross*, 93(884), 1211–1237. <http://doi.org/10.1017/S1816383112000574>
- Roeder, L. W., & Simard, A. J. (2013). *Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs*. New York, NY: Springer. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7113-4>
- Simpson, S. (1945). International Organization in the Area of Social and Humanitarian Problems. *Social Service Review*, 19(1), 1–23.
- Snyder, S. (2011). *Un/settling Angels: Faith-Based Organizations and Asylum-Seeking in the UK 1*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 565–585.
- Sugiono, M. (2011). *Cosmopolitanism and World Politics: Bringing the Global World to International Relations*. SSRN. Retrieved from <http://papers.ssrn.com/abstract=2001953>
- Tirtosudarmo, R. (2015). *On The Politics of Migration: Indonesia and Beyond*. Jakarta: LIPI Press.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: Wahid Institute.
- Wilson, E. (2011). *Much to be Proud of, Much to be Done: Faith-based Organizations and the Politics of Asylum in Australia*. *Journal of Refugee Studies*, 24(3), 548–564.
- Wispé, L. (1978). *Altruism, sympathy, and Helping: Psychological and Sociological Principles*. New York: Academic Press.
- 稲場 圭信, イナバ ケイシン, & Inaba Keishin. (2003). *Meaning and Construction of Altruism in New Religious Movements*. *人間科学研究 / 神戸大学発達科学部人間科学研究センター 編*., 11(1), 1–15.

Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik di Malaysia

Irza Khurun'in

Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
khurunin.irza@gmail.com
Diserahkan: 09 November 2016, diterima: 09 Januari 2017

Abstract

The aim of this research is to understand the formation in the issues of migrant domestic workers' right protection in Malaysia by analyzing the transnational activism in four civil organizations, namely WAO (Women's Aid Organization), Tenaganita, NSI (North South Initiatives), and AOHD (Archdiocesan Office of Human Development). This research is qualitative research which use deep interview, observation, and documentation in collecting the data. The formation and networking pattern are ranging from human rights claim, labour rights claim, claim of gender equality at work, and humanitarian claim. There are fragmented collective identity, those are cosmopolitan identity, humanitarian activist, and part of each organization. Therefore, this research shows that citizenship is not barrier in doing humanitarian activities.

Keywords: Migrant Domestic Workers, Transnational Activism, Human Rights, Collective Identity, Rooted Cosmopolitan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat formasi gerakan di seputar isu perlindungan hak buruh migran sektor domestik di Malaysia dengan melihat aktivisme transnasional dari empat organisasi masyarakat sipil, yakni WAO (*Women's Aid Organization*), Tenaganita, NSI (*North South Initiatives*), dan AOHD (*Archdiocesan Office of Human Development*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Formasi serta pola jejaring lintas batas gerakan tersebut berkisar antara klaim hak asasi manusia, hak-hak buruh, kesetaraan gender di tempat kerja, dan nilai kemanusiaan. Identitas kolektif gerakan terfragmentasi menjadi tiga, yakni identitas kosmopolitan, aktivis kemanusiaan, dan anggota organisasinya. Maka, penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan lagi pembatas dalam melakukan aksi kemanusiaan.

Kata Kunci: Buruh Migran Domestik, Aktivisme Transnasional, Hak Asasi Manusia, Identitas Kolektif, Akar Kosmopolitan

PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan formasi gerakan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan isu buruh migran sektor domestik yang dilakukan oleh masyarakat sipil Malaysia. Relasi antara buruh migran dan masyarakat sipil menarik dibahas karena ada hubungan antara *citizens* dan *non-citizens*. Tulisan ini menunjukkan bahwa *citizenship* bukan sebagai penghalang dalam melakukan aksi kemanusiaan. Ada konstruksi identitas kolektif dibawah semangat universalisme sebagai warga dunia yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai proses

transnasionalisasi gerakan melalui pembingkai aksi kolektif.

Malaysia memiliki tingkat dependensi yang tinggi terhadap ketersediaan buruh migran sektor domestik, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan perlindungan yang mengikat secara hukum. Pemerintah Malaysia belum mengatur secara khusus terhadap pekerja asing terutama yang bekerja di sektor domestik. Semua pekerja di Malaysia, baik pekerja dalam negeri maupun asing hanya diatur melalui kontrak kerja yang sah antara *employer* dengan *employee* (Pahroji & Singadimedja, 2012). Buruh migran

domestik di Malaysia terikat pada ketentuan aturan keimigrasian Malaysia sebagai warga negara asing yang berada di Malaysia untuk batas waktu tertentu (Pahroji & Singadimedja, 2012).

Peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran masih minim. Minimnya peran negara dalam melindungi hak-hak buruh migran domestik memberikan ruang bagi aktor non negara untuk mengambil bagian dalam interaksi lintas batas ini. Maka muncul berbagai aktivisme yang dilakukan oleh masyarakat sipil seperti yang ada di Malaysia. Penulis mengambil fokus pada gerakan transnasional yang dilakukan oleh *Civil Society Organisations* (CSOs) di Malaysia, yakni *Women's Aid Organizations* (WAO), Tenaganita, *North South Initiatives* (NSI), dan *Archdiocesan Office for Human Development* (AOHD). Empat organisasi tersebut dipilih sebagai sampel untuk melihat formasi gerakan perlindungan buruh migran di Malaysia. Penulis memilih empat organisasi tersebut karena keempatnya aktif berkecimpung dalam advokasi perlindungan hak buruh migran domestik. Selain itu, keempatnya mewakili kelompok suku bangsa yang ada di Malaysia, yakni India, Melayu, dan China. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa di Malaysia sangat erat identitas kebangsaannya yang kemudian dihadapkan dengan fenomena migrasi internasional yang memaksa mereka untuk melebur dengan masyarakat transnasional dari berbagai negara bangsa.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep pertama yang digunakan adalah konsep aktivisme transnasional untuk menjelaskan mekanisme dan proses perluasan gerakan ke level internasional. Dalam aktivisme transnasional ada upaya untuk membangun identitas kolektif. Maka, di konsep kedua, penulis menggunakan konsep identitas kolektif dari pemikiran Alberto Melucci untuk menjelaskan tentang konstruksi identitas dalam aksi kolektif. Selanjutnya, untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh gerakan sosial tersebut, penulis menggunakan konsep *framing collective action* oleh Benford dan Snow dan *transnational advocacy network*

oleh Keck dan Sikkink.

AKTIVISME TRANSNASIONAL

Konsep aktivisme transnasional menjadi *backbone* dalam tulisan ini. Dalam bukunya *The New Transnational Activism*, Sidney Tarrow menjelaskan proses transformasi posisi dalam ide dan gerakan lintas batas dan berakar pada lokalitas. Sebagai agenda transformatif, Tarrow menekankan bahwa aktivisme transnasional dapat mengubah aktor dalam protes domestik menjadi pelaku gerakan transnasional dengan tetap mengakar pada konteks sejarah dan kultur gerakan lintas batas. Transformasi tersebut bisa menjadi jembatan dalam gerakan sosial dari level lokal menuju global melalui *3 sets of processes* (Tarrow, 2005, hal. 2). Pertama, level *domestic ground* yang terdiri dari *global framing* dan *internalization* di ranah domestik dengan isu dalam negeri menjadi fokusnya. Level yang kedua adalah 'proses transisi', dimana ada dua aktivitas yakni *diffusion* dan *scale shift*. Dalam proses transisi ini bisa terjadi di ranah lokal maupun internasional dengan isu yang lebih variatif dari berbagai level. Yang terakhir adalah level internasional, yakni terdapat proses eksternalisasi dan koalisi transnasional (Tarrow, 2005, hal. 32). Keenam rangkaian tersebut dapat berjalan secara terpisah maupun berkombinasi. Konsep tersebut membantu penulis untuk mengilustrasikan aktivisme transnasional yang dilakukan oleh empat CSO di Malaysia baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran domestik.

Tiga premis yang ditekankan Tarrow tentang aktivisme transnasional adalah aktivisme transnasional memiliki proses sejarah; merupakan refleksi dari globalisasi; serta dibentuk oleh perubahan kesempatan struktur dalam politik internasional. Selaras dengan premis Tarrow, Ilcan dan Lacey (2013) juga mengatakan bahwa aspek historis, sosial, dan kondisi politik menjadi pertimbangan yang penting untuk mempengaruhi bentuk aktivisme transnasional. Aktivisme transnasional berakar pada lokalitas dan jatuh pada kondisi dunia yang kosmopolitan. Sementara globalisasi dalam aktivisme transnasional

memberikan insentif berupa proses internasionalisasi yang menawarkan kerangka serta kumpulan poin-titik fokus serta struktur bagi aktivis internasional (Tarrow, 2005, hal. 3). Terakhir, perubahan struktur dalam politik internasional menyumbang dua mekanisme kemunculan aktivisme transnasional yakni melalui dua mekanisme, difusi dan mobilisasi.

Sidney Tarrow (2005) melihat dasar kemunculan aliansi kampanye transnasional ini sebagian besar berakar kosmopolitan (*rooted cosmopolitan*). Kosmopolitan merujuk pada perasaan menjadi bagian dari dunia secara keseluruhan, tidak dibatasi pada salah satu kelompok atau bagian (Tarrow, 2005, hal. 40). Kampanye global tentang perlindungan hak buruh migran tidak lepas dari akar kemanusiaan yang bersifat universal. Ada transisi dari tatanan negara-bangsa menuju pada tatanan kosmopolitan yang secara signifikan menggeser hukum internasional pada hak asasi manusia. Ulrich Beck meletakkannya pada dua kondisi, *first age modernity* dan *second age modernity*. Pada modernitas pertama, hukum internasional mendahului hak asasi manusia (Beck, 2000, hal. 83). Namun pada modernitas kedua, hak asasi manusia mendahului hukum internasional.

IDENTITAS KOLEKTIF

Di bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai munculnya aktivisme transnasional yang tidak terlepas dari identitas kolektif yang mencoba dibentuk. 'Self-defined' atau pendefinisian diri berkaitan dengan konstruksi identitas atas respon terhadap *event* internasional sehingga memunculkan sebuah 'sense of collective identity' diantara kelompok negara. (Tarrow, 2005, hal. 22) Artinya, kelompok negara dalam konteks ini adalah kampanye kolektif dari NGOs di Malaysia untuk menyuarakan advokasi perlindungan terhadap hak-hak buruh migran domestik. Menyatukan beragam individu dan kelompok ke dalam sebuah gerakan atau kampanye, maka perlu mengidentifikasi identitas kolektif yang dibentuk.

Identitas kolektif adalah sebuah pemahaman akan diri yang terkonstruksi oleh 'interactive' dan 'shared'. Pada analisis gerakan sosial, identifikasi identitas

kolektif adalah penting untuk melihat peleburan aktor gerakan dalam sebuah perjuangan untuk melawan musuh bersama. Untuk mengidentifikasi musuh bersama, subjek berusaha menggemakan ide-ide mereka pada level kolektif di mana akhirnya mereka bisa bersatu, baik karena adanya persamaan maupun perbedaan (C.R.S. Milani, 2007, hal. 18). Secara definitif, Melucci (1996:70) menyatakan bahwa identitas kolektif adalah sebuah interaksi dan *shared definition* yang dihasilkan oleh sekelompok individu atau kelompok dengan tujuan tertentu (Melucci, 1996, hal. 70). Aksi kolektif diartikan sebagai produk negosiasi tujuan di mana sejumlah perspektif, makna, dan hubungan mengkristal menjadi pola tindakan dalam "sistem tindakan multipolar" (Melucci, 1989, hal. 332).

PEMBINGKAIAN AKSI KOLEKTIF

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu strategi dalam aktivisme transnasional adalah *framing collective action*. Tarrow dalam bukunya *The New Transnational Activism* menjelaskan mengenai *global framing* yang mana ia mendefinisikannya sebagai penggunaan simbol eksternal untuk orientasi lokal atau klaim nasional (Tarrow, 2005, hal. 60). Pada akhirnya, akar kosmopolitan-lah yang dianggap sebagai langkah dalam pembentukan sebuah pembingkaiian serta pemunculan identitas kolektif. Namun, sebelumnya penting untuk melihat apa itu *framing*.

Konsep 'framing' digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah gerakan mendefinisikan sebuah masalah (*diagnostic framing*), merancang solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut (*prognostic framing*), dan memobilisasi pengikut baru untuk penyebab masalah tersebut (*motivational framing*) (Benford & Snow, 2000, hal. 615). Dalam konteks ini, gerakan sosial tidak hanya dipahami sebagai pembawa ide yang telah ada, tidak pula dipahami sebagai pergerakan otomatis akibat dari susunan struktural, kondisi yang ada, maupun ideologi yang telah berkembang (Benford & Snow, 2000, hal. 613). Terlebih, aktor gerakan dilihat sebagai agen 'penanda' yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna bagi konsituen,

antagonis, dan para pengamat (Benford & Snow, 2000, hal. 613). Aktor-aktor tersebut terlibat aktif bersama dengan aktor *state* seperti negara maupun pemerintah daerah serta media dalam melakukan 'politik pemaknaan' (Benford & Snow, 2000, hal. 613). Di dalam 'politik pemaknaan', terdapat istilah '*Framing as Meaning Construction*'. Maksudnya adalah di dalam '*framing*' terdapat *signifying work* atau aktor yang bergerak sebagai penanda untuk melakukan konstruksi pemaknaan. Benford dan Snow menjelaskan '*framing*' sebagai sebuah fenomena prosedural. Disebut prosedural karena dalam realitanya terdapat proses dan dinamika dalam melakukan pembingkai atau *framing* itu sendiri. Maka, hasil dari produk tersebut disebut sebagai '*collective action frame*' (Benford & Snow, 2000, hal. 613).

JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL

Jaringan advokasi transnasional bukan hal baru dalam studi gerakan sosial. Keck dan Sikkink tidak terlalu memperhatikan fenomena globalisasi sebagai faktor kemunculan jaringan transnasional, namun lebih pada *shared value*, *common discourse*, dan *shared idea*. Meskipun, dalam sebuah jaringan aktivisme transnasional tidak mengesampingkan adanya pertimbangan terkait insentif, hambatan, strategi, institusi, dan aturan-aturan tertentu. Konsep *transnational network* atau jaringan transnasional ala Keck dan Sikkink ini merupakan perkawinan dua tradisi, yakni tradisi sosiologi dan politik internasional. Artinya, konsep *networking* yang dibangun melalui gagasan aktivisme atau gerakan diaplikasikan secara lintas bangsa, yang kemudian menjembatani antara keilmuan Hubungan Internasional dan studi Perbandingan Politik (Keck & Sikkink, 1999, hal. 90).

Konsep jaringan advokasi transnasional yang diusung oleh Keck dan Sikkink dengan menteorisasikan hubungan jaringan lintas batas dengan apa yang disebut dengan "*Boomerang Effect*" di mana aktor *non-state* menghadapi represi dan blokade di level domestik. Tarrow menjelaskan bahwasanya *boomerang effect* tersebut merupakan proses eksternalisasi yang

bekerja melalui urutan tahapan yang berbeda. Pertama, hubungannya dalam konteks dalam negeri; kedua adalah pembingkai pertentangan; dan yang ketiga adalah bentuk dari aksi kolektif (Tarrow, 2005, hal. 147). Sebuah jaringan internasional terus berproliferasi dan bertujuan untuk mengubah perilaku sebuah negara dan organisasi internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 2). 'Pembingkai' menjadi bagian penting dalam jaringan advokasi internasional. Aktor-aktor yang terlibat secara simultan melakukan pembingkai isu supaya mudah dipahami oleh target *audiences*, untuk menarik perhatian dan untuk mendorong aksi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 2). Selain itu juga bertujuan untuk mencocokkan dengan *venue* institusional.

Jaringan advokasi transnasional muncul dengan adanya kondisi dimana terdapat *boomerang pattern*, *political entrepreneurs*, dan pertumbuhan konferensi internasional. *Boomerang pattern* disini maksudnya adalah kondisi dimana adanya hambatan di dalam struktur penghubung antara kelompok lokal dan pemerintah (Keck & Sikkink, 1998, hal. 12). Selain itu, para aktivis menganggap bahwasanya 'jaringan' tersebut dapat memajukan misi-misi kampanye serta secara aktif mempromosikan ide-ide yang mereka perjuangkan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 12). Banyak diantara jaringan advokasi yang ada mengangkat isu 'hak' di dalam kampanye mereka. Hal tersebut muncul karena mereka meyakini bahwa pemerintah, selain sebagai 'penjamin hak' juga sebagai 'pelanggar hak' sehingga memunculkan *political entrepreneurs*. Kondisi terakhir yang memungkinkan sebuah jaringan advokasi transnasional terbentuk adalah karena adanya konferensi internasional sebagai wadah interaksi untuk membentuk dan menguatkan jaringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, penulis membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama menjelaskan tentang sejarah kemunculan gerakan perlindungan hak buruh migran domestik di Malaysia, fragmentasi identitas kolektif, serta proses transnasionalisasi di level domestik yakni melalui pembingkai global dan internalisasi. Pada

bagian ini penulis menjelaskan bahwa formasi gerakan perlindungan hak buruh migran berkisar antara klaim kemanusiaan, hak asasi manusia, *gender equality at work*, dan hak-hak buruh. Kedua, merupakan uraian mengenai proses transnasionalisasi gerakan di level transisi dan internasional. Peluang transnasionalisasi gerakan tidak lepas dari perubahan lingkungan politik internasional dan nasional serta akar kosmopolitan yang berpengaruh pada pembentukan identitas kolektif. Dan yang terakhir menguraikan tentang strategi mobilisasi politik yang terbagi dalam tiga level, yakni level *grassroot*, level nasional, dan level internasional.

MENJADI WARGA DUNIA? SEBUAH FRAGMENTASI IDENTITAS KOLEKTIF

Ide tentang transnasionalisme ini berangkat dari penolakan masyarakat sipil terhadap opresi negara. Ide tentang nilai ‘hak asasi’ yang universal tidak selaras dengan adanya tekanan yang diberikan oleh negara terhadap rakyatnya. Transnasionalisme dan kosmopolitanisme adalah dua konsep yang populer dalam diskursus para akademisi maupun jurnalis. Keduanya belum memiliki definisi universal yang disepakati dalam literatur. Transnasionalisme secara original berhubungan dengan aktifitas imigran, meskipun konsep tersebut telah meluas ke kelompok yang lain seperti halnya serangkaian aktivitas lintas batas (Roudometof, 2005, hal. 113).

Kosmopolitanisme telah digunakan sebagai sudut pandang moral baru dan etnis yang baru yang sesuai dengan abad 21, namun seringkali dikritik karena dianggap sebagai sebuah manifestasi dari mentalitas kelas menengah keatas (Roudometof, 2005, hal. 113). Transnasionalisme lebih sering diafiliasikan pada kegiatan migrasi yang terjadi secara besar-besaran di tahun 1990-an. Selama satu dekade terakhir ini, label telah lebih meluas pada kelas kapital, juga terhadap aktivis lintas batas, komunitas agama dan gerakan sosial (Roudometof, 2005, hal. 115).

Fragmentasi identitas terbagi menjadi tiga kategori, yang pertama identitas kosmopolitan sebagai *citizens of the world*. Yang kedua adalah identitas sebagai aktivis

kemanusiaan dan yang ketiga adalah identitas sebagai anggota di masing-masing organisasi. Pertama, pembentukan identitas kosmopolitan diawali dengan identifikasi diri sebagai konsituen (*protagonist identity*) yaitu sebagai bagian dari warga dunia. Identifikasi diri sebagai upaya bagi aktor gerakan melebur di dalam sebuah perjuangan yang lebih besar untuk melawan aktor lain yang dianggap sebagai ‘musuh bersama’. Aktor gerakan mendefinisikan diri sebagai bagian dari warga dunia yang meyakini kebenaran moral dan etika universal yakni nilai-nilai kemanusiaan. Bahwasanya semua manusia memiliki derajat yang sama dan berhak memperoleh hak-hak asasi manusia serta dijunjung harkat dan martabatnya. Dengan menjadi bagian dari warga dunia, aktor gerakan berusaha untuk menghilangkan batasan antara pelaku gerakan perlindungan buruh migran di Malaysia dengan buruh migran itu sendiri. Selain itu, aktor gerakan mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari warga dunia, sama halnya dengan buruh migran. Aktor gerakan menempatkan buruh migran sebagai subjek dalam aktivitasnya.

Dimensi kosmopolitanisme tercermin dalam landasan gerakan organisasi-organisasi. Misalnya WAO dengan misinya untuk mempromosikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kesetaraan hak bagi perempuan. Atau Tenganita yang memiliki misi untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dan martabat semua wanita, migran, pengungsi. Senada dengan dua organisasi sebelumnya, NSI juga memiliki misi yakni “*justice and dignity for all*”. Visi AOHD adalah ‘Bersatu dengan Tuhan, dalam solidaritas dengan seluruh umat manusia’. Lebih lanjut lagi, prinsip tentang kesetaraan dan martabat untuk semua manusia terlihat dalam pendapat pihak-pihak yang diwawancarai. Natasha mengatakan bahwa, “*And for everything we do, is to promote basic human right and gender equality for all people*” (Wawancara dengan Natasha, WAO, pada 17 Juni 2016). Adrian, direktur NSI dengan tegas menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk “*Serve the people*”. Senada dengan dua aktivis di atas, konsep *dignity* adalah moral universal yang berpengaruh pada aktivitas AOHD. Josephine

mengatakan "Dignity is for all people.... But I think even the beggar also has dignity. Or thief also has dignity" (Wawancara dengan Josephine, *The Migrant and Refugees Desk AOHD* tanggal 20 Juni 2016).

Kedua, pembentukan identitas sebagai aktivis kemanusiaan. Aktor gerakan mengklaim diri mereka sebagai *human rights defender* serta berupaya untuk memberikan jarak dengan objek gerakan yakni buruh migran sektor domestik. Posisi mereka sebagai aktivis kemanusiaan sangat kental terlihat ketika melakukan advokasi perlindungan hak buruh migran baik di level akar rumput, nasional, maupun internasional. Aktor gerakan memposisikan buruh migran sebagai kelompok yang rentan, hal tersebut penanda bahwa 'kita' (*us*) adalah aktivis, sedangkan 'mereka' (*other*) terdiri dari objek sasaran dan 'musuh bersama'.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan diri mereka sebagai *humanitarian activist*. *Women's Aid Organization* misalnya, yang cenderung meletakkan klaim mereka pada anti diskriminasi terhadap perempuan. Artinya, WAO memperjuangkan adanya *gender equality at work*. Dalam aksi-aksi yang dilakukannya, WAO juga banyak menggunakan argumentasi CEDAW sebagai landasan internasional aktivismenya. Sementara Tenaganita meletakkan klaim hak buruh migran serta anti diskriminasi terhadap perempuan sebagai klaim utamanya. Tenaganita banyak mengadopsi konvensi ILO dan CEDAW sebagai argumentasi aktivismenya.

Fragmentasi identitas kolektif yang ketiga adalah identitas sebagai anggota organisasi. Identitas sebagai anggota organisasi ini sebagai pembeda antar aktivis di organisasi yang satu dengan yang lain. Masing-masing organisasi berusaha untuk membedakan diri dengan organisasi lain sebagai bentuk pendefinisian diri sebagai anggota organisasi tersebut. Konsep 'ke-kita-an' dibangun untuk membentuk solidaritas dalam satu organisasi secara internal. Anggota dari WAO, di beberapa dimensi menyebut diri mereka 'WAO'. Begitu pula dengan anggota dari Tenaganita, NSI, maupun AOHD. AOHD, dalam dimensi ke dalam organisasi, mereka cenderung mendefinisikan diri sebagai 'Kelompok Gereja' yang mengambil ranah

kerjasama antar gereja dalam menyelesaikan beberapa problem terkait dengan advokasi buruh migran.

Pendefinisian diri terlihat ketika mereka tergabung dalam aliansi NGO yang memberikan perhatian terhadap kasus migrasi internasional, yakni *Migration Working Group* (MWG). Masing-masing organisasi memiliki ranahnya sendiri dalam menjalankan advokasi hak-hak buruh migran. Organisasi yang memiliki *shelter* seperti WAO dan Tenaganita sering melaksanakan advokasi secara langsung pada buruh migran yang bermasalah. Berbeda dengan NSI dan AOHD yang tidak memiliki *shelter*, mereka berjuang di lini yang lain. Josephine menjelaskan:

"Kalau organisasi ini boleh tolong shelter, dia boleh kasih perlindungan. satu bikin konseling. Bagi-bagi tugas supaya lebih fokus untuk hantar sesiapa. Satu orang tak boleh lakukan semua." (Wawancara dengan Josephine, *The Migrant and Refugees Desk AOHD* tanggal 20 Juni 2016).

Artinya, ada *limited cosmopolitanism* dalam pendefinisian diri yang dilakukan oleh aktor. Kosmopolitan menjadi pintu masuk bagi aktivis gerakan untuk melegitimasi posisi dengan semangat kemanusiaan yang universal. Namun kondisi tersebut dibatasi oleh kepentingan di masing-masing organisasi. Kembali pada preposisi Melucci bahwa identitas kolektif adalah semu, maka terlihat dari kolektifitas yang ada dalam gerakan kolektif tersebut.

RESISTENSI MASYARAKAT SIPIL DAN TRANSNASIONALISASI GERAKAN

Pentingnya pengkajian terkait buruh migran sektor domestik didasari oleh tiga faktor, *pertama* yakni tingginya ketergantungan Malaysia terhadap ketersediaan buruh migran sektor domestik. Namun buruh migran domestik ditempatkan sebagai '*second-class humans*' diantara masyarakat Malaysia dan sekaligus memegang peranan penting dalam sektor pemenuhan angkatan kerja sektor informal. Melihat kenyataannya, jika tidak ada arus migrasi di sektor pekerja rumah tangga ke Malaysia, keluarga di Malaysia akan kekurangan tenaga kerja sektor tersebut. *Kedua*,

relasi buruh migran domestik dengan struktur sosial di Malaysia. Persepsi gender yang mendarah daging di dalam masyarakat Malaysia bahwasanya pekerja rumah tangga adalah anggota rumah tangga yang tidak memerlukan perlindungan hukum formal. Hal itu yang turut berkontribusi pada kemunculan konflik laten antara kelompok buruh migran dengan masyarakat dan pemerintahan Malaysia. *Ketiga* adalah terkait dengan kondisi politik Malaysia itu sendiri yang tidak memberikan ruang kebebasan bagi buruh migran, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga.

Hal senada diungkapkan oleh Juanita Elias. Stigma negatif terhadap buruh migran domestik akibat dari ketakutan sosial terhadap hubungan intim antara pekerja domestik dan anggota keluarga (Elias, 2008, hal. 19). Hal tersebut bermain dalam diskursus kontrol sosial terhadap buruh migran. WAO, sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan juga mengungkapkan hal yang sama. Problem yang muncul terkait dengan buruh migran domestik salah satunya karena *stereotype* negatif masyarakat di Malaysia terhadap kelompok tersebut bahwa pekerja domestik tidak bisa dipercaya, *'husband stealer'*, dan *'sexually promiscuous'* (Elias, 2008 hal. 20).

Pemerintah tidak memberikan dukungan terhadap penelitian baik lokal maupun internasional, sementara NGOs sendiri memiliki sumber daya yang terbatas untuk melakukan analisis kritisnya (Weiss & Hassan, 2002, hal. 17). Kendati demikian, gerakan perempuan maupun gerakan-gerakan lain yang berbasis masyarakat sipil mengalami hambatan dalam aktivitasnya. Faktor yang paling signifikan menghambat perkembangan advokasi berorientasi NGOs adalah peraturan pemerintah Malaysia (Weiss & Hassan, 2002, hal. 30). Malaysia memiliki *Internal Security Act* yang digunakan untuk mendisiplinkan aksi dari kelompok-kelompok yang terlihat mengancam stabilitas politik pemerintahan (Lyons, 2006, hal. 4). Aturan tersebut diperkenalkan pada masa penjajahan Britania dan digunakan untuk melawan serangan politik dari komunis. Dan saat ini, ISA tersebut digunakan untuk melawan ancaman yang

kemungkinan dapat dianggap membahayakan keamanan nasional. Di Malaysia, Artikel 10 dari konstitusi Malaysia menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat, namun semua terbatas sepanjang tidak mengganggu kepentingan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Hukum lainnya yang juga memberikan batasan terhadap pergerakan NGOs maupun aktivis adalah *Police Act 1967* (telah diamandemen pada 1988) yang melarang adanya protes secara spontan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa diharuskan mendapat izin polisi empat belas hari sebelumnya untuk setiap pertemuan publik yang dihadiri lebih dari lima orang (Weiss & Hassan, 2002, hal. 34). Dan yang lebih buruk lagi, seringkali polisi tidak mau memberikan surat izin tersebut. Alih-alih melakukan aksi massa untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah, banyak NGOs yang mengambil jalan lain, misalnya dengan mengadakan seminar, simposium, dan publikasi dari hasil tulisan atau penelitian yang mereka lakukan. Hal itu sebagai respon mereka terhadap pembatasan yang cukup ketat.

Lebih jauh lagi, pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menekan aksi-aksi dari gerakan sosial adalah dengan adanya *Printing Presses and Publication Act 1984* yang telah diamandemen pada tahun 1987. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa untuk semua publikasi harus mendapatkan izin tahunan dari *Ministry of Home Affairs* begitu juga dengan undang-undang pencemaran nama baik, penghinaan terhadap pengadilan dan rahasia resmi menjadi aturan baku yang tidak bisa dilanggar. Ketika beberapa NGOs mengambil alternatif sebagai perusahaan *publishing*, masih harus dihadapkan dengan aturan ketat terkait dengan semua publikasinya.

Selain melalui *Internal Security Act*, Artikel 10 Konstitusi Malaysia, *Police Act 1967*, *Printing Presses and Publication Act 1984*, dari segi pendidikan juga ada *Universities and University Colleges Act 1971* atau UUCA yang telah diamandemen pada 1975 juga menjadi salah satu pembatas gerakan sosial yang bisa berasal dari gerakan mahasiswa. Pemerintah Malaysia melihat

kampus sebagai agen penting untuk mobilisasi politik, oleh karenanya diberlakukannya UU tersebut guna melarang mahasiswa terlibat dalam kegiatan politik (Weiss & Hassan, 2002, hal. 34).

Dalam level domestik terdapat agenda pembingkai isu, baik itu secara *diagnostic framing* maupun *prognostic framing*. *Diagnostic framing* adalah pemaparan bentuk-bentuk ketidakadilan oleh aktor gerakan. Berdasar hasil wawancara langsung pada keempat organisasi gerakan tersebut, keempatnya berpendapat sama dalam memaparkan kondisi buruh migran domestik. Berbagai kondisi yang disebutkan diantaranya adalah tidak adanya perlindungan bagi buruh migran sektor domestik yang termaktub dalam *employment act* Malaysia; gaji yang tidak dibayar; majikan merampas paspor pekerja; banyak pekerja yang tidak mendapatkan *day off*; tidak dibolehkan bagi pekerja untuk membentuk serikat pekerja; adanya *physical abuse*; serta seringkali pekerja mendapatkan perlakuan kasar salah satunya dengan menyebut sebagai 'servant'. Lebih dari itu, pekerja tidak mendapatkan hak untuk *maternity life*, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serta jam kerja yang tidak jelas.

Beragam pelanggaran HAM yang dialami oleh buruh migran diantaranya adalah tidak diberikan kebebasan untuk berasosiasi, dan banyak diantaranya tidak mendapatkan kontrak kerja yang jelas. Natasha juga menyebutkan bahwa hal yang paling penting adalah aspek bahasa. Bahasa menjadi salah satu *barrier* bagi tenaga kerja asing di Malaysia. Natasha, Adrian, Josephine, dan Fajar, maupun Glorene, sepakat bahwa tidak ada perlindungan secara legal formal bagi pekerja sektor domestik. Dalam *employment act* Malaysia, pekerja domestik disebut sebagai *domestic servant*.

"domestic servant" means a person employed in connection with the work of a private welling-house and not in connection with any trade, business, or profession carried on by the employer in such welling-house and includes a cook, house-servant, butler, child's nurse, valet, footman, gardener, washerman or washerwoman, watchman, groom and driver or cleaner of any vehicle licensed for private use (*Employment Act 1955, hal. 11*)

Kondisi tersebut dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Malaysia serta sebagai bahan dalam melakukan *prognostic framing*. *Prognostic framing* adalah pembingkai dalam mengartikulasikan usulan-usulan atas problematika yang diusung. Usulan kolektif yang diusung adalah dengan menempatkan profesi pekerja rumah tangga sebagai sektor pekerjaan yang formal dan dilindungi. Hal terpenting yang menjadi penanda adalah dengan menuntut pemerintah untuk merevisi *employment act*, meratifikasi konvensi ILO No. 189. Dari sini terlihat ada pembingkai isu yang tidak lepas dari isu global mengenai HAM. Ada upaya membawa isu global ke ranah lokal. Artinya, telah ada internalisasi isu global tentang buruh migran di Malaysia. *Term* umum hak asasi manusia menjadi pembingkai yang menarik sekaligus penting dalam membingkai isu mengenai buruh migran di Malaysia. Maka, pembingkai yang dilakukan tidak lepas dari aspek diskursif yang berkembang di dunia internasional.

Aktivisme gerakan mencerminkan bahwa promosi 'hak asasi manusia' adalah agenda pergerakan mereka. Pendefinisian diri tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pembingkai secara diagnostik, yakni pemaparan gerakan untuk mendefinisikan masalah. Melalui nilai 'hak asasi manusia' yang universal, gerakan melakukan mobilitas sumber daya dengan mendefinisikan masalah yang menimpa buruh migran sebagai akibat dari represi pemerintah terhadap kelompok yang dikonstruksikan sebagai kelompok rentan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan *term* 'hak asasi manusia', gerakan mencoba untuk mendobrak kemapanan relasi sosial yang ada dalam masyarakat yang menempatkan buruh migran domestik sebagai 'second-class human' di Malaysia. Melalui pendefinisian diri tersebut memudahkan gerakan untuk menentukan tujuan serta arah gerak mereka sehingga aspek 'ke-kita-an' yang dimunculkan ini dapat mempererat solidaritas dan memudahkan dalam mencapai kepentingan bersama.

Proses transisi menunjukkan bahwa aktivitas yang terjadi di aras lokal dan internasional serta upaya yang dilakukan dalam mentransformasikan isu domestik

menjadi isu internasional. Terdapat dua mekanisme dalam proses transisi, yakni *diffusion* dan *scale shift*. Dalam kasus yang terjadi di Malaysia, ada proses transisi isu yang dilakukan oleh aktivis gerakan melalui proses difusi dan *scale shift*.

Difusi berarti penyebaran, yakni transfer klaim atau bentuk dari *contention* dari satu sisi ke sisi yang lain. Transfer klaim ini dilakukan dengan cara internasionalisasi isu dan dengan pendekatan komunikasi. Aktivis gerakan melakukan internasionalisasi isu serta penyebaran isu melalui media komunikasi, baik itu melalui media mainstream maupun media internet dan kampanye. Dalam difusi, ada mekanisme *modularity* yakni bagaimana gerakan mengadopsi bentuk atau melakukan mobilisasi internasional dan pemingkiaan aksi kolektif. Dalam prosesnya ada bentuk pemingkiaan secara motivational yakni dengan memobilisasi pengikut baru sebagai agen gerakan.

MULTI-LEVEL STRATEGY DALAM ADVOKASI TRANSNASIONAL

Pola yang dilakukan dalam perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia ada 3, yakni di level *grassroot*, level nasional, dan internasional. Strategi kolektif dilakukan melalui *monitoring*, *advisory the domestic workers*, dan melakukan penelitian dengan organisasi internasional dalam pemetaan kerentanan buruh migran domestik. Advokasi terhadap buruh migran domestik juga dilakukan dengan pembagian ranah kerja. Strategi kolektif ini untuk menjawab konstruksi kerentanan terhadap buruh migran domestik di Malaysia.

Pertama, *Level grassroot* adalah advokasi yang dilakukan dengan menyoal target yang dibela yakni buruh migran sektor domestik. Strategi yang dilakukan adalah dengan memobilisasi sumber daya buruh migran yang mana merupakan target sasaran perlindungan. Mobilisasi buruh migran dilakukan melalui upaya yang penulis sebut sebagai '*organizing unorganized*'. '*Organizing unorganized*' adalah upaya mengorganisasikan PLRT migran dari berbagai negara untuk berkumpul dan berorganisasi berdasarkan

negara asal. Buruh migran sektor domestik adalah kelompok yang sulit untuk diorganisasikan karena ruang lingkup kerjanya yang sempit. Hal tersebut merupakan salah satu faktor mengapa buruh migran sektor domestik dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang rentan terhadap kekerasan. Namun, dengan mendorong mereka membentuk organisasi berdasar negara asal dapat memudahkan bagi aktor gerakan melakukan mobilisasi sumber daya PLRT migran maupun memudahkan dalam rangka melakukan advokasi perlindungan ketika terjadi pelanggaran yang menimpa mereka.

Upaya yang kedua pada level akar rumput adalah manajemen kasus. Manajemen kasus dilakukan melalui penyediaan *shelter*, konseling hukum, dukungan hukum, serta *lobbying* media. Tidak semua organisasi perlindungan buruh migran memiliki *shelter* sebagai tempat tinggal sementara bagi PLRT migran yang mengalami kekerasan dalam pekerjaan. Tenaganita dan WAO merupakan dua organisasi yang memiliki *shelter*. Dua organisasi tersebut juga bekerja sama dengan asosiasi pengacara di Malaysia yang bernama *Bar Council*. Dengan bekerja sama dengan *Bar Council*, organisasi dapat membantu memberikan advokasi hukum kepada PLRT migran yang mengalami masalah dengan secara cuma-cuma atau *Probono*. Selain itu, Tenaganita dan WAO juga memberikan layanan konseling bagi PLRT migran yang mengalami pelanggaran HAM.

Salah satu contohnya adalah Tenaganita, yang mana menjalin kerjasama dengan SBMI dan *Migrant Care*. SBMI dan *Migrant Care* adalah dua organisasi akar rumput di Indonesia yang memiliki fokus pada perlindungan hak buruh migran di luar negeri. Nasriah Sarah, koordinator buruh migran di Malaysia yang diwawancarai oleh penulis juga mengiyakan adanya kerjasama diantara organisasi-organisasi di Malaysia dengan organisasi di Indonesia dalam penyelesaian kasus (Wawancara dengan Nasriah, 18 Juli 2016). AOHD memiliki strategi yang sedikit berbeda dengan pola NGOs. AOHD melakukan pendekatan di level *grassroot* melalui pendekatan 'gereja'. AOHD berafiliasi dengan Gereja Katolik St.

John Chatedral, Kuala Lumpur. AOHD melakukan mobilisasi sumber daya massa melalui pihak gereja. Advokasi kasus PLRT migran yang bermasalah dilakukan dengan pendekatan konseling dan penyelesaian kasus secara hukum dengan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Malaysia.

Level yang kedua adalah level nasional. Dalam hal ini aktor gerakan di Malaysia menuntut adanya revisi terhadap *employment act* dan meletakkan buruh migran sektor domestik atau *domestic workers* dalam UU yang mengikat secara hukum. Aktivisme juga menuntut pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO No. 189 sehingga pemerintah Malaysia memiliki payung hukum internasional dalam perlindungan terhadap buruh migran sektor domestik. Dua hal itu merupakan hal yang utama dari sisi nasional dan terkait dengan *legal binding* dalam perlindungan hak-hak buruh migran.

Advokasi pada level nasional di tujukan pada pemerintah Malaysia. Strategi mobilisasi massa dalam menuntut perubahan UU dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan melakukan kampanye menuntut revisi UU. Kampanye tersebut tercermin dalam aksi kampanye kolektif *Domestic Work is Work*. Terdapat sembilan komponen kampanye yakni peningkatan kesadaran, mendapatkan dukungan dari kelompok majikan, menguatkan peran serikat buruh, mempengaruhi legislasi, mempengaruhi pembuat kebijakan, menguatkan keterlibatan masyarakat sipil, bekerja dengan partner negara, melibatkan pekerja domestik dengan mengorganisasikannya, dan menjadi bagian dari proses ILO (Tenaganita, 2012, hal. 80).

Dalam kampanyenya, aktor gerakan menggunakan tiga alat penting untuk mobilisasi massa yakni media, masyarakat sipil, dan serikat buruh. Tiga hal penting tersebut digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik, kelompok majikan, legislatif, dan pembuat kebijakan. Media massa adalah alat yang paling penting untuk strategi mobilisasi. Jenis-jenis media massa yang digunakan adalah media massa *mainstream*, internet, *bloggers*, media alternatif, dan bekerjasama dengan jurnalis-jurnalis. Teknik advokasi dengan menggunakan media adalah *public relations*, pemasaran, jurnalisisme, dan lobbying di akar rumput. Melalui teknik ini,

NGOs dapat secara aktif memasukkan forum publik dan mempengaruhi dalam pembingkai dan menunjukkan perhatian mereka serta sudut pandang mereka.

Kampanye media diluncurkan dalam koran, majalah, radio, televisi serta menggunakan pengiklanan berbayar. Selain itu, NGOs mengundang jurnalis sebagai aktor penting dalam media, untuk hadir dalam berbagai *workshop* yang diselenggarakan. Cara tersebut merupakan langkah NGOs untuk mentransfer ide dan gagasan mereka. Bagi media sendiri, kegiatan semacam itu adalah sumber berita. *Press statement* adalah hal penting bagi NGOs untuk menarik perhatian media. Oleh karenanya, NGOs selalu merancang *press statement* maupun melaksanakan *press conference*.

Strategi di level internasional adalah menjalin jaringan transnasional serta aktif menghadiri forum-forum internasional tentang buruh migran. Jaringan internasional yang dimiliki oleh NGOs Malaysia adalah dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional diantaranya adalah ILO, ASETUC, CARAM Asia, dan CAMSA Internasional. NGOs Malaysia tergabung dalam *International Migrant Alliance*, yakni aliansi global tentang migran akar rumput, pengungsi, dan masyarakat yang terdusur. Strategi yang lain adalah ikut serta dalam *ASEAN Forum on Migrant Labor (AFML)*. AFML merupakan forum di level ASEAN yang diikuti oleh organisasi-organisasi akar rumput yang fokus pada buruh migran. Upaya yang lain diwujudkan dalam bentuk kampanye kolektif dengan jaringan lintas batas. Salah satu aksi kolektif yakni *Domestic Work is Work*.

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa strategi mobilisasi politik oleh NGOs di Malaysia dilakukan dalam tiga level, level akar rumput, nasional, dan internasional. Salah satu agenda yang menjadi alat mobilisasi politik adalah keikutsertaan dalam forum-forum baik nasional maupun internasional. Di dalam forum-forum tersebut, mereka menjaring informasi sekaligus menyebarkan ide dan wacana. Mereka juga berjejaring dengan CSOs dari masing-masing negara asal buruh migran domestik di Malaysia. Misalnya NGOs Malaysia melakukan berjejaring dengan *Migrant*

Care dan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia).

KESIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan beberapa hal, pertama, ada konstruksi sosial politik dalam menciptakan isu kerentanan buruh migran sektor domestik di Malaysia. Kedua, formasi gerakan perlindungan berbasis pada pendekatan hak asasi manusia dan berkisar antara klaim hak asasi manusia, hak-hak buruh, *gender equality at work*, dan nilai kemanusiaan. Formasi gerakan tersebut terbentuk dari adanya konstruksi identitas dan manajemen solidaritas kolektif yang dilakukan dengan menggunakan pembingkai aksi kolektif. Namun, pada realita menunjukkan bahwa identitas kolektif terfragmentasi berdasarkan kepentingan. Fragmentasi identitas kolektif menunjukkan adanya pragmatisme dalam identitas kolektif. Konstruksi identitas bukan berarti meng-homogenkan sesuatu yang berbeda-beda melainkan membentuk aspek ke-kita-an supaya lebih mudah dalam menentukan ‘musuh bersama’ dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, terbukanya ruang interaksi bersama antara organisasi-organisasi internasional membuka kesempatan dalam memobilisasi politik dan massa, baik secara nasional maupun internasional. Penjiwaan aksi kolektif dengan pendefinisian krisis maupun konflik atas relasi politik dan sosial di Malaysia menjadi faktor kemunculan gerakan transnasional. Selanjutnya, aktor gerakan melakukan strategi mobilisasi politik melalui tiga level, yakni level *grassroot*, level nasional, dan level internasional.

Tulisan ini juga menunjukkan bahwa dalam sebuah aksi kemanusiaan, konsepsi tentang *citizenship* bukan lagi pembatas bagi aktivisme. Gagasan kosmopolitan menjadi semangat pergerakan dengan tanpa membedakan etnis, ras, agama, maupun bangsa dan negara. Warga negara maupun bukan adalah sama dihadapan nilai-nilai kemanusiaan. Dimensi kosmopolitan tidak berada di segala dimensi, melainkan memiliki keterbatasan. Aktor gerakan menempatkan buruh migran di dua sisi, sebagai subjek gerakan sekaligus objek gerakan. Menjadi subjek, ketika tidak ada batas antara aktor gerakan dengan buruh

migran domestik. Mereka merasa berada pada satu garis perjuangan yang sama, yakni sebagai manusia yang berhak mendapatkan hak-hak dasarnya. Prinsip *dignity* dan *equality* yang melandasi perasaan ini yang berimplikasi pada pendefinisian diri sebagai ‘*human being*’ dan bagian dari warga dunia. Di sisi lain, aktor gerakan juga menempatkan buruh migran domestik sebagai objek gerakan, yakni ada batas antara aktor gerakan dengan buruh migran domestik. Hal tersebut tercermin ketika aktor gerakan melakukan advokasi terhadap buruh migran domestik. Ada jarak yang tercipta antara pelaku dan aspek sasaran.

REFERENSI

- Batliwala, S. (2002, December 16). Grassroots Movements as Transnational Actors: Implications for Global Civil Society. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 13(4), 393-410.
- Beck, U. (2000). The Cosmopolitan Perspective: Sociology of The Second Age of Modernity. *British Journal of Sociology*, 51(1), 79-105.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611-639.
- C.R.S. Milani, A. R. (2007). Transnational Social Movement and the Globalization Agenda: a methodological approach based on the analysis of the World Social Forum. *Brazilian Political Science Review (online)*.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Borders*. London: Cornell University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2008). Advocacy Network and International Society. Dalam S. Khagram, & P. Levitt, *The transnational Studies Reader* (hal. 501-513). New York: Routledge.
- Lyons, L. (2006). The limits of transnasional activism: Organizing for migrant worker rights in Malaysia and Singapore. *Center for Asia Pacific Social Transformation Studies*, 1-25.
- Melucci, A. (1989). *Nomads of the Present Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. Philadelphia: Temple University Press.
- Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pahroji, D., & Singadimedja, H. N. (2012, September). Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia dan Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Majalah Iliah Solusi Unsika*, 11(24).
- Roudometof, V. (2005). Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization. *Current Sociology*, 53(1), 113-135.
- Tarrow, S. (2005). *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tenaganita. (2012). *Domestic Workers Campaign Toolkit*. Selangor: Tenaganita Sdn Bhd.
- Tenaganita. (2016, --). *Who We Are: Tenaganita*. Dipetik Agustus 10,

- 2016, dari Tenaganita Web site: <http://www.tenaganita.net/our-story/>
- Weiss, M., & Hassan, S. (2002). *Social Movements in Malaysia: from moral communities to NGOs* (1 ed.). London: Routledge.
- Women's Aid Organization. (2015). *Women's Aid Organization Annual Report 2015*. Kuala Lumpur: WAO.
- Wawancara:
- Wawancara dengan Natasha Dandavati, Advocacy Officer, Monitoring and Documentation, Women's Aid Organization (WAO) di Kantor WAO Petaling Jaya, tanggal 17 Juni 2016
- Wawancara dengan Adrian Pereira, Direktur North South Initiatives (NSI), di Kantor NSI Petaling Jaya, tanggal 18 Juni 2016
- Wawancara dengan Anne Beatrice, Staf NSI di Kantor NSI Petaling Jaya, tanggal 18 Juni 2016
- Wawancara dengan Taufiq, Ketua Pengelola Sekolah Indonesia-Malaysia, di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, tanggal 19 Juni 2016
- Wawancara dengan Liezl Rodrigo Galdo, *Coordinator of Filipino Migrant Domestic Workers*, di Kuala Lumpur, tanggal 19 Juni 2016
- Wawancara dengan Jovelyn Tantiado, *Filipino Migrant Domestic Workers*, di Kuala Lumpur, tanggal 19 Juni 2016
- Wawancara dengan Josephine, *The Migrant and Refugees Desk-Archdiocesan Office for Human Development* (AOHD), di Kantor AOHD Kuala Lumpur, tanggal 20 Juni 2016
- Wawancara dengan Sok Nay, *Coordinator of Cambodian Migrant Workers Solidarity Network*, di Petaling Jaya, tanggal 20 Juni 2016
- Wawancara dengan Fajar, Program Officer Tenaganita, di Kantor Tenaganita Petaling Jaya, tanggal 21 Juni 2016
- Wawancara dengan Glorene, Direktur Tenaganita, di Kantor Tenaganita Petaling Jaya, tanggal 21 Juni 2016
- Wawancara dengan Indriati Kusumawardhani, *Third Secretary-Consular Affairs Indonesian Embassy of Malaysia*, di KBRI Malaysia Kuala Lumpur, tanggal 21 Juni 2016
- Wawancara dengan BMI sektor domestik di kantor KBRI Malaysia Kuala Lumpur, tanggal 21 Juni 2016
- Wawancara dengan Marina, *Project Coordinator of ASEAN Service Employees Trade Union Council* (ASETUC) di Petaling Jaya, tanggal 22 Juni 2016
- Wawancara dengan Ridwan Wahyudi, Koordinator Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malaysia, di Kuala Lumpur, tanggal 22 Juni 2016
- Wawancara dengan Idah, BMI sektor domestik di Malaysia, di Kuala Lumpur, tanggal 23 Juni 2016
- Wawancara dengan Bobby, Direktur Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), di Jakarta, tanggal 23 Juni 2016
- Wawancara dengan beberapa staf Migrant Care (Nur Harsono- Divisi Kebijakan; Ika – Staf Migrant Care untuk Malaysia; Siti Bariah – Staf Migrant Care Divisi Informasi dan Data) di Kantor Migrant Care Jakarta, tanggal 24 Juni 2016
- Wawancara dengan Nashrikah, *Coordinator of Indonesian Migrant Domestic Workers* di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2016

Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Nur Rachmat Yuliantoro, Atin Prabandari, Dafri Agussalim

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

nur.rachmat@ugm.ac.id

Diserahkan: 20 November 2016, diterima: 17 Januari 2017

Abstract

This study is trying to project some trends of U.S. foreign policy based on the results of presidential election in 2016. The United States had recently held presidential election on November 8, 2016. The victory of Republican candidate Donald Trump shocked the world that he defeated Democratic Hillary Clinton, who had excelled in some polls before the election. Various controversies raised by Trump did not prevent him from becoming the president-elect, as the global community soon became concerned with the possibility of the unstable international politics. After describing Clinton and Trump's stand on foreign policy during their campaign, the study will present the results of the presidential election. Trump's foreign policy is expected to show "the great American power," but at the same time his favor of protectionism could threaten international economic cooperations involving the United States. The U.S. could see its image of "world police" reduced, but this would not automatically make the world safer. Under the leadership of Trump, American foreign policy will face many problems and challenges that are not easy to solve.

Keywords: the United States, Foreign Policy, Presidential Election. Donald Trump

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk memproyeksikan beberapa kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Amerika Serikat baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden pada tanggal 8 November 2016. Kemenangan kandidat Partai Republik, Donald Trump, mengejutkan dunia. Ia mengalahkan kandidat partai Demokrat Hillary Clinton, yang unggul dalam beberapa jajak pendapat sebelum pemilu. Berbagai kontroversi yang disampaikan oleh Trump tidak mencegahnya memenangkan pemilihan, membuat masyarakat dunia segera menjadi khawatir dengan kemungkinan politik internasional yang kacau. Setelah menggambarkan posisi Clinton dan Trump pada isu luar negeri selama kampanye mereka, studi ini akan menyajikan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Kebijakan luar negeri Trump diharapkan menunjukkan "kekuatan besar Amerika," tetapi pada saat yang sama kecenderungan proteksionismenya bisa mengancam kerja sama ekonomi internasional yang melibatkan Amerika Serikat. AS akan melihat bahwa citra "polisi dunia"-nya bisa berkurang, tapi ini tidak akan otomatis membuat dunia lebih aman. Di bawah kepemimpinan Trump, kebijakan luar negeri Amerika akan menghadapi banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Kata kunci: Amerika Serikat, Politik Luar Negeri, Pemilihan Presiden, Donald Trump

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2016, perhatian rakyat Amerika Serikat dan juga masyarakat internasional tertuju pada kampanye dan pemilihan pendahuluan di negara-negara bagian Amerika Serikat sebagai bagian dari pemilihan presiden pada bulan November. Terdapat banyak hal yang menarik untuk didiskusikan dan dianalisis terkait dengan kampanye dan pemilihan pendahuluan tersebut. Di antaranya adalah dinamika perolehan jumlah delegasi setiap kandidat yang dihasilkan dari pemilihan pendahuluan, saling serang

secara verbal antarkandidat – khususnya di Partai Republik, sampai pada berbagai kontroversi yang dimunculkan oleh milyuner Donald Trump. Sekalipun mengeluarkan banyak pernyataan yang membuat orang bingung atau bahkan marah, ternyata Trump kemudian berhasil mengamankan nominasi Partai Republik saat konvensi di Cleveland.

Kubu Partai Demokrat juga menunjukkan dinamika yang tidak kalah menariknya. Setelah sempat diramalkan oleh beberapa kandidat, persaingan

terakhir melibatkan mantan Ibu Negara dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Senator dari negara bagian Vermont Bernie Sanders. Orang mungkin tidak menyukai Hillary karena tidak ingin ada politik dinasti lagi setelah Bush (suami Hillary, Bill, adalah presiden ke-42 Amerika Serikat yang memerintah pada periode 1993-2001), tetapi dukungan yang besar dari kelompok minoritas membuat ia berpeluang menjadi presiden perempuan pertama Amerika Serikat. Di sisi lain, Sanders berupaya membuat perubahan besar-besaran dalam konteks ekonomi dan sosial, tetapi ia dikhawatirkan akan membuat Amerika Serikat yang liberal menjadi negara sosialis demokratik seperti pandangan politiknya. Clinton akhirnya mengalahkan Sanders dalam hal perolehan jumlah delegasi dari pemilihan pendahuluan dan kemudian dinominasikan secara resmi dalam konvensi partai di Philadelphia.

Dalam politik Amerika Serikat, hubungan antara pemilihan presiden dan isu politik luar negeri menunjukkan dinamika yang menarik. Sekalipun banyak pengamat berargumen bahwa politik luar negeri cenderung tidak begitu diperhatikan oleh para pemilih, namun ia merupakan sebuah tema penting di mana hasil pemilihan akan menunjukkan dampak yang signifikan. Peta posisi Clinton dan Trump terhadap politik luar negeri terbaca jelas. Apa yang akan mereka jalankan - jika terpilih sebagai presiden - untuk merespon kebangkitan Cina, situasi di Timur Tengah, hubungan dengan Eropa, regionalisme dan perdagangan internasional, terorisme, dan isu lainnya dalam politik luar negeri menarik untuk dianalisis.

Tulisan ini penting karena mencoba untuk memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan hasil pemilihan. Apakah pemilih akan memberikan suara lebih banyak kepada Clinton, yang mempunyai pengalaman sangat banyak dalam ranah politik luar negeri? Atau mereka akan lebih memilih Trump, yang berkeinginan "membuat Amerika kembali menjadi bangsa yang besar"? Dalam konteks ini, identifikasi posisi para kandidat terhadap sejumlah isu internasional yang dihadapi oleh Amerika Serikat menjadi penting. Dari identifikasi inilah kami akan

menganalisis sejumlah pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh pemimpin baru Amerika Serikat untuk merespon situasi internasional yang terus berubah dengan cepat. Dapatlah dikatakan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat akan sangat mempengaruhi politik, ekonomi, dan keamanan internasional, khususnya pada situasi di mana kekuatan Amerika disebut-sebut tengah mengalami kemunduran sejak krisis ekonomi 2008 dan kegagalan "perang melawan terorisme" di Irak dan Afghanistan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Telah banyak buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian tentang pemilihan presiden Amerika Serikat diterbitkan atau dipresentasikan. Ini tidak lepas dari fakta bahwa sistem politik Amerika Serikat yang cukup stabil merupakan subjek analisis yang berkelanjutan, termasuk bagaimana model dan implementasi pemilihan presidennya, yang sebenarnya cukup rumit. Salah satu tema utama yang diusung oleh literatur adalah kecilnya pengaruh isu politik luar negeri terhadap hasil pemilihan presiden.

Shana Gadarian (2010) menggambarkan kesimpulan umum literatur awal bahwa politik luar negeri tidak memainkan peran yang signifikan terhadap perilaku politik dan, pada gilirannya, pemilihan presiden. Alasan mendasar mengapa pendapat publik dianggap tidak cukup mempengaruhi posisi seorang kandidat presiden adalah asumsi bahwa isu-isu internasional merupakan sesuatu yang rumit dan tidak berkaitan langsung dengan keseharian kehidupan warga. Masyarakat pemilih umumnya tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang politik luar negeri. Mereka lebih mengutamakan isu-isu domestik yang secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi kualitas hidup mereka, misalnya ekonomi, pajak, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil.

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa masyarakat pemilih Amerika cenderung mengesampingkan isu politik luar negeri saat mereka harus memberikan suara. Sowmya Anand dan Jon Krosnick (2003) menulis penilaian sejumlah pengamat bahwa publik Amerika jarang ikut terlibat dalam

pengambilan kebijakan luar negeri dan jarang melihat kepada isu tersebut ketika memberikan suara dalam pemilihan presiden. Anand dan Krosnick meneliti bagaimana masyarakat pemilih pada pemilihan presiden tahun 2000 tampak cenderung tidak sejalan dengan sebagian besar isu yang dipercaya oleh kandidat, termasuk politik luar negeri, apalagi bila terdapat kandidat yang posisinya berseberangan dengan opini publik yang luas. Meski demikian, ketika isu politik luar negeri menjadi isu yang *salient* seperti pada pemilihan presiden tahun 2004, peran pentingnya dalam menentukan hasil pemilihan tidak bisa dikesampingkan.

Tentang kecenderungan korelasi yang tidak sejalan antara posisi politik luar negeri para kandidat dan preferensi para pemilih, John Aldrich, John Sullivan, dan Eugene Borgida (1989) menyampaikan temuan sebaliknya. Mereka berargumen bahwa isu politik luar negeri dan keamanan telah mempengaruhi preferensi dan suara para pemilih. Masyarakat pemilih dinilai telah mempunyai sikap tentang politik luar negeri, mampu membedakan dengan jelas preferensi partai-partai dan kandidat-kandidat tentang isu tersebut, dan kemudian menggunakan sikap dan kemampuan tersebut untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Dengan ini, Aldrich, Sullivan dan Borgida menegaskan bahwa kandidat presiden yang memainkan isu politik luar negeri dalam kampanyenya “*do not waltz before a blind audience [when discussing foreign policy].*” (p. 135).

Argumen bahwa isu politik luar negeri tidak memainkan peran penting dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat juga dibantah oleh hasil penelitian Christopher Randolph, Jr (2006). Randolph menegaskan bahwa para pemilih menunjukkan mereka mempertimbangkan pula posisi kandidat dalam politik luar negeri. Kandidat yang cenderung menunjukkan kebijakan luar negeri yang tidak populer berisiko kehilangan dukungan yang signifikan. Yang menarik, kandidat petahana (dalam kasus ini, Presiden Ronald Reagan) memodifikasi pandangan politik luar negerinya demi mengamankan peluang untuk dapat terpilih kembali.¹ Randolph kemudian menyimpulkan

bahwa kasus Reagan tidak saja menunjukkan pentingnya isu politik luar negeri dalam pemilihan presiden, tetapi juga bahwa pendapat masyarakat dan isu politik domestik turut menentukan hasil pemilihan tersebut. Kebijakan yang tidak populer akan membuat seorang presiden kehilangan dukungan Kongres dan mengundang musuh yang berpotensi merusak kesempatannya untuk terpilih kembali di masa jabatan kedua.

Jauh sebelum Randolph, Miroslav Nincic and Barbara Hinckley (1991) juga memberikan argumen yang serupa, yaitu bahwa pendapat keseluruhan pemilih atas sikap seorang kandidat dipengaruhi antara lain oleh posisi politik luar negerinya, sebuah situasi yang membuat posisi politik luar negeri memberikan dampak yang penting bagi perolehan suara kandidat dalam pemilihan presiden. Pendapat ini juga didukung oleh David Karol dan Edward Miguel (2007). Karol dan Miguel menunjukkan bahwa Perang Irak telah secara langsung mengurangi jumlah suara yang didapatkan oleh kandidat petahana Presiden George W. Bush. Mereka menemukan bahwa suara untuk Bush bisa saja 2% lebih besar dari yang nyatanya ia peroleh bila tidak ada informasi bahwa sampai dengan hari pemilihan telah setidaknya 10 ribu tentara dan warga sipil Amerika meninggal dan terluka dalam perang Irak. Dalam artikel ini dapat dipahami dengan jelas bahwa dalam pemilihan presiden tahun 2004, politik luar negeri mempengaruhi hasil pemilihan.

Kebanyakan literatur yang direviu dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa pada tingkat dan kasus tertentu, terdapat hubungan positif antara posisi politik luar negeri kandidat presiden dan hasil perolehan suara yang mereka peroleh. Tema ini merupakan sebuah subjek penelitian yang baik, namun bukanlah fokus utama dari penelitian ini. Dengan argumen bahwa posisi para kandidat sangat menentukan hasil pemilihan presiden pada bulan November 2016, penelitian ini akan mencoba melihat proyeksi politik luar negeri Amerika Serikat berdasarkan posisi kandidat yang keluar sebagai pemenang pemilihan.

Terdapat sejumlah teori yang menjelaskan mengapa

pemilih memberikan suara kepada kandidat tertentu. Dalam politik Amerika Serikat, salah satu penjelasan – ditawarkan oleh Jennifer Merolla, Jennifer Ramos, dan Elizabeth Zechmeister (2007) – menempatkan karisma seorang pemimpin yang dihubungkan dengan situasi krisis yang dihadapi. Merolla, Ramos, dan Zechmeister menemukan bahwa situasi krisis, alih-alih normal, dapat menunjukkan kualitas kepemimpinan seseorang yang karismatis. Menurut mereka, “*during times of crisis, individuals look for a strong, confident leader, and they project additional power, morality, and competence onto that individual.*” (p. 39).

Dalam artikel mereka, Merolla, Ramos, dan Zechmeister menunjukkan bahwa salah satu krisis yang tengah dihadapi Amerika Serikat pada masa itu adalah krisis keamanan nasional: pemilihan presiden dilangsungkan tiga tahun setelah serangan terorisme pada 9 September 2001, sebuah insiden yang digambarkan oleh Wakil Presiden Dick Cheney sebagai hal-hal yang “tidak ingin Anda pikirkan”. Kebijakan anti-terorisme Amerika Serikat kemudian dilangsungkan secara total dengan, antara lain, berperang melawan Taliban di Afghanistan dan rezim Saddam Hussein di Irak. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa isu politik luar negeri memainkan peran penting dalam kecenderungan mayoritas pemilih untuk memberikan suara kepada kandidat petahana Presiden Bush daripada Senator John Kerry. Dukungan luas masyarakat pemilih untuk jabatan kedua juga dimanfaatkan Bush untuk menjalankan kebijakan domestik yang keras sebagai bagian dari anti-terorisme, yaitu program “pengawasan teroris” yang membolehkan agen-agen pemerintah melakukan penyadapan tanpa ijin terhadap target yang dicurigai (p. 40).

Gadarian (2010) mengonfirmasi temuan Merolla, Ramos, dan Zechmeister. Menggunakan data set pemilihan presiden dari tahun 1980 hingga 2004, Gadarian menunjukkan bahwa isu politik luar negeri merupakan salah satu penentu kecenderungan pemberian suara oleh para pemilih. Ia menemukan bahwa dalam situasi yang “mengancam” pemilih cenderung mengidentikkan diri mereka dengan

kandidat dan partai politik yang “*hawkish*” daripada yang “*dovish*” (“elang” dan “merpati,” merepresentasikan perang dan damai). Ia juga berargumen bahwa dalam isu politik luar negeri, pemilih Amerika Serikat cenderung akan memberikan suara bukan kepada kandidat yang dinilai akan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan preferensi mereka, tetapi kepada kandidat yang dianggap dapat memimpin dengan tegas serta memberikan rasa aman dan perlindungan. Para kandidat pemilihan presiden di tahun 2004 memahami hal ini ketika mereka menggunakan seluruh debat sebelum pemilihan untuk isu politik luar negeri, khususnya tentang terorisme dan perang Irak. Sekalipun isu keamanan nasional dan politik luar negeri secara tradisional dinilai sebagai “isunya Partai Republik,” (Gadarian, 2010: 1046) tetapi fakta bahwa kedua kandidat dari dua partai utama “memainkan” isu politik luar negeri secara dominan menunjukkan bahwa, setidaknya dalam pemilihan tahun 2004, politik luar negeri akan menentukan hasil pemilihan presiden.

Ketika sebuah bangsa menghadapi ancaman keamanan nasional dan krisis politik luar negeri, calon pemimpin yang menunjukkan postur politik luar negeri yang “lebih militan” dan “lebih *hawkish*” cenderung akan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. “Kekuatan” dan “kemampuan menyelesaikan” adalah faktor-faktor penting dalam keputusan para pemilih memberikan suara mereka – hal yang menerangkan bahwa pemimpin dengan kualitas tersebut, misalnya Franklin Roosevelt dan George W. Bush, dapat terpilih kembali di masa krisis (Gadarian, 2010: 1049-1050). Dalam pemilihan presiden tahun 2004, isu seperti belanja militer, terorisme, dan perang Irak adalah “isu favorit” Bush yang tidak bisa dihindari oleh Kerry mengingat situasi krisis yang tengah dihadapi Amerika Serikat. Bush kemudian berhasil membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang kuat, yang “melawan teroris dengan segala upaya” dan kemauan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan persoalan keamanan nasional dan politik luar negeri (p. 1060-1061). Pemilihan tahun 2004 telah menunjukkan

bahwa kandidat yang berhasil menunjukkan postur sebagai pemimpin yang kuat dipandang akan lebih berhasil memimpin Amerika Serikat dalam mengarungi krisis dan mengatasi masalah. Pemilihan tahun 2016, dalam banyak hal, merefleksikan pandangan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

POSISI POLITIK LUAR NEGERI KANDIDAT PARTAI UTAMA

Hillary Clinton

Hillary Clinton, yang menjadi *first lady* ketika suaminya Bill menjadi presiden selama delapan tahun, pernah menjabat sebagai *Secretary of State* atau Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan pertama Barack Obama (2009-2013). Untuk strategi kampanye, Clinton sangat mengedepankan pengalaman politiknya. Misalnya, ia berulang kali menekankan pengalamannya sebagai menteri luar negeri dalam merespon isu-isu internasional hingga membandingkannya dengan pengalaman politik kandidat Republik Donald Trump yang dinilai masih sangat kurang (NPR, 2016a). Dengan slogan “*Grandmothers Know Best*,” Clinton juga menggunakan isu gender untuk mendulang dukungan sebagai kandidat presiden perempuan pertama Amerika Serikat. Tiga slogan lain yang ia gunakan dalam berkampanye adalah “*Hillary for America*”, “*I’m with Her*” dan “*We are Stronger Together*.”

Dalam urusan kebijakan luar negeri, Clinton sangat menekankan pada kekuatan (*power*), hegemoni, dan keamanan nasional. Sepak terjang Clinton dari saat menjadi senator hingga menteri luar negeri menunjukkan betapa ia cenderung menyukai penggunaan militer dan perang dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam artikelnya di laman *Foreign Policy*, Micah Zenko (2016) membuat suatu analisis menarik bahwa sepanjang karir politiknya sejak tahun 1994, Clinton dapat dipastikan mendukung dan membuat kebijakan luar negeri yang mendukung perang dan intervensionis.²

Clinton sangat pro pasar bebas dan melihat bahwa isolasi atau menutup diri dari persaingan internasional bukanlah kebijakan yang sesuai dengan semangat

Amerika Serikat. Namun demikian, Clinton juga menyeimbangkan pandangannya dengan mengatakan akan mendukung setiap usaha untuk mengurangi pengaruh negatif Cina dan melindungi pekerja Amerika di pasar global. Namun, terdapat satu hal yang mengejutkan dari Clinton, yaitu penolakannya terhadap Kemitraan Asia-Pasifik (*Trans Pacific Partnership*). Clinton secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak bisa mendukung TPP karena “*the bar here is very high and, based on what I have seen, I don’t believe this agreement has met it.*” (Clinton, 2015a).

Clinton memastikan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat akan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dengan memprioritaskan berbagai isu seperti *same-sex marriage*, kesetaraan gender, dan hak anak. Ia juga menekankan akan melindungi kaum Muslim Amerika, yang selalu mendapatkan stereotip buruk akibat dari peristiwa 9/11 dan mengatakan bahwa Muslim Amerika berkontribusi dengan bekerja setiap hari di garis depan melawan radikalisme. Clinton mengusulkan pembentukan zona aman pengungsi yang bisa menghentikan krisis migrasi – ditetapkan sebagai “Doktrin Hillary.” Ia pun siap memimpin komunitas internasional dalam mengorganisir penyelamatan dan perlindungan para pengungsi agar hidup mereka aman (Beckwith, 2015; Stacey, 2016).

Di Timur Tengah, Clinton berpikiran bahwa melindungi dan mendukung segala kepentingan Israel merupakan suatu “kewajiban moral” bagi Amerika Serikat (Jewish Telegraphic Agency, 2016). Menanggapi isu nuklir Iran, Clinton mendukung penuh bahwa Iran tidak akan dibiarkan untuk memperoleh senjata nuklir; Amerika dan Israel akan lebih aman apabila memiliki kesepakatan dengan Iran mengenai proliferasi nuklir serta menyiapkan strategi untuk mengantisipasi perilaku buruk Iran di wilayah tersebut secara luas (Clinton, 2015b). Akan halnya konflik di Suriah, Clinton mungkin akan membantu membentuk operasi penjaga perdamaian terbesar PBB. Clinton mengatakan akan mencegah apa yang dikenal sebagai “Negara Islam”/ISIS dari memperkuat pengaruhnya dan akan mendukung suatu transisi pemerintahan yang

stabil dan sukses (Stacey, 2016). Mengalahkan ISIS di Suriah, Irak, dan seluruh Timur Tengah, mengganggu serta membongkar infrastruktur dan dukungan finansial teroris inilah yang akan menjadi target Clinton (Beckwith, 2015).

Eropa merupakan salah satu tantangan utama kebijakan luar negeri AS, khususnya mengingat di dalamnya terdapat isu Rusia. Sebuah analisis menyebutkan bahwa Clinton mungkin akan mengambil sikap tegas terhadap Rusia dalam persoalan Ukraina, di mana mempersenjatai militer Ukraina merupakan salah satu opsi kebijakan yang sangat mungkin ia ambil. Clinton diprediksikan akan mendukung penguatan kehadiran militer Amerika di Eropa untuk mencegah Rusia memperluas agresinya (Nechepurenko, 2015).

Saat menjabat menteri luar negeri, Clinton pernah mengeluarkan strategi *'Pivoting to Asia,'* di mana Amerika Serikat mengakui arti penting Asia dalam konstelasi global dan ingin lebih memprioritaskan kawasan Asia dalam kebijakan luar negerinya. Strategi regional Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Clinton adalah berupa memperjelas komitmen berkelanjutan dalam upaya membentuk suatu kerja sama regional dengan Asia-Pasifik (Clinton, 2011). Kerja sama regional ini merupakan satu dari tiga strategi *rebalancing* Clinton di Asia - dua yang lain adalah pembangunan kepercayaan antara Cina dan Amerika Serikat serta komitmen penuh untuk memperluas ekonomi, politik, dan kerja sama keamanan secara maksimal. Menanggapi sikap Cina di Laut Cina Selatan, Clinton menyatakan bahwa *"the United States, like every nation, has a national interest in freedom of navigation, open access to Asia's maritime commons, and respect for international law in the South China Sea"* (Putz, 2015).

Donald Trump

Di kubu lawan, bergema slogan kampanye *"Make America Great Again"* dari Donald Trump yang sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya. Perbaikan sistem di dalam negeri dan restorasi kekuatan hegemoni Amerika Serikat di level dunia merupakan

kunci kampanye Trump untuk menarik massa, khususnya warga Amerika konservatif yang akhir-akhir ini memiliki keresahan terhadap imigrasi dan terorisme. Secara langsung Trump merespon isu-isu tersebut dan menyatakan posisinya yang kontroversial. Banyak pidato Trump yang mengandung substansi kekerasan dan rasisme. Pernyataannya mengenai isu terorisme dan Islam "radikal", misalnya, direspon negatif oleh kalangan muslim di Amerika Serikat dan dunia internasional. Trump cenderung vokal terhadap isu Islam "radikal" dan terorisme, bahkan sampai ia berjanji untuk tidak hanya membatasi, tetapi melarang masuknya imigran yang berasal dari negara-negara Islam yang diduga menjadi asal terorisme (Berman, 2015).

Di antara fokus kebijakan yang menjadi prioritas Trump mengenai keamanan nasional adalah pengetatan peraturan tentang imigran ilegal melalui program pembangunan dinding yang akan dibangun sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Menurut Trump, rencana kebijakan tersebut akan secara drastis mengurangi tingkat kejahatan di AS, seperti penyelundupan yang dilakukan oleh kartel narkoba dan tindak kriminal lainnya, termasuk kekerasan dan pemerkosaan yang dianggap bersumber dari meningkatnya angka imigran yang masuk melewati perbatasan secara ilegal. Mengingat lapangan pekerjaan selama ini didominasi oleh kaum pekerja yang berlatar belakang imigran, maka menurut Trump pengetatan sistem imigrasi akan membuat angka pengangguran di Amerika menurun. Tak pelak, rencana kebijakan imigrasi ini menimbulkan polemik, khususnya di antara imigran Hispanik yang menganggap Trump secara tidak langsung menilai mereka sebagai sumber permasalahan yang dialami Amerika selama ini.

Trump pertama kali mengeluarkan pernyataan tentang kebijakan luar negeri saat menghadiri undangan Center for the National Interest di Washington, D.C., April 2016. Trump memfokuskan beberapa postur kebijakan luar negeri yang menurutnya ideal bagi Amerika Serikat, sesuai dengan slogan kampanyenya yang bertujuan untuk membuat Amerika kembali disegani di kancah politik dunia. Trump kemudian mengatakan bahwa ia akan mengaplikasikan

“*America First*” dalam kebijakan luar negerinya (Beckwith, 2016). “*America First*” yang dimaksudkan oleh Trump adalah memprioritaskan warga Amerika Serikat dan keamanannya terkait dengan kebijakan luar negeri. Trump mengatakan bahwa warga AS menjadi prioritas di dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri ketika dia kelak menjadi presiden (Milbank, 2016). “*American First*” akan menjadi tema utama dalam pemerintahan Trump kelak (Diamond & Collison, 2016).

Selanjutnya Trump mengkritik intervensi administrasi Obama di Irak, Suriah, dan Libya untuk “mengubah rezim” yang kemudian menyebabkan kekacauan di Timur Tengah. Keadaan ini dianggap memberikan ruang bagi ISIS untuk berkembang pesat. Meskipun tidak bersedia menceritakan kapan dan dengan cara apa, Trump berencana untuk menyerang dan mendeklarasikan perang melawan ISIS. ISIS menjadi “bulan-bulanan” Trump sepanjang kampanyenya menuju Gedung Putih.

Yang pertama kali akan dilakukan Trump dalam menghadapi persoalan politik luar negeri adalah membangun kembali kekuatan militer dan mengembalikan kebebasan sistem finansial negara. Salah satu koreksi dari Trump mengenai restrukturisasi pengeluaran dalam sektor militer mengarah pada peran AS yang ikut andil untuk perlindungan Eropa melalui *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). NATO merupakan salah satu pakta pertahanan paling efektif setelah usainya Perang Dingin dan bertujuan untuk meredam kekuatan Soviet/Rusia. Di dalam pakta pertahanan ini Amerika Serikat menjadi kontributor dana langsung terbesar, yaitu sekitar 22% dari keseluruhan pendanaan (Kessler, 2016). Trump mengatakan pembahasan baru akan diadakan bersama dengan sekutu-sekutu AS di NATO demi mempertajam lagi struktur organisasi pakta pertahanan ini serta membahas penyeimbangan pendanaan oleh AS. Menurut Trump, negara anggota lain harus ikut andil dalam pendanaan NATO atau AS tidak akan berusaha mempertahankan mereka jika ada serangan dari kekuatan luar.

Kontroversi lain dari Trump menyangkut

kepemilikan senjata nuklir. Penyebaran penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apa pun, apalagi disalahgunakan untuk terorisme, merupakan hal yang tidak dapat ditolerir. Namun, Trump secara mencengangkan memberikan pernyataan untuk membiarkan Jepang dan Korea Selatan untuk mengembangkan kekuatan nuklir mereka (Kleiner, 2016). Ia juga menyuarakan janjinya untuk “akur” dengan Cina dan Rusia jika terpilih menjadi presiden. Milyuner berusia 70 tahun itu menambahkan, jika dirinya terpilih menjadi presiden maka AS, Rusia, dan Cina pasti akan akur, karena masing-masing presiden memiliki kharisma yang membuat mereka saling menghormati. Trump menyampaikan kritik pedas terhadap kebijakan luar negeri Obama terhadap kedua negara ini. Ia mengatakan bahwa sang presiden telah membiarkan Cina mengambil keuntungan dari Amerika Serikat dan telah gagal untuk mengalahkan ISIS. Menilai banyak yang keliru dari politik luar negeri Obama, Trump berjanji untuk “mengguncang karat dari kebijakan luar negeri Amerika” (Brunnstorm, dkk, 2016).

ISU DEBAT KANDIDAT DAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN 2016

Seperti biasa, dalam minggu-minggu terakhir menjelang pemilihan, diselenggarakanlah debat antar kandidat presiden. Salah satu dari tiga debat yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini mengambil tema utama politik luar negeri Amerika Serikat. Isu-isu yang dibahas dalam debat tersebut khususnya menyangkut keamanan nasional, ekonomi dan perdagangan internasional, serta hubungan bilateral Amerika Serikat dengan negara lain.

Merespon permasalahan ekonomi yang dianggap semakin mengkhawatirkan pasca krisis finansial global 2008, Clinton mengajukan strategi untuk memperkuat ekonomi yang adil dan merata, terutama membenahi sistem ekonomi domestik yang dianggap masih terlalu berpihak pada masyarakat kelas atas dan korporat. Sedangkan menurut Trump, penyebab utama melemahnya perekonomian Amerika Serikat adalah kebijakan Cina yang mendevaluasi mata uang,

sekalipun fakta yang ada terjadi sebaliknya. Selain itu, Trump juga menyatakan perlunya pemerintah Amerika Serikat menegosiasikan kembali kerja sama perdagangan yang telah dibentuk dengan negara lain, misalnya NAFTA, yang ia anggap sebagai sebuah kesepakatan yang “cacat” (NPR, 2016b).

Isu kerja sama perdagangan juga menjadi penting dengan ramainya perdebatan oleh publik Amerika Serikat mengenai *Trans Pacific Partnership* (TPP) di tengah defisit perdagangan yang begitu tinggi – di tahun 2015, misalnya, angka defisit telah mencapai \$531,5 milyar (NPR, 2016c). Kedua kandidat berpendapat bahwa TPP tidak akan memberikan keuntungan ekonomi, tetapi malah semakin merugikan perekonomian domestik berhadapan dengan negara ekonomi besar seperti Cina. Sekalipun demikian, Peterson Institute for International Economics mencatat bahwa rencana Trump untuk menaikkan tarif impor dari Cina dan Meksiko akan menimbulkan *trade war* yang berpotensi menimbulkan empat juta pengangguran dan resesi ekonomi, serta penundaan pelaksanaan TPP akan menurunkan GDP Amerika Serikat hingga puluhan milyar dolar tiap tahunnya (Noland, dkk, 2016).

Isu lain yang diangkat dalam debat adalah keamanan nasional, terutama tentang kejahatan dunia maya yang mulai marak terjadi di tengah kemajuan teknologi dan upaya menghentikan terorisme oleh ISIS. Trump berpendapat bahwa kejahatan dunia maya adalah masalah sangat besar bagi AS, sedangkan Clinton mengangkat hubungan bilateral dengan Rusia yang tengah renggang akibat rumor serangan dunia maya yang dilakukan oleh peretas-peretas dari negara tersebut (DHS Press Office, 2016). Penanganan kejahatan dunia maya menjadi penting karena banyak organisasi teroris kini menggunakan internet sebagai salah satu alat dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Clinton mendorong kerja sama dan hubungan aliansi yang lebih erat dengan NATO dan berkoalisi dengan negara mayoritas Muslim di Timur Tengah untuk mendapat asistensi dalam melawan ISIS. Clinton menunjukkan dukungan terhadap kesepakatan nuklir dengan Iran, namun rencananya

untuk membuat “*no-fly zone*” di Suriah bisa berekskalasi menjadi perang (NPR, 2016c). Sementara itu, strategi yang diajukan oleh Trump dalam melawan ISIS adalah “*taking the oil*,” di mana Amerika Serikat mengambil alih penguasaan ISIS terhadap sumber minyak di Timur Tengah yang berarti memotong sumber dana bagi organisasi teroris tersebut. Tidak jelas strategi militer atau diplomasi seperti apa yang akan dilakukan Trump untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Suriah. Trump kemudian mengkritik Jepang, Korea Selatan, dan NATO yang dianggap tidak banyak berkontribusi dan membebankan tanggung jawab hanya pada Amerika Serikat saja. Dapat disimpulkan bahwa Trump tidak ingin Amerika Serikat menjadi “polisi dunia” seterusnya. Clinton, di sisi lain, masih menghargai hubungan aliansi Amerika Serikat dan mengutamakan perdamaian melalui diplomasi (NPR, 2016b).

Isu imigrasi juga kemudian dikaitkan dengan keamanan nasional. Amerika Serikat sering menjadi tujuan bagi imigran ilegal dari negara tetangga, seperti Meksiko, yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial atau masuknya banyak pencari suaka dan pengungsi (terutama Muslim) dari daerah rawan konflik yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Kebijakan pemerintahan Obama menerima 12.000 pengungsi dari Suriah selama tahun 2015 dikritik oleh Trump sebagai gegabah karena pemeriksaan latar belakang yang dilakukan pemerintah begitu minim dan dapat memperbesar masuknya kriminal dan teroris ke Amerika Serikat. Trump mendorong peningkatan jumlah imigran yang dideportasi serta pemeriksaan yang lebih ketat bagi imigran yang ingin tinggal di Amerika (NPR, 2016c). Sekalipun sepakat dengan ide Trump memperketat perbatasan, Clinton mendukung kebijakan imigrasi Obama yang akan memproteksi sekitar lima juta imigran ilegal dari deportasi dan menawarkan ijin bekerja bagi mereka, terkecuali bagi imigran yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Secara umum, kedua kandidat memiliki perbedaan pendapat mengenai berbagai isu politik luar negeri. Hal ini mendapatkan respon beragam dari masyarakat,

namun melalui jajak pendapat yang dilakukan berbagai media independen, Clinton dipandang menunjukkan performa yang lebih baik daripada Trump. Gallup melaporkan setidaknya dua pertiga perempuan yang menyaksikan debat menilai Clinton memenangkan debat atas Trump, sedangkan kelompok laki-laki juga memilih Clinton dengan rasio 54% melawan 35% yang memilih Trump (Saad, 2016). Hal serupa juga ditunjukkan oleh jajak pendapat oleh media lain seperti *Vox*, *The Economist*, dan *CNN*.

Keunggulan Clinton dalam banyak jajak pendapat perlahan berkurang seminggu jelang pemilihan, ketika FBI mengumumkan akan kembali membuka investigasi atas penggunaan email pribadi Clinton untuk urusan pekerjaan. Trump, yang mendapatkan keuntungan besar dari situasi ini, kemudian berhasil membalikkan prediksi banyak orang. Sekalipun mendapatkan jumlah *popular vote* (suara rakyat pemilih langsung) yang lebih sedikit dari Clinton (Trump 61.201.031, Clinton 62.523.126 – data sampai dengan 18 November 2016), namun Trump berhasil mengantongi lebih banyak *electoral vote* (suara pemilih presiden). Hanya membutuhkan 270 untuk menang, Trump berhasil mengumpulkan 290 *electoral vote* setelah memenangkan beberapa negara bagian penting, sementara Clinton memperoleh 232 *electoral vote* (CNN, 2016). Kontroversi dan kurangnya pengalaman Trump tidak menjadikan ia sebagai pecundang. Bahkan, salah satu argumen terkuat yang mencoba menjawab mengapa Trump bisa menang menunjuk pada karakternya yang terbuka, bicara apa adanya, termasuk janji kembali membangun ekonomi Amerika. Ini dilihat oleh para pemilih Trump sebagai ciri-ciri pemimpin “karismatis,” pemimpin yang kuat, yang bisa membawa Amerika keluar dari krisis – mengafirmasi pendapat Merolla, Ramos, dan Zechmeister tentang pemimpin yang kuat dalam situasi krisis.

PROYEKSI POLITIK LUAR NEGERI DONALD TRUMP:
SEJUMLAH ISU TERPILIH
Keunggulan Amerika

Slogan “*Make America Great Again*”

mengindikasikan keyakinan Trump atas keunggulan Amerika (*American primacy*). Dalam pandangan Trump, kepentingan nasional Amerika haruslah menjadi yang paling utama. Karena diplomasi merupakan *zero sum game*, di mana hanya ada satu pemenang dan satu pecundang, Trump berpendapat bahwa penting bagi Amerika untuk kembali mendapatkan penghormatan yang seharusnya dari dunia internasional, dengan cara menunjukkan dominasi total atas semua negara. Untuk kembali menjadi negara yang mampu mendominasi, Amerika haruslah memfokuskan diri untuk membangun kekuatan dengan menempatkan kepentingan nasional dan kemampuan negara untuk bertindak tanpa pembatasan dari aliansi maupun aturan internasional sebagai prioritas utama (Beckwith, 2016).

Secara langsung arah politik luar negeri Trump merupakan bentuk anti-hegemoni dan anti-multilateralisme yang telah dibangun sebelumnya. Trump melihat hegemoni Amerika kini tidak lagi dapat memberikan manfaat bagi Amerika. Trump menilai bahwa hegemoni tersebut telah membatasi gerakan dan kemampuan Amerika untuk menjadi bangsa yang otonom dan dominan (Nichols, 2016). Kebijakan luar negeri Trump yang diwarnai oleh pengaruh isolasionis dan proteksionis ini sangat menekankan pentingnya cara pandang yang transaksional, yang lebih menekankan pada keuntungan finansial dan moneter bagi Amerika sebagai prioritas tertinggi daripada modal politik maupun keamanan (Ellis, dkk, 2016).

Ekonomi dan Perdagangan Internasional

Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump akan mendapati beragam masalah dan tantangan yang tidak mudah dalam politik domestik dan hubungan internasionalnya. Salah satu isu utama yang harus segera mendapatkan perhatian segera oleh Trump adalah ekonomi dan perdagangan internasional. Trump seringkali mengaitkan isu ini dengan permasalahan imigran dan perdagangan bebas, yang ia sebut sebagai dua faktor bagi tingginya angka pengangguran di Amerika. Ia meyakini bahwa

penyelesaian atas dua masalah ini akan membawa Amerika Serikat untuk membangun ekonomi yang lebih besar: *"If we do what we have to do correctly, we can create the biggest economic boom in this country since the New Deal when our vast infrastructure was first put into place. It's a no-brainer. It's so obvious that even the Democrats can figure it out."* (Trump, 2016: 125).

Salah satu kerja sama ekonomi yang hingga kini masih menjadi perdebatan adalah TPP yang proses negosiasinya telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Mengulang janji kampanyenya, Trump tampaknya akan mengeliminasi TPP – dan mungkin juga NAFTA, yang ia anggap tidak dapat memberikan keuntungan ekonomi yang diharapkan. Bagi Trump, TPP akan menjadi "pukulan mematikan bagi usaha manufaktur Amerika;" ia juga memprioritaskan kepentingan luar negeri negara lain daripada ekonomi Amerika sendiri. Trump mengatakan: *"Not only will the TPP undermine our economy, but it will undermine our independence ... There is no way to 'fix' the TPP. We need bilateral trade deals. We do not need to enter into another massive international agreement that ties us up and binds us down."* (Trump, 2016a). Selain TPP, proyek kerja sama ekonomi lain yang saat ini masih dalam proses negosiasi dan terancam gagal dengan terpilihnya Trump adalah *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP).

Proyeksi ini selaras dengan prinsip Trump yang tidak setuju akan perdagangan bebas. Trump berjanji untuk mengubah tata perdagangan internasional agar lebih berpihak pada Amerika Serikat: *"Trade reform and the negotiation of great trade deals is the quickest way to bring our jobs back to our country... A Trump administration will change our failed trade policies, and I mean quickly."* (Fox, 2016). Dengan ketergantungan negara mitra terhadap pasar Amerika yang lebih besar dibandingkan sebaliknya, serta dukungan kebijakan seperti Trade Expansion Act of 1962 dan Trade Act of 1974 yang dapat digunakan untuk membatasi dan memperbesar tarif, rencana Trump bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terwujud (Davis, 2016).

Namun demikian, bila rencana ekonomi dan perdagangan yang diajukan oleh Trump selama

kampanye benar-benar diwujudkan, akan berisiko memperburuk perekonomian dalam negeri dan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain. Dengan menutup akses perdagangan bebas dan memutus hubungan kerja sama ekonomi, diperkirakan 7% persen lapangan pekerjaan dan 14% GDP (*Gross Domestic Product*) Amerika Serikat yang tergantung pada ekspor akan menjadi korban. Selain itu, *global supply chain* murah dapat terjadi karena perdagangan bebas, sehingga memutus perdagangan bebas sama artinya dengan juga memutus jaringan tersebut. Sekalipun proses manufaktur di dalam negeri mampu menciptakan lapangan pekerjaan, harga barang akan menjadi lebih mahal karena ongkos yang dibutuhkan lebih besar, yang kemudian dapat berujung pada meningkatnya inflasi dan hutang negara (White, 2016). Ditambah dengan pemotongan pajak yang juga direncanakan Trump, Amerika Serikat akan menanggung utang dan beban ekonomi yang jauh lebih besar (The Economist, 2016).

Keamanan Nasional

Sebelum menganalisis proyeksi kebijakan keamanan nasional Trump, khususnya yang berhubungan dengan terorisme, penting untuk memahami dua identitas utama Amerika Serikat, yaitu *exemplar exceptionalism* dan *missionary exceptionalism*. *Exemplar exceptionalism* merujuk pada Amerika Serikat sebagai tempat yang bebas dari kesalahan-kesalahan dunia (khususnya Eropa) dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi (Greene, 1993: 58). Sementara itu, *missionary exceptionalism* merujuk pada Amerika Serikat yang menjalankan *manifest destiny*, imperialis, internasionalis, dan *"leader of the free world"* (McCrisken, 2002: 63). Apabila ditranslasikan menjadi bentuk kebijakan luar negeri, kedua paham eksepsionalisme ini mendorong Amerika Serikat ke arah yang benar-benar berbeda. Bila *exemplar exceptionalism* mendorong Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih isolasionis dengan hanya memfokuskan pada dirinya sendiri, *missionary exceptionalism* lebih menekankan pada bagaimana Amerika Serikat harus menjadi aktor

internasional dan menginspirasi dunia dengan *habits of democracy*-nya (Kagan, 1998: 27). Trump agaknya akan mengarah pada isolasionis atau *exemplar exceptionalism*. Hal ini dapat dilihat melalui tiga janji kebijakan utamanya terkait keamanan nasional: penghacuran ISIS secara menyeluruh, modernisasi militer, dan perlakuan khusus bagi komunitas Muslim.

Untuk mengalahkan ISIS, meskipun Trump menyebutkan bahwa dia akan membutuhkan bantuan dari sekutu AS di Timur Tengah, ada kecenderungan bahwa Amerika Serikat akan bertindak sendiri menggunakan kekuatan militernya. Tujuan dari penghancuran ISIS ini adalah untuk menjaga keamanan nasional Amerika Serikat dari serangan terorisme. Trump akan menghentikan intervensi pada pemerintahan tertentu di Timur Tengah dan berfokus pada penghancuran ISIS. Potensi hilangnya intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah semakin menunjukkan bahwa Trump tidak tertarik pada ide-ide *missionary exceptionalism* dan justru semakin condong ke arah isolasionisme yang mementingkan keamanan domestiknya.

Trump akan menambah kekuatan militer untuk mempertahankan Amerika dari serangan eksternal. Trump akan memulai modernisasi militernya dengan meningkatkan anggaran belanja militer, yang mulanya 3% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hingga maksimum 6,5%, seperti yang pernah ia tulis dalam buku *The American We Deserve* (Trump, 2002: 149). Selain itu, Trump juga akan memodernisasi sistem pertahanan misil balistik. Hal yang penting untuk dipahami dalam kebijakan Trump ini adalah bahwa kekuatan militer baru hanya akan digunakan untuk dua hal, yaitu menghancurkan ISIS dan mempertahankan Amerika dari serangan tradisional maupun nontradisional, bukan untuk membantu sekutu Amerika (Trump, 2016). Bila ini benar-benar terwujud, intervensi militer Amerika Serikat di dunia internasional diproyeksikan akan berkurang, yang menunjukkan bahwa negara ini bergerak menuju isolasionisme.

Akan halnya perlakuan khusus terhadap komunitas Muslim, Trump akan memberlakukan prosedur

penyaringan dan pencatatan khusus bagi mereka sebagai implikasi dari janji kampanye yang akan melarang Muslim memasuki Amerika Serikat. Ini merupakan wujud dari kebijakan utama Trump dalam menangkal terorisme di Amerika Serikat.

Kemungkinan kebijakan ini akan terealisasi menjadi lebih besar, mengingat Trump baru saja menunjuk Frank Gaffney yang terkenal dengan posisi anti-muslimnya dan Steve Bannon yang sangat mendukung *white supremacy* sebagai bagian dari administrasinya (Maltz, 2016). Kebijakan Trump pada komunitas Muslim inilah yang paling menegaskan posisi Trump sebagai *exemplar exceptionalism*. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump akan benar-benar menjadi “*city on a hill*,” di mana ia akan menutup diri dari pengaruh budaya lain dan pengakuan pada pembangunan yang dipimpin oleh bangsa pilihan, yaitu masyarakat kulit putih Amerika Serikat.

NATO dan Rusia

Posisi Trump pada NATO sangatlah sederhana dan singkat. Amerika Serikat tidak lagi bersedia untuk membiayai NATO dengan skema yang berlaku pada saat ini. Trump selalu menegaskan bahwa ia menginginkan sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk berkontribusi lebih, baik secara militer maupun pendanaan. Sejak NATO berdiri enam dekade silam, skema pembiayaannya tidak pernah berubah, yaitu Amerika Serikat selalu membiayai 70% dana operasionalnya (Machon, 2016). Anggota-anggota lain dari NATO akan “terpaksa” untuk bersedia berkontribusi lebih sehingga Amerika Serikat tetap bertahan dalam aliansi. Kemungkinan sebaliknya sangat sukar untuk terjadi karena Eropa belum mampu menghadapi berbagai masalah keamanan regional, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, tanpa bantuan AS (Wallace, 2001).

Bila skenario ini (negara-negara sekutu menambah porsi pembiayaan mereka) terjadi, kewenangan Amerika Serikat dalam menentukan agenda NATO ke depan akan berkurang. Kekuasaan Amerika Serikat mungkin akan bergeser ke beberapa negara-negara Eropa Barat - memungkinan bagi sebuah *pax*

germanica atau kepemimpinan Jerman di NATO (Hockenos, 2016). Amerika Serikat mungkin tidak akan memiliki kekuasaan seluas dulu, khususnya dalam konteks tata kelola dan bagaimana NATO merespon permasalahan dunia.

Turunnya dominasi AS dalam NATO bukan berarti pengaruhnya akan hilang sama sekali. Amerika Serikat mungkin akan tetap memainkan beberapa peran penting dalam memutuskan posisi NATO di dunia. Meskipun anggota-anggotanya mungkin akan siap untuk berkontribusi lebih, NATO tetap mengharapkan kehadiran Amerika Serikat sebagai pemimpin (Hague, 2016). Situasi inilah yang dinilai justru akan semakin membahayakan posisi Eropa, mengingat Trump cenderung untuk lebih kooperatif dengan Rusia (Machon, 2016). Sebagai contoh, Trump tidak begitu peduli dengan aneksasi Rusia di Krimea yang notabene adalah pertahanan terakhir Eropa Barat terhadap pengaruh Rusia. Meskipun Eropa mungkin akan berkontribusi lebih, Amerika Serikat masih memiliki kekuatan militer yang besar dan melalui kekuatan relatif itu maka ia akan mampu mempengaruhi posisi NATO terkait Rusia. Kekuasaan Amerika Serikat mungkin akan cenderung turun di Eropa Barat apabila Trump tetap menjalankan rencana kebijakannya ini.

Hubungan dengan Rusia sendiri merupakan salah satu isu yang paling terpolarisasi dalam pemilihan tahun 2016 ini. Menyebut Putin sebagai pemimpin yang lebih baik dari Obama, Trump secara terbuka menyampaikan aspirasi untuk memulai hubungan diplomatis yang lebih bersahabat dengan Rusia, terutama dalam isu keamanan nasional dan kontraterorisme (East, 2016). Ditingkahi oleh tuduhan pemerintah AS bahwa Rusia berada di balik peretasan server email *Democratic National Committee* – yang segera disangkal oleh Putin – Trump sendiri tidak membantah adanya peran dan *stake* Rusia di pemilihan kali ini. Ini semua mendorong Clinton menyebut Trump sebagai “boneka [Rusia]” dalam debat presidensial yang ketiga. Rusia tampaknya akan jauh lebih mudah mengendalikan Amerika Serikat di bawah Trump dibandingkan Clinton.

Trump pernah berujar, “*We desire to live peacefully and in friendship with Russia and China. We have serious differences with these two nations, and must regard them with open eyes, but we are not bound to be adversaries. We should seek common ground based on shared interests.*” (The New York Times, 2016). Upaya Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia mungkin tidak akan mendapatkan dukungan yang besar dari Kongres, sekalipun Kongres didominasi oleh Partai Republik. Membutuhkan waktu lama dan usaha yang besar bagi terjadinya perbaikan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, dengan atau tanpa Donald Trump sebagai presiden. Saat ini tampak bahwa janjinya untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia hanya didasarkan pada sentimen, rasa hormat dari seseorang kepada kepala negara Rusia yang seperti dirinya, menyelesaikan masalah dengan menggunakan *machismo* dan intimidasi.

Amerika Latin

Trump akan memulai masa jabatannya dalam periode yang konfliktual dalam politik Amerika Latin, khususnya menyangkut keberadaan gerakan politik yang bernama *pink tide*.³ Sebagian besar pemimpin *pink tide* memiliki kesamaan dalam pandangan politik mereka: populisme, kemerdekaan politik dan ekonomi, serta penolakan terhadap neoliberalisme dan intervensionisme Amerika Serikat. Penolakan yang meluas atas ide Trump untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko mencerminkan kesulitan besar yang akan ditemui Trump di kawasan ini.

Dewasa ini, kombinasi dari berbagai faktor, seperti skandal korupsi dan persepsi rakyat bahwa para pemimpin *pink tide* gagal mewujudkan janji mereka, telah mendorong konsensus bahwa *pink tide* sedang menurun (The Economist, 2015). Di satu sisi, melemahnya *pink tide* akan memudahkan tugas Trump dalam menjaga hubungan diplomatis yang baik dengan tetangga-tetangga mereka di selatan. Namun di sisi lain, jika mengingat betapa kontroversialnya Trump, boleh jadi ia akan mengakibatkan berkembangnya kembali gerakan tersebut (TeleSUR, 2016). Jika Trump mempertahankan posisi dia selama kampanye dan

mengurangi intervensi Amerika Serikat di skala global, maka akan ada dampak secara drastis ke Amerika Latin. Kebijakan proteksionis Trump berpotensi merugikan negara-negara yang selama ini mendapatkan bantuan dari AS, seperti Kolombia. Janji Trump untuk mundur dari perdagangan bebas dapat berdampak pada NAFTA, berikut investasi dan lapangan kerja yang telah dibangun di Meksiko. Peningkatan halangan perdagangan dan restriksi imigrasi dapat menghambat aliran barang, jasa, dan tenaga kerja ke dalam Amerika Serikat, yang kelak akan berdampak negatif bagi perdagangan dan ekonomi negara-negara seperti Honduras, Guatemala, Ekuador, dan Peru (Castaneda, 2016).

Dalam skenario terbaik, Trump akan dapat mempertahankan *status quo* dan memanfaatkan konsolidasi ideologi kanan di Amerika Latin untuk keuntungan Amerika Serikat. Namun, jika Trump berusaha lebih keras untuk mempertahankan hegemoni di Amerika Latin, maka terdapat potensi untuk eskalasi konflik.

Timur Tengah

Donald Trump mengindikasikan bahwa ia mendukung *one-state solution* untuk konflik Israel-Palestina. Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya Israel dalam usaha *counterterrorism* terhadap “terorisme Islam radikal.” Meskipun dukungan yang disampaikan Trump terhadap Israel bukan merupakan hal baru, posisi yang akan ia ambil tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari usaha diplomasi pemerintahan sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan oleh *Road Map* (Faris, 2013: 73). Pendekatan Trump ini dapat mengubah secara signifikan proses diplomasi AS pada masa pemerintahannya.

Trump akan menjalankan politik luar negeri yang lebih keras terhadap terorisme dan rezim-rezim pemerintah yang menentang kepentingan AS di Timur Tengah. Ini tercermin dari ide-idenya untuk melawan ISIS, yang tidak bisa dijalankan bersamaan dengan melawan kekuatan militer Assad di Suriah karena akan menguras sumber daya AS. Jika AS harus terlibat lebih jauh lagi dalam konflik di Suriah, Trump tampaknya

akan tetap mengandalkan kekuatan tempur udara, dengan bantuan dari Rusia dan negara-negara Arab. (Haberman & Sanger, 2016).

Trump diproyeksikan akan menjalankan politik luar negeri yang cenderung reaktif terhadap dua kekuatan utama kawasan, Iran dan Arab Saudi. Dengan dukungan Kongres, Trump akan berupaya menegosiasi ulang atau bahkan membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran yang dicapai pada tahun 2015. Terhadap Arab Saudi, Trump pernah mengatakan, “*We protect countries, and take tremendous monetary hits on protecting countries. I think if Saudi Arabia was without the cloak of American protection... I don’t think it won’t be around.*” (Haberman & Sanger, 2016). Sejalan dengan kehendak agar Amerika mengurangi keterlibatan internasionalnya, Trump sangat mungkin meminta Saudi untuk berkontribusi dalam memerangi ISIS dan mencegah kebangkitan Iran. Untuk itu, Trump mengatakan bahwa Arab Saudi dapat memiliki senjata nuklir. Situasi ini tentu akan membuat kawasan Timur Tengah akan semakin jauh dari stabil.

Asia Timur

Seperti halnya terhadap NATO, terhadap dua sekutu utamanya di kawasan, yaitu Jepang dan Korea Selatan, Trump juga akan mempertimbangkan untuk tidak lagi membela mereka kecuali mereka setuju untuk membayar Amerika Serikat lebih banyak. Tokyo dan Seoul akan diminta oleh Trump untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam keamanan regional. Mereka bahkan disarankan untuk mendapatkan senjata nuklir mereka sendiri demi menghadapi ancaman dari Korea Utara. Bila ini terjadi, konsekuensi langsungnya adalah penurunan derajat hubungan antara Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan.

Proteksionisme akan membawa Trump bersikap lebih keras kepada Cina. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia ini dinilainya telah bertindak curang dan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat (Trump, 2015). Meski demikian, dalam hal politik keamanan, Trump mungkin akan menjalankan

kebijakan yang lebih lunak kepada Cina. Ia pernah mengatakan bahwa keamanan di Laut Cina Selatan harus dikembalikan kepada negara-negara yang berada di dalamnya – sebuah pernyataan yang menyiratkan pengakuan akan kekuatan militer Cina di kawasan tersebut (Haberman & Sanger, 2016). Peran penting Cina akan dibutuhkan oleh Trump ketika ia harus mengambil langkah yang tepat dalam upayanya menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea.

KESIMPULAN

Presiden-terpilih Trump diperkirakan akan menjalankan politik luar negeri dengan beberapa ciri yang menonjol. Pertama, Amerika Serikat cenderung menolak atau memandang dengan skeptis konsep keamanan kolektif maupun organisasi internasional. Kedua, Amerika akan menolak kompromi yang disyaratkan atau dimunculkan oleh kesepakatan atau kerja sama multilateral, karena kompromi merupakan bentuk kelemahan, khususnya ketika ia berdampak negatif pada kepentingan ekonomi domestik Amerika. Kemungkinan kebijakannya terhadap TPP, NAFTA, perdagangan dengan Cina, dan kesepakatan dengan Iran dapat mengafirmasi poin ini.

Ketiga, Trump dalam berbagai kesempatan juga dengan sangat jelas menonjolkan kebijakan luar negeri yang lebih isolasionis. Di bawah Trump, Amerika Serikat tampaknya tidak perlu lagi menjadi “polisi dunia”. Keterlibatan Amerika dalam berbagai konflik di dunia pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi perekonomian Amerika. Trump akan menjadikan Amerika menahan diri dari terlibat dalam konflik-konflik internasional dan memfokuskan diri untuk membangun kekuatan di dalam negeri. Trump melihat intervensi Amerika di berbagai belahan dunia justru berdampak negatif pada relasi Amerika dengan berbagai negara besar, terutama Rusia dan Cina. Meski demikian, pendekatan isolasionis Trump tidak selamanya didasari murni oleh oposisinya terhadap intervensionisme, namun juga oleh perhitungan transaksional ekonomi yang pragmatis. Dengan kata lain, penentangan Trump terhadap berbagai bentuk intervensi Amerika disebabkan oleh kegagalan

pemerintah untuk mendapatkan kemenangan yang besar maupun keuntungan ekonomi yang nyata dari intervensi tersebut.

Keempat, dan terakhir, kebijakan isolasionis Trump juga diwarnai oleh posisi “garis keras” terkait dengan imigrasi. Trump melihat bahwa kebijakan imigrasi Amerika sekarang terlalu longgar dan menimbulkan banyak masalah; imigran ilegal dan pengungsi adalah permasalahan bagi Amerika. Imigran ilegal dari Meksiko dianggap sebagai membawa potensi peningkatan tingkat kriminalitas di Amerika, sementara imigran dan pengungsi dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam dilihat sebagai kelompok yang berisiko tinggi terlibat terorisme.

Dengan terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika masyarakat dunia harus mempersiapkan diri dengan politik luar negeri yang berlawanan dengan kebijakan umum Amerika Serikat selama ini. Amerika Serikat akan menjadi lebih isolasionis dan proteksionis, berfokus pada pengetatan pengawasan atas batas-batas negara, menerapkan imigrasi yang lebih selektif dan ketat, menempatkan prioritas pada ekonomi domestik, membatasi keterlibatan dalam konflik yang berkepanjangan di banyak tempat, dan mengurangi komitmen internasional – ini semua adalah wujud dari *exemplar exceptionalism* yang menjadi prinsip dasar politik luar negeri Trump.

CATATAN AKHIR

- ¹ Pada masa pemerintahan pertamanya, Reagan dikenal sangat “hawkish,” menjalankan politik luar negeri yang agresif, anti-komunis dan sangat mengandalkan kekuatan militer, khususnya dalam hubungan antara Amerika Serikat dengan Amerika Tengah dan Uni Soviet. Posisi ini ternyata dinilai sebagai tidak menguntungkan bagi Reagan yang berkampanye untuk masa jabatan kedua pada pemilihan di tahun 1984. Sebagai bagian dari strateginya memenangkan pemilihan, Reagan beralih dari sikap keras menuju “*conciliatory foreign policy positions*,” terutama terhadap Uni Soviet. Terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, Reagan tidak surut langkah; ia tetap mengurangi kadar “*hawkism*” dalam politik luar negerinya, tidak kembali menjadi agresif seperti pada masa jabatan pertamanya.
- ² Misalnya, pada tahun 2002, ketika masih menjabat sebagai senator, Hillary memberikan suaranya guna mengotorisasi penggunaan militer untuk menyerang Irak. Saat menjabat sebagai menteri luar negeri Hillary merupakan pendukung “perubahan rejim” di Libya. Hillary jugalah yang memerintahkan keterlibatan pasukan khusus

Angkatan Laut (*U.S. Navy Seal*) untuk menggerebek Abbotabat, Pakistan, pada tahun 2011. Misi ini 'berhasil' membunuh tersangka teroris 11 September, Osama bin Laden.

- ³ *Pink tide* merupakan nama tidak resmi yang diberikan kepada tren yang sempat melanda Amerika Latin di mana publik cenderung bersimpati kepada gerakan dan pemimpin politik yang menyuarakan ide-ide quasi-sosialis: bukan merah sepenuhnya, tetapi merah muda. Tren tersebut ditandai oleh bangkitnya pemimpin-pemimpin seperti Hugo Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, serta Nestor dan Cristina Kirchner di Argentina.

REFERENSI

JURNAL

- Aldrich, John, Sullivan, John & Borgida, Eugene. 1989. *Foreign Affairs and Issue Voting: Do Presidential Candidates "Waltz Before a Blind Audience?"*. American Political Science Review, March, Vol. 83, No. 1.
- Anand, Sowmya & Krosnick, Jon. 2003. *The Impact of Attitudes toward Foreign Policy Goals on Public Preferences among Presidential Candidates: A Study of Issue Publics and the Attentive Public in the 2000 U.S. Presidential Election*. Presidential Studies Quarterly, March, Vol. 33, No. 1.
- Gadarian, Shana. 2010. *Foreign Policy at the Ballot Box: How Citizens Use Foreign Policy to Judge and Choose Candidates*. The Journal of Politics, October, Vol. 72, No. 4.
- Hurwitz, Jon & Peffley, Mark. 1987. *The Means and Ends of Foreign Policy as Determinants of Presidential Support*. American Journal of Political Science, May, Vol. 31, No. 2.
- Kagan, Robert. 1998. *The Benevolent Empire*. Foreign Policy, No. 111.
- Karol, David & Miguel, Edward. 2007. *The Electoral Cost of War: Iraq Casualties and the 2004 U.S. Presidential Election*. Journal of Politics, August, Vol. 69, No. 3.
- McCrisken, Trevor. 2002. Exceptionalism. Dalam Alexander DeConde et al. (eds.). *Encyclopedia of American Foreign Policy*, Vol. 2, 2nd ed. New York: Scribner.
- Merolla, Jennifer, Ramos, Jennifer & Zechmeister, Elizabeth. 2007. *Crisis, Charisma, and Consequences: Evidence from the 2004 U.S. Presidential Election*. Journal of Politics, February, Vol. 69, No. 1.
- Nincic, Miroslav & Hinckley, Barbara. 1991. *Foreign Policy and the Evaluation of Presidential Candidates*. The Journal of Conflict Resolution, June, Vol. 35, No. 2.
- Randolph, Christopher, Jr. 2006. *The Effects of Electoral Concerns on Presidential Foreign Policy: The Case of Ronald Reagan*. Vanderbilt Undergraduate Research Journal, Spring, Vol. 2, No. 1.
- Wallace, William. 2001. *Europe, the Necessary Partner*. Foreign Affairs, May/June, Vol. 80, No. 3.

BUKU

- Faris, Hani. 2013. *The Failure of the Two-state Solution: The Prospect of One State in the Israel-Palestinian Conflict*. London & New York: I.B. Tauris.
- Greene, Jack. 1993. *The Intellectual Construction of America: Exceptionalism and Identity from 1492–1800*. Chapel Hill: University of North Carolina

Press.

- Trump, Donald. 2002. *The America We Deserve*. New York: Renaissance Books.
- Trump, Donald. 2016b. *Great Again: How to Fix Crippled America*. New York: Simon and Schuster.

WEBSITE:

- Beckwith, Ryan. 2015. *Transcript: Read Hillary Clinton's Speech on Fighting ISIS*. Time (daring). 19 November. (<http://time.com/4120295/hillary-clinton-foreign-policy-isis/>, diakses pada 14 Juli 2016).
- Beckwith, Ryan. 2016. *Read Donald Trump's 'America First' Foreign Policy Speech*. Time (daring). 27 April. (<http://time.com/4309786/read-donald-trumps-america-first-foreign-policy-speech/>, diakses pada 14 Juli 2016).
- Berman, Russell. 2015. *Donald Trump's Call to Ban Muslim Immigrants*. The Atlantic (daring). 27 December. (<http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/donald-trumps-call-to-ban-muslim-immigrants/419298/>, diakses pada 26 Juli 2016).
- Brunnstrom, David. dkk. 2016. *Trump Vows To Improve Relations With Russia, China If Elected U.S. President*. The Huffington Post (daring). 27 April. (http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-foreign_policy_us_5720f9d7e4b01a5ebde42eee, diakses pada 26 Juli 2016).
- Castaneda, Jorge. 2016. *The Trump Shock in Latin America*. Project Syndicate (daring). 11 November (<https://www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-latin-america-by-jorge-g—casta-eda-2016-11>, diakses pada 15 November 2016).
- Clinton, Hillary. 2011. *America's Pacific Century*. Foreign Policy (daring). 11 October. (<http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>, diakses 13 Juli 2016).
- Clinton, Hillary. 2015a. *Hillary Clinton Statement on Trans-Pacific Partnership*. Hillary Clinton (daring). 7 October. (<https://www.hillaryclinton.com/briefing/statements/2015/10/07/trans-pacific-partnership/>, diakses pada 24 Juni 2016).
- Clinton, Hillary. 2015b. *National Security: With Policies that keep us Strong and Safe, America can lead the World in the 21st Century*. Hillary Clinton (daring). 13 June. (<https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/>>, diakses pada 24 Juni 2016).
- CNN. 2016. *2016 election results – presidential results* (daring). (<http://edition.cnn.com/election/results>, diakses pada 20 November 2016).
- Davis, Bob. 2016. *Donald Trump Will Need to Leverage Size, Power of U.S. Economy to Remake Global Trading System*. Washington Street Journal (daring). 9 November. (<http://www.wsj.com/articles/donald-trump-will-need-to-leverage-size-power-of-u-s-economy-to-remake-global-trading-system-1478701144>, diakses pada 13 November 2016).
- DHS Press Office. 2016. *Joint Statement from the Department Of Homeland Security and Office of the Director of National Intelligence on Election Security*. Homeland Security (daring). 7 October. (<https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-homeland-security-and-office-director-national>, diakses pada 2 November 2016).
- Diamond, Jeremy & Collinson, Stephen. 2016. *Donald Trump's foreign policy: 'America first.'* CNN (daring), 27 April. (<http://>

- edition.cnn.com/2016/04/27/politics/donald-trump-foreign-policy-speech/>, diakses pada 26 Juli 2016).
- East, Kristen. 2016. *Trump in Hot Water Over Putin Embrace*. Politico (daring). 9 September. (<http://www.politico.com/story/2016/09/trump-putin-embrace-fallout-227940>, diakses pada 4 November 2016).
- Ellis, Sam. dkk. 2016. *How Donald Trump thinks about foreign policy, explained in 7 minutes*. Vox (daring). 1 November. (<http://www.vox.com/world/2016/11/1/13481594/donald-trump-explained-foreign-policy>, diakses pada 16 November 2016).
- Fox, Michelle. 2016. *One trade war and Donald Trump's economy is dead, market expert says*. CNBC (daring). 11 November. (<http://www.cnbc.com/2016/11/11/one-trade-war-and-donald-trumps-economy-is-dead-market-expert-says.html>, diakses pada 13 November 2016).
- Haberman, Maggie & Sanger, David. 2016. *Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views*. The New York Times (daring). 26 March. (http://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html?_r=0, diakses pada 10 November 2016).
- Hague, William. 2016. *After Donald Trump's victory, Europe and the US Must Stand Together: or The West will Fall*. The Telegraph (daring). 14 November. (<http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/14/after-donald-trumps-victory-europe-and-the-us-must-stand-together/>, diakses pada 17 November 2016).
- Hockenos, Paul. 2016. *The Dawn of Pax Germanica*. Foreign Policy (daring). 14 November. (<http://foreignpolicy.com/2016/11/14/the-dawn-of-pax-germanica-angela-merkel-donaldtrump/>, diakses pada 17 November 2016).
- Jewish Telegraphic Agency. 2016. *Hillary Clinton: US has 'Moral Obligation' to support Israel*. (daring). 2 June. (<http://www.jta.org/2016/06/02/news-opinion/politics/hillary-clinton-us-has-moral-obligation-to-support-israel-donald-trump-temperamentally-unfit>, diakses pada 23 Juni 2016).
- Kessler, Glenn. 2016. *Trump's Claim that the U.S Pays 'Lion's Share' for NATO*. The Washington Post (daring). 30 March. (<https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2016/03/30/trumps-claim-that-the-u-s-pays-the-lions-share-for-nato/>>, diakses pada 26 Juli 2016).
- Kleiner, Sam. 2016. *With his Finger on the Trigger*. The Atlantic (daring). 3 June. (<http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/donald-trump-nuclear-weapons/485504/>, diakses pada 26 Juli 2016).
- Machon, Annie. 2016. *NATO or not NATO - The Question for Donald Trump*. Russiantoday.com (daring). 15 November. (<https://www.rt.com/op-edge/367014-nato-us-europe-trump/>, diakses pada 16 November 2016).
- Maltz, Judy. 2016. *Islamophobe and 'Great Friend of Israel' Frank Gaffney Reportedly Joining Trump Team*. Haaretz (daring). 16 November. (<http://www.haaretz.com/world-news/u-s-election-2016-premium-1.753512>, diakses 16 November 2016).
- Milbank, Dana. 2016. *For Trump, it's (white) America First*. The Washington Post (daring). 15 July. (https://www.washingtonpost.com/opinions/for-donald-trump-its-white-america-first/2016/07/15/4faa1b60-49f9-11e6-90a8-fb84201e0645_story.html>, diakses pada 26 Juli 2016).
- Nechepurenko, Ivan. 2015. *Hillary Clinton as U.S. President 'Wouldn't Fix' Russia-U.S. Relationship*. The Moscow Times (daring). 13 April. (<http://www.themoscowtimes.com/articles/hillary-clinton-as-us-president-wouldnt-fix-russia-us-relationship-45715>, diakses pada 18 Juli 2016).
- Nichols, Christopher. 2016. *Trump's Misguided and Empty Promise of Protectionism Dovetails with His Appeal to Isolationism*. History News Network (daring). 17 April. (<http://historynewsnetwork.org/article/162423>, diakses pada 15 November 2016).
- Noland, Marcus. dkk. 2016. *Assessing Trade Agendas in the US Presidential Campaign*. Peterson Institute for International Economics (daring). September. (<https://piie.com/publications/piie-briefings/assessing-trade-agendas-us-presidential-campaign>, diakses pada 30 Oktober 2016).
- NPR. 2016a. *Clinton Plays Up Her Foreign Policy Experience; Portrays Trump As Unfit* (daring). 3 June. (<http://www.npr.org/2016/06/03/480564688/clinton-plays-up-her-foreign-policy-experience-portrays-trump-as-unfit>, diakses pada 18 Juli 2016).
- NPR. 2016b. *Fact Check: Trump And Clinton Debate For The First Time* (daring). 26 September 2016. (<http://www.npr.org/2016/09/26/495115346/fact-check-first-presidential-debate>, diakses pada 29 Oktober 2016).
- NPR. 2016c. *Fact Check: Clinton And Trump Debate For The 2nd Time* (daring). 9 October 2016. (<http://www.npr.org/2016/10/09/497056227/fact-check-clinton-and-trump-debate-for-the-second-time>, diakses pada 29 Oktober 2016).
- Putz, Catherine. 2015. *What Might a Hillary Clinton Presidency Mean for Asia?* The Diplomat (daring). 13 April. (<http://thediplomat.com/2015/04/what-might-a-hillary-clinton-presidency-mean-for-asia/>>, diakses pada 23 Juni 2016).
- Saad, Lydia. 2016. *Clinton Wins Third Debate, Gains Ground as 'Presidential.'* Gallup (daring). 21 October. (http://www.gallup.com/poll/196643/clinton-wins-third-debate-gains-ground-presidential.aspx?g_source=ELECTION_2016&g_medium=topic&g_campaign=titles, diakses pada 1 November 2016).
- Stacey, Jeffrey. 2016. *The Hillary Clinton Doctrine*. Foreign Affairs (daring). 17 May. (<https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-17/hillary-clinton-doctrine>>, diakses pada 11 Juli 2016).
- TeleSUR. 2016. *Correa Says Trump Could Revitalize Latin America's Left* (daring). (<http://www.telesurtv.net/english/news/Correa-Says-Trump-Could-Revitalize-Latin-Americas-Left-20160727-0022.html>, diakses pada 14 November 2016).
- The Economist. 2015. *The Ebbing of the Pink Tide* (daring). 28 November. (<http://www.economist.com/news/leaders/21679192-mauricio-macris-remarkable-victory-will-reverberate-across-south-america-ebbing-pink>, diakses pada 4 November 2016).
- The Economist. 2016. *Trump and the economy: Strap up* (daring). 12 November. (<http://www.economist.com/news/united-states/21710013-congress-can-constrain-only-parts-donald-trumps-economic-policy-strap-up>, diakses 13 November 2016).
- The New York Times. 2016. *Transcript: Donald Trump's Foreign Policy Speech* (daring). 27 April. (<http://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign-policy.html>, diakses pada 15 November 2016).
- Trump, Donald. 2015. *Trade*. Donald J. Trump (daring). (<https://www.donaldjtrump.com/policies/trade>, diakses pada 13 November

2016).

Trump, Donald. 2016a. *Declaring American Economic Independence* (daring). (https://assets.donaldjtrump.com/DJT_DeclaringAmericanEconomicIndependence.pdf, diakses pada 14 November 2016).

Trump, Donald. 2016c. *Foreign Policy and Defeating ISIS*. Donaldjtrump.com (daring). (<https://www.donaldjtrump.com/policies/foreign-policy-and-defeating-isis/>), diakses pada 15 November 2016).

White, Martha. 2016. *Trump Trade Policy Ideas Could Trigger Recession, Stagflation, Economists Say*. NBC News (daring). 10 November. (<http://www.nbcnews.com/business/economy/trump-trade-policy-ideas-could-trigger-recession-stagflation-economists-say-n682221>, diakses pada 13 November 2016).

Zenko, Micah. 2016. *Hillary the Hawk: A History. Foreign Policy* (daring). 27 July. (<http://foreignpolicy.com/2016/07/27/hillary-the-hawk-a-history-clinton-2016-military-intervention-libya-iraq-syria/>, diakses pada 10 November 2016).

Dari JI ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara

Badrus Sholeh

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Kertamukti no. 5 Ciputat, Tangerang 15419, Indonesia
badrus.sholeh@uinjkt.ac.id
Diserahkan: 20 November 2016, diterima: 27 Januari 2017

Abstract

This article examines the transformation of terrorist groups in the Southeast Asia, ranging from from Jama'ah Islamiyah (JI) to the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). It examines the movements and thoughts of the combatant leaders who fought in the battlefields and wrote books, blogging and social media to defend their jihad argument and strategically used by young generation and current terrorist groups, affiliated to JI and ISIS to recruit, consolidate and fight against so-called infidel governments of Southeast Asia and global coalition. The strategy and tactic of ISIS in the Southeast Asia vary from the networking of Syria-Iraq and Southeast Asia through Katibah Nusantara in Syria-Iraq and the home-grown terrorist networks in Indonesia, Malaysia and the Philippines. The challenge for state and civil society in Southeast Asia is greater given the current terrorist groups' movement which mostly recruit the youth and taking advantages from the online media, blogging and social media. It challenged the security threats and counter narratives developed state and civil society.

Keywords: Jama'ah Islamiyah, ISIS, Terrorism, Southeast Asia

Abstrak

Artikel ini membahas transformasi kelompok teroris di Asia Tenggara dari Jama'ah Islamiyah (JI) ke Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Artikel ini membahas gerakan dan pemikiran komandan dan tokoh kombatan yang tidak hanya terlibat dalam pertarungan tetapi juga menulis buku, blog, media sosial untuk mempertahankan argumen Jihad mereka dan secara strategis digunakan oleh generasi muda dan kelompok teroris saat ini, yang berafiliasi dengan JI dan ISIS untuk merekrut, melakukan konsolidasi dan bertarung melawan pemerintah dan koalisi global thoghut. Strategi dan taktik ISIS Asia Tenggara bekerja dalam jaringan Suriah-Irak-Asia Tenggara melalui Katibah Nusantara di Suriah dan Irak dan jaringan teroris dalam negeri di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Tantangan negara dan masyarakat sipil di Asia Tenggara lebih besar khususnya setelah bagaimana kelompok teroris merekrut kebanyakan pada generasi muda dan mengambil manfaat besar pada media online, blog dan media sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi ancaman keamanan dan kontra narasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

Kata kunci: Jama'ah Islamiyah, ISIS, Terorisme, Asia Tenggara

PENDAHULUAN

John Horgan menyatakan bahwa terjadi perubahan seorang atau sekelompok teroris dari orientasi kekerasan menuju non kekerasan karena transisi politik. Pada tahap berbeda mereka bisa kembali menjadi lebih radikal pada saat munculnya *pulling factor* solidaritas global atas adanya diskriminasi atau sebaliknya kekuatan kelompok transnasional dunia yang menguatkan ide, gagasan dan gerakan teroris di wilayah lain (Horgan, 2008). Radikalisme dan

ekstrimisme terjadi pada semua agama dan kelompok nasionalis. Gerakan teroris Aum Shinrikyo, didirikan pada 1984, dan melancarkan serangan mematikan gas sarin di subway Tokyo pada 1995 adalah kelompok ekstrimis Budha. Demikian juga di Myanmar, sekelompok pendeta Budha memimpin penyerangan atas warga Muslim di provinsi Rakhine. Sidney Jones menyatakan "I think it's important to underscore that not all extremism is islamist. You only have to look in Myanmar

to see extremism in another form” (Jones, 2015).

Deklarasi Abu Bakar Al Baghdadi tentu saja menjadi salah satu faktor bagaimana “janji” negara Islam dan Khilafah Islamiyah di Suriah dan Irak menarik perhatian dari individu dan kelompok jihadis seluruh dunia. Hingga pertengahan 2015, lebih dari 30.000 kombatan jihadis berasal dari sekitar 90 negara asing datang ke Suriah dan Irak, termasuk seribu diantaranya dari Asia Tenggara. Pada 26 September 2014, para kombatan Asia Tenggara membentuk organisasi *Katibah Nusantara Lid Daulah Islamiyah* (selanjutnya disebut *Katibah Nusantara-KN*) yang dibentuk oleh sekitar 500-700 kombatan dari Indonesia, 200 dari Malaysia, dan sisanya dari Filipina dan Singapura (Singh, 2015). KN berpusat di Al-Shadadi, Provinsi Haraka Suriah. Komandan KN adalah Abu Ibrahim al-Indunisiy a.k.a Bahrumsyah. *Katibah Nusantara* memberi pengaruh kuat melalui penerbitan dan publikasi media online, *blogging*, youtube dan media sosial bagi pergerakan dan serangan terorisme di Asia Tenggara. Bahrun Naim, salah satu komandan KN secara rutin menerbitkan manual pembuatan bom, serangan gerilya kota, manual senjata biologis dan kimia, *hacking*, strategi propaganda dan rekrutmen, hingga lebih taktis cara serangan yang efektif. Beberapa kali web pribadi dan akun Facebook Bahrun Naim di blok tetapi terus berhasil terbit lagi, dan selalu mendapat ratusan komentar dan sambutan. Naim telah menggeser pola tulisan buku dan pamflet yang dulu digunakan oleh Jama’ah Islamiyah dalam rekrutmen dan propaganda dengan pola baru yang lebih *cool* dan modern melalui tulisan lebih singkat dan efektif. Beberapa serangan lonewolf yang dilakukan pada 2016 oleh ISIS di Asia Tenggara dilakukan melalui *guidance* jarak jauh lewat media sosial dan online langsung dari Suriah.

Gerakan teroris berkembang melalui peran aktor-aktor intelektual yang memberi landasan pemikiran strategis dan taktis dalam pergerakan teroris. Beberapa peristiwa pengeboman dan serangan terorisme di Indonesia dilakukan atas stimulasi dan pengaruh *guidance* dari para komandan teroris baik dilakukan secara tertutup melalui pengajian maupun terbuka

melalui penerbitan, publikasi dan tulisan pendek di media online, *blogging* dan sosial media. Penyerangan Thamrin Jakarta pada Januari 2016 adalah diantara aksi yang mendapat pengaruh kuat dari posting tulisan dari para komandan para pelaku. Adalah Bahrun Naim dan Aman Abdurrahman, dua tokoh ISIS Indonesia yang memengaruhi para pelaku dalam menjalankan aksi terorismenya. Para pelaku terpengaruh pada pemikiran Jihad, dan menjalankan instruksi yang dipublikasikan melalui media online dan media sosial. Pemikiran elit jihadis dan teroris berpengaruh kuat atas perkembangan dan pergerakan teroris. Kontra narasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk membendung deras arus informasi radikal yang secara progresif dilakukan oleh ISIS. Pada tahap lebih kuat dan mengakar Jama’ah Islamiyah (JI) dan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaidah telah melakukan pengaruh intelektual dan pemikiran ideologi jihadis melalui lembaga pendidikan, publikasi dan media yang lebih lama mereka kembangkan. Sekitar tiga puluh sekolah yang berafiliasi dengan JI yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Indonesia Timur menjadi *breeding grown* efektif yang melahirkan generasi penerus jihadis (Magouirk dan Atran, 2008). Diantara mereka kemudian berafiliasi dengan ISIS, bahkan telah menjadi pelaku bom bunuh diri di Suriah. Wildan Mukhollad (lahir 6 Januari 1995) adalah salah satu mantan siswa di Pesantren Al-Islam Lamongan yang mendaftarkan sebagai sukarelawan bom bunuh diri ISIS di Suriah dan Irak. Wildan dipaksa orang tuanya untuk pindah dari Al-Islam Lamongan ke Al Azhar Mesir sekitar 2011 dengan tujuan untuk mengurangi ideologi jihadis yang dipelajari oleh Wildan di Pesantren Al-Islam, tetapi Wildan menunjukkan respon lebih keras (Asad, 2014). Ketika ke Mesir, Wildan memiliki pemikiran dan peran lebih radikal dengan meninggalkan bangku sekolah dan bergabung dalam medan perang di Suriah melawan rejim Bashar Al-Asad. Pada pertengahan 2012 Wildan berangkat ke Aleppo bergabung dengan kelompok jihadis. Ketika Al-Baghdadi mendeklarasikan diri menjadi Khalifah, Wildan termasuk diantara yang bergabung. Pada awal

Februari 2014 menyeberang ke Irak untuk menjadi pelaku bom bunuh diri ISIS. Di Irak, Wildan dikenal dengan nama Abu Bakar Al-Muhajir Al-Wildan Mukhollad bin Lasmin (Damanik, 2014).

Aksi strategis dan taktis JI dan ISIS di Asia Tenggara dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, konsolidasi komunitas Jihadis menjadi strategi utama. Konsolidasi ini dilakukan pada lima sampai sepuluh tahun pertama setelah organisasi teroris berdiri. JI berdiri pada 1993 di Kuala Lumpur, dan Afghan veteran kembali ke Indonesia dan Asia Tenggara melakukan konsolidasi dan gerakan strategis melalui madrasah, sekolah, majelis taklim dan pelatihan fisik lainnya. Menurut Farihin a.k.a Yasir antara 1993 hingga 1998 adalah periode penting bagi JI untuk “mengumpulkan kekuatan dan menjaga kualitas keilmuan dan kemiliteran melalui pendidikan formal, mengajarkan di madrasah dan pesantren serta pelatihan fisik kepada kelompok pemuda di beberapa organisasi Jihad lokal” (Farihin, 2015). Kedua, praktik jihad terutama sebagai respon atas konflik dan perang yang mendorong JI dan ISIS untuk “menjawab panggilan Jihad” akibat banyaknya Muslim yang terbunuh di medan konflik dan perang. JI mengirim pasukan Jihad secara resmi setelah terjadinya konflik Ambon dan Poso pada 1999. Mereka memiliki waktu dan kapasitas yang lebih memadai setelah sekitar sepuluh tahun berlatih di Afghanistan dan Mindanao, serta melakukan konsolidasi komunitas dan keluarga JI. Gerakan taktis dimulai dengan membuka pelatihan paramiliter di Ambon dan Poso antara 1999 dan 2001, dan melakukan aksi-aksi pemboman dan penyerangan pada basis-basis dan target yang mereka anggap sebagai “musuh Islam,” misalnya penyerangan desa Kristen dan gereja di Ambon dan Poso, pemboman gereja di Jawa Timur dan pemboman Sari Club dan Paddys Club di Bali pada Oktober 2002. Sementara ISIS memiliki pola berbeda. Mereka tidak mensyaratkan sukarelawan Jihad untuk menyiapkan diri secara kuat sebelum berangkat untuk ikut perang di Suriah. ISIS memiliki gerakan taktis yang berbeda dengan JI. ISIS memanfaatkan media sosial untuk rekrutmen, konsolidasi, mobilisasi dan aksi Jihad

antara 2013 dan 2015, lebih dari 500 sukarelawan Indonesia bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak (Sholeh, 2016). Ketiga, gerakan strategis dan taktis JI dan ISIS didukung oleh pemikiran Jihad, publikasi dan perdebatan yang didominasi oleh elit intelektual jihadis di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Derasnya publikasi dan perdebatan ini memengaruhi radikalitas Muslim di Asia Tenggara karena penonton dan pembaca karya tulis baik melalui penerbitan jaringan jihadis maupun melalui media online mendapat komunitas pembaca yang banyak di Malaysia dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Al-Aqwam penerbit buku-buku Al-Qaidah dan JI sering menjual buku-bukunya hingga negeri jiran Malaysia. Demikian juga blog pribadi Aman Abdurrahman yang memuat artikel dan buku-buku terjemahan dan pemikiran Aman dibaca secara serius di madrasah dan majelis taklim di Indonesia dan Asia Tenggara. Imam Samudra juga menulis beberapa buku yang menegaskan pandangan dia atas perannya dalam aksi bom Bali 2002. Bahkan Samudra memasukkan bab khusus bagaimana internet menjadi media penting dalam aksi terorisme. Dalam konteks ini Samudra melihat peluang *hacking*, *fa'i* dan propaganda melawan Barat menjadi metode strategis dan taktis melalui internet. Gagasan Samudra menginspirasi jihadis muda Indonesia yang kemudian berperan besar dalam propaganda dan aksi terorisme yang dikendalikan oleh ISIS di Indonesia dan Asia Tenggara. Bahrin Naim memberi instruksi bagaimana menciptakan sel jihad agar terhindar dari *tracking* Densus 88, juga berhasil mengajak ratusan sukarelawan jihad melalui Facebook dan Telegram yang dikelola oleh komunitas ISIS.

Jauh sebelum Aman Abdurrahman menulis buku Jihad, Abu Bakar Ba'asyir dan para pelaku Bom Bali juga beberapa kali menulis buku Jihad yang menyerukan pentingnya Jihad bagi perjuangan Ummat Islam dari tekanan internasional dan melakukan kritik atas pemerintah dan koalisi Barat. Jihadis Indonesia yang aktif menulis dari penjara terkait aksi terorisme terinspirasi dari para penulis terkenal di dunia Arab. Ba'asyir menyinggung Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutub sebagai figur mujahidin yang tetap menjaga

keagamaan dan berdakwah melalui tulisan meski mendapat tekanan penguasa. Ba'asyir menyebut mereka sebagai Ulama Robbaniyyin. Ba'asyir memberi *endorsement* atas konsistensi Aman Abdurrahman dalam menulis saat di penjara dengan menyebut Aman sebagai “seorang alim muda yang konsekuen yang menegakkan kemurnian tauhid. Sebagaimana ulama robbaniyyin Al-Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrohman juga berusaha memanfaatkan rahmat Allah dalam penjara yang ditimpakan oleh thaghut penguasa negeri ini dengan menulis risalah-risalah tauhid dan risalah dakwah lainnya” (Ba'asyir, 2013).

Publikasi Jihadis memiliki setidaknya tiga tujuan. Pertama, argumentasi atas tindakan mereka dalam melakukan aksi pemboman dengan legitimasi agama. Bahkan Imam Samudra menulis khusus membantah buku penulis lain (Nasir Abbas) dan menegaskan posisi dia sebelum eksekusi dilakukan. Kedua, industri jihadis tumbuh dengan baik dan memberi manfaat ekonomis bagi terpidana teroris dan keluarganya. Buku Imam Samudra cetak lebih dari empat puluh ribu eksemplar dan masih juga habis di pasaran. Ketiga, tulisan memberi inspirasi bagi siswa dan pemuda untuk melanjutkan tradisi Jihad. Dalam banyak kesempatan tulisan menjadi acuan penting dalam rekrutmen dan pelatihan jihad. Buku dan tulisan online Aman Abdurrahman menginspirasi banyak individu dan kelompok yang melakukan serangan independen (*lone wolf*) didukung dengan penjelasan manual yang dalam dua tahun terakhir dilakukan oleh para pendukung dan simpatisan ISIS. Bahrunnaim diantaranya membuat facebook dan *personal blog* untuk mendorong Muslim di Asia Tenggara, khususnya yang berbahasa Melayu untuk melakukan aksi terorisme melawan pemerintah dan koalisi internasional. *Self-radicalisation* ini menjadi perhatian ASEAN Summit pada September 2016, ketika hampir semua pemimpin negara sepakat ancaman terorisme telah menjadi tantangan tidak hanya negara-negara anggota ASEAN tetapi juga dunia. Aksi individu menjadi lebih sulit diprediksi oleh intelejen negara dan pihak keamanan untuk mengantisipasi serangan. ISIS pada edisi publikasi Juni 2016 menyerukan serakan setiap

sukarelawan jihad secara personal dan kelompok kecil untuk menyerang dengan senjata yang dimiliki oleh jihadis. Serangan tidak harus besar dan monumental tetapi bisa secara simbolik terhadap anggota kepolisian dan keamanan. Pada 2016, Malaysia, Indonesia dan Filipina Selatan mengalami serangan melalui gerakan individu yang digerakkan oleh ISIS melalui peran dan pengaruh elit jihadis asal Asia Tenggara Katibah Nusantara di Suriah.

Buku *Dakwah dan Jihad* Abu Bakar Ba'asyir yang ditulis pada 2003 menjadi salah satu buku awal yang ditulis jihadis pasca Bom Bali pada Oktober 2002. Dalam menulis pengantar bukunya Ba'asyir ketika dipenjarakan terkait aksi Bom Bali menyatakan,

“Dalam mengisi hidup ini, para ulama memberi nasehat yang singkat kalimatnya namun padat isinya ‘Hidup mulia atau mati syahid’. Hidup mulia artinya hidup yang diatur dengan syari’at Islam secara kaffah, atau hidup yang dipenuhi dengan perjuangan menegakkan Syari’at Islam, kemudian dengan sabar rela menanggung segala resikonya. Sedangkan mati syahid ialah mati terbunuh oleh musuh Islam dalam jihad fi sabilillah, atau dibunuh oleh penguasa dhalim karena berani menyuarakan kebenaran (Ba'asyir, 2003: 5).

Artikel ini akan membahas strategi dan taktik aksi dan pemikiran kelompok teroris baik Jama'ah Islamiyah maupun ISIS di Asia Tenggara. Artikel ini berasal dari wawancara mendalam dengan teroris di penjara dan luar penjara, serta kajian dokumen terkait dengan perkembangan terorisme di Asia Tenggara. Argumen artikel ini adalah bahwa pemikiran elit kombatan baik pada level global maupun regional memengaruhi kuat dalam pola rekrutmen dan perkembangan terorisme. Tantangan serius terhadap fenomena ini adalah tidak hanya taktik tindakan dalam menghentikan aksi dan rencana serangan teror tetapi lebih penting lagi dalam kontra narasi yang membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

PEMBAHASAN

PERDEBATAN PASCA BOM BALI

Pasca bom Bali 2002 terjadi perdebatan melalui publikasi buku yang dilakukan oleh para elit JI dan pelaku Bom Bali. Tradisi menulis ini kemudian berlanjut ke elit ISIS yang memengaruhi pergerakan dan aksi terorisme di Asia Tenggara antara 2013 hingga 2015.

Buku dan artikel Jihadis berlanjut dari Ba'asyir ke Aman Abdurrahman. Sementara Abu Bakar Ba'asyir menulis buku-buku serial *Tazkirah* dengan dukungan organisasi Jama'ah Ansharut Tauhid, sebagai pelengkap dari tulisan Ba'asyir *Dakwah dan Jihad*. Buku *Tazkirah* tidak dicetak secara resmi dan difotokopi untuk didiskusikan di banyak forum jihad di seluruh Indonesia melalui JAT. Demikian juga, buku *Jihad Aman* didiskusikan oleh kelompok Tauhid wal Jihad serta Jama'ah Ansharul Khilafah sebagai bagian dari instrumen dakwah dan solidaritas kelompok dan keluarga Mujahidin.

Buku *Seri Materi Tauhid* karya Abu Sulaiman Aman Abdurrahman yang bisa diunduh di millahibrahim.wordpress.com terbagi menjadi beberapa bagian pokok. Pertama, prinsip ketauhidan melalui pemaknaan Thaghut dan bagaimana kewajiban Muslim untuk beriman kepada Allah dan kufur terhadap thaghut. Kedua, kritik atas praktik demokrasi sebagai bagian dari tradisi Thaghut. Termasuk didalamnya status hukum nasional. Ketiga, penegasan Aman atas penolakan keta'atan terhadap pemerintah Indonesia, juga bagaimana Muslim bekerja sebagai PNS dan bekerja di perusahaan pemerintah. Dalam melihat status pegawai pemerintah Aman Abdurrahman menyatakan "setiap pekerjaan yang merupakan pembuatan hukum, pemutusan dengan hukum buatan, pembelaan kepada thaghut atau sistemnya, mengikuti atau menyetujui sistem thaghut, ada syarat sumpah atau janji setia kepada thaghut atau sistemnya, maka semua ini adalah kekafiran" (Abdurrahman, 2015: 161).

Karya Aman bukanlah sesuatu yang baru dalam penulisan jihadis. Tulisan karya bomber Bali menjadi pioneer atas publikasi aktivis Jihad, terutama

menempatkan publikasi pada perusahaan penerbitan yang dikelola oleh kelompok jihadis. Publikasi didominasi oleh jaringan Alumni Afghanistan dan Alumni Ngruki. Jazera (Al Aqwaam Group) Solo dan Arrahmah Media Jakarta menjadi penerbit yang ikut memengaruhi semangat penerbit-penerbit kelompok radikal lain. Dengan menerbitkan karya para Jihadis, mereka menunjukkan *positioning* yang berbeda dengan umumnya penerbit Islam. M. Fachry, Pemred Arrahmah Media menyatakan,

"Termasuk buku 'Trio Syuhada', tiga orang yang menurut mereka melakukan suatu kebaikan. Tapi dinista oleh banyak orang dan dianggap mereka melakukan keburukan. Apa alasan dari mereka dan apa alasan mereka ini kita angkat. Ini yang kemudian akhirnya ar-Rahmah media dikenal sebagai penerbit yang punya ciri khas. Walaupun mungkin kecil dan baru berkembang tapi sudah bisa membetot perhatian. Karena tadi positioningnya alhamdulillah kita anggap tepat. Hikmahnya di situ" (Fachry, 2010).

Arrahmah Media juga memiliki alasan khusus untuk menerbitkan buku Trio Syuhada dan kelompok Jihad lainnya. Fachry melihat bahwa,

"Karena orang kebanyakan menganggap tiga orang ini adalah berbuat kerusakan, teroris. Nah, kita perlu cek dan ricek, kita perlu tabayyun kepada pelakunya sendiri. Betul enggak Anda melakukan teror sebagaimana yang disampaikan. Apa sih pandangan-pandangan Anda. Kemudian mereka juga ternyata merasa perlu untuk membuat bantahan, membuat klarifikasi kepada umat. Dan dia mencari juga media mana yang mau menyalurkan aspirasi dan suara mereka. Mereka ketemu dengan kita. Kemudian, sebelum mereka ketemu mereka sudah melihat kemungkinan media mana yang fokus dan concern dengan masalah ini. Melihat ar-Rahmah media, mereka setuju mau diterbitkan. Alhamdulillah jadi menerbitkan buku tersebut. Karena kan mereka memiliki bantahan dan klarifikasi yang selama ini sudah dituduhkan kepada mereka. Jadi mereka sudah terstigma sebagai teroris. Itu yang kemudian kita sampaikan. Sebenarnya rencana mengangkat lagi kisah-kisah yang dianggap teroris ini yang sebenarnya mereka menganggap

sebagai mujahidin kita masih banyak memiliki keinginan” (Fachry, 2010).

PENGARUH KOMBATAN INTERNASIONAL

Abu Bakar Ba’asyir dan Aman Abdurrahman banyak dipengaruhi oleh teks-teks karya Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutb. Juga risalah yang ditulis oleh Aiman Az Zawahiri memengaruhi generasi jihadis Indonesia dan dunia. Aman Abdurrahman dianggap memiliki pengaruh kuat atas pergeseran Abu Bakar Ba’asyir yang kemudian berbai’at kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Ba’asyir membaca banyak buku Aman dan memberi pengantar. Pertukaran tulisan di penjara Nusa Kambangan saling memengaruhi tahanan teroris (Sholeh, 2013). Aman Abdurrahman alias Oman Rochman alias Abu Sulaiman Al-Arkhabily memiliki julukan Singa Tauhid, lahir di Cimalaka-Sumedang, 5 Januari 1972. Penjara di Indonesia tidak memiliki cukup regulasi dalam mencegah peredaran tulisan dan diskusi karya jihadis di penjara-penjara. Tahanan teroris yang bergabung dengan ISIS secara rutin mendiskusikan buku dan artikel Aman dan Ba’asyir, selain Dabiq yang bebas diunduh melalui *smartphone* (Bambang, 2016). Aman dipengaruhi oleh Abu Muhammad Al Maqdisi dan Abu Musab Az Zarqowi dalam banyak tulisan, pidato dan gerakan jihadnya. Karena itu ketika ISIS muncul Aman begitu akrab dengan jargon dan semangat Jahadi takfiri yang sebelumnya digagas dan dikembangkan oleh Al Maqdisi dan Az Zarqawi.

Perubahan sikap seseorang untuk bergabung dalam kelompok Jihad dan melakukan aksi teror banyak diilhami oleh tokoh-tokoh dan penulis Jihadis. Imam Samudra yang mempelopori awal tulisan anggota Jama’ah Islamiah sejak 2004, *Aku Melawan Teroris* (AMT), yang terbit ulang beberapa kali (tiga kali berturut-turut dalam tiga bulan: September, Oktober dan November 2004) dengan oplah lebih dari 50 ribu eksemplar. Menurut editornya, Bambang Sukirno yang juga direktur Al Aqwaam, buku ini semula berasal dari “Catatan Harian” Imam Samudra. Dia mengusulkan judulnya menjadi AMT, dengan alasan “judul itu lebih mencerminkan isi buku dan niat aksi yang mereka

lakukan”(Sukirno, 2004).

Penerbit Jazera yang berbasis di Solo mendapatkan banyak keuntungan dari penerbitan ini, terutama menjadi salah satu penerbit yang dikenal masyarakat lebih luas. Setelah penerbitan AMT, Jazera sub bagian dari Yayasan Al Aqwaam, terus menerbitkan buku-buku para Mujahidin Timur Tengah dengan mengandalkan terjemahan. Menurut mereka penulis Indonesia sangat terbatas jumlahnya, sementara permintaan pasar cukup tinggi. Sejak 2004, banyak muncul penerbitan yang dikelola secara mandiri dengan manajemen kecil-menengah. Mereka tidak akan bersaing dengan penerbit besar seperti Gramedia dan Mizan. Mereka mengandalkan kelompok pembaca tertentu baik melalui pengajian (majelis taklim), bedah buku-buku Islam dan agen-agen lepas yang membeli langsung dari penerbit dan menjual ke pasaran.

Imam Samudra menyatakan bahwa sejak diberlakukannya Jihad sebagai fardlu ain pada masa Rasulullah, maka seluruh umat Islam masuk dalam *Ahluts-Tsughur*. Selanjutnya, Samudra memberi contoh nama-nama Ulama *Ahluts-Tsughur* yang “tidak ada seorangpun dari [mereka] yang tidak pernah mengangkat senjata dan berjihad melawan kaum kafir” (Samudra, 2004: 69). Mereka adalah seluruh Imam Madzhab, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, kemudian pada abad berikutnya Shalahuddin Al Ayyubi, Umar Mukhtar, disusul generasi abad 20, Syaikh Dr. Abdullah Azzam (w. 1987 di Pakistan), Syaikh Aiman Az-Zawahiri, Syaikh Sulaiman Abu Ghait, Syaikh Mullah Omar, Syaikh Usamah Bin Laden, juga di Pakistan ada Syaikh Mir Hamzah dan Maulana Mansoor (Samudra, 2004: 69-70).

Buku pertama yang menyentuh hati Imam Samudra adalah karya Dr. Abdullah Azzam, *Ayatur Rahman fie Jihadi Afghanistan* (Tanda-tanda Kekuasaan Allah dalam Jihad di Afghanistan). Samudra menyatakan:

“Mereka yang sempat membaca buku ini, Insya Allah akan tergerak hatinya untuk berjihad mengangkat senjata ke Afghanistan... Lebih dari sekali buku itu kubaca, dan selesai membacanya selalu Aku berdo’a semoga Allah menyampaikanku ke Afghani-

stan, negeri para syuhada, negeri para penghuni surga” (Samudra, 2004: 41).

Ketika itu umur Imam Samudra 16 tahun, masih siswa kelas 3 SMP Negeri 4 Serang, Banten. Selanjutnya Samudra menyatakan: “sejak mengenal ‘buku ajaib’ itu, aku tak pernah berhenti berdo’a agar Allah menggabungkanku dengan para mujahidin dan menjadikanku salah satu syuhada” (Samudra, 2004: 42). Imam Samudra adalah salah satu siswa brilian. Sejak SD hingga SMP hampir selalu mendapat juara di setiap kelasnya. Bahkan ditingkat Kabupaten Serang, Samudra kecil salah satu terbaik dalam beberapa lomba. Pada saat lulus SD, hasil evaluasi belajar akhir nomor dua terbaik se Kabupaten.

Imam Samudra juga mendapat inspirasi dari seorang Jihadis dari Timur Tengah, Syaikh Abu Ibrahim Al-Mishri tentang tujuan Jihad, yaitu

(1) menghancurkan penghalang-penghalang yang menyekat tersebarnya *dien* (agama) ini ke seluruh penjuru dunia...(2) menolak kezaliman dan mengukuhkan yang *haq* sekaligus mencegah kaum Muslimin dari kerusakan dan kehancuran (akibat kezhaliman kaum kafir)... (3) menjaga eksistensi dan kemuliaan kaum Muslimin, serta menolong *mustadh’afin* (orang-orang yang tertindas)... (4) menghinakan musuh-musuh Allah, menggentarkan mereka, dan mencegah keganasan mereka, (5) untuk menyaring-bersihkan orang-orang beriman, membinasakan orang-orang kafir, dan memilih para syuhada’... (6) untuk mengukuhkan kekuasaan di muka bumi demi tegaknya syari’at yang adil dan terlaksananya keperluan hidup dibawah naungan aturan Allah... (7) untuk memperoleh karunia lain yang diperlukan oleh manusia yang dijanjikan Allah... (8) demi memperoleh ridla Allah *Ta’ala*.” (Samudra, 2009: 87).

Imam Samudra banyak mengutip pandangan Aiman al-Zawahiri, dan menyatakan kagum atas intelektualisme dan pengalaman jihad al-Zawahiri.

Aiman al-Zawahiri lahir pada 19 Juni 1951 di Maadi, Mesir. Memiliki nama sejak lahir Aiman Muhammad Rabayah al-Zawahiri. Al-Zawahiri memiliki beberapa nama yaitu Abu Muhammad, Abu

Fatima, Muhammad Ibrahim, Abu Abdallah, Abu al-Mu’iz, Dokter, Dosen, Nur, Ustaz, Abu Muhammad Nur al-Din, Abdul Muaz (Abdul Moez).

Al Zawahiri berasal dari keluarga kaya, seorang dokter dan ilmuwan. Alumni Universitas Kairo pada 1974 dan mendapatkan gelar master Kedokteran spesialis bedah pada 1978. Al-Zawahiri menguasai Bahasa Arab, Inggris dan Perancis. Setahun setelah resmi menjadi ahli bedah, al Zawahiri memilih bergabung dengan Mujahidin di Afghanistan melawan Uni Soviet. Di Afghanistan pula, al Zawahiri bertemu Osama bin Laden, pemimpin Al Qaidah. Pada 1998, Al Zawahiri secara resmi menggabungkan kelompok Jihad Islam Mesir kedalam Al Qaidah, dengan melakukan pernyataan bersama. Pada 2001, Al Zawahiri menerbitkan buku *Knights Under the Prophet’s Banner*. Al-Zawahiri sering disebut sebagai “the real brains” atau otak gerakan Al-Qaidah.

Ali Ghufuran (Mukhlis) dalam risalah “Maktabah Kita” memberikan komentarnya setelah membaca tuntas kitab karya Syekh Ayman, At Tabriah. Menurut Ghufuran, inti kandungan kitab karya Dr. Fadl yang dituliskannya dalam penjara Mesir itu adalah,

1. Memperbaharui dan memperhebat kritiknya terhadap operasi-operasi jihad yang pernah ditulis dalam kitab Al-Jamie, dan kali ini sasaran utamanya adalah Al Qaidah sebagai tandzim atau jama’ah jihad, sedang secara individu adalah Asy Syekh Ayman dan Asy Syekh Usamah bin Ladin. (At Tabriah, Muqaddimah hal. 3)
2. Berusaha menghentikan operasi-operasi jihad dengan alasan kaum Muslimin (mujahidin) lemah dan tidak berdaya dan dengan alasan tidak terpenuhinya penopang-penopang jihad.
3. Menunjukkan kepada ummat keraguannya terhadap pendapat-pendapatnya dan fatwa-fatwanya yang ditulis selama ini di dalam kitab-kitabnya, dan seperti memberi isyarat agar tidak diikuti, khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan jihad dan operasi jihad yang tidak sejalan dengan “Watsiqah Tarsyid”. (Menggugat Al Qaidah) (Prince of Jihad, 2010).

Beberapa Ulama yang menurut Ali Ghufuran layak

untuk diikuti, yaitu: (1) Al-Imam Al-Bukhari (w. 256 H.), (2) Al-Imam Abul Fida' Al-Hafidz Ibnu Katsir (w. 774), (3) Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jam'ah bin Hazzam, Muhyidin Abu Zakaria an-Nawawi (631-676 H), (4) Al-Imam Abdul Wahid bin Adam Ath-Thawawisi, (5) Al-Imam Abu Zakaria Ahmad bin Ibrahim Muhammad (w 814 H.), (6) Asy-syaikh Abdullah Azzam, (7) al-Ustadz Muhammad Najib Al-Muthii (Ghufran, 2009: 74-79).

Dr. Abdullah Azzam adalah mentor (dosen pembimbing) Usamah Bin Laden ketika masih kuliah di Saudi Arabia. Adalah Dr. Azzam yang memberi inspirasi Usamah Bin Laden dan para pelajar Arab untuk berjihad ke Afghanistan. Selain Dr. Azzam, sebelumnya ada Sayyid Qutb dan Abd. al-Salam Faraj. Qutb, Faraj dan Azzam adalah ilmuwan dan penulis radikal sunni yang telah menginspirasi kaum muda Muslim di Timur Tengah dan wilayah lain untuk berjihad. Buku Faraj, *Al-Faridah al-Ghaibah* (Tugas yang Terlupakan) menginspirasi aktivis Muslim tahun 1980an untuk bergabung dengan kelompok jihad. Menurut Faraj "Jihad tidak hanya komitmen pribadi tetapi juga [bersungguh-sungguh] melawan musuh-musuh Islam...siapa yang berpartisipasi dalam jihad yang benar maka akan mendapatkan imbalan pada level tertinggi di Surga. Jihad harus terus ditegakkan hingga Islam bisa menguasai seluruh dunia" (Ali dan Post, 2008: 9).

Selain para ulama dan tokoh Mujahidin yang menginspirasi Imam Samudra, Ali Ghufuran dan Amrozi, mereka juga mendapat asupan tenaga dari mimpi-mimpi. Ali Ghufuran dan Amrozi menulis secara rinci mimpi-mimpi mereka yang terkait dengan Jihad, dan pengalaman mereka ketika dipenjara pasca Bom Bali. Juga mimpi dan ucapan Imam Samudra, yang menjadi kenyataan. Abu Jibril menggambarkan bagaimana mimpi Samudra, Ghufuran dan Amrozi. Menurut Jibril:

"Mereka telah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi yang sangat indah, memperoleh tarbiyah asyari, dan juga mendapatkan tausiyah Baginda [Nabi]. Keberanian, kehebatan dan ketabahan yang dimiliki sulit dicariandingannya...Ditambah lagi

dengan cerita akhi Mukhlas dan Amrozi yang menceritakan pertemuannya dengan bidadari yang cantik bermata jeli dalam mimpinya" (Jibriel, 2009: 14).

Pemikiran Jihadis menjadi propaganda utama untuk melegitimasi aksi Jihad dan teror. Aksi Al-Qaidah dan IS didukung legitimasi ulama dalam serial pemboman di banyak negara. Sementara tulisan Jihadis Indonesia juga menjadi instrumen penting dalam perkembangan aksi terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara. Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir, Aman Abdurrahman dan pelaku pengeboman di Bali dan Kedutaan Australia bisa diakses oleh jihadis jaringan melayu. Karena itu, ulama jihadis Indonesia bisa memengaruhi perkembangan dakwah yang berbasis salafi-jihadi di Asia Tenggara.

Pasca Bom Bali 2002 dan 2005, jaringan Al Qaedah di Asia Tenggara terungkap setelah adanya pertukaran informasi intelijen antar negara-negara anggota ASEAN. Pengalaman menangani jaringan Al Qaedah ini menjadi pelajaran penting bagi Polisi dan pemerintah dalam menghadapi jaringan ISIS dan mengantisipasi ancaman keamanan sepulangnya jihadis ISIS dan JN dari Suriah dan Irak ke Asia Tenggara. Sekitar 800-1000 jihadis asal Asia Tenggara berafiliasi dengan ISIS berada di Suriah dan Irak yang kini terdesak akibat operasi gabungan Barat, serta tekanan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Bashar Al-Asad yang didukung Rusia dan Iran.

STRATEGI ISIS DI ASIA TENGGARA

ISIS Asia Tenggara merupakan bagian dari ISIS dunia. Beberapa penerbitan resmi ISIS antara lain *Dabiq* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk konsumsi komunitas ISIS di Asia Tenggara. Jaringan transnasional Asia Tenggara ISIS dan Timur Tengah khususnya di Suriah dan Iraq menjadi elemen penting pola dan dinamika pergerakan aksi ISIS bagaimana mereka mengembangkan jaringannya dan melakukan aksi penyerangan. Sebelum ISIS menerbitkan majalah dan publikasi lain, elit spiritual ISIS juga sudah menulis melalui buku dan media online yang sangat berpengaruh atas radikalisasi Muslim di Asia Tenggara.

Hal ini terus berlanjut dengan pemikiran yang lebih taktis. Beberapa aksi terorisme di Indonesia dan Malaysia yang dilakukan oleh ISIS diawali melalui jaringan Suriah-Irak-Asia Tenggara.

ISIS jaringan Asia Tenggara berkembang melalui dua strategi. Pertama, Katibah Nusantara (KN) organisasi yang dibentuk oleh kombatan ISIS asal Indonesia, Indonesia dan Filipina di Suriah dan Irak menjadi hub yang menyatukan kombatan berbahasa Melayu. KN tidak hanya aktif terlibat pertarungan tetapi juga membantu publikasi versi Bahasa Indonesia pada majalah, artikel dan pernyataan yang berasal dari pusat informasi ISIS di Suriah. KN juga aktif dalam memberi informasi secara langsung melalui sosial media dan *bloging* yang dibentuk oleh pasukan media ISIS asal Asia Tenggara. Kedua, strategi melalui penguatan jaringan, interaksi dan aksi dengan kelompok-kelompok jihadis di Indonesia, Malaysia dan Filipina. *Home-grown* terorisme ini menjadi ancaman langsung atas pergerakan dan aktis terorisme oleh jaringan dan individu yang berafiliasi dengan ISIS. Hubungan saling mendukung antar organisasi teroris dalam afiliasi ISIS sangat nampak. Misalnya dalam pernyataan dan tulisan Aman Abdurrahman, Santoso dan Ba'asyir mendukung jihad di Filipina Selatan melawan pemerintah Thoghut, dan sebaliknya Abu Sayaf juga mendukung aksi ISIS Indonesia dalam melakukan aksi teror.

Aman Abdurrahman menulis artikel dan buku yang dijual online melalui blog pribadi, millahibrahim.blogspot.com, yang pada saat menyelesaikan tulisan ini September 2015 blog ini tidak bisa diakses. Tetapi Aman menikmati kebebasan selama bertahun-tahun dalam menyampaikan tulisannya melalui blog tersebut. Aman menginspirasi penulis-penulis ISIS lainnya. Diantaranya Bahrn Naim yang memberi manual aksi terorisme melalui web yang dikendalikan dari luar negeri. Pasca serangan Thamrin pada Januari 2016, Bahrn Naim memberi komentar "Selamat" bagi para pelaku penyerangan. Bahrn Naim telah menulis peringatan beberapa bulan sebelum serangan Thamrin bahwa akan ada operasi "Konser Jakarta" yang mendapat inspirasi "Konser

Paris".

Muhammad Bahrnaim Anggin alias Na'im lahir di Pekalongan, pada 6 September 1983. Naim bergabung dengan JAT pada September 2008. Pertama, Naim masuk dalam sel Abdullah Sonata, kemudian mengikuti Pelatihan Militer di Jalin Janto, Aceh pada 2010. Na'im di penjara di Surakarta pada 9 November 2010 dengan tuduhan menyimpan senjata dan amunisi. Na'im dipenjara 2 tahun, 6 bulan, dan pada 2012 berakhir masa tahanannya. Dua tahun kemudian, Na'im bergabung dengan ISIS dan berangkat ke Suriah. Secara rutin Na'im menulis pengalaman Jihad di blog pribadinya bahrnaim.com; bahrnaim.site.

Ba'asyir dan Aman merupakan ikon penting dalam perkembangan ISIS di Indonesia, dan memiliki pengaruh di Asia Tenggara. Banyak pelajar dan pemuda yang berbai'at kepada Al- Baghdadi karena pengaruh Ba'asyir dan Aman. Ba'asyir dan Aman memengaruhi jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang menjadi organisasi lokal Indonesia yang terkait dengan ISIS di Suriah. Dalam jaringan ini Bahrumsyah, Bahrn Naim dan Salim Mubarak Attamimi memiliki peran penting menjaga soliditas jihadis Indonesia dan Asia Tenggara dalam jaringan Katibah Nusantara di Suriah.

Pada level regional, Ba'asyir dan Aman memiliki peran strategis bagi pengembangan ideologi ISIS di Asia Tenggara. Daulah Islam Malizia (DMI), salah satu sel ISIS di Malaysia dan bekerja sama dengan Kumpulan Arakan Daulah Islamiyyah bermaksud mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Polisi Malaysia menemukan DIM melanjutkan ideologi yang sudah berjalan di Malaysia yaitu Jama'ah Islamiyah, Darul Islam dan Kumpulan Mujahidin Malaysia. DIM menggunakan buku-buku dan tulisan Ba'asyir dan Aman sebagai "reading materials" dalam kajian rutin rekrutmen, konsolidasi dan pergerakan organisasi dalam lingkaran DIM (El-Muhammady, 2016: 111). Antara Februari 2013 hingga 2015, Polisi Malaysia telah menahan 107 orang yang terlibat dalam gerakan terorisme. Mayoritas diantara mereka (80 orang) berumur antara 18-40 tahun. Hanya 15 orang berumur lebih dari 40 tahun. Kurang dari 18 tahun

berjumlah 12 orang. Ini menunjukkan target sasaran ISIS dan gerakan radikalisme mengarah ke kelompok muda. Terutama akibat interaksi melalui sosial media (El-Muhammady, 2016: 111). Thomas Koruth Samuel menyatakan bahwa para komandan jihadis di Asia Tenggara menempati posisi tinggi pada usia 20an, setelah bertahun-tahun bergabung dalam lingkungan pendidikan, latihan perang dan bahkan pertarungan pada usia belasan tahun. Abdurrajaq Janjalani membentuk Kelompok Abu Sayaf pada usia 26 tahun, kemudian digantikan oleh Khadafy Janjalani (usia 22 tahun) setelah Abdurrajaq terbunuh pada 1998. Amir Abu Sayaf, Yasser Iqan, mulai ikut ASG pada usia 21 tahun. Kelompok radikal lainnya di Filipina, Gerakan Rajah Solaiman (RSM, Rajah Solaiman Movement) yang berasal dari perkumpulan siswa dan guru di madrasah di Luzon, didirikan oleh Ahmad Santos. Santos mulai terlibat pada usia 21 tahun. RSM melakukan 14 pemboman superferry pada 27 Februari 2004 (Samuel, 2012: 6-7). Bagi JI, ISIS dan kelompok teroris lainnya individu dan kelompok muda merupakan target paling mudah mendapat pengaruh karena masa aktualisasi diri dan pola interaksi yang memengaruhi pertumbuhan ideologi mereka. Dalam penelitian yang dilakukan pada 2007, salah seorang responden yang merupakan staf pengajar di Pondok Al Mukmin Ngruki mengakui bahwa siswa dan alumni Al Mukmin Ngruki lebih banyak dipengaruhi bahan bacaan dan interaksi dari luar pondok yang membentuk karakter jihad mereka (Sholeh, 2007). Salah satu sel yang dibentuk gabungan alumni dan siswa Al Mukmin Ngruki yang menyerang pos Polisi di Solo pada 2014 melakukan kajian kelompok sendiri dengan bacaan dari artikel dan buku Aman Abdurrahman yang mudah didownload dari blog Aman tanpa mengundang guru-guru mereka secara langsung. Rekrutmen, pengembangan jaringan dan aksi ISIS di Asia Tenggara banyak dilakukan melalui kelompok muda.

KESIMPULAN

Pemikiran, pengalaman dalam konflik dan perang serta respon pemerintah dan masyarakat sipil

memengaruhi dinamika perkembangan dan ancaman terorisme di Asia Tenggara. Pemikiran elit jihadis baik dari Suriah dan Irak, dan khususnya di Asia Tenggara akan terus menumbuhkan ideologi radikal jihadis. Pemikiran ini menjadi alat strategi dan taktik gerakan yang berafiliasi dengan JI dan ISIS di wilayah regional dan internasional.

Pemikiran jihad Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman serta penulis jihadis lain di Indonesia dan Asia Tenggara sangat memengaruhi dinamika radikalisme regional. Buku, artikel, pledoi, pidato dan khutbah yang mereka tulis tidak hanya disalin melalui sosial media tetapi juga dibukukan secara profesional melalui penerbitan yang dikelola oleh kelompok jihadis. *Blogging*, media online dan media sosial yang memuat tulisan jihadis Asia Tenggara menginspirasi pergerakan jihad ditingkat regional. Jaringan transnasional ISIS yang aktif dan masif dilakukan dengan memanfaatkan media sosial menjadi tantangan serius tidak hanya dalam menghentikan serangkaian teror tetapi lebih penting lagi membendung tekanan radikalisme yang menasar kelompok muda Muslim di Asia Tenggara.

Tantangan bagi pemerintah dan masyarakat sipil adalah semakin berat kebijakan kontra terorisme yang selama ini masih didominasi oleh negara. Masyarakat sipil, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih menjadi *silent majority* yang membutuhkan kerjasama komprehensif bersama pemerintah di Indonesia dan negara serta masyarakat sipil di Asia Tenggara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mestinya menjalankan fungsi koordinatif, dan tidak menjalankan program sendiri. Keterbatasan sumber BNPT dalam kontra terorisme terutama dalam mengimbangi progresivitas karya tulis jihadis perlu merangkul lebih luas ulama, sarjana dan masyarakat sipil. Demikian juga pada level regional, pada ASEAN Summit 6-8 September 2016 di Laos semua kepala negara sepakat bahwa terorisme menjadi ancaman bersama. Semakin banyaknya *selfradicalisation* dan *lone wolf* banyak dipengaruhi media online dan tulisan jihadis. Aksi pemboman Gereja di Medan pada 28 Agustus 2016 juga salah satu *lone wolf* yang

terinspirasi oleh karya tulis jihadis.

Gerakan strategis dan taktis Ji dan ISIS dilakukan melalui kerja kolektif yang cukup lama dan melibatkan gerakan transnasional baik di Asia Tenggara maupun di Afghanistan, Suriah dan Irak. Karena itu, kerjasama yang solid dan komprehensif antar negara-negara dan masyarakat sipil di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa dan negara dunia menjadi sangat penting tidak hanya menghentikan aksi-aksi teroris tetapi membendung derasnya pengaruh radikal jihadisme yang dikembangkan oleh para veteran Afghanistan, Mindanao, Suriah dan Irak.

Pemikiran yang ditulis melalui penerbit jaringan Ji dan ISIS serta tulisan melalui blog dan media online termasuk media sosial semakin menjadi tantangan negara dan masyarakat sipil. Keamanan virtual dan kontra narasi dibutuhkan kerja bersama dan kolektif negara dan masyarakat sipil. BNPT tidak bisa melakukan sendiri bagaimana melawan pemikiran Aman Abdurrahman melalui media online yang mereka kembangkan, tetapi lebih penting lagi peran sarjana, ulama dan intelektual di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, juga lembaga keagamaan di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan negara-negara dunia agar bekerjasama lebih erat dan konsisten untuk mengatasi terutama menjelang veteran Suriah dan Irak yang dalam beberapa tahun akan menjadi ancaman keamanan serius di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

REFERENSI

BUKU DAN MEDIA

- Abdurrahman, Abu Sulaiman Aman. 2013. *Mutiara dari Balik Penjara Penyejuk Orang yang Beriman*. Banten: P-TA Press.
- Abdurrahman, Abu Sulaiman Aman. 2015. *Seri Materi Tauhid for the Greatest Happiness*, Rilis ke II 1 Ramadhan 1436 H/ 18 Juni, millahibrahim.wordpress.com.
- Ali, Farhana dan Jerrold Post. 2008. "The History and Evolution of Martyrdom in the Service of Defensive Jihad: An Analysis of Suicide Bombers in Current Conflicts", *Social Research*, 1 Juni.
- Ba'asyir, Abu Bakar. 2013. "Kata Pengantar dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir," dalam Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, *Mutiara dari Balik Penjara Penyejuk Orang yang Beriman*. Banten: P-TA Press.
- Ba'asyir, Abu Bakar. 2003. "Renungan dari Penjara," dalam Irfan Suryahadi Awwas (ed.), *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Damanik, Caroline. 2014. "Kisah Wildan di ISIS di mulai dari Sekolah di Mesir," *Kompas*, 14 Agustus.
- El-Muhammady, Ahmad. 2016. "Countering the Threats of Daesh in Malaysia," dalam Beatrice Gorawantschy, Rohan Gunaratna, Megha Sarmah dan Patrick Rueppel (ed.), *Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses, Panorama Insights into Asian and European Affairs*, 02/ 2016, Singapura: Konrad Aderauer Stiftung dan S. Rajaratnam School of International Studies.
- Ghufran, Ali. 2009. *Mimpi Suci di Balik Jeruji Besi Hikmah Mimpi yang Benar dan Baik*, Jakarta: Ar-Rahmah Media.
- Horgan, John. 2008. "Deradicalization or Disengagement? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative on Need of Evaluation," *Perspectives on Terrorism*, Volume II, Issue 4, Februari.
- Samudra, Imam. 2009. *Jika Masih ada yang Mempertanyakan Jihadku [sebuah catatan terakhir dari Nusakambangan]*. Solo: Kafilah Syuhada' Media Centre.
- Jones, Sidney. 2015. "ISIS in Southeast Asia: Problems Now and Later," Private Discussion, Center for East Asia Policy Studies, Brookings Institution, Somers Room, 5 Juni, Washington DC. Diakses 6 November 2016 dari https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2015/06/20150606_sidney_jones_transcript.pdf.
- Jibriel, Abu Muhammad. 2009. "Kata Pengantar", dalam Amrozi bin Nurhasyim, *Senyum Terakhir Sang Mujahid Catatan Kehidupan Seorang Amrozi*, Jakarta: Ar-Rahmah Media.
- Samuel, Thomas Koruth. 2012. *Reaching the Youth: Countering the Terrorist Narrative*, Kuala Lumpur: Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism.
- Magouirk, Justin dan Scott Atran. 2008. "Jema'ah Islamiyah's radical madrasah networks," *Dynamics of Asymmetric Conflict*, Vol. 1, No. 1, Maret.
- Prince of Jihad. 2010. "Kritik Buku Menggugat AlQaidah: Merasionalisasi Jihad Dunia Dari Penjara Mesir", <http://arrahmah.com/index.php/blog/read/4713/kritik-buku-menggugat-al-qaidah-merasionalisasi-jihad-dunia#ixzz14kOi4J9k>, diakses 9 November 2010.
- Sholeh, Badrus. 2016. "Daesh in Europe and Southeast Asia: An Indonesian Perspective," dalam Beatrice Gorawantschy, Rohan Gunaratna, Megha Sarmah dan Patrick Rueppel (ed.), *Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses, Panorama Insights into Asian and European Affairs*, 02/ 2016, Singapura: Konrad Aderauer Stiftung dan S. Rajaratnam School of International Studies.
- Sholeh, Badrus. 2013. *Catatan Kunjungan di Penjara Nusa Kambangan*. Agustus.
- Sholeh, Badrus (ed.). 2007. *Tradisi Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Singh, Jasminder. 2015. "Katibah Nusantara: Islamic State's Malay Archipelago Combat Unit," *RSIS Commentary*, No. 126, 26 Mei. Diakses 6 November 2016 dari <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/05/CO15126.pdf>.
- Sukirno, Bambang (ed.). 2004. "Pengantar Editor", dalam Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazera.

WAWANCARA

Asad, wawancara dengan penulis di Surabaya, 6 September 2014.

Bambang, wawancara dengan penulis di penjara Porong, 3 September 2016.

Fachry, M., wawancara dengan penulis di Jakarta, 10 November 2010

Farihin Aka Yasir, wawancara dengan penulis di Jakarta, Agustus 2015.

Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional

Tulus Yuniasih, Riasa Rizky, Claudia Natasha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Budi Luhur
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12260, Indonesia
tulus.yuniasih@budiluhur.ac.id
Diserahkan: 13 Desember 2016, diterima: 18 Februari 2017

Abstract

The article aims to discuss the private military and security companies/PMSC, International Humanitarian Law/IHL and the fourth generation warfare/4GW in contemporary non-international armed conflict. Discussion on PMSC varies in terms of its contribution to the development of weapon system and intelligence gathering in combating terrorism, and of its violation towards humanity that has caused civilian casualties. Meanwhile, IHL is present to regulate the primary actors of international and non-international armed conflict, and to protect civilians in both conflicts. The dynamics of contemporary conflict, especially the asymmetrical non-international armed conflict, is also influenced by the rapid development of information and communication technology. This affects the popularity of the use of and debate on the definition of 4GW and its relevance to the contemporary conflict. This article also analyses the presence of PMSC on the dynamics of respect towards IHL in non-international armed conflict during the period of 2009-2014. The qualitative analysis would be especially conducted under the concept of international law and PMSC as two of the conceptual frameworks. Secondary data is collected on three main variables. The results show that PMSC creates both potentials and challenges to the effort of upholding IHL in three non-international conflict areas, i.e. Lebanon, Somalia, and Ukraine. In relation to 4GW, PMSC also reflects some characterisation of 4GW trends in such contemporary conflict.

Keywords: Non-International Armed Conflict (NIAC), Private Military And Security Company (PMSC), International Humanitarian Law (IHL), Fourth Generation Warfare

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan perusahaan swasta dalam bidang militer dan keamanan (*private military and security companies/PMSC*), hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/IHL*), dan perang generasi keempat (*fourth generation warfare/4GW*) dalam konflik bersenjata non-internasional kontemporer. Diskusi mengenai PMSC beragam pada sisi kontribusinya kepada pengembangan sistem persenjataan dan pengumpulan data intelijen dalam rangka melawan terorisme, serta pada sisi pelanggaran terhadap kemanusiaan yang telah mengakibatkan korban sipil. Sementara itu, terdapat IHL yang mengatur para aktor dalam konflik baik itu internasional maupun non-internasional dalam rangka melindungi warga sipil pada keduanya. Dinamika konflik kontemporer terutama yang bersifat non-internasional dan asimetris juga dipengaruhi oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mendorong perdebatan terkait relevansi 4GW dalam konflik kontemporer. Tulisan ini kemudiannya menganalisis kehadiran PMSC terhadap dinamika penegakan IHL dalam konflik non-internasional kontemporer pada tahun 2009-2014. Analisis kualitatif akan dilakukan terutama dengan menggunakan konsep hukum internasional dan PMSC. Data sekunder yang dikumpulkan fokus kepada tiga variabel utama tersebut di atas. Hasil menunjukkan bahwa PMSC tidak hanya memberikan potensi kontribusi tetapi juga tantangan kepada upaya menegakkan IHL pada tiga area konflik non-internasional, yaitu Libanon, Somalia dan Ukraina. Terkait dengan 4GW, kehadiran PMSC juga mencerminkan beberapa karakter tren 4GW dalam konflik kontemporer.

Kata kunci: Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict/NIAC*), Perusahaan Swasta Bidang Militer dan Keamanan (*Private Military And Security Company/PMSC*), Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law/IHL*), Perang Generasi Ke-empat

PENDAHULUAN

Konflik, baik itu pada level internasional, non-internasional, ataupun level yang lebih sederhana yaitu

pada level individu, dapat bersifat konstruktif. Konflik dapat menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang

terlibat perbedaan kepentingan dan tujuan untuk lebih memahami keinginan dan kebutuhan pihak yang lainnya. Oleh karena itu, pada dasarnya konflik berpotensi untuk menciptakan kerjasama yang lebih mendasar dan bermanfaat. Bagaimanapun, konflik seringkali bersifat desktruktif, terutama ketika konflik telah melibatkan penggunaan kekuatan fisik terutama senjata. Seperti halnya senjata merupakan sebab khusus kejadian kematian, maka konflik bersenjata sering kali berdampak pada kematian jiwa. Kejadian kematian inilah yang kemudian memperparah kondisi konflik. Konflik semakin sulit untuk diselesaikan karena tidak hanya berdampak secara fisik seperti infrastruktur namun juga psikologis.

Hukum perang kemudian disusun dan disepakati dalam bentuk hukum humaniter internasional atau *international humanitarian law* (IHL) sejak Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Berdasar kepada Konvensi Jenewa dan Protokol-protokolnya, hukum ini mencakup aturan-aturan mengenai konflik bersenjata (*armed conflict*) baik pada level internasional (*international armed conflict*/IAC) maupun non-internasional atau domestik (*non-international armed conflict*) (ICRC, 2013). Hukum ini mencakup identifikasi dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik seperti aktor utama konflik, serta aktor-aktor lain yang termasuk masyarakat sipil, dan sebagian dari mereka yang menggunakan seragam pasukan bersenjata. Hukum ini juga mengatur senjata-senjata dan metode-metode yang diperbolehkan untuk digunakan oleh aktor utama konflik.

Meski demikian, konteks konflik bersenjata pada tahun 1949 dengan yang berlaku pada masa kini jauh berbeda. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mendorong terciptanya teknologi militer yang kemudian juga mendorong evolusi dalam penyusunan strategi militer dalam menghadapi pihak lawan. Kecanggihan teknologi dan kemandapan strategi perang juga meningkatkan kebutuhan akan kedua elemen tersebut. Kebutuhan ini bahkan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik dalam rangka meminimalisir dampak konflik. Tantangan-tantangan

tersebut adalah berkembangnya perang siber yang tidak terbatas pada peperangan intelijen yang juga dapat menyerang sistem energi (listrik) maupun fasilitas kesehatan serta air minum (ICRC, 2013). Contoh tantangan lain adalah pesawat tanpa awak dan pengembangan *nanotechnology* (ATHA, 2014) yang dapat memperkuat teknologi pertahanan dan penyerangan beserta mobilitasnya (Nasu, 2012: 656), serta senjata otomatis lainnya. Selain itu, tantangan lain muncul dari kehadiran aktor selain yang secara jelas teridentifikasi dalam IHL, yaitu perusahaan swasta militer dan keamanan (*private military and security companies*/PMSCs) yang didorong oleh upaya privatisasi dalam konflik (del Prado, 2010).

Kehadiran aktor baru ini tidak saja mengundang diskusi, tetapi juga perdebatan mengenai upaya penegakan hukum humaniter internasional, terutamanya sejak berlaku berbagai pelanggaran kemanusiaan di kawasan konflik terkait keberadaan PMSC. PMSC pada dasarnya merupakan sebuah perusahaan komersil yang bergerak dalam bidang militer dan keamanan yang disewa sebagai bentuk *outsourcing* atas kebutuhan militer dan keamanan yang tidak mudah dimiliki secara kualitas, kuantitas maupun biaya. Maka, secara ideal, aktor ini seharusnya membantu aktor utama konflik yang menyewa jasanya dalam rangka menstabilkan keamanan. Kontribusi positif aktor ini memang terlihat dari perannya sebagai jasa perlindungan bantuan serta personil kemanusiaan, perlindungan masyarakat sipil, penyedia jasa intelijen, hingga jasa perlindungan personil militer (Kinsey, 2006: 94-110; del Prado, 2013). Namun, aktor ini juga ternyata terbukti memperburuk kondisi konflik dengan menyebabkan kematian masyarakat sipil. Sebagai contoh yang populer adalah insiden oleh personil Blackwater pada tahun 2007 di Baghdad yang menewaskan 17 warga sipil (The New York Times, 2007).

Dinamika konflik bersenjata kontemporer juga mendapatkan tantangan dari berkembangnya istilah dan teori perang generasi ke-empat (*fourth generation warfare*/4GW). Berbagai pihak, termasuk pihak militer, memandang bahwa 4GW secara konsep dan teori

mampu menggambarkan konteks konflik kontemporer yang berbeda dari konflik bersenjata sebelumnya (Corn, 2006; Murden, 2007: 97-211; Khan dan Kiran, 2012: 89-109). Generasi perang ini mencoba menjelaskan karakter asimetris dan psikologis dalam konflik bersenjata pada masa kini yang didominasi oleh sisi perang di antara pemerintah sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam negara dan kelompok dalam masyarakat negara itu sendiri. Namun, pada saat yang sama, terdapat pihak yang tidak sepakat dengan 4GW secara teoritis (Echevarria II, 2005; Khan, 2010; Williamson, 2009: 8-13). Bagaimanapun, para pengkaji konflik tentu tidak bisa meniadakan variabel ini mengingat masih berkembangnya proses adaptasi teori tersebut di kalangan para militer. Lebih lanjut, karakter asimetris dan psikologis serta elemen penggunaan media-media baru dalam perang merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam menjelaskan perkembangan konflik non-internasional kontemporer.

Relevansi di antara variabel konflik, 4GW dan PMSC kemudian dapat dilihat dari pencapaian tujuan 4GW itu sendiri. PMSC secara konseptual dapat memberikan kontribusi dan dampak berupa mengurangi keinginan lawan untuk berperang atau *deterrence* (Yuniasih dan Hartono, 2013: 144-160). Hal ini akan lebih lanjut dijelaskan dalam bagian Kerangka Pemikiran. Tulisan ini menganalisa kehadiran perusahaan swasta militer dan keamanan dalam dinamika penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata kontemporer non-internasional terkait tren perang generasi keempat. Adapun kawasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini adalah didasarkan pada kawasan operasi utama ICRC sebagai badan yang menerima mandat untuk menegakkan implementasi IHL dan didasarkan pada kajian eskalasi konflik oleh International Crisis Group sehingga akhir tahun 2014. Di antara negara-negara tersebut adalah Libanon, Somalia, dan Ukraina (ICRC, 2015). Ketiga negara jarang menerima perhatian pemberitaan terkait PMSC, tanpa keluar dari batasan kawasan-kawasan yang dinilai penting dalam aktivitas kemanusiaan. Presiden ICRC

menyatakan bahwa kegagalan solusi untuk krisis yang melibatkan kekerasan bersenjata di wilayah termasuk Timur Tengah, sub-Sahara Afrika dan Ukraina telah menghabiskan 1.5 miliar Francs Swiss atau setara dengan 1 miliar Poundsterling dalam operasi kemanusiaan (Jones, 2015). Adapun kehadiran PMSC di negara-negara tersebut akan diamati sejak tahun 2009 hingga pertengahan 2014. Pemilihan periode ini mengingat kesepakatan 17 negara dalam Dokumen Montreux pada tahun 2008 yang menegaskan kembali kewajiban-kewajiban negara atas PMSC dan PMSC secara ideal.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tulisan ini menganalisa dinamika indikator-indikator dan hubungan yang termasuk dalam ruang lingkup IHL yang berkaitan dengan PMSC dan 4GW. Dalam memahami dan mendiskusikan IHL, maka tulisan ini menggunakan konsep hukum internasional. 4GW sebagai konsep dan teori, serta konsep konflik bersenjata non-internasional, terutama kaitannya dengan IHL, akan digunakan dalam memahami konflik kontemporer. Sedangkan dalam menganalisa PMSC, penulis akan menggunakan PMSC sebagai sebuah konsep.

Sebagai karakter dalam konflik kontemporer, perang generasi keempat atau 4GW merujuk pada sifat konflik yang asimetrik, dimana tidak adanya keseimbangan antara sumber dan filosofi pertempuran dan tidak hanya menyerang kekuatan militer tetapi juga secara langsung menyerang budaya, politik atau masyarakat (Yuniasih dan Hartono, 2013). Pengembangan teknologi komunikasi dan transportasi dalam era globalisasi merupakan salah satu faktor yang menyumbang kedinamikan perubahan kepada karakter konflik kontemporer tersebut. Kemajuan teknologi yang semakin cepat dan melintasi batas-batas negara memudahkan penyebaran ideologi dan budaya hampir tanpa halangan. Pada saat yang sama, liberalisasi pada berbagai sektor menyebabkan kemajuan ini tidak lagi eksklusif dimiliki dan dinikmati oleh negara. Oleh karena itu, negara tidak lagi memonopoli bahkan mendominasi konflik kontemporer (Lind, 2004: 13),

aktor-aktor non-negara seperti teroris dan pemberontak (bahkan tentara bayaran) pada perkembangannya memiliki kemampuan yang setara dengan pasukan nasional (Echevarria II, 2005: 5). Akhirnya konteks konflik kontemporer juga mencakup sulitnya pembedaan antara sipil dan militer (Lind, *et. al.*, 1989: 23). Lebih lanjut, kemudahan komunikasi juga menjadi faktor pendukung terciptanya jaringan yang luas bagi aktor-aktor non-negara.

Dalam rangka menghadapi kompleksitas konflik kontemporer ini, diperlukan strategi yang berbeda dari perang konvensional. Penggantungan kepada kekuatan militer pada akhirnya semakin berkurang meski bukan hilang sama sekali (Cannon, 2015: 45). Strategi penyerangan yang dominan adalah dengan mengurangi atau menghilangkan keinginan pihak lawan untuk memulai serangan (Lind, *et. al.*, 1989). Di sini, dapat dilihat bahwa ada upaya untuk menciptakan sebuah daya tangkal atau *deterrence* dalam 4GW. *Deterrence* tidak lagi hanya bergantung pada teknologi senjata api tetapi juga pada penggunaan ideologi dan moralitas. Pihak yang lemah dalam konflik asimetris akan lebih mungkin memenangkan perang ketika juga mampu menjatuhkan moral pihak yang lebih kuat. Selain tidak memerlukan kekuatan fisik yang besar, kemajuan teknologi memungkinkan implementasi strategi non-konvensional ini secara cepat dan tidak mudah tercatat atau terlacak. Namun, dalam mediumnya, aktor konflik tidak lagi bisa bergantung pada kepemilikan teknologi oleh media massa ataupun jaringan sosial dalam menyebarkan propaganda, tetapi juga bahkan pada pihak lain seperti PMSC yang memang merupakan aktor dalam sektor keamanan.

PMSC sendiri dapat didefinisikan sebagai entitas bisnis swasta yang menyediakan jasa profesional militer ataupun keamanan, sehingga berhubungan erat dengan peperangan (ICRC, 2009: 9; Singer, 2001: 1). Adapun ruang lingkup pergerakan perusahaan ini adalah dalam hal penyediaan keterampilan militer yang meliputi operasi taktik tempur, perencanaan strategis, pengumpulan data intelijen dan analisis, dukungan operasional, pelatihan pasukan, dan bantuan teknis militer. Perusahaan ini juga bertanggung jawab untuk

hal-hal penting lainnya seperti mempersiapkan bahan bakar untuk kendaraan militer, mempersiapkan amunisi, dan peralatan militer untuk tentara negara (Terlikowski, 2008: 43). Variasi jasa tersebut kemudian menentukan karakter personel dalam perusahaan ini. Sebagian besar personel dari PMSC merupakan mantan pasukan khusus (Miller, 2006: 227).

Perusahaan ini semakin berkembang karena adanya kebutuhan yang meningkat dalam pasar global terhadap keamanan. Isu-isu keamanan non-tradisional banyak berlaku di negara-negara baru merdeka akibat kerentanan stabilitas politik yang diiringi oleh ketidakmampuan negara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka, masyarakat sipil, dalam hal ini adalah PMSC, dilibatkan dalam perang untuk mengemban tugas-tugas militer. Meskipun dalam mencapai keberhasilan pada misi yang dijalankannya, PMSC melengkapi dirinya dengan senjata yang bersifat konvensional, akan tetapi setiap tindakan PMSC dibatasi oleh beberapa regulasi. Regulasi yang mengatur tindakan dari PMSC meliputi regulasi militer negara asal, negara pengontrak, dan hukum internasional dimana PMSC boleh menembak hanya untuk membela diri. PMSC boleh merespon serangan, tapi tidak memulainya. Akan tetapi, pada implementasinya PMSC sering menembak terlebih dahulu, sebab pemberontak kerap kali mengemudikan mobil yang memuat bahan peledak ke konvoi PMSC yang sedang mengantar bahan logistik (Miller, 2006: 232). Dalam situasi yang kritis seperti itu PMSC hanya memiliki waktu beberapa detik untuk memutuskan, apakah kendaraan yang mendekat itu dikendarai pemberontak atau warga sipil.

Bagaimanapun, secara praktis, PMSC tidak memiliki pedoman yang jelas, karena negara asal mereka selalu menyangkal bertanggung jawab atas tindakan-tindakan PMSC (Severin, 2012: 3). Meskipun kerap melakukan pelanggaran, akan tetapi PMSC menghindari pemeriksaan lantaran mereka bekerja di wilayah abu-abu. PMSC sendiri berpendapat seharusnya mereka diadili di negara mereka sendiri (Miller, 2006: 237). Hal itu tentunya

memberikan kekebalan kepada PMSC dari pengadilan lokal, tapi tidak mewajibkan negara asal atau negara mana pun memproses tuntutan. Pada perkembangannya, persoalan terbesar menyangkut PMSC adalah rendahnya akuntabilitas karena tuntutan untuk menyelesaikan atau membuat misi mereka berhasil sesuai kontrak (Miller, 2006: 237).

Telah ada hukum perang yang berlaku untuk konflik internasional maupun konflik non-internasional. Hukum perang ini lebih populer dikenal sebagai hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/ IHL*). Hukum internasional sendiri didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan prinsip yang dapat diaplikasikan secara umum yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, organisasi internasional, dalam hubungan internasionalnya antara yang satu dengan yang lainnya serta dengan individu, kelompok minoritas dan perusahaan transnasional (Beckman dan Butte, 2015). Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai hukum antar negara-bangsa yang berdaulat (*sovereign nation-states*) dalam konteks hukum perang, perdamaian dan keamanan, dan perlindungan wilayah (Vinopal, 2013). Definisi di atas pada tataran kontemporer kemudian meluas melibatkan aktor non-negara pada level individu, maupun kelompok. Perluasan juga pada akhirnya berlaku dalam hal ruang lingkup, membentuk cabang-cabang dalam hukum internasional, salah satunya adalah hukum humaniter internasional.

Terkait dengan hukum humaniter internasional, hukum internasional juga dihubungkan dengan konsep keamanan manusia (*human security*). Konsep ini digunakan sebagai titik acuan bagi negara dan organisasi internasional untuk menyusun agenda aksi dimana bertujuan meningkatkan tingkat keamanan individu yang ada dunia (Tigerstorm, 2006). Pada tulisan ini, tentu saja individu yang dimaksudkan adalah warga sipil yang berada dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Maka, hukum humaniter internasional secara ideal harus mampu menjaga keamanan warga sipil ketika masa-masa konflik bersenjata non-internasional masih berlangsung. Secara mandat, IHL ditegakkan oleh ICRC.

Dalam hukum humaniter internasional disebutkan bahwa konflik bersenjata non-internasional sebagai konflik bersenjata yang tidak memiliki karakter internasional berlaku dalam wilayah salah satu pihak yang telah menandatangani atau meratifikasi konvensi (Konvensi Jenewa I, 1949; Cullen, 2010). Maka, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan warga sipil oleh hukum humaniter internasional, baik keempat Konvensi Jenewa maupun ketiga Protokol Tambahnya, hanya berlaku bagi konflik bersenjata yang berada dalam teritori negara-negara tertentu saja. Oleh karena itu, ketika sebuah negara yang menderita konflik internal tidak menandatangani apalagi meratifikasi hukum ini, maka ICRC tidak dapat melaksanakan penegakan IHL di negara tersebut.

Terkait konflik non-internasional, pasal 3 yang merupakan bagian khusus bagi konflik non-internasional secara umum mengatur 2 (dua) hal (ICRC, 2013). Yang pertama adalah perlakuan yang manusiawi wajib diberikan kepada mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam permusuhan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah menyerah atau sakit, terluka, ditawan atau penyebab *hors de combat* lain, tanpa melihat ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan atau kriteria serupa lainnya. Adapun yang termasuk dalam perlakuan tidak manusiawi adalah kekerasan terhadap hidup atau personal, penyanderaan, penghinaan terhadap kehormatan personal, terutama perlakuan yang memalukan dan merendahkan, pemberian dakwaan atau hukuman tanpa pengadilan. Yang kedua adalah bahwa mereka yang terluka dan sakit harus dibawa dan dirawat.

Protokol Tambahan Kedua kemudian berkembang dan melengkapi Pasal Ketiga Konvensi Jenewa (ICRC, 2013). Protokol ini juga merupakan protokol yang melindungi korban konflik-konflik yang tidak tercantum dalam Protokol Tambahan Pertama, yang mengatur konflik internasional. Protokol Tambahan Kedua ini menambahkan beberapa kondisi tambahan yang termasuk ke dalam kategori perlakuan tidak manusiawi, yaitu hukuman kolektif, tindakan

terorisme, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun, penjarahan atau perampokan, dan ancaman untuk melakukan tindakan apapun atau tindakan serupa yang termasuk dalam kategori perlakuan tidak manusiawi.

Protokol ini juga melindungi anak-anak dengan menegaskan terpenuhinya perawatan dan bantuan berupa pendidikan termasuk pendidikan rohani dan moral, pelayanan untuk berkumpul kembali dengan keluarga, perlindungan bagi mereka yang berumur kurang dari 15 tahun dari perekrutan sebagai angkatan bersenjata, perlindungan bagi mereka yang berumur kurang dari 15 tahun dan telah terekrut dalam angkatan bersenjata termasuk jika tertawan, pemindahan lokasi dari area konflik kepada kawasan yang lebih aman di dalam negara dan bersama dengan pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, perlindungan juga diberikan bagi mereka yang ditawan (*persons whose liberty has been restricted*) selama dalam penahanan, para penjahat perang dalam hal dakwaan pidana, mereka yang terluka, sakit dan terdampar akibat kapal karam, dan tentu saja masyarakat sipil. Adapun penting untuk menjelaskan bahwa populasi atau masyarakat sipil di sini tidak hanya meliputi manusia sipil itu sendiri tetapi juga objek-objek yang menjamin keberlangsungan hidup warga sipil, pekerjaan atau instalasi berbahaya seperti bendungan, pusat pembangkit listrik tenaga nuklir dan sejenisnya, bahkan fasilitas militer yang jika diserang akan membahayakan warga sipil, objek budaya dan tempat ibadah. Protokol ini juga melarang adanya pemindahan warga sipil dengan paksa.

Maka, dalam menganalisis dinamika penegakan hukum humaniter internasional, tim penulis akan menggunakan bagian-bagian yang mengatur konflik non-internasional. Dinamika penegakan akan dilihat pada sisi sejauh mana kehadiran PMSC membantu penegakan hukum humaniter internasional atau pada sebaliknya malah menjadi kelemahan bagi penegakan hukum tersebut.

Tulisan mengenai kehadiran PMSC ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat

eksplanatif yang memungkinkan analisis bersifat kasuistik berdasarkan konteks konflik yang beragam dan dinamis. Maka, data yang dicari lebih kepada perbedaan-perbedaan (*'different examples of'*) yang menunjukkan variasi data dalam rangka menunjang sisi manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Harrison, 2001: 74-75). Data sekunder, baik secara tertulis ataupun dalam bentuk virtual (video), merupakan data utama yang diolah dan dianalisa dalam tulisan ini. Data diolah menggunakan *discourse* dan *content analysis*. Teknik yang pertama merupakan tipe analisis yang bersifat kualitatif yang mengeksplorasi cara-cara diskursus atas sebuah topik, memberikan legitimasi dan makna bagi praktik dan organisasi sosial. Teknik ini memungkinkan analisa dilakukan ke atas "teks" yang tertulis, tersampaikan dan terlihat, secara parsial dan secara komprehensif dengan mengaitkannya dengan konteks yang berlaku. Sedangkan, teknik yang kedua digunakan untuk menginterpretasi teks dengan tujuan menguak makna, motif dan tujuan yang terkandung dalam teks tersebut (Halperin dan Heath, 2012: 309-310).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang pertama adalah identifikasi kehadiran PMSC di Ukraina, Libanon dan Somalia. Kehadiran PMSC di Ukraina telah tercatat sejak 20 tahun silam diwakili dengan adanya G4S, PMSC Inggris (Morgenstern, 2015). Selain itu, di Ukraina juga telah terdapat PMSC lain seperti yang berasal dari Amerika Serikat seperti Frontier Horizons, Global Protection Agency Ltd, serta PMSC lainnya dari Amerika Serikat (AS) (Morgenstern, 2015). Terkait dengan konflik di Ukraina, kehadiran PMSC baru banyak dibicarakan pada awal tahun 2014.

Pada April 2014, media memberitakan bahwa pemerintah Ukraina berupaya untuk mengontrak Greystone Ltd., sebuah PMSC AS untuk menekan para demonstran di wilayah timur (Rogulin, 2014). PMSC ini kemudian bertanggung jawab dalam pencarian politis dan perlindungan keamanan negara karena ketidakmampuan agen keamanan Ukraina untuk menghadapi pemimpin dan aktivis gerakan pro-

Rusia. Greystone Ltd. merupakan PMSC yang berdomisili di Barbados yang telah mandiri terpisah dari Academi pada tahun 2010. Bagaimanapun, klaim Rusia bahwa Greystone Ltd. telah disewa oleh pemerintah Ukraina dalam menghadapi gerakan pemisah di timur dibantah oleh PMSC tersebut (Radia, *et. al.*, 2014).

Pada 27 Februari 2015, CyberBerkut merilis surat dari PMSC AS bernama Green Group kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ukraina Muzhenko pada 15 Februari 2015 atau 3 hari setelah Perjanjian Minsk ditandatangani (Novoseltsev, 2015). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Ukraina sendiri telah memulai pembicaraan mengenai suplai senjata sejak pertengahan tahun 2014. Laporan lain menyatakan bahwa hingga Agustus 2014, tidak ditemui keterlibatan para PMSC Ukraina dalam membantu pemerintah Ukraina menghadapi krisis. Adapun Albatross dan Group Vega yang merupakan PMSC Ukraina hanya dikontrak sebagai pihak keamanan transportasi laut, yang sebagian besarnya atas kapal-kapal asing (Morgensten, 2015). Namun, sejak diunggahkannya video yang menunjukkan adanya pasukan yang tidak teridentifikasi di kota-kota wilayah timur Ukraina pada Maret 2014, terdapat spekulasi bahwa PMSC barat telah hadir dalam konflik di Ukraina timur (Gayle, 2014). Adapun PMSC yang dicurigai adalah Academi (pada awalnya bernama Blackwater).

Kehadiran PMSC dalam konflik di Ukraina juga telah ada di Krimea selatan yang telah dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia. Rusia menyatakan bahwa pasukan bersenjata yang menguasai kawasan tersebut merupakan personel PMSC Vnevedomstvenaya Okhrana, biro kontraktor keamanan swasta di bawah Kementerian Dalam Negeri Rusia, meskipun beberapa diplomat lainnya menyatakan pasukan tersebut merupakan paramiliter yang tidak secara spesifik milik biro tersebut (Rogin, 2014).

Di Libanon, jumlah PMSC pada tahun 2011 mencapai 40 perusahaan (Collombier, 2011: 13-19). Sebagian merupakan perusahaan asing, seperti G4S Lebanon, Protectron, Patrick Security, dan American System Corp. Sebagian lainnya merupakan perusahaan

lokal seperti Zed Security, SCAP, Pro.Sec Lebanon dan Secure Plus (namun Secure Plus dibubarkan pada tahun 2009) (Columbier, 2011: 13-19). Di Libanon, sebagian besar PMSC disewa untuk menjaga kedutaan-kedutaan besar (Caroll, 2007). PMSC juga sebagian besar disewa oleh para elit, dari berbagai kelompok, untuk menjaga areal perumahan mewah seperti Saifi Village di Beirut (Mikdashy, 2012) dan hiburan seperti klub malam (BBC News, 2011). Pada tahun 2012, American System Corp. juga telah membantu melatih pasukan Libanon di Beirut (Lamothe, 2015).

Di Somalia, terdapat dua PMSC utama yaitu Bancroft Security Development asal AS dan Saracen International asal Afrika Selatan yang dikontrak oleh AS untuk melatih pasukan Somalia (Arman, 2012). Kedua PMSC tersebut tentu saja di luar dari PMSC lain yang kemudian disewa dalam mengamankan wilayah Somaliland dan Puntland. Keduanya di luar mereka yang tergabung dalam Puntland Maritime Police Force. Pasukan keamanan tersebut terdiri dari puluhan personel PMSC berkebangsaan Afrika Selatan tanpa dinyatakan dengan spesifik hanya berasal dari Saracen International (Mazzetti dan Schmitt, 2012).

Pada tahun 2012, UN SEMG (*Somalia and Eritrea Monitoring Group*) telah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Saracen International telah melakukan penyiksaan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap tentara Somalia selama latihan (Powell, 2012). Juga dikarenakan adanya pelanggaran embargo senjata, PMSC ini mendapat sanksi pemutusan kontrak terkait jasa anti-pembajakan. Kehadiran PMSC di Somalia juga ada dengan hadirnya kapal-kapal dagang asing yang mendapatkan ancaman dari aktivitas pembajakan di perairan internasional sekitar Somalia. Sebagai contoh adalah perdebatan mengenai keterlibatan PMSC di kapal-kapal dagang berkebangsaan Jerman yang melalui wilayah perairan internasional (Knight, 2011).

The Future Current yang mewakili kaum Sunni membentuk sebuah PMSC bernama Secure Plus dalam rangka melindungi para pemimpinnya dibanding membentuk sebuah kelompok milisia. Hal ini mengingat pembunuhan tokoh-tokoh penting

terkait insiden 14 Maret selama tahun 2005 hingga 2007 (ICG, 2010: 13). Sejak tahun 2010 hingga 2011, PMSC Bancroft di Somalia telah mendapatkan kontrak sebesar 7 juta Dollar AS untuk pelatihan tentara Uganda dan Burundi dalam rangka mengatasi insurgensi di Somalia (Gettleman, 2011). Untuk menjaga kapal-kapal dagang yang melalui Samudra Hindia yang sering diwarnai dengan pembajakan oleh warga kebangsaan Somalia, sebagian PMSC hanya mempekerjakan mantan marinir atau pasukan khusus (Apps, 2012). Terdapat peningkatan penawaran jasa PMSC kepada jasa penjagaan perdamaian oleh Uni Afrika untuk Somalia (AMISOM), pemerintah transisi (TFG) dan pemerintah pusat (sejak akhir tahun 2012), serta pemerintahan Puntland.

Hasil yang kedua berkaitan dengan relevansi ketiga negara dengan Dokumen Montreux. Di antara ketiga negara fokus tulisan, hanya Ukraina yang termasuk dalam negara partisipan Dokumen Montreux bahkan sehingga finalisasi dokumen tersebut. Ukraina tidak hanya menjadi *territorial states* tetapi juga berpotensi sebagai *home* dan *contracting states*. Terkait regulasi ke atas PMSC di Ukraina, sehingga tulisan ini disusun, tim peneliti belum menemui adanya peraturan khusus pada level nasional. Pada tahun 2008, Ukraina telah tercatat melakukan upaya untuk menganeksasi beberapa butir kesepakatan antara pihak negara anggota dan para PMSC yang dicapai dalam Pertemuan PMSC ke-19 di Skopje pada 15-16 April 2008 (SEDM-CC/PMSC, 2008).

Terkait regulasi di Libanon, izin kepada PMSC diberikan sesuai dengan hukum di Libanon. Pengawasan juga dilakukan di bawah pasukan keamanan Libanon. Oleh karena itu, pelanggaran akan dikenakan kontrak litigasi sesuai hukum di negara ini (BBC Monitoring Middle East, 2007). Untuk regulasi di Somalia, peneliti tidak menemukan satu hukum spesifik yang mengatur kinerja PMSC di Somalia. Adapun sanksi yang pernah diberikan kepada PMSC adalah kepada Saracen Internasional berupa pemutusan kontrak karena melanggar embargo senjata internasional yang telah ditetapkan oleh PBB (Powell, 2012).

Hasil yang ketiga adalah bahwa penulis tidak mendapati data mengenai aspek personel PMSC yang terluka akibat konflik di ketiga negara, baik mereka yang pada akhirnya terlibat sebagai kombatan (menjadi anggota pasukan keamanan negara) maupun masih memiliki status sebagai masyarakat sipil atau non-kombatan (disewa oleh aktor non-partisan konflik). Maka, pada bagian pembahasan, peneliti tidak dapat memberikan pengukuran lebih lanjut analisa kehadiran PMSC terhadap penegakan IHL pada klausa yang melindungi warga sipil ataupun klausa yang melindungi kombatan yang terluka. Masih berkaitan dengan variabel 4GW, peneliti juga tidak mendapatkan data mengenai keterlibatan PMSC dalam pengumpulan data intelijen keamanan, serta pengoperasian teknologi canggih selama konflik.

IHL merupakan hukum internasional yang memiliki fungsi utama tidak hanya mengatur melaksanakan perang, tetapi yang terpenting adalah melindungi korban perang terutama masyarakat sipil. Terkait konflik yang bersifat non-internasional, IHL mengatur para pihak yang terlibat konflik di bawah Pasal 3 Konvensi Geneva dan di bawah Protokol Tambahan Kedua yang mengatur perlindungan bagi korban konflik non-internasional. Sebelum membahas dinamika penegakan IHL terkait kehadiran PMSC, maka penting untuk membahas mengenai instrumen legal internasional yang mengatur kinerja PMSC, yang nantinya akan membantu penegakan IHL, yaitu Dokumen Montreux. Oleh karena itu, analisa atas kehadiran PMSC terhadap penegakan IHL pada konflik bersenjata non-internasional di Ukraina, Libanon dan Somalia dapat dilihat dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah berdasarkan konteks negara tempat PMSC beroperasi, PMSC, negara asal PMSC, dan negara pengontrak operasi dalam regulasi nasional dan internasional. Aspek yang kedua adalah berdasarkan konteks peran PMSC sebagai penyeimbang kekuatan antar aktor dalam konflik. Aspek yang terakhir adalah berdasarkan konteks PMSC sebagai entitas ekonomi.

Dokumen Montreux merupakan sebuah dokumen yang bertujuan untuk mempromosikan penghormatan

terhadap IHL dan hukum hak asasi manusia internasional kapanpun PMSC hadir dalam konflik bersenjata (ICRC, 2009: 32). Dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar negara dan bersifat *intergovernmental*. Penyusunan dokumen ini ditujukan kepada negara untuk mengatur kinerja PMSC baik di negara asal (*home states*) maupun di wilayah operasional (*territorial states*). Dokumen ini pada dasarnya merupakan panduan agar operasi PMSC tidak bertentangan dengan IHL dan hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*). Selain PMSC, negara asal dan wilayah operasional, terdapat 2 (dua) jenis negara yang diatur di bawah dokumen ini, yaitu negara pengontrak (*contracting states*) sebagai negara yang menyewa jasa PMSC termasuk dimana terjadi subkontrak antar PMSC, dan negara lainnya (*all other states*). Hingga tulisan ini disusun, baru 52 negara dan 3 organisasi internasional yang secara jelas berpartisipasi dalam Dokumen Montreux. Pada 9 November 2010, 58 PMSC menandatangani International Code of Conduct yang menetapkan aturan dasar terkait kinerja PMSC (Hagedorn, 2014: 163). Adapun aturan dasar tersebut meliputi aturan dalam rangka seleksi dan pelatihan personil. Selain itu, aturan dasar ini juga mengatur pelaporan insiden, penggunaan kekerasan (*use of force*), pengilegalan penyiksaan, serta pelarangan aktivitas perdagangan manusia.

Oleh karena itu, dinamika penegakan IHL yang pertama kemudian dapat didasarkan pada potensi dan tantangan yang muncul dari konteks partisipasi negara dan PMSC yang terlibat dalam konflik dalam Dokumen Montreux. Potensi penegakan IHL pada keterkaitannya dengan Dokumen Montreux dapat dilihat dalam kasus konflik di Ukraina. Seperti telah dijelaskan pada bagian hasil, Ukraina merupakan negara partisipan Dokumen Montreux. Lebih lanjut, Ukraina telah melakukan upaya untuk menganeksasi beberapa butir dalam dokumen tersebut. Upaya yang dilakukan Ukraina tentu saja berpotensi bagi peningkatan penghormatan bagi penegakan hukum humaniter internasional di wilayah tersebut. Pada

bagian hasil juga telah disebutkan bahwa antara PMSC yang ada di Ukraina adalah G4S asal Inggris dan PMSC lain asal Amerika Serikat. Dengan partisipasi negara-negara asal PMSC tersebut dalam Dokumen Montreux, maka secara minimal telah terdapat komitmen negara-negara tersebut dalam penegakan IHL dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Namun, perbedaan hasil pada kasus Libanon dan Somalia memberikan tantangan bagi penegakan IHL. Hal ini didasarkan pada peraturan dalam Dokumen Montreux.

Secara umum, dokumen yang berisikan 27 poin tersebut mempertegas kewajiban kelima subjek hukum untuk menghormati IHL dan hukum hak asasi manusia internasional. Selain kewajiban di atas, bagi keempat tipe negara, persamaan kewajiban tersebut dipaparkan dalam 3 (tiga) pasal lainnya. Pertama, negara bertanggung jawab untuk mengimplemetasikan kewajibannya terhadap IHL. Kewajiban ini termasuk mengadopsi peraturan serupa dan upaya lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban tersebut (poin 4, 10, 15, dan 19). Kedua, negara memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan, pelanggaran Konvensi Jenewa dan, jika berlaku, Protokol Tambahan 1, dan kewajiban untuk menjadi orang-orang yang dituduh melakukan atau memerintahkan pelanggaran tersebut serta membawa orang-orang tersebut, apapun kebangsaannya ke depan pengadilan lokal. Negara diperbolehkan menyerahkan orang-orang tersebut, jika berkeinginan dan sesuai dengan perundangan lokal yang berlaku, kepada pengadilan di negara lain yang terkait yang mampu mengajukan *prima facie case*,¹ atau kepada pengadilan kriminal internasional (poin 5, 11, 16, dan 20).

Persamaan yang terakhir bagi keempat jenis negara adalah bahwa negara berkewajiban melakukan penyelidikan dan, seperti halnya sesuai dengan hukum internasional atau dianggap perlu, mengadili, mengekstradisi atau menyerahkan orang-orang yang merupakan tersangka telah melakukan kejahatan lain

di bawah hukum internasional. Pengadilan serupa diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional secara adil, dengan memperhatikan bahwa sanksi disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan (poin 6, 12, 17, dan 21).

Kemudian, terdapat persamaan kewajiban yang kemudian dimiliki oleh negara pengontrak, negara asal dan negara operasi. Persamaan kewajiban dari ketiga negara ini adalah ketiga negara wajib menggunakan kemampuannya untuk memastikan bahwa PMSC menghormati IHL dengan cara tidak mendukung atau membantu, dan menggunakan langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah pelanggaran IHL oleh personel PMSC dan dengan memberlakukan langkah-langkah untuk menekan pelanggaran IHL oleh personel PMSC melalui cara-cara yang sesuai seperti peraturan militer, peraturan administratif dan regulasi lainnya seperti upaya yang bersifat administratif, sanksi disipliner atau pengadilan jika diperlukan (poin 3, 9, dan 14, masing-masing pada butir 2 dan 3).

Secara rinci, tentu saja tetap terdapat perbedaan kewajiban kepada setiap aktornya. Penjelasan dalam dokumen ini dimulai dari negara pengontrak. Tim peneliti melihat bahwa tentu saja penetapan penyebutan kewajiban negara pengontrak pada awal dokumen adalah krusial mengingat PMSC tidak dapat beroperasi jika tidak disewa. Maka, kewajiban utama terletak pada negara pengontrak.

Perbedaan pertama terletak pada kewajiban negara pengontrak untuk mempertahankan kewajibannya kepada hukum internasional meskipun PMSC dikontrak untuk menjalankan aktivitas tertentu. Jika negara berkuasa, maka kewajiban juga termasuk dalam menggunakan segala upaya dalam kekuasaannya untuk menciptakan, memastikan, sejauh mungkin, penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum. Negara pengontrak juga berkewajiban untuk tidak menyewa PMSC untuk menjalankan aktivitas yang secara eksplisit dimandatkan oleh IHL kepada sebuah agen negara atau pihak berwenang, sebagai contoh adalah menggunakan kekuasaan pejabat yang bertanggungjawab atas kamp tahanan perang atau pemukiman masyarakat sipil sesuai dengan Konvensi

Jenewa. Negara pengontrak juga berkewajiban untuk memastikan bahwa PMSC mengormati IHL dengan cara memastikan bahwa PMSC beserta personelnnya faham akan kewajiban mereka di bawah IHL dan dilatih sesuai dengan kewajiban tersebut.

Dokumen Montreux juga menegaskan bahwa meskipun hubungan kontrak tidak menciptakan kewajiban yang serupa, negara pengontrak bertanggungjawab atas pelanggaran IHL, hukum hak asasi manusia internasional, atau hukum internasional lain yang dilakukan oleh PMSC atau personelnnya ketika pelanggaran disebabkan oleh negara pengontrak, sesuai dengan (*customary international law*), jika PMSC atau personelnnya secara khusus memenuhi kriteria berikut. Pertama, jika digabungkan kepada tentara oleh negara sesuai dengan peraturan lokal. Kedua, jika menjadi anggota pasukan atau kelompok atau unit bersenjata terorganisir di bawah komando negara. Ketiga, ketika mereka diberikan kekuasaan untuk menjalankan wewenang elemen negara. Kriteria yang terakhir adalah jika mereka secara nyata beroperasi atas perintah, atau di bawah arahan atau kontrol negara.

Negara pengontrak juga diwajibkan menyediakan reparasi bagi pelanggaran IHL dan hukum hak asasi manusia internasional yang disebabkan oleh kesalahan personel PMSC ketika tindakan tersebut terkait dengan negara pengontrak sesuai dengan *international customary law* terkait kewajiban negara. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab negara pengontrak adalah besar, dan utama dibandingkan dengan tanggung jawab negara-negara lain dalam dokumen ini. Perbedaan selanjutnya terletak pada kewajiban dari negara lain (*all other states*) dimana negara wajib menahan diri dari mendorong atau membantu pelanggaran IHL oleh pihak manapun dalam konflik bersenjata.

Selanjutnya adalah kewajiban PMSC sebagai salah satu fokus dari tulisan ini (poin 22-26). PMSC wajib mematuhi IHL dan hukum hak asasi manusia yang diberlakukan kepada mereka oleh hukum nasional terkait dan hukum nasional lainnya seperti hukum kriminalitas, pajak, imigrasi, tenaga kerja dan peraturan spesifik terkait jasa militer dan keamanan

swasta. Hal ini penting mengingat subjek dari IHL dan hukum hak asasi manusia internasional adalah negara, kelompok, dan individu, bukan perusahaan. Personel PMSC juga wajib mematuhi hukum nasional yang relevan, terutama di negara operasi dan negara asal.

Status personel PMSC kemudiannya ditentukan oleh IHL per kasus yang secara khusus disesuaikan dengan sifat alami dan kondisi fungsi mereka, dan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini disesuaikan dengan interpretasi IHL oleh ICRC (ICRC, 2009: 36-37). Sebagian besar dari mereka memiliki status sebagai masyarakat sipil karena tidak tergabung dalam angkatan bersenjata meskipun mereka memegang senjata. Maka mereka wajib menjalankan kewajiban dan menerima perlindungan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Dalam Konvensi Jenewa, juga tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai masyarakat sipil yang menemani pasukan bersenjata, milisia ataupun kelompok sukarela, dalam konflik non-internasional. Yang diatur oleh Konvensi ini hanyalah mereka yang terlibat dalam konflik internasional mewakili salah satu negara aktor utama konflik. Jika fungsi mereka berubah kepada anggota resmi angkatan bersenjata, maka personel PMSC menjadi subjek dari IHL dan hukum hak asasi manusia internasional. Perlindungan kepada personil PMSC sebagai non-kombatan atau masyarakat sipil gugur apabila personil tersebut terlibat langsung dalam konflik. Dalam penjelasannya, ditegaskan pula bahwa hal ini mencakup partisipasi dalam operasi atau aktivitas pertempuran yang bertujuan melemahkan kapasitas militer musuh dan secara spesifik untuk mendukung satu pihak dalam konflik melawan lainnya, juga menjaga basis militer dari serangan musuh, mengumpulkan informasi intelijen militer taktis, dan mengoperasikan sistem senjata dalam operasi pertempuran.

Sedangkan, terkait dengan negara lain yang menjadi asal PMSC (*home states*) dan negara pengontrak (*contracting states*), terdapat beberapa yang kemudian akan dibahas dalam bagian ini, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, dan Jerman seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya (FDFA, 2015).

Partisipasi ke empat negara di atas dalam Dokumen Montreux pada dasarnya menunjukkan komitmen untuk mendukung penegakan IHL dan hukum hak asasi manusia internasional ketika PMSC yang terdaftar di negaranya atau negara lain beroperasi di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya.

Dengan partisipasi negara-negara asal PMSC tersebut dalam Dokumen Montreux, maka secara minimal telah terdapat komitmen negara-negara tersebut dalam penegakan IHL dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Meskipun demikian, keterlibatan pihak asing tidak menutup kemungkinan adanya penurunan aktivitas para aktor dalam konflik untuk menghormati IHL sebagai hukum perang.

Dinamika yang kedua berasal dari potensi dan tantangan penegakan pada aspek peran PMSC sebagai penyeimbang kekuatan antar aktor konflik dan dengan masyarakat sipil. Pada aspek ini, pembahasan akan relevan dengan karakter konflik yang asimetris serta *deterrence* dalam konsepsi 4GW. Konflik bersenjata non-internasional kontemporer tidak hanya bersifat simetris dalam artian horizontal, namun juga asimetris yaitu bersifat vertikal. Yang dimaksud dengan konflik horizontal atau simetris di sini adalah yang melibatkan dua kekuatan yang seimbang terutama dalam hal hierarki dan wewenang dalam sebuah negara. Oleh karena itu, konflik jenis ini merujuk pada konflik antara kaum atau kelompok dalam sebuah negara. Sebagai contoh dalam tulisan ini adalah konflik antar kelompok di Libanon (ICG, 2010; Collombier, 2011), serta konflik antara kelompok pembajak dan masyarakat sipil di Somalia (ICG, 2014; BTI 2014). Sedangkan, yang dimaksud sebagai konflik vertikal asimetris dalam tulisan ini merujuk pada konflik yang berlaku antara dua pihak yang memiliki kekuatan terutamanya wewenang yang berbeda. Sebagai contoh perbedaan wewenang adalah antara pemerintah dan masyarakat. Maka, dalam tulisan ini, konflik vertikal dan asimetris berlaku antara pemerintah Ukraina dan gerakan pemberontak, Somalia dengan kaum pembajak (ICG, 2014; BTI, 2014), serta antara pemerintah Lebanon dan kelompok-kelompok

masyarakat (ICG, 2010; Collombier, 2011).

Selain itu, mengingat bahwa tulisan ini juga akan membahas mengenai sisi 4GW dalam konflik bersenjata non-internasional kontemporer, maka, konflik asimetris juga merujuk kepada perbedaan kekuatan yang mendorong adanya kebutuhan di pihak masyarakat yang melawan pemerintah untuk memberdayakan strategi dan taktik yang di luar keumuman. Sebagai contoh dalam tulisan ini adalah bagaimana kelompok minoritas di Somalia yang tertekan dari segi ekonomi memilih untuk melakukan pembajakan ke atas kapal-kapal dagang asing (pihak sipil) di perairan internasional. Aktor-aktor dalam konflik bersenjata kontemporer berupa organisasi yang memiliki jaringan yang kuat (*networked organization*) seperti teroris dan entitas kriminal transnasional lainnya juga tidak perlu mempertahankan lokasi fisik (Godlewski, 2014: 29). Padahal, negara ataupun institusi keamanan secara formal memiliki kantor-kantor serta fasilitas-fasilitas lainnya sebagai aset mereka untuk dilindungi. Lebih lanjut, konflik asimetris di ketiga wilayah tersebut telah mengorbankan masyarakat sipil. Hal inilah yang kemudian secara ideal hendak dihindari dengan diberlakukannya IHL pada masa-masa perang. Kontribusi dan dampak IHL terhadap penegakan IHL pada tataran inilah yang juga perlu diperhatikan.

Pembahasan berikutnya akan fokus pada penggunaan kekuatan PMSC justru lebih menunjukkan upaya penyeimbangan kekuatan (*balance of power*) di antara aktor dalam konflik asimetris dibandingkan tujuan 4GW dalam mengurangi keinginan lawan untuk menyerang. Mengingat bahwa pasukan keamanan di ketiga negara tersebut terutama di Libanon dan Somalia tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka tidak mengherankan ketika tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat sipil, pada akhirnya menyewa jasa keamanan PMSC. Hal ini dapat dilihat dari penyewaan PMSC tidak hanya untuk membantu melatih pasukan, tetapi juga dalam menjaga kedutaan besar, para elit, areal perumahan mewah, bahkan tempat hiburan di Libanon. Meskipun demikian, hal ini tidak terlihat secara nyata pada kasus konflik di

Ukraina mengingat terdapat perbedaan klaim di Ukraina.

Pada kasus yang lain, kompetensi dan kapabilitas PMSC bukan saja membantu membentuk keseimbangan kekuatan dalam perang asimetrik, tetapi juga menurunkan tingkat korban sipil yang berarti mendukung penegakan IHL. Hal ini terlihat dalam kasus di Somalia dimana pelatihan tentara oleh PMSC pada akhirnya dapat memukul mundur milisia pada tahun 2011. Hal ini mampu menurunkan tingkat korban sipil melalui keberhasilan membujuk para tentara untuk tidak menyerang secara membabi buta di Mogashidu yang ramai. PMSC tersebut mengajarkan teknik penyerangan yang aman dan terarah. Hal ini tentu saja akan mengurangi tingkat korban warga sipil karena pihak pasukan keamanan sendiri akan lebih ahli dalam menyerang pihak musuh. Pada akhirnya, kesuksesan penurunan tingkat korban warga sipil juga disertai dengan potensi PMSC dalam meningkatkan *deterrence*. Hal ini ditunjukkan dengan data pada pertengahan akhir tahun 2012 dimana tidak terdapat serangan pembajakan (Bertelsmann Stiftung, 2014). Meskipun dalam hal ini pembajakan berada pada wilayah perairan internasional, bukan pada wilayah konflik (Somalia), namun, konflik internal merupakan salah satu penyumbang berlakunya pembajakan.

Pada saat yang sama, PMSC juga didapati menurunkan penegakan terhadap IHL. Pada kasus konflik di Somalia, ketika pembajakan berkurang, para pelaku pembajakan terlihat meningkatkan aktivitas penculikan relawan kemanusiaan dan warga sipil di daratan Somalia (Bertelsmann Stiftung, 2014). Penurunan juga terlihat dari adanya laporan UN SEMG pada tahun 2012 terkait pelanggaran HAM terhadap tentara Somalia oleh PMSC. Potensi penurunan penegakan juga dapat dilihat dari penemuan pelanggaran terhadap embargo senjata yang menyebabkan PMSC mendapatkan sanksi pemutusan kontrak. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana PMSC pada saat yang sama juga berpotensi meningkatkan pelanggaran IHL dengan tidak disengaja mengalihkan korban sipil kembali ke dalam wilayah

yurisdiksi, dan dengan sengaja menambah jumlah senjata. Seperti halnya sumber umum dan khusus kematian, kehadiran senjata akan meningkatkan potensi korban jiwa. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan perlindungan warga sipil yang diperjuangkan oleh IHL.

Selain itu, ketika kualitas personel PMSC mengalami penurunan, maka akan memberikan dampak negatif bagi penegakan IHL terutama dalam hal perlindungan masyarakat sipil. Pembubaran Secure Plus pada 2009 karena ketidakmampuan PMSC lokal ini untuk menjaga kelompok Sunni menekankan pentingnya penjagaan kualitas personel perusahaan jasa keamanan swasta. Perusahaan swasta yang memang dibentuk oleh kelompok tertentu ternyata menunjukkan ketidakmampuan perusahaan jasa ini untuk memberikan keamanan bagi pihak yang menyewa sehingga masih banyak warga Sunni yang menjadi korban konflik (ICG, 2014; BTI 2014). Hal ini bukan sekadar berhubungan dengan keberlangsungan kontrak. Namun, yang perlu dijadikan landasan adalah bahwa pihak penyewa dari perusahaan ini terutama di Libanon dan Somalia adalah warga sipil. Ketika perusahaan ini tidak mampu memberikan keamanan bagi warga sipil, maka, korban dari pihak sipil, yang ingin dihindari dengan penyelenggaraan IHL, justru akan bertambah. Dari pertimbangan di atas, maka penting untuk menekankan bahwa jenis konflik yang kemudian dihadapi oleh PMSC sebagai salah satu aktor dalam konflik harus dijadikan pertimbangan dalam untuk menyusun strategi dan taktik yang tepat pada konteks konflik asimetris yang rumit tersebut.

Pentingnya penyusunan strategi dan taktik yang komprehensif semakin meningkat mengingat pelibatan pihak eksternal dalam konflik asimetris di ketiga negara yang memiliki hubungan sebab-akibat yang erat dengan kehadiran PMSC. Konflik bersenjata non-internasional kemudian memiliki potensi sebagai penyebab adanya konflik bersenjata internasional. Kehadiran PMSC di Somalia juga ada dengan hadirnya kapal-kapal dagang asing yang mendapatkan ancaman dari aktivitas pembajakan di perairan internasional

sekitar Somalia. Sebagai contoh adalah perdebatan mengenai keterlibatan PMSC di kapal-kapal dagang berkebangsaan Jerman yang melalui wilayah perairan internasional dan video terkait pasukan tidak teridentifikasi di Ukraina Timur pada tahun 2014.

Kemudian, beberapa kasus mencerminkan pentingnya pengaturan kehadiran PMSC dalam fenomena pergeseran konflik dari terlimitasi di dalam yurisdiksi satu negara kepada perluasan sehingga melintas batas-batas negara. Sebagai contoh adalah keterlibatan Ethiopia dan Kenya dalam keamanan di Somalia (Arman, 2012), korelasi konflik di Suriah dan keterlibatan Iran dengan perkembangan konflik domestik di Libanon antara kelompok Syiah dan Sunni, serta keterlibatan tentara Cechnya dalam konflik antara pemerintah Ukraina dengan masyarakat pro-Rusia (Walker, 2015), serta Amerika Serikat (AS) dan NATO berupa upaya AS mengirimkan 290 tentara untuk latihan bersama dengan 900 tentara Ukraina di Yaroviv yang berdekatan dengan perbatasan ke Polandia pada April 2015 (Luhn, 2015). Melihat pelibatan wilayah perairan internasional, serta pelibatan negara tetangga dalam konflik domestik, maka, dapat disimpulkan pula bagaimana dimensi konflik domestik dapat meluas sehingga melibatkan pihak eksternal dan berpotensi menciptakan konflik internasional ketika terdapat PMSC asing.

Kemudian, sisi ideologis yang seringkali turut mewarnai perspektif dalam aktor-aktor yang terlibat dalam konflik seperti agama juga merupakan salah satu karakteristik dari konflik kontemporer yang erat kaitannya dengan tren 4GW. Tidak jarang sisi ideologis inilah yang mampu menjadi pendorong kegigihan aktor yang berkonflik untuk mengekalkan perjuangannya dalam konflik, seperti halnya pada konflik sektarian antara kaum Sunni dan Syiah di Libanon yang melibatkan The Future Current dan Secure Plus.

Relevansi kehadiran PMSC terhadap penegakan IHL juga dapat dikaji pada aspek posisinya sebagai entitas ekonomi penyedia jasa profesional dalam bidang keamanan. merupakan sebuah perusahaan komersil sehingga pada dasarnya, pertimbangan

rasional dalam artian upaya menjaga agar perusahaan mendapat keuntungan (*benefit* lebih besar dari *cost*) perlu dipertahankan, terlepas dari kewajiban memberikan jasa pengamanan dan militer di area konflik. Sebagai contoh adalah kontrak pelatihan tentara di Somalia sebesar 7 juta Dollar AS. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari upaya PMSC menjaga kualitas jasa keamanan yang diberikan. Sebagai contoh adalah upaya PMSC hanya mempekerjakan mantan marinir atau pasukan khusus dalam menghadapi pembajakan yang melibatkan warga kebangsaan Somalia. Peraturan terkait kualitas ini penting dalam jasa keamanan karena bukan hanya berkaitan erat dengan keselamatan jiwa, tetapi juga keselamatan aset-aset bisnis pada level internasional. Dari spesifikasi personil yang tinggi tersebut, secara logika, biaya yang dibutuhkan dalam penyewaan jasa keamanan adalah tidak sedikit.

Secara kontekstual, konflik militer-politik yang berlaku di ketiga negara tidak hanya diwarnai dengan adanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Konflik di ketiga negara ini juga diwarnai dengan konflik ekonomi. Sebagai contoh adalah krisis utang mulai memberikan pengaruh terhadap kestabilan politik dan ekonomi di Ukraina, Kemiskinan di Somalia dan Penurunan Ekonomi di Libanon. Di Ukraina, konflik tereskalasi akibat kekerasan bersenjata yang akhirnya berlaku antara demonstran dan kepolisian anti huru hara pada 11 Desember 2013 (ICG, 2014). Frekuensi eskalasi konflik kemudian meningkat selama tahun 2014 berdasarkan kekerapan peristiwa-peristiwa yang menentukan atau bahkan mencetuskan konflik (*precipitating events*) (ICG, 2014; BBC News, 2014). Pemerintah Yanukovich pada akhirnya menolak kesepakatan dengan UE karena untuk menandatangani perjanjian tersebut, Ukraina harus membuat utang negara sebesar 20 miliar Euro yang setara dengan 27,5 miliar Dollar AS dari Uni Eropa (*Agence France-Presse*, 2013). Padahal Ukraina juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun telah mendapatkan bantuan dari IMF untuk memaksa para kreditor merelakan kewajiban utang Ukraina (Kramer, 2015),

Ukraina tetap harus membayar berbagai hutangnya. Salah satunya adalah sebesar 120 Juta Dollar AS untuk membayar Eurobonds pada Juli 2015 (*RT.com*, 2015). Pada saat yang sama, utang Ukraina kepada investor asing swasta masih sebesar 70 miliar Dollar AS. Sementara itu, Somalia menghadapi kesulitan pangan yang akut atau krisis sebesar 12% (WFP, 2015).

Di antara kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di negara-negara tersebut, biaya menyewa jasa perusahaan keamanan ini juga tidak sedikit. Kontradiksi di antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan kebutuhan keamanan tersebut menurut penulis juga erat kaitannya dengan penegakan IHL. IHL sendiri mencakup klausa yang menyatakan bahwa pihak yang berkonflik tidak boleh menyebabkan penderitaan yang besar terhadap masyarakat sipil. Keselamatan jiwa sebagian masyarakat sipil, yaitu kelompok elit yang mampu menyewa jasa keamanan PMSC, tentu saja lebih terjamin. Namun, pada saat yang sama, situasi ini menghasilkan ancaman atau tantangan bagi kelompok atau kelas masyarakat lain, terutama yang tidak mampu menyewa jasa keamanan atau bahkan menjadi *internally displaced person* (IDP) dan menderita kelaparan karena konflik menutup akses mereka kepada sumber daya pangan dan logistik bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakan IHL juga mendapatkan tantangan dari sisi tersebut.

Bagaimanapun, telah ada upaya pemberdayaan jasa keamanan oleh PMSC dalam menjadi penyaluran bantuan kemanusiaan dan keamanan bagi warga sipil secara umum. Sebagai contoh adalah di Somalia pada tahun 2011-2012. Kelompok al-Shabaab terus menyerang tentara aliansi, petugas kemanusiaan internasional, jurnalis, dan aktivis (masyarakat sipil) tidak hanya di Mogadishu tetapi juga di berbagai wilayah lain (Bertelsmann Stiftung, 2014). Sebagai contoh lain adalah peningkatan penawaran jasa oleh PMSC kepada AMISOM serta pemerintah di Somalia. Hal ini perlu menjadi catatan mengenai pengarahannya peran PMSC kepada penegakan IHL dibandingkan melemahkan promosi IHL di wilayah-wilayah konflik.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji kehadiran PMSC dalam penegakan IHL di Ukraina, Libanon dan Somalia sesuai dengan tujuan penulisan yang telah dijelaskan pada awal artikel. Analisis dalam bagian pembahasan berdasarkan kerangka pemikiran terkait 4GW dan IHL menghasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama berdasar kepada eksistensi IHL pada wilayah konflik dalam rangka yang utama adalah untuk melindungi warga sipil. Bagian pembahasan telah menunjukkan argumentasi bahwa PMSC hadir, baik sebagai warga sipil maupun kombatan (bergantung pada kondisi penyewaan jasa perusahaan tersebut). Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat kontribusi PMSC dalam membantu menegakkan IHL pada masa konflik, diperlukan regulasi dan komitmen negara asal, negara tempat beroperasi, negara pengkontrak serta PMSC itu sendiri terhadap regulasi yang ada. Ketidakturutsertaan PMSC dan negara-negara tersebut dalam mendukung pembentukan regulasi yang jelas akan berpotensi pada pelanggaran IHL dan hukum internasional terkait hak asasi manusia di masa mendatang. Tidak terkecuali adalah bagi PMSC yang beroperasi di Ukraina, Libanon, dan Somalia yang kurang mendapat perhatian besar dibandingkan PMSC di negara yang juga mengalami konflik domestik seperti Iraq, Afganistan, dan Suriah.

Hal yang kemudian perlu diperhatikan pula dari kinerja PMSC di ketiga negara adalah adanya keamanan bagi masyarakat sipil yang bersifat *segmented*. Maka dari itu, perlu adanya upaya pemerintah dan masyarakat internasional secara material dan politis dalam menyeimbangkan kebutuhan PMSC untuk terus mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya yang mengeluarkan biaya tidak sedikit dalam menyediakan jasa personil dan teknologi keamanan dengan kebutuhan memberikan keamanan yang merata dan menyeluruh secara efektif dan non-diskriminatif.

Ke depannya, penelitian mengenai kontribusi dan dampak PMSC terhadap keamanan tradisional dan non-tradisional dapat terus dikembangkan. Hal ini semakin penting dengan terus berkembangnya asumsi

bahwa telah berlakunya generasi baru dalam peperangan meskipun pada saat ini masih mendapatkan kritik yang beragam. Adapun kontribusi dan dampak PMSC kepada keamanan negara, regional, dan internasional dapat dikaji dalam rangka penyusunan formula pencapaian perdamaian positif.

CATATAN AKHIR

- ¹ Dalam Bahasa Latin, istilah *prima facie* secara harfiah berarti "pada pandangan pertama." Kasus *prima facie* merujuk pada pembentukan praduga yang dapat dibantah secara legal atau hukum dimana penyebab tindakan atau pembelaan dibangun secara cukup selama bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan (www.law.cornell.edu).

REFERENSI

- Agence France-Presse. 12 Desember, 2013. Ukrainian Protesters Dig In as Pressure Mounts on Yanukovich. (Online), (<http://thejakartaglobe.beritasatu.com/international/ukrainian-protesters-dig-in-as-pressure-mounts-on-yanukovich/>) diakses pada 24 Juli 2015)
- Apps, Peter. 21 Oktober, 2012. As Iraq, Afghan Wars End, Private Security Firms Adapt. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmscs/52016-as-iraq-afghan-wars-end-private-security-firms-adapt.html?itemid=id#50208>)
- Arman, Abukar. 3 Agustus, 2012. Obstacles to Progress: Somalia's Fault Lines. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/somalia/51812-obstacles-to-progress-somalias-fault-lines.html#876>)
- Beckman, Robert dan Dagmar Butte. Introduction to International Law. International Law Student Association. (Online), (<https://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf>) diakses pada 9 Maret 2015)
- Bertelsmann Stiftung. 2014. *Somalia Country Report*. (Online), (<http://www.bti-project.org/reports/country-reports/esa/som/index.nc>)
- BBC Monitoring Middle East. 18 Maret, 2007. Al-Manar says number of Lebanon "private" security firms rising. (Online), (http://www.privateforces.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1646&Itemid=1) diakses pada 1 Mei 2015)
- BBC News. 2011. Growth of Lebanon's Private Security Sector. *Middle East Business Report*. (Online), (diunggah pada 14 Oktober 2011 oleh Howard Johnson pada <https://www.youtube.com/watch?v=LEJp6aJ105k>)
- Cornell University Law School. (t. thn.). *Prima Facie*. Cornell University Law School. (Online), (https://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie)
- Halperin, Sandra dan Oliver Heath. 2012. *Political Research: Methods and Practical Skill*. Oxford: Oxford University Press.
- Harrison, Lisa. 2001. *Political Research: An introduction*. London: Routledge.
- International Crisis Group. 26 Mei, 2010. *Lebanon's Politics: The Sunni Community and Hariri's Future Current*. Middle East Report 96.
- International Crisis Group. 2 Januari, 2014. Crisis Watch Database. (Online), <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/>

- crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs={8864A71C-2EC4-456D-A9BC-5E7190244489}#results diakses pada 24 Juli 2015.
- International Crisis Group. 26 Juni, 2014. *Somalia: Al-Shabaab – It Will Be a Long War*. Africa Briefing No. 99. Brussel: ICG.
- Khan, Khurshid dan Afifa Kiran. 2012. *Understanding Fourth Generation Warfare and Its Relevance to Pakistan*. IPRI Journal XII No. 2 (Summer 2012).
- Knight, David. 26 Agustus, 2011. Private Security Companies Used in International Waters. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmcs/50640-private-security-companies-used-in-international-waters-.html?itemid=1462>)
- Kramer, Andrew E. (2015, 3 Juli). Mindful of Greece, Ukraine Is in a Rush to Line Up Debt Relief. *New York Times*, (Online), (<http://www.nytimes.com/business/mindful-of-greece-ukraine-is-in-a-rush-to-line-up-debt-relief.html> diakses pada 25 Juli 2015)
- Lamothe, Dan. (2015, 28 Januari). Security contractor David Berry, killed in Libya, leaves a legacy of U.S. military service. *Washington Post*, (Online), (<https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/01/28/security-contractor-david-berry-killed-in-libya-leaves-a-legacy-of-u-s-military-service/>)
- Luhn, Alec. (2015, 20 April 2015). US Paratroopers begin Training Ukraine National Guard Units. *The Guardian*, (Online), (<http://www.theguardian.com/world/2015/apr/20/us-paratroopers-begin-training-national-guard-units-in-ukraine> diakses pada 24 Juli 2015)
- Mazzetti, Mark, dan Eric Schmitt. 4 Oktober, 2012. Private Army Formed to Fight Somali Pirates Leaves Troubled Legacy. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmcs/51965-private-army-formed-to-fight-somali-pirates-leaves-troubled-legacy.html?viewarticle=&itemid=id#50208>.)
- Mikdashy, Maya. September 24, 2012. Beirut: Security, Surveillance, Navigation. (Online), (http://www.jadaliyya.com/pages/index/7500/beirut_security-surveillance-navigation-)
- Morgenstern, Alex. 26 Juni, 2015. The Conflict in Ukraine and Private Military Companies. (Online), (<http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15049> diakses pada 24 Juli 2015)
- Murden, Simon. 2007. *Staying the Course in 'Fourth-Generation Warfare': Persuasion and Perseverance in the Era of the Asymmetric Bargaining War*. Contemporary Security Policy, Vol. 28, No.1 (April 2007)
- Novoseltsev, Boris. 5 Maret, 2015. US PMSCs Used for Arms Supplies to Ukraine. (Online), (<http://www.strategic-culture.org/news/2015/03/05/us-PMSCs-used-forarms-supplies-to-ukraine.html> diakses pada 24 Juli 2015)
- del Prado, Jose L. Gomez. 9 Juli, 2013. *The Privatisation of War: "Private Security Companies" on Contract with UN "Humanitarian" and "Peace Keeping" Operations*. Global Research, (Online), (<http://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-war-private-security-companies-on-contract-with-un-humanitarianand-peace-keeping-operations/5342155> diakses pada 15 Juli 2013)
- Powell, Ivor. 29 September, 2012. South Africa-Linked Military Firm Loses Anti-Piracy Contract. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmcs/51945-south-africa-linked-military-firm-loses-anti-piracy-contract.html?itemid=id#50208>)
- Radia, Kirit, et. al. 8 April, 2014. US Contractor Greystone Denies Its 'Mercenaries' in Ukraine. *ABC News* (Online), (<http://abcnews.go.com/Blotter/greystone-firm-accused-disguising-mercenaries-ukrainians/story?id=23243761> diakses pada 26 Juli 2015)
- Rogin, Josh. 28 Februari, 2014. Exclusive: Russian 'Blackwater' Takes Over Ukraine Airport. *The Daily Beast*, (Online), (<http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/28/exclusive-russian-blackwater-takes-over-ukraine-airport.html> diakses pada 26 Juli 2015)
- Rogulin, Dmitry. 25 Maret, 2014. Protest Movement in Eastern Ukraine: Security Forces Integrated bu Foreign Mercenaries Hired by Private U.S. Military Outfit. (Online), (<http://www.globalresearch.ca/crisis-in-eastern-ukraine-security-forces-integrated-by-foreign-mercenaries/5377018> diakses pada 24 Juli 2014)
- RT.com. 24 Juli, 2015. Ukraine pays \$120mn debt, avoids technical default – finance ministry. (Online), (<https://www.rt.com/business/310639-ukraine-pays-debt-default/> diakses pada 25 Juli 2015)
- SEDM-CC/PMSC, 19th PMSC Meeting: Approved Minutes, Skopje, 15-16 April 2008.
- Singer, P.W. 2001. *Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privated Military Industry*. International Security, Vol. 26 No. 3.
- Terlikowski, Marcin. 2008. *Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq*. Warsawa: The Polish Institute of International Affairs.
- Vinopal, Kelly. 2013. *Researching Public International Law*. Panduan sumber elektronik. American Society of International Law. (Online), (www.asil.org/sites/default/files/ERG_PUBLIC_INT.pdf diakses pada 9 Maret 2015)
- Walker, Shaun. 24 Juli, 2015. 'We like partisan warfare'. Chechens fighting in Ukraine – on both sides. *The Guardian*, (Online), (<http://www.theguardian.com/world/2015/jul/24/chechens-fighting-in-ukraine-on-both-sides>, diakses pada 24 Juli 2015)
- World Food Programme. 2015. Somalia: Overview. (Online), (<https://www.wfp.org/countries/somalia/food-security>)
- Yuniasih, Tulus dan Budi Hartono. (2013). *Analisis Konseptual Dampak Perusahaan Swasta Militer dan Keamanan (Private Military and Security Company/PMSC) Terhadap Perang Generasi Keempat (Fourth Generation Warfare/4GW)*. Transnasional Vol. 8 (2)

Terimakasih

Segenap pengelola Jurnal Ilmu Hubungan Internasional mengucapkan terimakasih atas kontribusi para mitra bebestari dalam penerbitan jurnal Ilmu Hubungan Internasional edisi ini. Mitra Bebestari Jurnal Hubungan Internasional (JHI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Edisi Oktober 2016-Maret 2017

1. Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D., *Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia*
2. Elisabeth Dewi, Ph.D., *Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia*
3. Baiq Wardhani, Ph.D., *Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia*
5. Sylvia Yazid, Ph.D., *Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, Indonesia*
6. Noore Alam Siddiquee, Ph.D., *Flinders University, Australia*
7. Ayesah Uy Abubakar, Ph.D., *University Malaysia Sabah, Malaysia*

Indeks

A

Abdul Latif Bin Rashid al Zayani. 163
Abu Bakar Al Baghdadi 211
Abu Bakar Al-Muhajir 212
Abu Dhabi 165
Abu Ibrahim Al-Mishri 216
Adam Segal 156
Adly Mansour 143
Afghanistan 128
AFML 190
Ahmed Dovutoglu 130
Ahmed Kuru 137
Ahmet Davutođlu 130
AKP 128, 139, 143
Al-Qaidah 211
Al-Shadadi 211
Algiers 126
Amelia Arselnaut 120
Amerika Serikat, 120
Anatolia 126
Andana 127
Ankara 127
Arab Saudi 163
Arab Spring 138
Archdiocesan Office for Human Development 182
Armenia 126, 127
ASEAN 190
ASETUC 190
Asia 190
Asia Tenggara 212
Australia 121, 178
Ayatur Rahman fie Jihadi Afghanistan 215
Azerbaijan 127

B

Bahrain 168
Bahrun Naim 211
Balai Melayu 119

Bali 212
Bandung 124
Belanda 119
Belt and Road 169
Bom Bali 2002 217
Bosnia 130
Bosporus 127
Bruce Russet 125
Brussels 135
Budha 210
Bulgaria 127
Burma 178
Bursa 127

C

California Press. 145
CARAM 190
Cekoslovakia 120
Charles Hermann 125
China 128, 161, 168
CHP 140
Christian identity 126
Christians 126
Civil Society Organisations 182
Clarisa Gabriell 115
CNN 121
Cold War period 130
Colonel Muharrem Kose 141
Condoleeza Rice 116
Condongcatur 113
Conflict and Terrorism 122
Constantine 126
Coptic 143
Crimea 127
Cyprus 124

D

David Kinsella 125
Deborah Gerner 125
Defense Procurement Procedure 157
Deng Xioping 161
Densus 88 212
Dewan Kerjasama Teluk 161
Diplomasi Publik 113
Dokumen Montreux. 229

Dr. Abdullah Azzam 215

Dubai 164

E

Edmund Gullion 116

Edward Murrow 116

Egypt 139

Eminent Person Group 119

Eurasia 127

Europe Council 124

F

Faith-Based Organizations 172

Fethullah Gulen 144

G

Games of the New Emerging Forces 120

GANEFO 120

Gao Yaozhen, 165

General al-Sisi 142

Geoffrey Cowen 120

George Bush 114

Georgia 127

Germany 128

Global War on Terror 114

good governance 119

Greece 127

Gross Domestic Product 132

GWOT 114

H

Hampshire 121

Harvey Starr 125

Hassan Wirajuda 114

Hatay 127

HDP 140

Helsinki 129

Hillary Clinton 197

Hindia-Belanda 118

Hinduja Group 154

Hizmet 144

Hu Jiantao 163

Hubungan Internasional 117

Hungaria 120

Hungary 127

I

Ibnu Taimiyah 215

ICRC 232

India 147

Indonesia 114, 119, 212

Iran 127

Iraq 127

ISIS 139, 210, 211

Ismahan 139

Italy 128

Izmir 127

J

Jepang 120

Jerusalem 126

Jews 126

Jl 210

Justice and Development Party 128

K

Kaisar Meiji 149

Kalyani Group 155

KAMCO 150

KIAS 120

King Faruq 141

Kirkuk 128

Konvensi Geneva 229

Korea Asset Management Corporation 150

Korea Utara 120

Kurdi 124

Kurdish 126

Kurdistan Workers Party 132

Kuwait 163

L

Latin America 128

Laura Neack 125

Lebanon 130

Libya 130

Lisboa 160

logic of consequences 117

M

MABBIM 120

Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia 120

Malaysia 119, 181

Martin Wight 114

Maulana Mansoor 215

Mecca 126

Medina 126
Mediterranean 128
Mehmet Gormez 142
Melayu 119
Mesir 121
MHP 140
Middle East 138
Ministry of Foreign Affairs 128
MITI 150
Moslem Brotherhood 142
Mosul 127
Multi-Track Diplomacy 175
multilateral diplomacy 118
Muslim 139
Muslims 126

N
NAFTA 205
Nationalist Movement Party 140
NATO 127, 135, 203
Nazi Party 128
Necmetik Erbakan 144
Network Centric Warfare 156
New Delhi 159
New Jersey 160
non-state actors 114
North Africa 126, 138
North Atlantic Treaty Organization 127
North South Initiatives 182

O
OECD 127
Ottoman Caliphate 124
Oxford University 145

P
Paddys Club 212
Pakistan 120
Palestine 130
Park Geun Hye 150
Paul Sharp 116
Paul Wolfowitz 135
Peoples' Democratic Party 140
Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia 119
Persatuan Pelajar Indonesia 120
Pesantren Al-Islam 211

Peter Van Ham 120
PKI 119
PKK 132
PMSC 222
Polandia 120
Poso 212
PPI 120
Princeton University 160

Q
Qatar 165

R
Recep Tayib Erdogan 138
Republican People's Party 140
Riau 120
Robert J. Jackson 125
Robert Wage 148
Rohingya 178
RS Zaharna 118
Rusia 199
Russia 130

S
Sayyid Qutub 212
SCAF 141
Semarang 147
Serbia 130
Shaikh Muhammad Bin Sayed 165
Sheik Sayid bin Sultan 164
Sidney Tarrow 182
Sleman 113
Soekarno 120
South Korea 133
Sunni 132
Syaikh Aiman Az- Zawahiri 215
Syaikh Mir Hamzah 215
Syaikh Mullah Omar 215
Syaikh Sulaiman Abu Ghait, 215
Syria 126, 127, 138

T
Taiwan 149
Tajikistan 130
Tenas Effendi 120
The Guardian 161
The New Transnational Activism 182

The New York Times 139

Theory of Social Capital 121

Timur Tengah 114

Tiongkok 149

Turkish 124

U

Uni Soviet 120, 161

Universitas Bahrain 168

Universitas Wahid Hasyim 147

Usamah Bin Laden 215

W

West Europea 124

Women's Aid Organizations 182

World Economic Forum 165

X

Xi Jinping 163

Y

Yogyakarta 113, 137

Z

Zhou Enlai 164